

79.7
19
Anang Masduki, Ph.D.



Ideologi, Media, & GLOBALISASI TIONGKOK

*Perebutan Wacana
di Ruang Publik Indonesia*

Prolog: **Budiman Sudjatmiko**

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)

Epilog: **NIU Panqiang**

*Professor and Vice Dean,
School of Journalism and Communication, Shanghai University*



IDEOLOGI, MEDIA, DAN GLOBALISASI TIONGKOK

Perebutan Wacana di Ruang Publik Indonesia

Anang Masduki, Ph. D

 PUSTAKA
PRANALA
2025

Buku ini tidak diperjualbelikan

中图分类号: G206

单位代号: 10280

密级:

学号: 19860156

上海大学



博士学位论文

SHANGHAI UNIVERSITY

DOCTORAL DISSERTATION

题目	印度尼西亚社交媒体关于“一带一路”倡议的公众舆论研究
----	----------------------------

作者 ANANG MASDUKI

学科专业 新闻传播学

导师 牛盼强 教授

完成日期 2023. 06. 22

Buku ini merupakan adaptasi dari disertasi penulis berjudul SOCIAL MEDIA PUBLIC OPINION IN INDONESIA, TOWARD THE BELT ROAD INITIATIVE PROJECT. Naskah asli telah disusun ulang, disederhanakan, dan diperluas agar dapat diakses oleh pembaca umum.

Judul : **Ideologi, Media, dan Globalisasi Tiongkok:**
Perebutan Wacana di Ruang Publik Indonesia
Penulis : Anang Masduki, Ph. D
Editor : Wahyu Tanoto dan Nova Dwi Wulandari
Penerjemah : Naufal
Tata letak : Pustaka Pranala
Desain Sampul : Ngadimin

Diterbitkan oleh:

Penerbit Pustaka Pranala

Jl. Rejowinangun No.66, Rejowinangun, Kec. Kotagede,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171

Email: redaksi.pustakapranala@gmail.com

085124413535

Yogyakarta, Cetakan 1, Agustus 2025

Tebal : xxvi+256 halaman; Uk: 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-5427-92-8

Hak cipta dilindungi Undang-undang

All right reserved

PRAKATA

Menulis disertasi dan menyiapkannya sebagai buku adalah dua bentuk proses yang berbeda. Disertasi, memang untuk ruang akademik. Terstruktur dan formal. Sementara buku, seperti di tangan pembaca ini ditujukan untuk khalayak yang lebih luas dan terbuka bagi pembaca, yang biasanya datang dari berbagai latar belakang, cara pandang, harapan, atau bahkan keyakinan (aliran).

Naskah ini awalnya adalah sebuah disertasi yang disusun dalam bahasa asing, dengan beberapa referensi bahasa Mandarin. Kombinasi itu saja sudah membuat saya kelimpungan, apalagi ketika harus mengalihkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan “mandatory” tetap menjaga substansi pada makna, sekaligus enak dibaca. Dalam batin saya, “apa-apaan ini?”.

Namun, yang paling menantang bukan hanya dalam urusan bahasa. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana menyampaikan gagasan dan hasil observasi dalam bentuk yang lebih mengalir, mudah dicerna, dan tetap menjaga ketelitian. Tidak mudah memang, tetapi justru di situlah letak usaha buku ini. Mencoba menjembatani ruang akademik dan publik, agar pengetahuan tidak “ngumpet” di ruang seminar yang berpendingin udara, tapi bersenyawa dalam percakapan sehari-hari.

Bahasa akademik, untuk dipahami, bisa terasa *mbingungi*, kaku, dan tidak jarang menjauhkan orang untuk sekedar membukanya. Di sisi lain, bahasa populer kadang terlalu longgar, ada kesan menyederhanakan, atau bahkan menggampangkan. Maka yang dicoba dalam buku ini adalah sebuah jalan tengah: menghadirkan ilmu dengan *low profile*, dan tentu saja tetap mempertahankan nalar-narasi kritisnya.

Buku ini menaruh perhatian pada satu isu besar yang agaknya benar-benar jarang dibicarakan. Bagaimana mungkin mega proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dipahami oleh masyarakat Indonesia, khususnya di media sosial. Kita

tahu, BRI ini proyek besar. Bukan hanya dalam hitung-hitungan soal angka investasi dan pembangunan infrastruktur saja, tapi juga soal posisi geopolitik Indonesia di antara kekuatan besar dunia: Tiongkok dan negara-negara Barat.

Meski begitu, narasi publik tentang BRI ternyata tidak selalu produksi di ruang seminar atau pidato-pidato kenegaraan. Justru hidup dan berkembang di linimasa. Di ruang yang penuh perdebatan. Diantara cuitan, meme, komentar, dan konten-konten yang viral. Di sinilah buku ini mengambil tempat, tidak bicara dari menara gading, turun ke ruang di mana persepsi publik benar-benar terbentuk. Menggunakan ratusan, atau bahkan ribuan data dari media sosial dan diperkaya dengan wawancara mendalam. Hemat saya, buku ini sedang menyajikan satu hal, bagaimana opini publik Indonesia tentang BRI sangat dipengaruhi oleh konteks politik dalam negeri, framing media, dan bahkan kampanye asing yang menyebar melalui organisasi non-pemerintah, media internasional, dan jaringan akademik.

Bukan hal yang mengejutkan jika mayoritas sentimen publik terhadap BRI di Indonesia bernada negatif. Tapi pertanyaannya, siapa yang membentuk narasi itu? Dan apa dampaknya terhadap arah kebijakan kita sebagai negara demokratis?

Sebagai pemeriksa aksara, alih-alih penyunting, saya merasa ini adalah jenis buku yang jarang muncul dari dunia akademik Indonesia. Tidak banyak disertasi yang punya keberanian keluar dari jalurnya, lalu membuka diri menjadi narasi yang bisa dicerna publik. Sebab, di luar substansi yang kuat, dibutuhkan juga *sense of audience* -kesadaran-bahwa ilmu tidak hanya untuk dikaji, tetapi juga untuk dibagi.

Saya ingin memberi catatan khusus pada penulis, Anang Masduki: temuan-temuan Anda sangat menarik, terutama soal bagaimana propaganda negara-negara Barat yang “cawe-cawe” membentuk opini publik Indonesia soal BRI. Akan tetapi, di beberapa bagian, saya merasa narasi reflektif Anda bisa lebih dalam. Bukan dalam konteks untuk mengambil posisi membela atau menolak, tetapi memancing diskusi. Sejauh mana kita menyadari bahwa opini publik kita bisa dibentuk oleh narasi dari luar? Sejauh mana kita benar-benar punya “daulat narasi” sendiri?

Jujur saja, kita kerap membanggakan demokrasi, tapi alpa bahwa demokrasi digital juga memiliki celah. Ruang terbuka seperti media sosial ternyata bisa menjadi arena sehat sebagai ajang debat. Tapi bisa juga jadi lahan subur untuk manipulasi, amplifikasi kebencian, atau permainan wacana yang dibungkus sedemikian rupa yang akhirnya dianggap sebagai kebenaran publik.

Seyogianya, proyek BRI dalam buku ini jangan sampai hanya dibaca sebagai urusan ekonomi, melainkan sebagai *kaca benggala*. Karena, BRI mencerminkan bagaimana masyarakat kita membaca proyek-proyek asing yang tempo hari

makin marak, bagaimana media sosial bekerja, dan bagaimana negara sering *gagap* untuk menjelaskan narasi pembangunan kepada rakyatnya sendiri.

Tentu, buku ini bukanlah jawaban atas semua pertanyaan, melainkan sebagai suatu ajakan untuk berpikir lebih jernih. tentang pembangunan, tentang media, tentang kedaulatan informasi, dan tentang bagaimana suara publik tidak selalu datang dari bawah, kadang digiring, kadang dihasilkan oleh “mereka” yang suaranya paling nyaring.

Saya percaya buku ini bisa menjadi bacaan bermakna. Tidak hanya bagi akademisi, juga bagi jurnalis, aktivis, pembuat kebijakan, dan bagi siapa pun yang sedang *gelisah galau dan merana* (gegana) melihat betapa gaduhnya ruang digital kita hari-hari ini. Terlebih, di era seperti sekarang, ketika cuitan bisa memiliki pengaruh lebih daripada laporan resmi, dan ketika persepsi bisa menggiring arah kebijakan, buku ini hadir sebagai bahan bakar untuk diskusi yang lebih sehat, jujur, dan mungkin, lebih berani.

Selamat membaca.

PRAKATA PENULIS

Tidak ada niatan awalnya untuk menerbitkan disertasi menjadi sebuah buku. Karena dorongan oleh dosen muda progresif UAD yang pernah menjabat pemimpin umum majalah legendaris dan profokatif, sekaligus presiden Persma Poros yang kebetulan mengelola penerbitan yang lagi naik daun, maka jadilah buku ini. Apalagi ketika penulis mengontak Mas Budiman Sujatmiko, politisi sekaligus Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan bersedia memberikan Prolog, maka penulis tambah semangat untuk menerbitkannya. Tentu kata “terima kasih” saja tidak cukup untuk mengapresiasi Mas Budiman yang bersedia memberikan catatan di tengah kesibukannya.

Beberapa bagian buku ini telah terbit di jurnal ilmiah *International Journal of Communication and Society* dengan judul “*Media views in Indonesia on the belt and road initiative policy : a study of Indonesian new media reports to the BRI project of China in Indonesia*”, kemudian juga terbit pada *the 3rd Jogjakarta Communication Conference (JCC 2021)* dengan judul “*The Digital Silk Road and Chiglobalization: A Post-Epidemic Information and Communication Technology Alternative Project*”.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, bimbingan, dan karunia-Nya yang melimpah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dan kemudian dibukukan sebagaimana yang ada ditangan penulis. Judul disertasi yang penulis ambil adalah “*Media Social Public Opinion In Indonesia: Toward Belt Road Initiative Project*”. Penulis menempuh gelar doktor pada Departemen Jurnalisme dan Komunikasi, Universitas Shanghai, Tiongkok. Dalam penulisan ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Rektor dan Dekan Universitas Shanghai. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para guru dan pembimbing seperti Jiang An Laoshi, Xue Laoshi, Profesor Li Xigen, dll. Secara khusus, saya menyampaikan penghargaan

dan rasa terima kasih yang tinggi kepada Profesor Panqiang Niu sebagai pembimbing dan memberikan epilog. Prof. Niu membimbing dengan sabar, tekun, konstruktif, dan sangat membantu. Selain itu, beliau juga lugas dalam berkomunikasi. Sejujurnya, kami telah belajar banyak sejauh ini.

Apresiasi penulis berikan juga kepada seluruh sahabat di jurusan jurnalistik dan komunikasi Universitas Shanghai yang sedang menempuh pendidikan bersama. Serta sahabat-sahabat dari Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Tiongkok, Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penuh rasa “spesial” kepada sahabat dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Muhammad Hamka, yang telah membantu dalam proses penelitian tesis ini. Kemudian penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan tempat penulis bekerja, yaitu Rektor senior Dr. Kasiyarno, Rektor sekarang Prof. Dr. Muchlas, Dekan Nizam Ph.D dan Kang Wajiran, Ph.D, dan seluruh rekan dosen di Universitas Ahmad Dahlan.

Kepada Ibunda tercinta, Hj. Kuswartini beserta keluarga, dan saudara-saudaranya (Mbk Yun, Mas Najad, Mas Salis, Yazid), terima kasih atas bimbingan dan restunya. Terakhir dan yang terpenting, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan, motivasi, toleransi, serta kesabaran istri tercinta, Wikut Deniarti, dan kedua anak saya tersayang, Filza Hanniyya Avanindra dan Radeva Zia Uljihad.

Terakhir penulis ingin mengapresiasi CEO Penerbit Pustaka Pranala, Fajar dan Direktur eksekutif, Prayuda, juga penerjemah Naufal serta editor Wahyu Tanoto dan Nova Dwi atas kerja kerasnya yang tidak bisa kami hargai dalam bentuk apapun, hanya Tuhan yang bisa menakarnya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih atas saran dan kritik yang akan digunakan sebagai masukan untuk perbaikan. Semoga buku ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca yang budiman.

PROLOG BUDIMAN

Tiongkok dan Dunia Multipolar

Sejarah panjang Tiongkok mencerminkan perjalanan sebuah peradaban yang berulang kali menempatkan dirinya sebagai pusat kekuatan ekonomi, politik, dan budaya dunia. Sejak masa **Dinasti Qin dan Han** (sekitar abad ke-3 SM hingga abad ke-3 M), Tiongkok sudah dikenal sebagai kekuatan politik yang besar dengan birokrasi terpusat yang efisien. Pada masa itu pula jalur perdagangan legendaris, **Jalur Sutra**, mulai terbentuk, menjadikan Tiongkok sebagai simpul penting dalam perdagangan global kuno yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Produk-produk Tiongkok seperti sutra, keramik, dan kertas bukan hanya bernilai ekonomis, tetapi juga membawa pengaruh budaya yang luas.

Masa kejayaan berlanjut pada era **Dinasti Tang dan Song**, dimana Tiongkok menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya dunia. Penemuan seperti kompas, bubuk mesiu, kertas, dan teknologi percetakan bukan hanya merevolusi masyarakat Tiongkok, tetapi juga memengaruhi perkembangan peradaban global. Pada masa **Dinasti Ming dan Qing**, Tiongkok memiliki ekonomi terbesar di dunia, ditopang oleh pertanian produktif dan perdagangan maritim yang berkembang pesat. Namun, mulai abad ke-19, kekuatan ini merosot akibat kolonialisme Barat, perang candu, dan kekalahan dalam konflik internasional yang melemahkan kedaulatan serta struktur ekonominya.

Kebangkitan kembali Tiongkok modern dimulai sejak **Reformasi dan Keterbukaan (1978)** yang dipelopori oleh Deng Xiaoping. Dengan mengadopsi ekonomi pasar terbuka dalam kerangka sosialisme, Tiongkok berhasil mendorong industrialisasi masif dan menjadi “pabrik dunia”. Dalam beberapa dekade, ratusan juta penduduk keluar dari kemiskinan, menjadikan transformasi ekonomi Tiongkok salah satu yang paling spektakuler dalam

sejarah modern. Kini, Tiongkok bukan hanya mengandalkan manufaktur, tetapi juga berinvestasi besar dalam **sains, teknologi, dan inovasi**. Negeri ini bersaing dalam bidang kecerdasan buatan (AI), teknologi 5G, kendaraan listrik, bioteknologi, hingga eksplorasi ruang angkasa.

Selain itu, Tiongkok kembali memainkan peran global melalui **inisiatif pembangunan infrastruktur internasional, khususnya Belt and Road Initiative (BRI)**. Program ini menghubungkan puluhan negara melalui investasi di sektor transportasi, energi, dan kawasan industri, yang memperlihatkan ambisi Tiongkok untuk membangun jaringan ekonomi global baru. Di sisi lain, program ini juga mencerminkan warisan Jalur Sutra kuno, dengan visi menciptakan konektivitas lintas benua yang menguntungkan secara ekonomi sekaligus memperkuat pengaruh geopolitiknya.

Dari perjalanan sejarahnya, jelas terlihat bahwa Tiongkok bukan sekadar bangkit dalam konteks modern, tetapi tengah menghidupkan kembali tradisi panjangnya sebagai peradaban besar dunia. Keberhasilan dalam menggabungkan warisan kuno dengan ambisi teknologi dan geoekonomi masa kini menjadikan Tiongkok sebagai salah satu aktor global paling berpengaruh dalam menentukan arah tatanan dunia multipolar.

Situasi geopolitik dan geoekonomi global saat ini bergerak menuju format multipolar power, dimana dominasi tunggal Amerika Serikat mulai ditantang oleh munculnya kekuatan baru, terutama Tiongkok. Peran Tiongkok kian menonjol bukan hanya melalui kekuatan ekonominya, tetapi juga lewat inisiatif global seperti **Belt Road Initiative (BRI)** yang memperluas jejaring kerjasama infrastruktur, perdagangan, dan investasi lintas negara. BRI bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi juga instrumen strategi geoekonomi untuk memperkuat posisi Tiongkok dalam rantai pasok global serta membangun konektivitas lintas Asia, Afrika, hingga Eropa.

Bagi Indonesia, BRI membuka peluang signifikan. Dari sisi **manfaat**, proyek ini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan kawasan industri, sekaligus mendorong integrasi logistik nasional. Selain itu, investasi BRI berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas akses pasar ekspor Indonesia. Namun, ada pula **tantangan strategis**. Risiko ketergantungan pada pembiayaan Tiongkok, potensi jebakan utang (*debt trap*), serta isu transparansi proyek menjadi perhatian utama. Selain itu, Indonesia perlu menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar lain agar tidak terlalu terikat pada satu poros geopolitik.

Dalam pemberitaan media, framing terhadap BRI menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. **Media Barat** cenderung mengangkat sisi kritis, dengan menyoroti isu *debt trap diplomacy*, dominasi politik Tiongkok, dan dampak lingkungan. Narasi ini sering menekankan bahwa BRI berpotensi memperluas pengaruh geopolitik Beijing secara agresif. Sebaliknya, **media Asia, termasuk**

Indonesia, lebih menyoroti aspek pragmatis dan peluang ekonomi. Liputan di kawasan ini cenderung menekankan manfaat pembangunan infrastruktur, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta peluang integrasi ekonomi kawasan. Meski demikian, media Indonesia juga tidak sepenuhnya abai terhadap risiko, melainkan berusaha menyeimbangkan narasi dengan menekankan perlunya tata kelola yang transparan dan partisipasi lokal.

Perbedaan framing ini menunjukkan bagaimana BRI dipersepsikan secara geopolitik: di Barat sebagai ancaman dominasi, sementara di Asia lebih sebagai peluang pembangunan, meskipun dengan kewaspadaan strategis.

Budiman Sudjatmiko

2025

PENGANTAR

NIU Panqiang

Professor and Vice Dean, School of Journalism and
Communication, Shanghai University

I first met Anang Masduki in 2019 when he came to Shanghai University to pursue his doctoral studies. At our initial meeting, he struck me as a calm, humble, and intellectually sharp young scholar. As our daily interactions and academic mentoring deepened, I gradually came to appreciate the many commendable scholarly qualities he possesses: diligence, intellectual rigor, broad vision, and a strong interest in communication studies—especially in international communication—with an ability to analyze these issues through the lens of Indonesian social realities.

As his doctoral advisor, I am gratified to have witnessed his academic growth. Not only did he successfully complete his dissertation amid the challenges posed by the COVID-19 pandemic, but he also co-authored several high-quality journal articles with me during his studies. One notable example is our recent joint article published in the *Journal of International Communication Studies (China)*, titled “Indonesian Public Opinion toward China’s Belt and Road Initiative: A Sentiment Analysis Based on Indonesian Twitter Data.” This study, based on a chapter of his dissertation, received highly positive feedback from peer reviewers. After obtaining his doctoral degree, Dr. Masduki did not slacken his efforts. Instead, he continued refining and expanding his previous research, which ultimately culminated in this impressive and timely monograph—*Narratives, Media, and China’s Belt and Road: Discursive Struggles in Indonesia’s Public Sphere*—marked by clear structure, solid argumentation, and strong practical relevance.

This book emerges from an important research background. For a long time, international discourse on the Belt and Road Initiative (BRI) has been largely dominated by mainstream Western media and scholars. As a major Southeast Asian nation, how Indonesia understands and responds to China's communication efforts is a crucial question worthy of in-depth study. Anchored in the Indonesian context, the author explores how the BRI is recontextualized in Indonesia's public opinion space through multiple dimensions—including communication structures, emotional mechanisms, and discursive dynamics. Rather than simply repeating narrative frameworks from China or the West, he foregrounds the complexity of Indonesian society and the openness of its media environment to examine how the Indonesian public, media, and political elites position themselves in relation to this global issue. This approach expands the theoretical horizons of international communication studies and provides a valuable external perspective for understanding how “telling China's story well” is received and reshaped abroad.

Theoretically, the author draws on Jürgen Habermas's concept of the public sphere, while also engaging with theories of political economy of communication, emotional politics, global communication, and media discourse. He argues that social media in Indonesia is not simply a forum for rational deliberation but also a battleground for emotional expression, opinion contestation, and identity negotiation. Within such a dynamic space, China's BRI inevitably undergoes processes of semantic transformation and value negotiation when it enters Indonesia's public discourse.

Methodologically, the book adopts a hybrid approach combining sentiment analysis, frame analysis, and critical discourse analysis. By integrating big data tools with qualitative traditions in communication research, the author selects key events and terms—such as “China,” “Belt and Road,” and “debt trap”—from major Indonesian social media platforms. He uses quantitative methods to trace communication trends and follows up with discourse analysis to uncover the ideological undercurrents, media logic, and political metaphors embedded within the narratives. This integration of digital and critical methodologies enhances the coherence of the study and opens up new possibilities for research in international communication.

In terms of research findings, Dr. Masduki observes that political and economic exchanges between China and Indonesia have grown steadily, and issues of communication are closely tied to geopolitical tensions. Western countries have long exaggerated the potential risks of cooperation with China, especially by popularizing the concept of a “debt trap,” which has negatively influenced perceptions in developing countries. This study, therefore, contributes to a more nuanced understanding of Indonesian government,

intellectual, and public attitudes toward the BRI and helps counterbalance the biases and stereotypes prevalent in some Western narratives.

Moreover, the study suggests a need to revisit and critically examine theories of the public sphere and democracy. The rise of populism in the United States—especially after the election of Donald Trump—and the structural challenges Indonesia has encountered in implementing BRI-related projects both highlight the discrepancy between democratic theory and practice. The BRI, as an initiative largely led by China, has often been portrayed in the West with labels such as “authoritarian,” “anti-freedom,” or “media suppressive.” However, through sustained economic development and improvements in public services, China has challenged these stereotypes and emerged as a new model for modernization. Behind this shift lies a deeper transformation in the logic of national governance and communication mechanisms.

The book also reflects on pressing issues in Indonesia’s own communication environment. The rapid rise of social media has improved the efficiency of information dissemination but has also resulted in the proliferation of rumors, emotional incitement, and widespread misinformation. Such risks are particularly acute when it comes to sensitive issues involving foreign policy, national security, and religion. The author rightly points out that to cope with the challenges of diversified information sources, media professionals, policymakers, and scholars in Indonesia must take collective responsibility to enhance public understanding of the BRI. Doing so can reduce doubts arising from misinformation and help explore how the initiative can be implemented more effectively in Indonesia to promote mutually beneficial cooperation.

From a knowledge production perspective, this book also provides new directions for BRI communication research. It goes beyond content analysis and places greater emphasis on the perspectives, sentiments, and cognitive structures of the recipients. By closely examining the processes of narrative reconstruction and reinterpretation in the Indonesian context, the author argues that the BRI narrative itself is a dynamic process of negotiation. The effectiveness of communication does not lie solely in whether the information is transmitted accurately, but also in whether it resonates with local emotions, values, and interests. This “negotiated communication” framework offers an insightful contribution to current international communication scholarship.

Finally, as a Chinese scholar, I am heartened by the constructive attitude reflected in this book. It starts from the lived realities of Indonesian society and investigates the ways in which China-related narratives are constructed, received, and debated in the public sphere. Looking ahead, as China deepens cooperation with Southeast Asian countries—including Indonesia—our shared future depends not only on economic and infrastructural connectivity but also on mutual understanding through cultural exchange and communication.

I believe that the publication of *Narratives, Media, and China's Belt and Road: Discursive Struggles in Indonesia's Public Sphere* will provide valuable insight for Indonesian scholars, media professionals, and the public to better understand the mechanisms and processes of BRI communication in their local context. It may also serve as a bridge for academic collaboration, cultural dialogue, and policy coordination between China and Indonesia. I hope that more young scholars like Dr. Anang Masduki will take up the task of interpreting the world through locally grounded lenses and responding to real-world concerns through rigorous scholarship, contributing to the creation of a more equal, trusting, and pluralistic knowledge system in global communication. May this book be an important step toward fostering deeper understanding and meaningful exchanges between the peoples of China and Indonesia, as they move forward hand in hand on the path of mutual respect and shared prosperity.

后记

牛盼强

上海大学新闻传播学院 教授、副院长

我第一次见到Anang Masduki,是在2019年他来到上海大学攻读博士学位之时。初次见面时,他给我留下了沉静谦和、思维清晰的印象。随着日常交流和学术指导的深入,我逐渐发现他身上具有许多宝贵的学术品质:勤勉刻苦,逻辑严谨,视野开阔,对传播学尤其是国际传播问题具有浓厚的兴趣,并能结合印尼本国社会现实进行深入分析。作为他的博士生导师,我很欣慰地看到,他学术能力的成长。他不仅在我的指导下克服了新冠疫情顺利完成了博士学位论文,并且和我合作发表了多篇高质量学术期刊文章。近期我们合作发表在中国《国际传播研究》集刊上的论文《印尼公众对中国“一带一路”倡议的舆论态度研究——基于印尼Twitter的情感分析》就是以他博士论文的其中一节为基础进一步创作发展完成,受到了专家的好评。他在博士毕业后也没有懈怠,进一步对读博期间和毕业后的相关研究成果进一步拓展与深化,最终形成了这本结构严谨、论证充分、极具现实意义的优秀著作——《叙事、媒体与中国“一带一路”:印尼公共空间话语的斗争》。

这本书的研究背景是,长期以来,关于“一带一路”倡议的国际舆论多由欧美主流媒体与学者主导,而印尼作为东南亚的重要国家,其自身如何理解和回应中国的传播行动,是值得深入研究的课题。作者立足印尼语境,从传播结构、情绪机制、舆论动态等多个维度,尝试还原“一带一路”在印尼舆论场中的“再语境化”过程。他没有简单复述中国或西方已有的叙事框架,而是以印尼社会的复杂性、媒体环境的开放性为背景,揭示印尼民众、媒体与政界如何在全球议题中定位自身。这种努力,不仅拓展了国际传播研究的知识边界,也为“讲好中国故事”提供了可贵的他者视角。

在理论方面,作者以哈贝马斯的“公共领域”概念为出发点,结合传播政治经济学、情绪传播、全球传播等理论资源,对社交媒体上的话语生产与再传

播过程进行剖析。他指出,印尼的社交媒体环境不仅是理性对话的空间,更是情绪表达、意见竞争与身份认同博弈的场所。在这一背景下,来自中国的“一带一路”倡议如何进入印尼公共舆论场,势必会经历一系列意义转化与价值协商的过程。

在方法论上,作者结合了情绪分析、框架分析与批判性话语分析,将大数据方法与传播学传统的质性研究路径有机结合。他选取印尼主要社交媒体平台上的关键舆论事件与关键词,如“中国”“一带一路”“债务陷阱”等,通过量化数据分析呈现传播趋势,再通过话语分析深入解读背后潜藏的意识形态倾向、媒体逻辑与政治隐喻。这种数字化与批判性路径的融合,不仅增强了研究的系统性,也为国际传播研究提供了新的方法论可能。

在研究观点上,Anang指出,中国和印尼之间的政治与经济交流日益频繁,传播问题与地缘政治高度相关。西方国家长期渲染与中国合作可能引发“债务陷阱”,对发展中国家产生负面影响。因此,这项研究有助于深入理解印尼政府、知识界与公众对“一带一路”合作的态度,也有助于抵消西方叙事中的偏见与宣传。该研究还指出有必要重新审视公共领域与民主理论。美国在特朗普当选后展现的民主裂缝,以及印尼在“一带一路”政策执行中出现的结构性问题,都揭示出现实远比理论复杂。“一带一路”项目几乎成为西式全球化的对立面。中国作为该倡议的领导国家,虽被贴上“闭关锁国”“压制自由”“限制媒体”等西方标签,但中国通过稳健的经济增长与公共服务建设,逐步打破这些成见,成为迈向现代化的国家样板。这一转变的背后,正是对国家治理逻辑与新闻传播机制的深层再认识。

本书还就印尼本国传播环境所面临的问题提出了有针对性的反思。例如,社交媒体的高度普及虽然提升了信息传播效率,但同时也伴随着大量谣言、情绪煽动与信息误读。尤其在涉及外交、安全、宗教等敏感议题时,信息失真的风险尤为突出。作者提醒我们,面对信息来源多元化所带来的挑战,印尼媒体从业者、政策制定者与学术界增进印尼民众对“一带一路”倡议的全面了解,减少因信息不对称或误解产生的疑虑,为探讨“一带一路”倡议如何在印尼更有效地实施、促进互利合作提供基础。

从学术建构角度来看,这部著作也对“一带一路”传播的研究路径提出了新的可能。它不仅关注传播内容,更重视传播接受者的立场、感受与认知结构。通过对印尼语境中的“再构建”“再诠释”过程的考察,作者提出“一带一路”叙事本身就是一个动态协商的过程,传播的成效不仅取决于信息是否准确传达,更取决于传播是否能够与本地社会的情感共鸣、价值期待与利益关切相对接。这种“协商传播观”对当前国际传播研究具有重要启发意义。

最后,作为中国学者,我注意到本书所体现的研究态度是建设性的。它从印尼社会现实出发,探索公共领域中关于中国议题的认知机制、传播逻辑与社会反应。在未来,中国与包括印尼在内的东南亚国家深化合作时,不仅要

在经贸和基础设施方面加强互联互通,更有赖于在人文交流与传播认知层面实现真正的互信与理解。

我相信,《叙事、媒体与中国“一带一路”:印尼公共空间话语的斗争》的出版,必将对印尼学界、媒体与公众深入理解“一带一路”倡议在印尼语境中的传播机制与认知过程提供宝贵的参考。同时,它也有望成为中国与印尼两国在学术交流、文化互鉴与政策协同方面的桥梁。希望更多像Anang博士这样的青年学者,能在全球化背景下,以本土视角审视世界,以学术研究回应现实,推动建立更加平等、互信与多元的国际传播知识体系。愿这本著作成为深化中印尼两国人民相互理解与交流的重要契机,愿两国人民在相互理解、合作共赢的道路上携手前行。

DAFTAR ISI

Prakata	v
Prakata Penulis.....	ix
Prolog Budiman - Tiongkok dan Dunia Multipolar	xi
Pengantar.....	xv
后记	xix
Daftar Isi	xxiii

BAGIAN I

Membaca Proyek BRI dalam Pusaran Opini Publik Digital.....	1
Indonesia, Simpul Strategis di Tengah Geliat Global.....	1
Janji Pertumbuhan dan Bayang-Bayang Kecemasan	2
Infrastruktur, Polarisasi Media, dan Ruang Opini.....	3
Untuk Siapa Informasi Disampaikan?.....	4
Menakar Narasi, Gagasan, dan Pertarungan Wacana	5
Merekam Suara, Menyusun Makna	6
Relevansi	7

BAGIAN 2

Media Sosial dan Wacana tentang Proyek BRI di Indonesia	9
Persahabatan Indonesia dan Tiongkok	9
Akulturasi Budaya Tionghoa dan Indonesia	11
Negara, Identitas, dan Dinamika Sosial	14
Negara, Bangsa, dan Posisi Warga Tionghoa di Indonesia	16
Rencana Proyek Inisiatif Jalur sutra di Indonesia.....	19
Menghitung Potensi dan Skala Proyek.....	20

Strategi Tiongkok Mewujudkan BRI.....	20
Proyek <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) di ASEAN.....	23
Pasca Proyek BRI di Indonesia.....	25
Perkembangan Media Sosial di Indonesia.....	26
Karakteristik Media Sosial sebagai Bagian dari Media Baru.....	27
Media Lokal dan Ruang Alternatif.....	31
Isu Ekonomi Politik dalam Media Baru di Indonesia.....	32
1) Kapitalisasi Media Baru di Era Reformasi.....	32
2) Evolusi Media Baru dalam Konteks Ekonomi Politik Media.....	36
Narasi <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) dalam Media Baru Indonesia.....	41
1) BRI dan peningkatan kerjasama ekonomi.....	41
2) Hubungan Naratif BRI dengan Pertahanan dan Keamanan Nasional.....	44
Ringkasan.....	47
 BAGIAN 3	
Menelaah Fungsi Media Sosial dalam Jaringan BRI.....	49
Epistemologi <i>Inisiatif Belt and Road</i> sebagai Wacana Kritis Media Sosial.....	52
<i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) antara Media Baru dan Dunia Maya.....	53
Internet sebagai Pilar Utama Inisiatif Jalur Sutra Digital.....	56
Media Sosial dalam Cengkeraman Ideologi Globalisasi Barat.....	60
Interseksi antara Komunikasi Digital, Arus Global, dan Strategi Tiongkok.....	64
Globalisasi ala Tiongkok dan Barat.....	65
Ekonomi Politik Sosialis Tiongkok.....	69
<i>Belt and Road Initiative</i> dan Wacana Teknologi dalam Konsep Globalisasi.....	71
Proyek BRI dan Representasi Media Baru di Era Postmodernisme.....	73
Ringkasan.....	75
 BAGIAN 4	
BRI, Inovasi Tiongkok Merancang Realitas Sosial Baru.....	77
Menafsir ulang Media Sosial sebagai Medium Pengetahuan.....	77
Ekonomi Digital dan Cara Baru Memandang Dunia Global.....	80
BRI di Tengah Perebutan Narasi Global.....	82
Pembentukan Opini Publik.....	87
Pembentukan Budaya Masyarakat.....	89

Merawat Nasionalisme dan Kepedulian pada Sesama.....	90
Sarana Sosialisasi Program Negara dan Pemerintah	92
BRI, Media Baru, dan Jejak Oligarki dalam Narasi Global	95
Media Sosial dan Ruang Perlawanan	96
Demokrasi Barat, Media Arus Utama, dan Manuver Tiongkok.....	98
Demokrasi Barat di Ujung Tanduk, Membaca Ramalan Levitsky dan Ziblatt.....	100
Proyek BRI, Wacana Media dan Kekuasaan.....	101
Ruang Publik, dan Kontestasi Wacana Global.....	102
Media Sosial dan Sarana Komunikasi Internasional.....	103
Ringkasan.....	105

BAGIAN V

Konten Laporan Media Sosial tentang Proyek BRI di Indonesia.....	107
Twitter dan Cerminan Dinamika proyek BRI Tiongkok sejak 2014	119
Dialektika Publik di Media Sosial Jelang Pemilu 2019	123
Isu Lingkungan	126
Hak Asasi Manusia	129
Pekerja Lokal dan Pekerja Asing	131
Isu Pekerjaan.....	134
Populisme Islam	137
Jebakan Utang.....	144
Kedaulatan Negara	148
Poros Maritim	151
Narasi Sosial tentang Proyek BRI di Indonesia	153
Kontak sosial Prakarsa BRI di Indonesia	160
Budaya.....	161
Politik	163
Ekonomi.....	165
Ringkasan.....	167

BAGIAN VI

Media Sosial dan Geliat Opini Publik Proyek BRI di Indonesia.....	169
Imbas Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia	170
Nilai-nilai Sosial dan Persepsi Kolektif Masyarakat	172
Dampak Hubungan Diplomatik di Bidang Pendidikan	174
Opini Publik dan Implikasi Proyek BRI di Indonesiaa	177
Ringkasan.....	179

BAGIAN VII

Kontra Narasi atas Isu BRI.....	181
Narasi Media Global atas Ambisi BRI Tiongkok	181
Amerika Latin, antara Kecurigaan dan Kemitraan Strategis	183
Propaganda Negara Barat terhadap Proyek BRI.....	190
Reaksi Politisi, Intelektual, dan Tokoh Berpengaruh.....	196
Respon Jurnalis dalam Pelaporan.....	203
Ringkasan.....	212

BAGIAN VIII

Arah dan Pengembangan Wacana.....	215
Apa yang Sebenarnya Terjadi?	216
Menyusun ulang temuan.....	217
Menemukan ruang bermakna	218
Peluang di masa depan	219

BAGIAN I

Membaca Proyek BRI dalam Pusaran Opini Publik Digital

Indonesia, Simpul Strategis di Tengah Geliat Global

Indonesia memiliki wilayah yang luas, terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur, dan terletak di pertemuan dua benua serta dua samudra. Letak geografis ini menjadikan Indonesia bagian penting dalam jalur perdagangan global dan rute pelayaran internasional yang cukup ramai. Posisi ini membawa dampak yang saling berkaitan, meliputi peluang ekonomi yang terbuka lebar, dan tanggung jawab dalam dinamika geopolitik kawasan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran cukup sentral dalam percaturan relasi regional Asia Tenggara. Letaknya yang strategis membuat berbagai kekuatan dunia menilai Indonesia sebagai mitra potensial dalam agenda ekonomi dan politik mereka. Setiap investasi, proyek pembangunan, maupun kerja sama ekonomi yang menysasar kawasan Asia Tenggara hampir selalu memperhitungkan posisi Indonesia dalam strategi jangka panjang.

Namun, eminensi geografis ini tidak serta-merta menjadi jaminan kesejahteraan-kemakmuran. Sebaliknya, dapat menjadi sumber kerentanan apabila tidak dikelola dengan visi dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional. Di sinilah pentingnya keberpihakan pada kebijakan luar negeri yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga berbasis nilai dan kepentingan jangka panjang bagi rakyat.

Dalam dua dekade terakhir, tatanan dunia mengalami pergeseran yang cukup drastis. Tiongkok bangkit sebagai kekuatan ekonomi dan politik baru yang menantang dominasi negara-negara Barat. Dalam konteks inilah, proyek

Belt and Road Initiative (BRI) yang dicanangkan Tiongkok menjadi relevan untuk dibahas. BRI bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga representasi dari cara baru Tiongkok membangun pengaruh globalnya.

Indonesia pun tidak lepas dari jangkauan proyek ambisius ini. Sejumlah proyek kerja sama mulai dibangun, dari kereta cepat hingga kawasan industri, dari pelabuhan hingga pembangkit listrik. Semua ini berjalan di tengah semangat pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional. Namun, di balik semangat tersebut, muncul juga perdebatan: apakah keterlibatan Indonesia dalam BRI sepenuhnya menguntungkan, atau justru menyisakan ruang bagi ketergantungan baru?

Kerja sama dengan negara asing selalu mengandung negosiasi kepentingan. Dalam kasus BRI, posisi Indonesia sebagai simpul strategis global mengandung ironi. Di satu sisi, Indonesia diundang masuk ke dalam jaringan pembangunan global Tiongkok. Di sisi lain, keterlibatan ini menyisakan pertanyaan: sejauh mana kedaulatan ekonomi dan politik dapat tetap dipertahankan dalam proyek sebesar ini?

Itulah sebabnya, membahas BRI tidak cukup hanya pada level proyek fisik. Kita perlu menggali lebih dalam bagaimana posisi Indonesia dalam jejaring global ini dikonstruksi. Apakah Indonesia benar-benar menjadi mitra setara, atau hanya sekadar jalur lintasan bagi arus modal dan kepentingan asing

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak dalam pembahasan selanjutnya. Indonesia berada dalam persimpangan jalan: menjadi pemain aktif dalam tatanan dunia yang baru, atau sekadar pengikut dari agenda global yang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyatnya. Dari sinilah, urgensi untuk membaca ulang posisi Indonesia dalam BRI menjadi semakin penting, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan budaya.

Janji Pertumbuhan dan Bayang-Bayang Kecemasan

Ketika Presiden Xi Jinping memperkenalkan inisiatif Jalur Sutra abad ke-21 pada tahun 2013, ia membawa serta janji kolaborasi ekonomi yang mencakup investasi, pembangunan infrastruktur, dan perluasan konektivitas antarnegara. Janji itu kemudian dijawabantahkan ke dalam mega proyek bertajuk *Belt and Road Initiative* (BRI) yang menyebar ke berbagai kawasan, dari Asia hingga Afrika, dari Eropa hingga Pasifik Selatan.

Saat itu, narasi yang digembar-gemborkan jika mega proyek BRI menjanjikan, terutama bagi negara-negara berkembang yang kekurangan dana untuk pembangunan infrastruktur. Tawaran investasi dalam jumlah besar, pembangunan jalan, pelabuhan, kereta api, dan kawasan industri membuat banyak pemerintah tertarik bergabung. Bagi Indonesia, inisiatif ini hadir

di tengah kebutuhan percepatan pembangunan, sehingga disambut dengan tangan terbuka.

Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai pertanyaan mulai bermunculan. Apakah proyek-proyek BRI semata-mata hanya untuk mewujudkan kerja sama ekonomi jangka panjang, ataukah terselip motif dominasi dan kepentingan politik luar negeri Tiongkok? Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Mengingat, beberapa negara yang terlibat dalam BRI diketahui mengalami kesulitan membayar utang proyek dan akhirnya kehilangan kontrol atas aset strategis mereka.

Di Indonesia sendiri, BRI tercermin dalam sejumlah proyek besar seperti kereta cepat Jakarta–Bandung, pelabuhan internasional, serta pembangunan pembangkit listrik dan kawasan industri. Proyek-proyek semacam ini memang meningkatkan aktivitas pembangunan, tetapi juga memicu perdebatan mengenai transparansi tentang bagaimana proses tendernya, keterlibatan kontraktor lokal, serta penggunaan pekerja asing. Diskursus publik mulai menilai ulang berbagai konsekuensi yang mungkin timbul dari kerja sama ini.

Beberapa kalangan mempertanyakan, apakah kerja sama ini akan memberi manfaat berkelanjutan bagi rakyat Indonesia, atau justru memperkuat posisi investor asing dalam perekonomian nasional? Dalam berbagai forum, baik resmi maupun informal, muncul kegelisahan bahwa proyek ini bisa memperbesar ketimpangan dan menciptakan ketergantungan baru. Narasi yang awalnya berisi janji kemajuan perlahan diimbangi oleh kekhawatiran tentang harga yang harus dibayar.

Publik pun terlibat untuk menimbang untung-rugi mega proyek BRI. Diskusi ini ternyata tidak hanya terjadi di kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, tetapi juga menyebar luas di ruang-ruang media sosial, forum diskusi komunitas, bahkan obrolan sehari-hari. Fenomena ini menandakan bahwa proyek pembangunan berskala besar seperti BRI tidak lagi bisa dilepaskan dari ruang partisipasi warga. Maka, sudah saatnya pembangunan tidak hanya diukur dari panjang jalan atau cepatnya rel kereta, tetapi juga dari sejauh mana keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan dijadikan pijakan.

Infrastruktur, Polarisasi Media, dan Ruang Opini

Infrastruktur fisik telah menjadi wajah paling terlihat dari kerja sama Indonesia dengan Tiongkok melalui proyek BRI. Jalan tol dibangun di banyak titik, rel kereta cepat mulai terbentang, dan pelabuhan diperluas kapasitasnya. Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Namun, pembangunan infrastruktur tidak berlangsung dalam ruang hampa. Selalu hadir bersamaan dengan narasi. Dalam hal ini, media berperan penting sebagai perantara yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap proyek-proyek tersebut. Narasi yang diproduksi oleh media justru dapat memperkuat legitimasi, atau malah menimbulkan keraguan dan tidak lepas dari kritik.

Beberapa media arus utama cenderung menyajikan proyek BRI secara positif, menekankan pada besarnya investasi dan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja. Meski begitu, tidak sedikit pula yang mengupas sisi lain. Misalnya, tentang keterlambatan proyek, transparansi anggaran yang dipertanyakan, hingga efek sosial terhadap masyarakat lokal yang terdampak.

Media sosial memperluas ruang perdebatan ini. Di sana, opini publik muncul dalam berbagai bentuk, dari pujian atas modernisasi infrastruktur hingga sindiran tajam atas ketidakseimbangan manfaat. Polarisasi pun tidak terelakkan. Dalam perbincangan daring, proyek BRI menjadi topik yang membelah opini, bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga menyangkut rasa nasionalisme dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Hal ini menandakan bahwa yang disebut sebagai infrastruktur tidak selalu berbicara soal fisik. Melainkan menjadi simbol dari relasi kuasa, cara negara bernegosiasi dengan aktor global, dan sejauh mana publik merasa dilibatkan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk melihat proyek BRI dari kacamata komunikasi politik, di mana opini publik bukan hanya reaksi spontan, tetapi cerminan dari dinamika sosial yang lebih dalam.

Untuk Siapa Informasi Disampaikan?

Di tengah derasnya arus informasi tentang pembangunan, publik tidak hanya menjadi penerima pasif. Masyarakat kini menuntut hak untuk memahami, mengkritisi, dan bahkan menolak kebijakan yang dinilai tidak mewakili kepentingan mereka. Pertanyaannya, apakah informasi yang beredar telah memenuhi kebutuhan publik yang beragam itu?

Proyek BRI, dengan segala kompleksitasnya, tidak bisa hanya dikomunikasikan melalui pidato resmi atau siaran pers pemerintah. Diperlukan pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif agar masyarakat benar-benar merasa menjadi bagian dari pembangunan. Keterlibatan warga tidak cukup dimaknai sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek aktif yang mampu memberi masukan dan mengajukan pertanyaan kritis.

Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar memiliki kualitas dan akurasi yang memadai. Dalam banyak kasus, masyarakat justru disuguhi narasi-narasi sepihak yang cenderung glorifikatif, tanpa ruang untuk membandingkan

atau mempertanyakan. Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan media digital untuk mengejar kecepatan ketimbang kedalaman.

Di sisi lain, informasi yang bias atau katakanlah “dangkal” dapat memicu polarisasi. Ketika masyarakat hanya disuguhi dua kutub ekstrem - antara mendukung sepenuhnya atau menolak secara membabi buta - maka diskusi yang sehat dan konstruktif agaknya akan sulit dicapai. Oleh karena itu, proyek seperti BRI pun bisa terjebak dalam situasi yang kaku, padahal realitasnya jauh lebih rumit dari yang dibayangkan.

Oleh sebab itu, perlu ada upaya sistematis untuk membangun literasi publik, memperluas akses informasi yang berimbang, dan mendorong lahirnya jurnalisme investigatif yang independen. Dalam konteks ini, peran jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proyek sebesar BRI benar-benar dikawal secara transparan dan akuntabel.

Menakar Narasi, Gagasan, dan Pertarungan Wacana

Sebagaimana diketahui, bahwa barasi bukanlah sekadar kumpulan kata-kata yang membentuk makna. Dalam konteks politik pembangunan, narasi adalah alat untuk membingkai realitas, membentuk persepsi, dan pada akhirnya memengaruhi kebijakan. Bahkan mega proyek BRI juga tidak terlepas dari pertarungan narasi ini. Selain sebagai infrastruktur fisik, juga sebagai medan pertarungan wacana yang melibatkan banyak aktor dengan berbagai macam kepentingan yang berbeda.

Salah satu pemikir yang relevan untuk membaca konteks ini adalah Jürgen Habermas. Konsep ruang publik yang Habermas ajukan menekankan pentingnya diskusi rasional dalam masyarakat demokratis. Ruang ini seharusnya menjadi tempat di mana warga negara dapat menyampaikan gagasan secara setara tanpa dominasi satu pihak. Namun, dalam praktiknya, ruang publik digital hari ini justru kerap kali diwarnai oleh disinformasi, ujaran kebencian, dan tajamnya pembelahan narasi.

Dalam banyak kasus, media sosial menjadi saluran sentral distribusi informasi, tetapi, sekaligus mempercepat penyebaran narasi yang tidak diverifikasi. Dalam konteks BRI, narasi yang dominan bisa saja tidak mewakili kenyataan di lapangan. Atau dalam istilah lain mencerminkan kekuatan modal, afiliasi politik, atau kecenderungan algoritma platform digital. Maka, membaca BRI sebagai narasi berarti juga membaca siapa yang punya kuasa atas wacana.

Pemikiran lain yang layak digunakan adalah teori ekonomi politik media dari Vincent Mosco. Ia menunjukkan bahwa media bukan institusi netral, melainkan bagian dari sistem kekuasaan yang tunduk pada logika pasar dan struktur kepemilikan. Dalam situasi ini, informasi diproduksi bukan untuk

membebaskan publik dari ketidaktahuan, tetapi untuk menjaga dominasi wacana yang menguntungkan pihak tertentu.

Pertarungan wacana dalam proyek BRI berlangsung di banyak level. Antara pemerintah dan masyarakat, media arus utama dan media alternatif, antara narasi lokal dan global. Di ranah ini, semua mafhum bahwa setiap aktor memiliki-membawa perspektif dan agenda masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi publik untuk tetap bersikap kritis, menimbang (alih-alih menyaring) berbagai informasi yang sudah kadung beredar, dan tidak mudah terseret dalam arus opini yang dikendalikan oleh kepentingan tersembunyi.

Dengan memahami bahwa BRI bukan hanya tentang rel kereta atau pelabuhan baru, melainkan juga tentang cerita yang dibangun di sekitarnya, kita dapat memperkuat posisi masyarakat dalam proses pembangunan. Wacana yang inklusif dan terbuka adalah syarat mutlak agar proyek sebesar ini benar-benar menjadi milik bersama, bukan hanya agenda elite.

Merekam Suara, Menyusun Makna

Untuk memahami bagaimana publik menanggapi proyek BRI, kita tidak bisa hanya mengandalkan data-data statistik dan laporan-laporan “resmi.” Narasi dan opini yang tersebar di media sosial, serta pernyataan dari berbagai tokoh masyarakat, menyimpan informasi yang sangat kaya dan mendalam. Di balik angka dan grafik, ada suara-suara yang merefleksikan harapan, kecemasan, bahkan kekecewaan.

Media sosial, dalam hal ini, berfungsi seperti pasar ide yang dinamis. Di sana, publik menyampaikan pendapat mereka secara langsung, tanpa perantara. Cuitan, unggahan, dan komentar yang beredar tidak hanya menjadi bentuk ekspresi individual, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas. Ketika sebuah topik menjadi perbincangan hangat, itu menunjukkan adanya ketegangan atau ketertarikan yang besar dari masyarakat.

Namun, media sosial juga memiliki keterbatasan. Suara yang paling keras atau paling sering muncul belum tentu merepresentasikan suara mayoritas. Algoritma platform dapat memperbesar sebagian narasi dan mengecilkan yang lain. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam sangat diperlukan.

Wawancara akan menjadi ruang bagi individu untuk menjelaskan pandangan mereka secara lebih terukur, dan komprehensif. Di sana, kita bisa menangkap nuansa yang tidak terlihat di permukaan. Misalnya, seorang warga yang secara umum mendukung proyek BRI bisa saja menyimpan kekhawatiran soal dampak lingkungan atau keterlibatan pekerja lokal. Informasi semacam ini sangat berharga untuk memahami kompleksitas pandangan publik.

Menggabungkan analisis media sosial dan wawancara memungkinkan kita menyusun peta makna yang lebih holistik. Kita bisa mengidentifikasi isu-isu yang paling sering dibicarakan, aktor-aktor yang dominan dalam membentuk opini, serta bagaimana persepsi terhadap BRI berubah seiring waktu. Proses ini juga membantu mengungkap dinamika politik komunikasi yang terjadi antara negara, masyarakat, dan platform digital.

Selebihnya, pendekatan ini ingin menempatkan masyarakat sebagai subjek pengetahuan. Dengan mendengarkan mereka secara bermakna, kita bisa membangun pemahaman yang cenderung lebih adil dan representatif tentang topik-topik pembangunan. Narasi-narasi terkait mega proyek, termasuk BRI, sudah seharusnya tidak hanya dikisahkan dari sudut pandang pemerintah atau pemilik modal, tetapi juga dari sudut pandang warga negara yang hidup berdampingan dan terdampak proyek tersebut.

Dengan begitu, merekam suara dan menyusun makna bukan sekadar kerja akademik, tetapi juga bagian dari upaya membangun demokrasi yang sehat. Ketika suara publik terdengar dan diakui dalam proses pengambilan keputusan, maka legitimasi pembangunan akan semakin kuat. Dan hanya dengan begitu, proyek sebesar BRI dapat benar-benar memberi manfaat bagi semua, bukan hanya segelintir pihak.

Relevansi

Apa yang akan dibahas dalam buku ini seyogianya tidak dimaknai sebagai rangkaian teori atau data teknis semata. Akan tetapi, usaha untuk memahami ulang bagaimana pembangunan mega proyek seperti BRI hadir dan mendapat umpan balik di tengah masyarakat. Karena, mega proyek BRI telah menjadi bagian dari narasi besar tentang arah masa depan Indonesia dalam kancah global.

Ketika sebuah proyek melibatkan investasi triliunan rupiah, mencakup wilayah yang luas, serta berdampak pada banyak lapisan masyarakat, maka ia tidak bisa hanya dibaca sebagai proyek teknokratik. BRI adalah arena tarik-menarik antara berbagai kepentingan: negara, investor, warga lokal, media, dan opini publik. Maka dari itu, membicarakan BRI berarti membicarakan demokrasi, kedaulatan, dan masa depan.

Relevansi pembahasan ini semakin terasa ketika kita menilik bagaimana proyek ini diperdebatkan di ruang publik. Suara-suara yang muncul tidak seragam. Ada dukungan yang kuat atas pembangunan infrastruktur, namun ada pula kritik tajam tentang dampak sosial dan lingkungan. Ketegangan ini adalah hal yang wajar dalam masyarakat terbuka. Yang tidak wajar adalah ketika suara-suara kritis dibungkam atau diabaikan.

Buku ini juga menekankan pentingnya melihat BRI dari sudut pandang masyarakat. Apakah mereka merasa dilibatkan? Apakah mereka memahami implikasi dari proyek tersebut? Dan yang paling penting, apakah mereka merasa diuntungkan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab bukan dengan retorika pembangunan, tetapi dengan refleksi yang jujur dan berbasis data serta pengalaman nyata warga.

Karenanya, tidak terlalu berlebihan dikatakan jika dengan membumikan narasi pembangunan ke dalam ruang keseharian masyarakat, kita bisa menilai apakah proyek seperti BRI benar-benar membawa manfaat jangka panjang atau hanya sekadar memenuhi ambisi politik dan ekonomi sesaat. Saya meyakini, ketika ruang publik digunakan untuk mendiskusikan hal-hal semacam ini secara terbuka dan rasional, di situlah demokrasi menemukan maknanya. Dan hanya dalam masyarakat yang demikianlah pembangunan bisa disebut berkelanjutan.

BAGIAN 2

Media Sosial dan Wacana tentang Proyek BRI di Indonesia

Persahabatan Indonesia dan Tiongkok

Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok sejatinya bukan cerita baru dalam sejarah. Jauh sebelum kedua negara berdiri sebagai negara modern, jejak interaksi antara masyarakat Nusantara dan Tiongkok telah terbentuk selama berabad-abad. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa bangsa Tionghoa sudah datang ke wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia sejak tahun 414 Masehi. Bahkan lebih jauh, catatan dalam buku berbahasa Mandarin *The Political Vortex* menyebut bahwa Tiongkok sudah mengenal kawasan Nusantara-dulu dikenal sebagai Huang-Tse-sejak era Kaisar Wang Mang di awal abad ke-1 sebelum Masehi.

Kala itu, pelayaran antar bangsa mengandalkan angin muson sebagai penunjuk arah. Kapal-kapal dari Tiongkok berlayar selama berbulan-bulan, bahkan bisa mencapai satu tahun perjalanan, untuk sampai ke wilayah kepulauan Indonesia. Karena waktu tunggu angin yang cukup panjang, banyak pelaut yang akhirnya menetap. Mereka pun menikah dengan penduduk lokal dan melahirkan generasi baru yang kemudian dikenal sebagai Peranakan Tionghoa atau sebagai anak keturunan hasil percampuran budaya Tiongkok dan Nusantara.

Masuknya komunitas Tionghoa ke Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi. Pada masa kejayaan Kerajaan Kutai di Kalimantan, misalnya, para pendatang Tionghoa dikenal sebagai pengrajin emas, pedagang, bahkan buruh bangunan. Mereka menetap di wilayah-wilayah kaya akan sumber daya seperti Kutai dan Pontianak. Dari sana, mereka menyebar ke berbagai daerah di Jawa dan Sumatera.

Salah satu momen bersejarah yang kerap dikenang adalah ketika pasukan Khubilai Khan dari Dinasti Yuan mengirim ekspedisi ke Jawa pada akhir abad ke-13. Ekspedisi itu bertujuan membalas perlakuan Raja Singasari terhadap utusan mereka. Akan tetapi, ketika tiba, kerajaan itu sudah runtuh dan digantikan oleh Kediri. Dalam pelayaran itu, mereka sempat mendarat di wilayah pesisir yang kini dikenal sebagai Lasem dan Semarang—dua kota yang masih memiliki jejak komunitas Tionghoa yang kuat hingga hari ini.

Era Dinasti Ming menandai babak baru dalam hubungan budaya antara Tiongkok dan Indonesia. Salah satu tokoh penting dalam sejarah ini adalah Cheng Ho (Zheng He), laksamana Muslim yang melakukan ekspedisi damai ke berbagai wilayah Asia dan Afrika, termasuk Nusantara. Bersama para awaknya yang mayoritas juga beragama Islam dari mazhab Hanafi, Cheng Ho tidak hanya berdagang tetapi juga mempererat hubungan diplomatik dan memperkenalkan nilai-nilai budaya serta agama.

Banyak sejarawan meyakini bahwa kehadiran Cheng Ho turut membawa pengaruh dalam penyebaran Islam di wilayah pesisir utara Jawa. Hal ini terlihat dari kesamaan mazhab yang dianut para penguasa Islam di wilayah tersebut dan awak kapal Cheng Ho. Bahkan, bentuk arsitektur beberapa masjid tua di Demak dan Banten memperjelas kuatnya pengaruh Tionghoa, memperkuat hipotesis bahwa Islamisasi juga dilakukan melalui jalur dagang dan budaya, bukan dengan kekerasan.

Jejak peninggalan Cheng Ho masih bisa disaksikan hingga kini, salah satunya adalah Kelenteng Sam Po Kong di Semarang—tempat yang diyakini menjadi titik persinggahan Cheng Ho. Kelenteng ini tidak hanya menjadi simbol hubungan sejarah, tetapi juga bukti nyata akulturasi budaya yang telah berjalan harmonis selama ratusan tahun.

Seiring waktu, keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Para imigran Tionghoa yang awalnya datang karena faktor dagang atau situasi politik di tanah kelahirannya, kemudian menetap dan beranak pinak. Proses ini berlangsung secara bertahap dan terus berlanjut hingga kini.

Catatan sensus penduduk Hindia Belanda tahun 1900 telah mengekspos bahwa sekitar 3.500 warga Tionghoa datang ke Indonesia setiap tahunnya. Angka ini melonjak tajam pada periode 1925–1930, dengan jumlah kedatangan mencapai 12.000 orang per tahun. Umumnya, mereka masuk melalui wilayah pesisir seperti Bangka dan Belitung sebelum akhirnya menuju ke pusat-pusat perdagangan dan pemukiman seperti Pulau Jawa.

Sensus tahun 1930 mencatat jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia telah mencapai sekitar 1,9 juta jiwa. Dari jumlah itu, mayoritas—sekitar 63 persen—lahir di Indonesia, dan sebagian besar tinggal di Jawa, pulau terpadat di nusantara. Namun, data sensus tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah

etnis Tionghoa hanya sekitar 1,2% dari total penduduk Indonesia, yakni sekitar 2,8 juta jiwa dari populasi nasional yang kala itu mencapai lebih dari 272 juta.

Kehidupan sehari-hari warga Tionghoa Indonesia pun terus berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Sekitar 60% dari mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi. Banyak pula yang fasih menggunakan bahasa daerah seperti Jawa atau Sunda sesuai dengan tempat tinggal mereka. Penggunaan berbagai dialek Tionghoa sebagai bahasa sehari-hari relatif kecil, yakni sekitar 20% dari total populasi etnis Tionghoa.

Dari sisi agama, komposisi kepercayaan mereka juga mencerminkan keberagaman. Separuh populasi Tionghoa menganut agama Buddha, 27% beragama Kristen Protestan, dan hampir 17% Katolik. Sementara itu, sekitar 4% menganut agama Islam, dan 4% lainnya memeluk Konghucu.

Dalam dua dekade terakhir, hubungan sosial antara warga keturunan Tionghoa dan masyarakat Indonesia semakin cair dan terbuka. Banyak generasi muda Tionghoa di Indonesia kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sejarah bangsanya sendiri—baik sejarah Indonesia modern maupun sejarah migrasi leluhur mereka. Hal ini turut memperkuat identitas nasional mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid—yang akrab disapa Gus Dur—menjadi tonggak penting dalam proses rekonsiliasi identitas ini. Di awal era reformasi, Gus Dur mengambil langkah berani dengan mencabut berbagai pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berekspresi warga keturunan Tionghoa. Ia bahkan menyebut bahwa leluhur keluarganya, KH Hasyim Asy'ari, memiliki garis keturunan dari marga Tan, salah satu marga Tionghoa.

Tidak hanya itu, Gus Dur juga memberikan ruang bagi tokoh-tokoh Tionghoa untuk terlibat aktif dalam pemerintahan. Beberapa nama penting seperti Mari Elka Pangestu, Kwik Kian Gie, dan Bob Hasan menjadi bagian dari kabinet pada masa pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Langkah ini memberi pesan kuat: warga keturunan Tionghoa adalah bagian integral dari Indonesia.

Melalui regulasi yang menjamin hak beribadah dan pelestarian budaya, era Gus Dur menjadi simbol awal pengakuan kembali terhadap hak-hak sipil dan budaya warga Tionghoa Indonesia. Sejak saat itu, ruang-ruang ekspresi dan kontribusi mereka dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa semakin terbuka lebar.

Akulturasasi Budaya Tionghoa dan Indonesia

Ketika membahas identitas budaya Indonesia, kita sebenarnya sedang menelusuri jejak panjang percampuran antarperadaban. Dalam pandangan

sejumlah sejarawan seperti Higham, Coedes, D.G.E. Hall, hingga Denys Lombard, budaya Indonesia tidak dibentuk dalam ruang kosong. Ia merupakan hasil interaksi yang terus-menerus antara dua arus besar: peradaban India dan peradaban Sinik, atau budaya Tionghoa dari daratan Cina. Kedua peradaban ini tidak datang secara masif sekaligus, secara perlahan, berkelanjutan, dan kemudian mengakar. Khusus pengaruh Tionghoa, kehadirannya begitu kuat, menyatu secara halus dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Budaya Tionghoa hadir dan kemudian melebur dalam kehidupan masyarakat lokal, membentuk mozaik kebudayaan yang kita kenal hari ini. Proses ini dikenal sebagai akulturasi atau percampuran budaya yang tidak saling meniadakan, melainkan memperkaya satu sama lain. Akulturasi budaya Tionghoa dan Indonesia bisa dilihat melalui berbagai unsur berikut:

1) Bahasa dan Sastra

Salah satu bentuk akulturasi yang paling awal terekam dalam dunia literasi adalah keberadaan Sastra Melayu-Tionghoa yang muncul sejak akhir abad ke-19. Sastra ini ditulis oleh orang-orang Tionghoa keturunan yang menggunakan bahasa Melayu dalam berbagai bentuk tulisan: roman, cerita silat, hingga berita dalam surat kabar. Pada masa itu, sastra ini disebut sebagai Indo-Chineesche literatuur atau sastra Indo-Tionghoa.

Tokoh seperti Nio Joe Lan telah mencatat keberadaan dan kekayaan genre ini sejak 1930-an. Namun, pada masa Orde Baru, kebebasan berekspresi warga keturunan Tionghoa dibatasi oleh regulasi seperti Inpres No. 14 Tahun 1967, yang turut menghambat perkembangan sastra dan budaya mereka. Meski begitu, karya-karya sastra ini tetap menjadi saksi sejarah tentang bagaimana identitas ganda—antara sebagai Tionghoa dan sebagai Indonesia—dinyatakan melalui dokumen tulisan.

Sastrawan Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, bahkan menyebut sastra ini sebagai bagian dari masa transisi. Dari bentuk sastra tradisional menuju sastra modern yang lebih kosmopolitan dan terbuka.

2) Pengobatan

Bidang pengobatan adalah wilayah lain di mana pengaruh Tionghoa sangat terasa. Salah satu warisan pengobatan tradisional Tionghoa yang masih digunakan luas di Indonesia hingga kini adalah akupunktur. Teknik penyembuhan yang melibatkan penusukan jarum ke titik-titik tertentu dalam tubuh ini dikenal dengan nama *Cen Ciew*. *Cen* berarti jarum, *Ciew* berarti panas.

Selain menggunakan jarum, metode ini juga sering memanfaatkan moksa, yaitu bahan bakar dari dedaunan tertentu yang dibakar untuk menghangatkan area tubuh. Akupunktur dipercaya telah ditemukan ribuan tahun sebelum

masehi dan terus bertahan sebagai pilihan terapi alternatif yang dipercaya sebagian masyarakat Indonesia, bahkan dipraktikkan di rumah-rumah sakit maupun klinik modern.

3) Kuliner

Siapa yang tidak mengenal soto? Hidangan berkuah hangat dengan isian daging dan rempah ini adalah salah satu makanan paling populer di Indonesia. Tapi tidak banyak yang tahu, bahwa soto sebenarnya merupakan hasil transformasi dari makanan Tionghoa bernama *caudo*, yang dulu diperkenalkan di Semarang.

Dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya, sejarawan Denys Lombard menjelaskan bahwa hidangan ini awalnya dibawa oleh pedagang-pedagang Tionghoa dan kemudian diadaptasi oleh masyarakat lokal dengan menyesuaikan bahan dan rasa. Dari sinilah kemudian lahir berbagai varian soto: dari Soto Kudus, Soto Betawi, hingga Soto Lamongan. Jejak Tionghoa dalam kuliner Indonesia juga bisa ditemukan dalam berbagai makanan lain seperti bakmi, lumpia, hingga bakso, sebagai hidangan-hidangan yang kini sudah sangat membumi dalam selera kuliner kita.

4) Arsitektur

Jika kita berjalan menyusuri kawasan Pecinan di beberapa kota tua Indonesia, seperti Semarang, Surabaya, atau Jakarta, kita bisa melihat jejak visual dari percampuran budaya yang begitu kentara—terutama dari sisi arsitektur. Warisan budaya Tionghoa tidak hanya hidup dalam bahasa dan kuliner, tetapi juga dalam bentuk bangunan yang menjulang dan menyimpan sejarah panjang peradaban.

Menurut David G. Khol dalam bukunya *Chinese Architecture in The Straits Settlements and Western Malaya*, gaya arsitektur Tionghoa yang berkembang di Asia Tenggara sebelum tahun 1900 memiliki ciri-ciri khas yang mudah dikenali. Salah satunya adalah keberadaan courtyard—ruang terbuka di tengah rumah yang biasanya dipadukan dengan taman atau kebun kecil. Ruang ini bersifat privat dan menjadi pusat kehidupan keluarga. Namun, di Indonesia, terutama di Kawasan Pecinan yang padat, konsep ini sering diadaptasi menjadi teras luas di bagian depan rumah, sebagai respons terhadap keterbatasan lahan.

Atap rumah Tionghoa juga sangat khas. Bentuk atap pelana dengan ujung melengkung ke atas, yang dikenal sebagai model Ngang Shan, tidak hanya fungsional tetapi juga sarat makna simbolis. Dalam kepercayaan Tionghoa, ujung atap yang melengkung ke atas dipercaya dapat mengusir roh jahat.

Sentuhan artistik lainnya terlihat dari struktur kayu yang dibiarkan terbuka agar ukiran-ukiran khas Tionghoa bisa dinikmati. Warna bangunan pun tidak

sembarangan—merah dan kuning keemasan menjadi warna dominan yang banyak dipakai, terutama untuk bangunan kelenteng. Merah melambangkan keberuntungan dan perlindungan, sementara kuning keemasan identik dengan kekuasaan dan kemuliaan.

Salah satu bangunan yang menjadi simbol kuat perpaduan budaya ini adalah Kelenteng Sam Po Kong di Semarang. Kelenteng ini dibangun untuk mengenang kedatangan Cheng Ho (Zheng He), seorang laksamana Muslim dari Dinasti Ming yang melakukan pelayaran ke nusantara pada abad ke-15. Bersama rekannya Wang Jinghong, Cheng Ho tidak hanya dikenal sebagai utusan kerajaan, tetapi juga sebagai penyebar ajaran Islam di kalangan masyarakat Tionghoa di wilayah ini. Sam Po Kong mengalami kerusakan akibat badai pada tahun 1704, dan kemudian dipugar kembali oleh masyarakat setempat dua dekade kemudian. Kini, ia berdiri megah sebagai simbol sejarah, toleransi, dan warisan budaya lintas bangsa.

Pengaruh arsitektur Tionghoa juga menyentuh tempat-tempat ibadah umat Islam di Indonesia. Contohnya adalah Masjid Mantingan di Jepara yang dibangun sekitar tahun 1550 oleh Ratu Kalinyamat. Masjid ini memiliki ornamen dan ukiran yang menunjukkan adanya pengaruh seni ukir Tionghoa—menjadi contoh awal bagaimana dua kebudayaan ini saling bersentuhan secara damai.

Lebih dekat ke masa kini, Masjid Al-Imtizaj di Bandung menjadi bukti nyata bahwa akulturasi masih terus hidup. Masjid yang didirikan oleh H.R. Nuriyana ini dikenal juga sebagai Masjid Ronghe. Dari luar, bangunannya menyerupai kelenteng, lengkap dengan warna merah dan kuning yang mendominasi. Namun, sebuah kubah di atas bangunan menegaskan identitasnya sebagai rumah ibadah umat Islam. Masjid ini menjadi ruang inklusif bagi muslim Tionghoa sekaligus menjadi simbol persatuan antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi dalam semangat keberagaman.

Negara, Identitas, dan Dinamika Sosial

Hubungan antara warga keturunan Tionghoa dan negara Indonesia telah mengalami perjalanan panjang yang penuh dinamika. Dalam sejarahnya, posisi komunitas Tionghoa di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan negara, baik saat masa penjajahan maupun setelah kemerdekaan.

Pada masa kolonial Belanda, kebijakan ekonomi dan sosial justru memperkuat peran komunitas Tionghoa dalam sektor perdagangan dan distribusi. Pasca kemerdekaan, peran ini terus berlanjut meskipun tidak berarti bahwa kelompok Tionghoa menguasai seluruh perekonomian negara. Di sisi lain, kebijakan asimilasi pemerintah Indonesia berusaha memperkuat identitas nasional, termasuk dengan mendorong warga Tionghoa melebur ke dalam budaya lokal. Namun, pada saat yang sama, sejumlah kebijakan seperti

pembedaan dalam kartu identitas dan penyaluran terbatas ke sektor ekonomi tertentu justru memperkuat kembali sekat-sekat etnis yang ada.

Pluralisme agama yang dijamin oleh Pancasila membuka ruang bagi warga keturunan Tionghoa untuk mempertahankan budaya dan keyakinan mereka. Identitas etnis tidak hilang, tetapi mengalami penyesuaian dengan konteks Indonesia yang terus berubah.

Sejarah politik masyarakat Tionghoa mempertegas adanya beragam orientasi identitas. Pada masa penjajahan, setidaknya terdapat tiga orientasi sosial-politik utama: pertama, mereka yang merasa sebagai bagian dari bangsa Tiongkok dan loyal kepada negara asal leluhurnya. Kedua, mereka yang bersikap pragmatis dan menjalin hubungan baik dengan pemerintah Hindia Belanda. Dan ketiga, mereka yang mulai mengidentifikasi diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia masa depan, khususnya dari kelompok Keturunan, yaitu keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia.

Setelah kemerdekaan, dinamika terus berlanjut. Sebagian warga Tionghoa totok (imigran generasi pertama) tetap merasa sebagai bagian dari Tiongkok. Namun, warga Keturunan terpecah dalam dua pendekatan: kelompok integrasionis yang ingin mempertahankan identitas khas Tionghoa dalam kerangka negara Indonesia, dan kelompok asimilasionis yang mendorong peleburan total ke dalam budaya pribumi.

Reformasi politik pasca-Soeharto membuka kembali ruang kebebasan bagi etnis Tionghoa untuk mengekspresikan identitasnya. Masa ini juga ditandai oleh tumbuhnya semangat keterbukaan dan keadilan yang lebih luas. Wacana pendirian partai politik berbasis etnis Tionghoa sempat muncul, namun sebagian besar tokoh Tionghoa lebih memilih bergabung dalam partai-partai besar yang sudah ada. Kalangan muda Tionghoa mulai menghidupkan kembali kesadaran budaya, tetapi tidak sedikit yang memilih jalan moderat dengan menjalin kerja sama lintas etnis.

Meskipun Orde Baru telah lama berlalu, warisan kebijakan asimilasi masih membekas. Banyak warga keturunan Tionghoa kini lebih memilih menjadi “Indonesia seutuhnya,” meskipun di balik itu identitas Tionghoa tetap hidup, baik dalam budaya keluarga, bahasa, maupun kegiatan sosial.

Menurut sejumlah peneliti, solusi dari dinamika relasi antara negara dan etnis Tionghoa bukan hanya pada aspek ekonomi yang adil dan merata, tetapi juga pada pemahaman dan penerimaan terhadap konsep Indonesia yang benar-benar setara. Di mana semua warga, tanpa melihat asal-usul etnisnya, memiliki ruang yang sama untuk tumbuh, bersuara, dan berkontribusi bagi negeri.

Negara, Bangsa, dan Posisi Warga Tionghoa di Indonesia

Di kawasan Asia Tenggara, para ahli sering membagi negara-negara menjadi dua kategori: negara pribumi dan negara imigran. Indonesia masuk dalam kategori negara pribumi, berbeda dengan negara seperti Singapura atau Malaysia yang berkembang dengan keragaman penduduk imigran sejak awal. Perbedaan ini tidak hanya soal sejarah, tetapi juga memengaruhi cara sebuah negara membentuk konsep bangsa.

Di Indonesia, konsep bangsa kecenderungannya lebih banyak dikaitkan dengan unsur etnis, terutama karena negeri ini terdiri dari ratusan suku dengan sejarah panjang di wilayahnya masing-masing. Dalam kerangka ini, kelompok Tionghoa kadang dianggap sebagai “yang lain,” karena latar belakang leluhur mereka berasal dari luar Nusantara. Meski telah menjadi warga negara Indonesia, banyak dari mereka masih dianggap belum sepenuhnya “menjadi bangsa Indonesia”.

Kritik terhadap konsep semacam ini datang dari banyak pemikir dan tokoh bangsa, termasuk Mohammad Hatta dan Soekarno. Hatta pernah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung kewarganegaraan, bukan keturunan. Sementara Soekarno, dalam pidatonya tahun 1963, dengan tegas menyebutkan bahwa bangsa Indonesia adalah kumpulan berbagai suku, termasuk Tionghoa.

Sayangnya, gagasan-gagasan tersebut belum sepenuhnya diterima masyarakat luas. Masih ada pandangan bahwa warga keturunan Tionghoa—terlepas dari kontribusi mereka terhadap negeri ini—tetap dianggap “asing” oleh sebagian orang. Dalam praktiknya, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” belum sepenuhnya melindungi semua warga secara setara, terutama dalam soal identitas dan penerimaan sosial.

Padahal, bila menilik sejarah, kontribusi komunitas Tionghoa bagi Indonesia sangatlah besar. Salah satu tonggak penting adalah pendirian sekolah-sekolah oleh organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) pada awal abad ke-20. Sekolah-sekolah ini memelopori lahirnya karya sastra Melayu-Tionghoa yang sangat produktif—sekitar 3.000 buku terbit dalam waktu 70 tahun, angka yang luar biasa jika dibandingkan dengan generasi penulis lainnya.

Warga Tionghoa juga punya andil dalam sejarah penting bangsa ini. Surat kabar *Sin Po* tercatat sebagai media pertama yang memuat teks lagu Indonesia Raya setelah Sumpah Pemuda 1928. Bahkan rumah tempat para pemuda berkumpul dan merumuskan Sumpah Pemuda, yakni Gedung Kramat 106, adalah milik seorang warga keturunan Tionghoa bernama Sie Kok Liong. Sayangnya, nama ini jarang disebut dalam buku sejarah.

Selain itu, Universitas Trisakti — salah satu kampus terkemuka di Indonesia — juga tidak lepas dari peran komunitas Tionghoa. Universitas ini awalnya didirikan oleh tokoh-tokoh Baperki, organisasi masyarakat keturunan

Tionghoa, termasuk Siauw Giok Tjhan. Pada era Presiden Soekarno, nama universitas ini sempat diubah menjadi Universitas Res Publika sebelum kemudian berganti menjadi Trisakti.

Kisah-kisah ini seharusnya menjadi pengingat bahwa menjadi “Indonesia” tidak selalu berarti berasal dari suku tertentu, melainkan tentang kesediaan untuk membangun negeri bersama. Konsep kewarganegaraan yang adil dan setara menjadi fondasi penting dalam membentuk bangsa Indonesia yang benar-benar Bhinneka Tunggal Ika.

Di berbagai kota di Indonesia, jejak kontribusi dan nasionalisme warga Tionghoa dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Di Medan, misalnya, nama Tjong A Fie dikenang bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga dermawan yang ikut menyumbang sepertiga biaya pembangunan Masjid Raya Medan—sebuah bukti nyata kedekatannya dengan Sultan Deli dan semangat keberagaman yang dia hidupi. Meski rumah warisannya kini tampak kurang terawat, ingatan akan jasanya masih hidup di tengah masyarakat.

Sementara itu, di Bagansiapiapi, warisan budaya Tionghoa hadir dalam bentuk Festival Bakar Tongkang, tradisi tahunan sebagai ungkapan syukur kepada Dewa Ki Ong Ya. Tradisi ini telah diangkat menjadi agenda wisata budaya daerah yang setiap tahunnya menarik ribuan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Semangat nasionalisme etnis Tionghoa juga mengemuka lewat organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang berdiri di Jakarta. Awalnya, organisasi ini didirikan oleh warga Tionghoa berpendidikan Barat yang resah terhadap diskriminasi hukum oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendorong peningkatan martabat dan pendidikan komunitas Tionghoa, meski gerakan awalnya lebih bersifat eksklusif dan belum menyentuh isu antikolonialisme secara langsung (Suryadinata, 2002).

THHK juga mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak Tionghoa. Namun, penggunaan buku-buku pelajaran dari Tiongkok atau Singapura membuat para siswa merasa terasing dari kehidupan sosial Indonesia. Akibatnya, meski mereka tinggal secara turun-temurun di tanah ini, mereka merasa seperti orang asing di negeri sendiri. Organisasi ini pun terus mencari dukungan dari negeri leluhur mereka, Tiongkok. Pemerintah Dinasti Qing bahkan rutin mengirim pejabat tinggi ke Indonesia dan mendirikan Siang Hwee—semacam kamar dagang yang aktif melindungi kepentingan ekonomi komunitas Tionghoa dengan cara memboikot perusahaan-perusahaan kolonial Eropa (Darini, 2018).

Namun, seiring perubahan zaman, muncul kesadaran bahwa perjuangan harus diubah. Maka, pada tahun 1932 lahirlah Partai Tionghoa Indonesia. Partai ini menyerukan agar warga Tionghoa di Hindia Belanda mengidentifikasi diri sebagai orang Indonesia, mendukung gerakan nasional, dan menolak

nasionalisme Tionghoa yang mengacu pada Tiongkok. Partai ini juga menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi perjuangan kemerdekaan (Suryadinata, 2002).

Sumbangsih warga Tionghoa dalam perjuangan nasional pun tidak sedikit. Beberapa tokoh seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang, dan Tjio Djien Kwie turut ambil bagian dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahkan dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ada empat tokoh Tionghoa yang terlibat: Oei Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, Tan Eng Hua, dan Liem Koen Hian (Darini, 2018).

Setelah membahas sejarah dan konteks geopolitik proyek BRI di bagian sebelumnya, kita perlu memahami lebih dekat jenis-jenis proyek yang ditawarkan dalam inisiatif ini. Secara umum, proyek BRI terbagi ke dalam tiga jalur utama: Jalur Sutra Darat, Jalur Sutra Digital, dan Jalur Sutra Maritim. Ketiganya saling melengkapi dan menggambarkan ambisi besar Tiongkok dalam membangun konektivitas global lintas benua.

1. Inovasi Digital, Penghubung Baru Jalur Sutra

Berbeda dari jalur fisik yang mengandalkan rel, pelabuhan, dan jalan raya, Jalur Sutra Digital beroperasi di dunia maya. Fokusnya adalah membangun infrastruktur digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan memperkuat keterhubungan antarbangsa dalam hal pengetahuan, budaya, dan pendidikan.

Melalui proyek ini, Tiongkok mendorong penyebaran teknologi mutakhir seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, pembangunan kabel optik bawah laut, sistem kota pintar (*smart city*), serta platform berbasis *e-commerce*. Visi fundamentalnya adalah pemerataan akses digital agar tidak ada negara, terlebih di kawasan berkembang, yang tertinggal dalam arus transformasi teknologi global (Huadong et al., 2018).

Jalur ini juga menjawab dua tantangan besar: pertama, kebutuhan akan data besar (*big data*) untuk memahami dinamika bumi dan perubahan iklim; dan kedua, ketimpangan distribusi pengetahuan ilmiah antarnegara. Untuk mendukung inisiatif ini, Tiongkok bahkan telah menerbitkan white paper yang menjelaskan strategi mereka dalam membumikan visi BRI di dunia digital (Das, 2017; Group, 2020).

2. Jalur Sutra Maritim: Menghidupkan Kembali Jalur Perdagangan Laut Kuno

Jika Jalur Sutra Digital bergerak melalui data dan informasi, maka Jalur Sutra Maritim membawa semangat lama pelayaran Tiongkok kembali ke

permukaan. Jalur ini mengambil inspirasi dari ekspedisi Cheng Ho di abad ke-15, yang membentang dari Selat Malaka hingga ke Laut Merah dan pesisir Afrika Timur.

Di era modern, Jalur Sutra Maritim abad ke-21 dirancang untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan strategis dari Tiongkok hingga Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan kawasan Asia Tenggara. Tujuannya adalah memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur pelabuhan, logistik, dan jalur pelayaran laut.

Beberapa pelabuhan penting yang menjadi bagian dari proyek ini antara lain: Kuantan di Malaysia, Kyaukpyu di Myanmar, Jakarta dan Batam di Indonesia, Kolombo dan Hambantota di Sri Lanka, Gwadar di Pakistan, Mombasa di Kenya, hingga Piraeus di Yunani (Wyman, 2017).

3. Jalur Sutra Darat

Jalur ini menghubungkan Tiongkok dengan berbagai negara di Asia Tengah, Rusia, hingga Eropa melalui serangkaian koridor ekonomi. Jalur ini tidak hanya mengandalkan transportasi darat seperti rel dan jalan raya, tetapi juga membangun pusat-pusat logistik, kawasan industri, dan sistem perdagangan lintas negara.

Salah satu proyek andalannya adalah New Eurasian Land Bridge. Kereta barang sepanjang hampir 12.000 km dari Tiongkok hingga ke Rotterdam, Belanda. Proyek ini juga mencakup berbagai koridor strategis seperti Tiongkok-Mongolia-Rusia, Tiongkok-Asia Tengah-Asia Barat, serta Tiongkok-Pakistan yang menghubungkan daratan ke pelabuhan laut Gwadar di Laut Arab (Minghao, 2015).

Dengan cakupan lebih dari 60 negara dan menjangkau 63% populasi dunia, proyek-proyek ini menjadi gambaran ambisi besar Tiongkok membentuk “Komunitas Global dengan Nasib Bersama”, sebuah gagasan yang diperkenalkan Presiden Xi Jinping dalam berbagai forum internasional (Kosandi, 2014; Shen, 2018).

Rencana Proyek Inisiatif Jalur sutra di Indonesia

Sejak dicanangkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping, prakarsa *Belt and Road Initiative* (BRI) menjadi salah satu proyek ambisius abad ini. Tujuannya sederhana namun besar: membangun konektivitas global melalui infrastruktur dan kerja sama ekonomi yang luas. Lewat BRI, Tiongkok ingin menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika melalui dua jalur utama—Jalur Sutra Darat dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (Cai, 2017).

Indonesia menjadi salah satu mitra kunci dalam proyek ini, terutama karena posisinya yang strategis di jalur pelayaran internasional. Selain

karena letaknya yang berada di poros Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia juga memiliki potensi ekonomi yang besar dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak. Di sinilah titik temu antara visi besar BRI dan kepentingan domestik Indonesia.

Menghitung Potensi dan Skala Proyek

Secara global, BRI mencakup lebih dari 60 negara dan menjangkau sekitar 63% populasi dunia. Skala investasinya pun luar biasa: Tiongkok diperkirakan menggelontorkan dana hingga US\$ 100 miliar per tahun (sekitar Rp 1.500 triliun) untuk mendukung berbagai proyek BRI (Ziromwatela & Changfeng, 2016).

Di Indonesia sendiri, kebutuhan investasi infrastruktur pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo diperkirakan mencapai Rp 4.700 triliun. Tentu, dana sebesar itu tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka, kolaborasi dengan mitra asing menjadi keniscayaan, dan Tiongkok hadir dengan tawaran investasi besar.

Pada tahun 2015, realisasi investasi Tiongkok ke Indonesia meningkat tajam hingga mencapai 26%, atau sekitar US\$ 628 juta. Hanya dalam waktu satu tahun, nilai ini melonjak hingga US\$ 1 miliar pada triwulan pertama 2016 (M. Idris, 2016). Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang 2016 terdapat lebih dari 1.700 proyek investasi dari Tiongkok dengan total nilai sekitar US\$ 2,66 miliar. Artinya, Tiongkok masuk sebagai salah satu dari tiga besar investor asing di Indonesia saat itu.

Strategi Tiongkok Mewujudkan BRI

Demi menjalankan visi besar *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok mengembangkan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan rel kereta, sekaligus membentuk institusi keuangan baru serta memperluas kerja sama ekonomi lintas negara. Beberapa langkah strategis yang ditempuh antara lain:

1. Mempererat Kerja Sama Regional (2013–2014)

Tiongkok memulai fase awal BRI dengan memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara tetangganya. Salah satu langkah penting adalah kerja sama maritim antara Tiongkok dan ASEAN pada Oktober 2013. Dalam waktu singkat, Tiongkok juga menjalin kerja sama dengan Rusia untuk membangun proyek kereta api lintas Eurasia, serta memperkuat jaringan koridor ekonomi seperti Bangladesh-Tiongkok-India-Myanmar dan Tiongkok-Pakistan.

2. Mendirikan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB)

Pada Oktober 2013, Presiden Xi mengusulkan pendirian AIIB sebagai lembaga pembiayaan baru yang khusus mendanai proyek-proyek infrastruktur di kawasan Asia. Tidak lama berselang, pada 2014, sebanyak 21 negara Asia menandatangani nota kesepahaman pembentukan AIIB. Jumlah ini bertambah menjadi 26 negara pada Januari 2015. AIIB akhirnya resmi beroperasi pada awal 2016, dengan kantor pusat di Beijing.

Selain AIIB, Tiongkok juga membentuk dua lembaga keuangan lainnya untuk mendukung BRI, yaitu: Bank Pembangunan Baru (*New Development Bank*) pada 2013 dan Dana Jalur Sutra (*Silk Road Fund*) pada 2015.

Lembaga-lembaga ini menjadi salah satu penopang finansial bagi inisiatif BRI. Keberadaannya menawarkan alternatif terhadap dominasi institusi-institusi Barat seperti Bank Dunia dan IMF, sekaligus membuka peluang bagi pendekatan pembiayaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang.

3. Konferensi dan konsolidasi demi penguatan kerja sama BRI

Sebagai langkah serius dalam membangun *Belt and Road Initiative* (BRI), pemerintah Tiongkok mengadakan berbagai forum multilateral dan konsolidasi internal yang strategis. Tiga pertemuan penting yang patut dicatat sebagai landasan kuat penguatan kerja sama adalah Konferensi Ekonomi Pusat, Forum Boao untuk Asia, serta Forum Belt and Road untuk Kerja Sama Internasional. Forum-forum ini menjadi ajang konsolidasi regional dan global dalam memperkenalkan visi Tiongkok tentang pembangunan bersama melalui konektivitas lintas-negara.

Indonesia menjadi salah satu mitra penting dalam peta besar BRI. Sejak 2010 hingga 2016, terjadi lonjakan investasi dan proyek dari Tiongkok di Indonesia. Nilai investasi tumbuh sebesar 147 persen, dan jumlah proyek meningkat 53 persen. Puncaknya terjadi pada 2016, dengan realisasi investasi mencapai US\$2,665,3 juta melalui 1.734 proyek. Ini menandai kenaikan nilai investasi sebesar 324 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu tersebut, posisi Tiongkok sebagai investor di Indonesia naik pesat: dari peringkat kesembilan pada 2015, naik ke posisi ketiga pada 2017, hanya di bawah Singapura dan Jepang. Ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan minat investasi Tiongkok terhadap pasar Indonesia.

Namun, meskipun investasi meningkat, hubungan dagang Indonesia-Tiongkok memiliki tantangan tersendiri. Dalam kurun 2012 hingga Mei 2017, neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok tercatat negatif. Tren penurunan ekspor selama lima tahun tersebut tidak diimbangi dengan penurunan impor, meskipun peningkatan impor hanya sekitar 0,8 persen per

tahun. Ketimpangan ini menjadi catatan penting, karena memperlihatkan dominasi barang impor Tiongkok di pasar domestik Indonesia.

Keterlibatan Indonesia dalam BRI sendiri sudah dimulai sejak 2013, ketika Presiden Tiongkok Xi Jinping berpidato di hadapan parlemen Indonesia, menyampaikan visinya soal kerja sama maritim dan regional. Pada 2015, kerja sama ini diperkuat dalam Forum Boao untuk Asia yang menyepakati lima bidang strategis: politik dan keamanan, ekonomi dan investasi, maritim dan teknologi, hubungan budaya dan sosial, serta kerja sama internasional dan kawasan. Forum Belt and Road pada 14–15 Mei 2017 semakin memperjelas komitmen Indonesia dalam BRI, terutama dalam mendukung proyek-proyek besar yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Selain proyek besar, terdapat pula sejumlah inisiatif lain yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangkit listrik skala menengah di sejumlah lokasi di Pulau Jawa, pembangunan gedung pencakar langit Signature Tower, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia–Tiongkok di Jonggol, Jawa Barat, kawasan industri terpadu di Ketapang, hingga program-program sosial seperti penanggulangan kemiskinan dan reboisasi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, proyek kerja sama internasional juga terwujud dalam pengembangan kawasan Meikarta sebagai bagian dari relasi ekonomi Indonesia–Tiongkok.

Sebagai bentuk komitmen finansial terhadap kerja sama ini, pemerintah Tiongkok telah mengalokasikan dana sebesar 91,1 miliar dolar AS, atau setara Rp1.296 triliun (dengan kurs Rp14.237 per dolar AS), untuk mendanai 28 proyek strategis di Indonesia. Dari total tersebut, lima proyek utama menyerap dana hingga sekitar 14,21 miliar dolar AS. Kelima proyek strategis itu adalah: Pembangunan PLTA Kayan di Kalimantan Utara (1,5 miliar dolar AS), Investasi dalam sektor pengolahan limbah (3 miliar dolar AS), Pembangunan PLTA Salo Pebatua (560 juta dolar AS), Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus seluas 31.000 hektare (9 miliar dolar AS), dan Proyek industri perikanan terpadu di Pulau Seram, Maluku (150 juta dolar AS) (Bhaskara, 2019a).

Laporan terbaru dari Fitch Solutions mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah proyek infrastruktur terbesar yang dikerjakan oleh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Dari total keseluruhan proyek Tiongkok di ASEAN, sekitar 36 persen atau senilai 93 miliar dolar AS diinvestasikan di Indonesia. Angka ini mencerminkan betapa strategisnya posisi Indonesia dalam peta kerja sama ekonomi Tiongkok di wilayah ini.

Salah satu proyek yang paling menyedot perhatian publik adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Kalimantan Utara, yang nilainya mencapai 17,8 miliar dolar AS. Proyek ini bukan hanya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, tetapi juga termasuk dalam

daftar proyek infrastruktur paling spektakuler yang didanai Tiongkok di Asia Tenggara.

Proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) di ASEAN

Studi yang dirilis oleh Oxford Economics dan CIMB ASEAN Research Institute pada tahun 2018 mencatat bahwa nilai total proyek-proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) di kawasan ASEAN mencapai lebih dari 739 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi teratas sebagai penerima investasi BRI terbesar dengan nilai mencapai 171 miliar dolar AS. Disusul oleh Vietnam sebesar 152 miliar, Kamboja 104 miliar, Malaysia 98,5 miliar, Singapura 70,1 miliar, Laos 48 miliar, Brunei 36 miliar, Myanmar 27,2 miliar, Thailand 24 miliar, dan Filipina 9,4 miliar (Vinales, 2019).

Dalam upaya merespons kritik mengenai potensi jeratan utang, Tiongkok merancang Kerangka Kerja Keberlanjutan Utang untuk memastikan bahwa proyek-proyek BRI tetap berkelanjutan secara fiskal. Selain itu, dibentuk pula panel mediator internasional dari negara-negara peserta BRI untuk menangani sengketa lintas negara yang mungkin muncul dari kerja sama infrastruktur lintas batas ini.

Langkah Tiongkok untuk mendorong BRI menjadi proyek multilateral membuka peluang bagi negara-negara ASEAN untuk berperan lebih aktif dalam menciptakan manfaat bersama. Negara-negara seperti Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Myanmar tercatat sebagai mitra dagang paling terhubung dengan Tiongkok di kawasan ini.

Kedekatan ekonomi ini telah diperkuat sejak proyek BRI pertama kali diluncurkan di Asia Tenggara pada tahun 2014, dan mengalami peningkatan signifikan pada 2016. Misalnya, perdagangan antara Tiongkok dan Vietnam tumbuh sebesar 25% pada tahun 2016, didorong oleh sektor listrik dan mesin. Sementara itu, ekspor makanan olahan memainkan peran penting dalam hubungan dagang Tiongkok-Kamboja, dan kerja sama di sektor tekstil menjadi andalan hubungan Tiongkok-Myanmar.

Dinamika regional juga mengindikasikan bahwa kenaikan upah dan perubahan demografis di Tiongkok telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk mencari kemitraan produksi di Asia Tenggara. Malaysia, misalnya, memainkan peran strategis dalam rantai pasok Tiongkok melalui industri mikrochip, dengan nilai ekspor ke Tiongkok mencapai 16 miliar dolar AS pada 2016 (Cox et al., 2018).

Peran Tiongkok sebagai produsen global mulai mendominasi perdagangan di negara-negara seperti Singapura. Dalam sektor kimia, plastik, dan produk karet, tercatat investasi Tiongkok mencapai sekitar 7 miliar dolar AS. Malaysia

dan Singapura diprediksi akan semakin penting karena manufaktur Tiongkok mulai beralih ke industri bernilai tambah tinggi.

Dalam konteks *Belt and Road Initiative* (BRI), sektor transportasi dan logistik mencatat porsi investasi terbesar, dengan total mencapai sekitar 330 miliar dolar AS di 88 negara. Sektor energi menjadi yang kedua, dengan nilai akuisisi sebesar 266 miliar dolar sejak 2013. Keduanya menyumbang lebih dari tiga perempat dari keseluruhan proyek unggulan BRI. Di sektor transportasi, rel kereta api menjadi proyek dengan nilai investasi tertinggi—terutama di Amerika Serikat—yang mencapai 190 miliar dolar. Proyek-proyek lain di sektor jalan raya dan otomotif menyusul dengan nilai sekitar 66 miliar dolar, kemudian investasi pelabuhan sebesar 39 miliar dolar, mencakup pembangunan maupun perluasan fasilitas pelabuhan. Sementara itu, investasi di bidang penerbangan masih tergolong kecil.

Investasi BRI juga menjangkau sektor lain seperti industri, teknologi dan keuangan, real estat, serta pariwisata. Di bidang teknologi dan keuangan, Singapura menjadi sorotan. Salah satu contohnya adalah konsorsium investor Tiongkok yang berhasil mengakuisisi produsen semikonduktor Singapura (Cox et al., 2018, hlm. 1–52).

Salah satu dimensi penting dari konektivitas ekonomi yang jarang diperhatikan adalah mobilitas manusia. Pertukaran pekerja lintas negara serta program pendidikan dan pariwisata menjadi faktor utama. Tiongkok memperlihatkan ketertarikan yang tinggi untuk memperkuat konektivitas sosial melalui pendidikan dan pariwisata ke luar negeri. Sebaliknya, negara-negara lain juga mulai menunjukkan minat serupa terhadap Tiongkok.

Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk ASEAN, terus berupaya membangun konektivitas lebih dalam dengan Tiongkok. Harapannya, relasi dagang ini tidak hanya mempercepat arus barang, tetapi juga arus pekerja lintas batas. Faktor manusia dalam konektivitas ekonomi diperkirakan akan semakin krusial ke depannya.

Kedekatan geografis antara Tiongkok, ASEAN, dan negara-negara tetangganya di Asia-Pasifik sudah mengalami kemajuan. Namun, masa depan proyek BRI sangat bergantung pada respons kebijakan yang adaptif dan dinamis dari para pemangku kepentingan. BRI menargetkan keterlibatan sektor publik dan swasta untuk membangun jaringan konektivitas ekonomi yang lebih solid.

Kerja sama antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia berpotensi besar dalam membentuk klaster maritim. Secara teoritis, BRI bisa menjadi pendorong utama peningkatan konektivitas maritim dan bahkan membantu menurunkan ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan (Evers & Menkhoff, 2018, hlm. 8–29).

Di tengah berjalannya proyek BRI, peran negara-negara ASEAN menjadi semakin penting karena beberapa alasan. Salah satunya adalah diluncurkannya visi strategis Tiongkok-ASEAN untuk tahun 2030. Visi ini mencakup tiga pilar utama: kerja sama ekonomi, keamanan politik, dan perdagangan (X, 2019). Pemerintah Tiongkok juga mulai lebih aktif membangun hubungan diplomasi publik dengan negara-negara ASEAN.

Meskipun demikian, masih ada tantangan seperti campur tangan pihak luar kawasan dan meningkatnya semangat nasionalisme di beberapa negara ASEAN. Untuk menjaga stabilitas kerja sama jangka panjang, Tiongkok diharapkan mampu mengambil peran sebagai negara besar yang bertanggung jawab, dengan mencerminkan pada semangat kontribusi, toleransi, dan diplomasi kooperatif (谷合强, 2018).

Jika diarahkan dengan baik, penguatan diplomasi publik antara Tiongkok dan ASEAN dapat menciptakan iklim yang sehat, stabil, dan sejahtera. Hal ini tentu saja sangat penting untuk mendukung kebangkitan damai Tiongkok di tengah dinamika global saat ini (景丽娜, 2017).

Pasca Proyek BRI di Indonesia

Sejak 2015, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen besar dalam pembangunan infrastruktur nasional, terutama untuk mendukung konektivitas dan pemerataan ekonomi. Salah satu pencapaian yang menonjol adalah pembangunan 65 bendungan, di mana 14 bendungan telah rampung, sementara 41 sisanya masih dalam tahap konstruksi. Tahun 2019, pemerintah menargetkan pembangunan 10 bendungan baru, memperkuat ketahanan air dan pangan di berbagai wilayah (Cakti, 2019).

Di sektor irigasi, pemerintah telah membangun jaringan seluas 865.389 hektare (Ha) hingga 2018, dan menargetkan penambahan 139.410 Ha pada 2019. Artinya, total jaringan irigasi yang dibangun mencapai lebih dari 1 juta hektare. Selain itu, 942 embung telah dibangun untuk menjaga ketersediaan air, ditambah 120 embung baru yang direncanakan, menjadikan total 1.062 embung tersebar di seluruh Indonesia.

Kemajuan juga tercermin dari pembangunan jalan nasional sepanjang 4.119 km hingga 2019. Pemerintah menyadari pentingnya jalan tol bagi distribusi logistik, dan berhasil membangun 1.852 km jalan tol selama era Presiden Jokowi. Pembangunan jembatan juga menjadi prioritas, dengan panjang total mencapai 51.092 meter. Untuk menjangkau wilayah terpencil, 330-unit jembatan gantung ditargetkan selesai dibangun hingga akhir 2019.

Dalam hal akses air bersih, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dibangun dengan kapasitas 21.500 liter/detik, dan akan ditambah 3.173 liter/

detik lagi. Total kapasitas SPAM menjadi 24.673 liter/detik. Untuk sektor sanitasi dan persampahan, 12,4 juta rumah tangga telah mendapat akses layanan ini. Pemerintah juga berhasil menangani 24.295 hektare kawasan kumuh di berbagai kota.

Perhatian juga diberikan pada kawasan perbatasan. Sejak 2015, pemerintah membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) lengkap dengan pasar dan hunian. Tambahan 4 PLBN direncanakan pada 2019. Sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia membangun 79 venue olahraga, tersebar di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Sementara itu, di sektor perumahan, sejak 2015 hingga 2018, telah dibangun 3,5 juta unit rumah. Pada 2019, pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 1,25 juta unit, termasuk 893 rumah susun dengan 50.031 unit. Khusus untuk TNI-Polri, nelayan, masyarakat perbatasan dan daerah tertinggal, dibangun 24.463-unit rumah khusus.

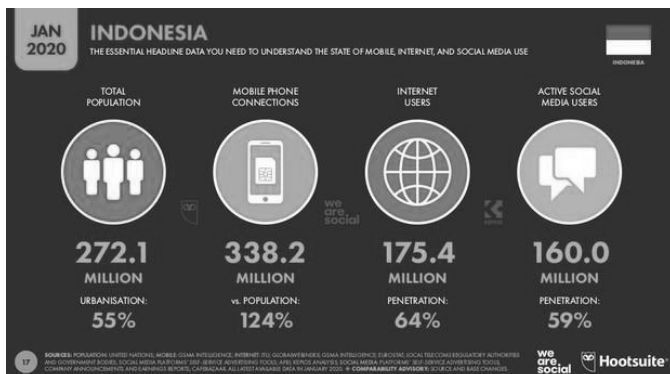
Bukti komitmen lain terlihat pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah menysasar 700.699-unit rumah bagi masyarakat miskin (Pramesti, 2019). Program ini terus berjalan hingga akhir masa jabatan Jokowi.

Tidak kalah penting, pemerintah menyusun 89 usulan proyek strategis nasional baru untuk periode 2020–2024, dengan anggaran mencapai Rp 1.422 triliun. Proyek-proyek ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, dari Jawa (25 proyek, Rp 462 triliun) hingga Maluku-Papua (7 proyek, Rp 11 triliun). Meskipun pandemi COVID-19 melanda, proses lelang dan konstruksi tetap berjalan, menjadikan infrastruktur sebagai motor pemulihan ekonomi nasional (Amali, 2020).

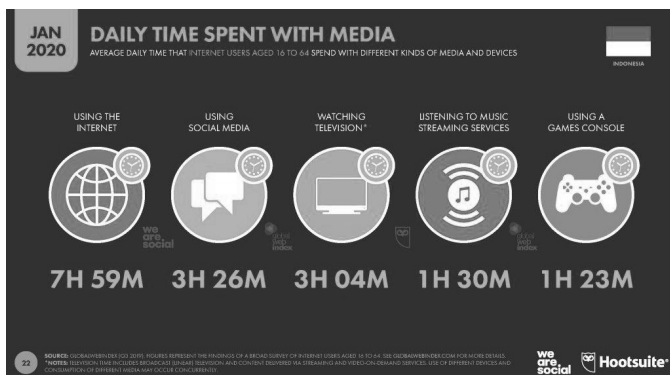
Perkembangan Media Sosial di Indonesia

Kehidupan manusia modern hari ini tidak bisa dilepaskan dari kehadiran internet. Dunia seperti menyusut menjadi satu ruang besar yang saling terhubung. Marshall McLuhan menyebutnya sebagai “Global Village”, di mana manusia, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mulai memiliki kesamaan selera dan pola konsumsi informasi berkat media baru (Pamungkas, 2017, hlm. 245). Di sisi lain, Manuel Castells menekankan pentingnya jaringan luas yang memungkinkan manusia terkoneksi secara sosial dan ekonomi (Castells, 2011). Keduanya menawarkan sudut pandang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memahami bagaimana teknologi mengubah kehidupan manusia.

Internet membuka jalan bagi munculnya media baru—bukan hanya media yang disiarkan secara satu arah seperti televisi atau radio, tapi media yang bersifat interaktif dan partisipatif. Dunia maya kini dipenuhi dengan beragam platform seperti website, blog, email, media sosial, marketplace, dan layanan



Gambar 5
Perkembangan
platform digital
di Indonesia.
(Kami Sosial &
Hootsuite, 2020).



Gambar 6 Rata-
rata lama waktu
yang dihabiskan
masyarakat
Indonesia untuk
mengakses
internet. Sumber
(We Are Social &
Hootsuite, 2020)

Indonesia adalah bagian dari kawasan Asia Pasifik, wilayah dengan populasi terbesar di dunia. Dari total sekitar 7,75 miliar penduduk dunia, sebanyak 4,54 miliar jiwa atau sekitar 59% di antaranya telah memiliki akses ke internet. Fakta ini menempatkan Asia Pasifik sebagai kawasan dengan pertumbuhan konektivitas digital yang sangat pesat.

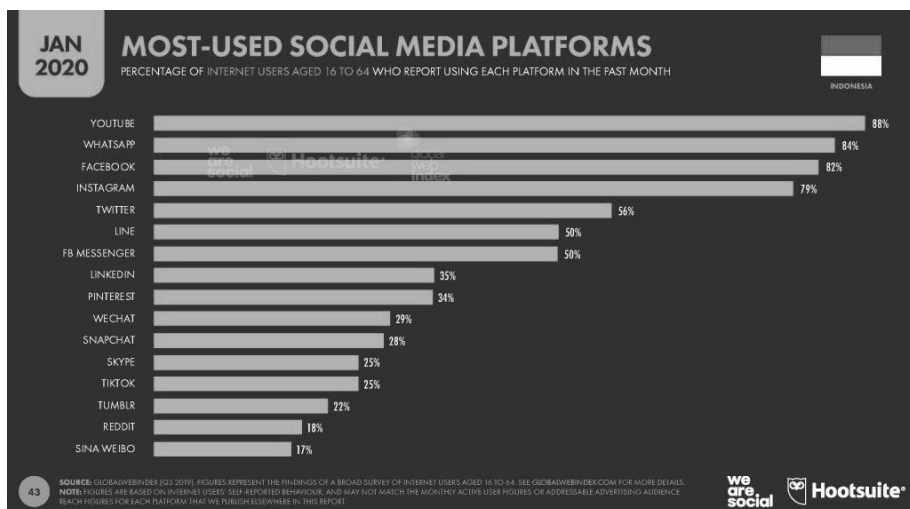
Kendatipun persentase keseluruhan pengguna internet di beberapa negara belum terlalu tinggi, tingkat pertumbuhannya tergolong signifikan. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, penetrasi internet di kawasan ini meningkat sebesar 9,2%, sementara penggunaan media sosial tumbuh 9,8% dari Januari 2019 hingga Januari 2020 (Hill & Sen, 2005; Lim, 2005).

Khusus di Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat lompatan luar biasa dalam akses internet. Jika pada tahun 2002 jumlah pengguna internet masih berkisar 4,5 juta orang, maka pada tahun 2017, angka tersebut melonjak menjadi 145 juta pengguna. Lonjakan

ini menggambarkan transformasi digital yang sangat cepat, seiring dengan meluasnya penggunaan smartphone, murah nya paket data, dan masifnya penetrasi media sosial.

Namun, ada hal menarik dari pola perilaku digital masyarakat Indonesia. Berdasarkan sejumlah kajian, motivasi utama warganet Indonesia dalam mengakses internet adalah hiburan dan aktivitas di media sosial, bukan pencarian berita atau informasi (Luthfi, 2019). Fenomena ini sejalan dengan tren global, di mana media sosial lebih sering digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi secara informal, mengisi waktu luang, atau mendapatkan hiburan visual, dibanding sebagai alat utama pencarian informasi atau pembelajaran.

Kondisi ini mengajarkan bahwa meskipun akses terhadap teknologi telah tersedia luas, kemampuan literasi digital masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah penting. Bagaimana informasi dibaca, disebarluaskan, dan dipahami memengaruhi kualitas ruang publik digital. Terlebih lagi dalam konteks proyek-proyek besar seperti Inisiatif Belt and Road (BRI), peran media sosial sebagai ruang artikulasi warga bisa sangat menentukan bagaimana narasi global disambut di tingkat lokal.



Gambar 7 media sosial terpopuler di Indonesia Sumber (We Are Social & Hootsuite, 2020).

Tidak mengherankan jika Indonesia juga menduduki peringkat tinggi dalam penggunaan media sosial. Hingga awal 2020, penetrasi media sosial telah mencapai 59 persen, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 8,1 persen. Dalam satu tahun saja, tercatat 12 juta pengguna media sosial baru. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna media sosial terbesar ketiga di dunia, setelah India (130 juta) dan Tiongkok (15 juta) (Bagus, 2020).

Dalam konteks sosial-politik, internet bukan hanya media hiburan. Ia telah menjadi bagian dari aktivisme digital. Seperti yang dikatakan Lim (2005), internet memungkinkan hadirnya pengalaman lintas batas yang cepat dan masif—baik dalam bentuk solidaritas sosial, kampanye, hingga gerakan protes.

Platform seperti Facebook dan X telah menjelma menjadi ruang publik virtual yang seringkali melampaui jangkauan media arus utama. Berita-berita dari pelosok desa, kasus ketidakadilan, atau pelanggaran hukum yang luput dari sorotan media besar, dapat cepat menjadi viral dan memantik diskusi publik luas.

Fenomena ini dikenal sebagai pergeseran “dari jalan ke tweet”—aktivisme yang dulunya harus turun ke jalan kini bisa dimulai dari layar ponsel. Media sosial memberi ruang bagi jurnalisme warga, partisipasi publik, bahkan advokasi akar rumput. Namun, di sisi lain, muncul pula efek negatif berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga fitnah yang kerap kali berbuntut pada masalah hukum.

Gemerlapnya dunia informasi dan kebebasan pers di Indonesia sering kali menyembunyikan satu kenyataan penting: sebagian besar media dikuasai oleh sejumlah kecil kelompok konglomerasi. Studi yang dilakukan oleh Nugroho dan timnya (2012, hlm. 1–45) mencatat bahwa setidaknya ada 13 grup perusahaan media besar yang menguasai hampir seluruh sektor penyiaran, media cetak, hingga platform digital. Konsentrasi kepemilikan seperti ini menimbulkan kekhawatiran, bukan hanya karena potensi monopoli secara ekonomi, tetapi juga karena bisa membuka jalan bagi kepentingan politik tertentu dan memunculkan bias informasi yang merugikan prinsip demokrasi.

Siapa saja mereka?

1. MNC Group (Hary Tanoesoedibjo). Mengelola 20 stasiun televisi, 22 radio, tujuh media cetak, dan satu media daring.
2. Kompas Gramedia (Jacob Oetomo). Memiliki 10 stasiun televisi, 12 radio, 89 media cetak, dan dua portal online.
3. Elang Mahkota Teknologi (Eddy Kusnadi Sariaatmadja). Mengoperasikan tiga stasiun televisi dan satu media online.
4. Mahaka Media (Abdul Gani dan Erick Thohir). Memiliki dua televisi, 19 radio, dan lima media cetak.
5. CT Corp (Chairul Tanjung). Menguasai dua stasiun televisi dan satu portal online.
6. News One Media/Lippo Group (James Riady). Mengoperasikan dua televisi, sepuluh media cetak, dan satu media daring.

7. Media Group (Surya Paloh). Mengelola satu televisi nasional dan tiga media cetak.
8. Visi Media Asia/Bakrie Group (Anindya Bakrie). Memiliki dua televisi dan satu portal online.
9. Jawa Pos Group (Dahlan Iskan dan Azrul Ananda). Salah satu yang terbesar: 20 televisi, 171 media cetak, dan satu media online.
10. MRA Media (Adiguna Sutowo dan Soetikno Soedarjo). Memiliki 11 radio dan 16 media cetak.
11. Femina Group (Pia Alisyahbana dan Mirta Kartohadiprodjo). Dua radio dan 14 media cetak.
12. Tempo Inti Media (Yayasan Tempo). Satu televisi, satu radio, tiga media cetak, dan satu media online.
13. Bali Post Group (Satria Narada). Sembilan televisi, delapan radio, delapan media cetak, dan dua portal daring.

Dampak dominasi konglomerasi media ini sangat signifikan. Dalam praktiknya, keberagaman informasi dapat tereduksi menjadi satu narasi yang senada—terutama ketika kepentingan ekonomi dan politik pemilik media ikut bermain dalam agenda redaksional.

Media Lokal dan Ruang Alternatif

Meski begitu, tidak semua media tunduk pada 13 konglomerasi besar tersebut. Di berbagai daerah, masih ada media-media lokal yang berusaha berdiri independen dan menjadi penyambung suara masyarakat akar rumput. Kelompok-kelompok ini memang tidak sebesar konglomerasi nasional, namun mereka memainkan peran penting dalam membentuk opini publik lokal.

Beberapa di antaranya:

- Grup Suara Merdeka. Mengelola Harian Suara Merdeka, Cempaka, Harian Tegal, Pekalongan, Semarang, Banyumas, dan lainnya.
- Kelompok Pikiran Rakyat. Menerbitkan Pikiran Rakyat, Galamedia, Pakuan, Priangan, Fajar Banten, serta mengelola Radio Parahyangan dan PT Granesia Percetakan Bandung.
- Kelompok Kedaulatan Rakyat. Memiliki Harian Kedaulatan Rakyat, Merapi, Koran Update, koran mingguan Sunday Morning, dan Radio KR.
- Grup Bisnis Indonesia. Mengelola Harian Bisnis Indonesia, Harian Jogja, serta jaringan media dan percetakan lainnya.

Media-media lokal ini masih memegang akar jurnalistik komunitas, dan dalam konteks media sosial—kerap menjadi sumber kredibel ketika isu-isu lokal merebak. Mereka pun telah bertransformasi ke media digital dan memanfaatkan platform online untuk menjangkau pembaca lintas daerah.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini memiliki sekitar 47.000 media massa yang mencakup media cetak, radio, televisi, dan media daring. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan media terbanyak di dunia. Dari total tersebut, sekitar 2.000 adalah media cetak, 674 stasiun radio, dan 523 stasiun televisi, termasuk yang berskala lokal. Selebihnya adalah media daring yang jumlahnya terus bertambah.

Meski angka pertumbuhan media terlihat mengesankan, ada persoalan mendasar yang belum teratasi, yakni soal standar kelayakan dan profesionalisme lembaga pers. Masih banyak media yang beroperasi tanpa memenuhi kriteria sebagai institusi jurnalistik yang kredibel. Di sisi lain, kompetensi wartawan pun belum merata. Banyak jurnalis yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik secara memadai. Hingga saat ini, baru sekitar 14.000 wartawan di Indonesia yang telah mengantongi sertifikasi dan diakui kompetensinya oleh Dewan Pers (Agustina, 2021).

Isu Ekonomi Politik dalam Media Baru di Indonesia

1) Kapitalisasi Media Baru di Era Reformasi

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membawa harapan baru bagi kehidupan demokrasi, termasuk dalam sektor media. Salah satu bentuk kebebasan yang muncul adalah dibukanya kembali izin pendirian stasiun televisi swasta. Meski TVRI kehilangan statusnya sebagai satu-satunya penyiar nasional sejak berdirinya RCTI pada 1989, disusul oleh SCTV dan TPI, perubahan ini belum sepenuhnya mencerminkan era baru kebebasan pers. Hal ini disebabkan karena kepemilikan media tersebut masih berada di tangan kelompok elit yang dekat dengan lingkaran kekuasaan Soeharto, menjadikan media-media itu tetap menjadi alat propaganda pemerintah kala itu.

Namun, dalam dua dekade terakhir pascareformasi, industri media, terutama televisi, berkembang pesat baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Inovasi teknologi dan peningkatan mutu konten menjadi ciri utama. Beberapa stasiun televisi mengembangkan identitas khusus, seperti Metro TV, TV One, Kompas TV, INews, CNN, dan CNBC yang menonjol sebagai televisi berita. TVRI, sebagai televisi milik negara, mengedepankan siaran yang mengangkat keberagaman budaya dan daerah untuk memperkuat persatuan nasional. Sementara itu, Trans TV dan Global TV lebih fokus pada program sinema,

dan RCTI, ANTV, Indosiar, serta Net TV lebih dikenal dengan tayangan drama dan hiburan.

Menariknya, beberapa stasiun televisi juga dimiliki dan dikelola oleh organisasi kemasyarakatan. Sebagai contoh, TVMu dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah, dan TV9 dikelola oleh Nahdlatul Ulama (NU). Kehadiran media ini memperkaya keragaman akan kepemilikan dan konten yang berkembang seiring meningkatnya dinamika demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pola komunikasi masyarakat mengalami perubahan signifikan. Interaksi yang sebelumnya bersifat satu arah kini bertransformasi menjadi dua arah dengan dukungan kecepatan, akurasi, dan kemudahan. Internet hadir sebagai solusi atas kebutuhan ini. Dibandingkan media konvensional, internet memiliki keunggulan berupa minimnya jeda komunikasi, biaya yang relatif terjangkau, kecepatan tinggi, serta cakupan informasi yang luas. Daya tarik inilah yang kemudian mendorong pelaku ekonomi untuk memanfaatkan internet sebagai sarana bisnis, termasuk dalam geliat pertumbuhan toko-toko daring.

Media digital pun berkembang sebagai ruang partisipasi publik yang inklusif. Dalam konteks ini, konvergensi media tidak hanya menyentuh sisi teknologi, tetapi juga memengaruhi pola kerja insan media. Para jurnalis dituntut untuk menjadi tenaga profesional yang mampu menangani berbagai platform sekaligus—baik teks, audio, visual, maupun daring—dalam satu alur kerja redaksi yang terintegrasi (Yuni & Gita, 2021, hlm. 27–38).

Fenomena konvergensi media tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan merupakan bagian dari tren global. Industri media saat ini memasuki fase persaingan yang sangat kompetitif, di mana batas-batas antara media cetak, televisi, radio, media daring, bahkan toko buku dan percetakan, semakin kabur. Dalam banyak kasus, satu pemilik media dapat menguasai berbagai jenis platform secara bersamaan—suatu praktik yang dikenal sebagai konsolidasi kepemilikan media.

Bagi sebagian pemilik media, konvergensi bukan hanya strategi bisnis, tetapi menjadi obsesi tersendiri dalam menguasai saluran distribusi informasi. Konsekuensinya, terjadi perubahan mendasar dalam definisi berita. Jika sebelumnya berita dipahami sebagai pelaporan atas suatu peristiwa yang sudah terjadi, kini berita dikejar untuk bisa hadir saat peristiwa masih berlangsung, bahkan dalam detik yang sama. (Hamna, 2018).

Media Group	Group Leader	TV stations			Print			Other businesses
		National	Other	Radio stations	Newspapers	Magazines/ Tabloids	Online media	
Media Nusantara Citra (MNC) Group	Hary Tanoesoedibjo	RCTI, Global TV, MNCTV (ex TPI)	Indovision, Sky Vision, SunTV Network (13 local stations)	Trijaya FM, Radio Dangdut, ARH Global Radio	<i>Sepuluh Indonesia</i> (Koran Sindo)	<i>High End magz: Genie, Mom & Kidie</i> tabloids	Okezone	IT, content production and distribution, talent management, automobile
Mahaka Media Group	Erick Tohir	TVOne	Jak TV, Alif TV	Radio JakFM	<i>Republika, Harian Indonesia</i> (in Mandarin)	<i>Parent's Indonesia, A+, Golf Digest, Area</i> , magazines	Republika Online	Entertainment, outdoor advertisement
Kompas Gramedia Group	Jakob Oetama, Agung Adiprasetyo	—	<i>Currently build</i> Kompas TV network	Sonora Radio & Otomotion Radio	<i>Kompas, Jakarta Post, Warta Kota</i> , + other 11 local papers	<i>Intisori</i> + 43 magazines & tabloids, 5 book publishers	Kompas Cyber Media	Hotels, public relation agencies, university & telecommunication tower (in plan)
Jawa Pos Group	Dahlan Iskan	—	JTV, BatamTV, RiauTV, FajarTV + others (total: 12)	Fajar FM (Makassar)	<i>Jawa Pos, Indo Pos Rakyat Merdeka, Radar</i> + others (total: 151)	<i>Mentari, Liberty</i> magazines + 11 tabloids	Jawa Pos Digital Edition	Travel bureau, power plant
Media Bali Post Group (KMB)	Satria Narada	—	Bali TV + other local stations (total: 9)	Global Kini Jani, Genta FM + others (total: 7)	<i>Bali Post, Bisnis Bali, Suluhi Indonesia, Harian Denpasar, & Suara NTB</i>	<i>Tokoh, Lintara, & Wiyata Mandala</i> tabloids	Bali Post, Bisnis Bali	—
Elang Mahkota Teknologi (EMTEK) Group	Eddy Kurnadi Sariaatmadja	SCTV, Indosiar	O'Channel, ElShinta TV	Elshinta FM	—	<i>Elshinta, Gaul, Story, Korz, Mamamia</i>	—	Wireless broadband, pay-TV, telecommunications, banking, IT solutions, production house
Lippo Group	James Riady	—	First Media	—	<i>Jakarta Globe, Investor Daily, Suara Pembertan</i>	<i>Invertor, globe Asia & Campus Asia</i> magazines	Jakarta Globe Online	Property, hospital, education, insurance
Bakrie & Brothers	Anindya Bakrie	antv, TVOne	Channel [V]	—	—	—	VIVAnews	Telecommunications, property, metal, oil & gas, agribusiness, coal
Femina Group	Fia Alisyahbana, Mira Kartohadiprojdo	—	—	U-FM Jakarta & Bandung	—	<i>Femina, Gadis, Dewi Ayuabunda</i> + others (total: 15)	Femina, GiraCitra, Ayuabunda, Gadis, Parenting Online	Physical infrastructure
Media Group	Surya Paloh	Metro TV	—	—	<i>Media Indonesia, Lampung Post, BorneoNews</i>	—	Media Indonesia	Production house, even management, boutique education, printing
Mugi Reka Aditama (MRA) Group	Dian Muljanti Soedarjo	—	—	Cosmopolitan FM, Hard Rock FM, I-Radio, Trax FM	—	<i>Cosmopolitan, Cosmagiri, Fitness</i> + others (total: 16)	—	Holder of several international boutique brands
Trans Corpora (Para Group)	Chairul Tanjung	Trans TV, Trans 7	—	—	—	—	Detik Online	Banking, venture capital, insurance, theme parks, resort, retail, cinema

Tabel 2. Konglomerasi pemilik media massa di Indonesia Sumber (Lim, 2011)

Fenomena konsentrasi kepemilikan media juga terlihat jelas di Indonesia. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi memberikan dampak negatif terhadap sistem media nasional, terutama dalam hal keragaman konten dan informasi yang disampaikan kepada publik. Menyadari adanya risiko tersebut, pemerintah mencoba mengambil peran melalui penerbitan regulasi terkait kepemilikan perusahaan media. Namun dalam praktiknya, para pelaku industri kerap menemukan celah hukum yang memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan strategi konsolidasi, termasuk dalam bentuk integrasi vertikal maupun horizontal, demi meraup keuntungan sebesar mungkin.

Konsentrasi media ini tidak hanya menggambarkan pola penyatuan kepemilikan, juga diversifikasi, di mana satu entitas bisnis memiliki berbagai jenis media dalam satu jaringan. Melalui sinergi tersebut, masing-masing media saling mendukung dan mempromosikan satu sama lain. Dalam banyak kasus, relasi istimewa antara pemilik media dan kekuasaan politik turut memperkuat dominasi mereka di pasar industri komunikasi.

Dampaknya, perusahaan media besar dengan jaringan luas cenderung memperoleh pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan media independen yang berdiri sendiri. Misalnya, penguasaan iklan lebih banyak didominasi oleh stasiun televisi yang merupakan bagian dari konglomerasi media. Tahun 2019 menjadi salah satu catatan penting, di mana belanja iklan nasional mengalami pertumbuhan sebesar 10 persen dibanding tahun sebelumnya.

Menurut data Nielsen Advertising Intelligence (Ad Intel), total belanja iklan di media televisi, radio, dan cetak mencapai Rp168 triliun berdasarkan tarif kotor. Televisi tetap menjadi media utama dengan porsi 85 persen atau setara dengan Rp143 triliun, meningkat 14 persen dari tahun sebelumnya. Sementara media cetak menyerap lebih dari Rp22 triliun, dan radio sekitar Rp1,7 triliun. Di sisi lain, media digital juga mulai menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan kontribusi iklan mencapai Rp10,3 triliun, naik sekitar 2 persen dari tahun sebelumnya.

Di antara sektor pengiklan, kategori produk perawatan rambut menyusul dengan belanja iklan sebesar Rp9,2 triliun (naik 17 persen), dan perawatan wajah Rp8,1 triliun (naik 41 persen). Kategori lembaga pemerintah dan politik pun cukup dominan, mencatatkan angka Rp8,8 triliun. Tidak ketinggalan, industri rokok juga masuk dalam lima besar dengan total belanja iklan mencapai Rp7,2 triliun, meningkat 24 persen dibandingkan tahun 2018.

Sejak kuartal ketiga tahun 2018, Nielsen juga mulai melacak belanja iklan digital, termasuk dari 200 situs lokal teratas dan 18 kanal YouTube. Hasilnya, pada 2019 total belanja iklan digital mencapai Rp13,3 triliun. Meski angkanya masih relatif kecil dibandingkan media konvensional, kontribusi media digital sudah mencapai 7 persen dari total belanja iklan nasional yang menyentuh

angka Rp181 triliun—sebuah tren yang diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan.

Kehadiran media sosial telah memperkaya dinamika kontestasi dalam ranah ekonomi politik media. Salah satu platform yang mencolok dalam hal ini adalah X, yang sejak kemunculannya pada tahun 2006 telah berkembang menjadi medium penting untuk debat politik, komunikasi krisis, promosi bisnis, hingga ekspresi budaya. Salah satu peristiwa global yang menyoroti peran signifikan media sosial adalah Arab Spring, ketika media sosial menjadi alat pembentukan opini publik dan pengorganisasian gerakan di negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Yaman, Suriah, dan Libya. Tidak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, X kerap menjadi medan kontestasi politik, terutama saat pemilu berlangsung. Isu-isu politik dan sosial banyak dikonstruksi berdasarkan tagar atau topik yang sedang tren di X. Masing-masing kubu politik aktif menggunakan media sosial, termasuk Facebook, sebagai sarana kampanye karena dinilai efisien, cepat, dan menjangkau banyak orang. Interaksi publik berlangsung secara terbuka—dengan memberi komentar, rating, dan opini dalam ruang digital yang terus berkembang (Muqsith et al., 2019; Wulandari et al., 2019).

Namun, pesatnya pertukaran informasi di media sosial juga melahirkan tantangan baru. Kita tengah memasuki era yang disebut sebagai post-truth atau pasca-kebenaran—suatu masa ketika fakta dan kebenaran kerap dikesampingkan oleh emosi, opini, dan narasi yang viral. Dalam kondisi ini, siapa saja bisa menjadi penyebar informasi tanpa verifikasi. Maka, peran jurnalis dan media profesional menjadi sangat penting untuk membimbing arah informasi ke ranah yang lebih objektif, jujur, dan berimbang.

Dalam jangka panjang, dibutuhkan upaya kolektif untuk membangun budaya digital yang sehat—budaya siber yang mendorong partisipasi publik tanpa kehilangan nilai-nilai etis dan integritas informasi. Bila ini tercapai, media sosial bukan hanya menjadi arena konflik narasi, tetapi juga fondasi bagi lahirnya peradaban digital yang lebih cerdas dan adil (Ritonga & Syahputra, 2019).

2) Evolusi Media Baru dalam Konteks Ekonomi Politik Media

Menurut Vincent Mosco (2008), kapitalisme bekerja dengan cara mengakumulasi keuntungan melalui proses yang disebut komodifikasi, yaitu pengubahan nilai guna menjadi nilai tukar yang bernilai kapital. Dalam konteks media baru, komodifikasi ini muncul dalam berbagai bentuk yang berpengaruh pada kehidupan manusia modern.

Salah satu bentuk komodifikasi yang paling menonjol adalah terhadap konten media dan khalayak. Konten berita, yang terdiri atas gambar, tulisan,

dan ulasan, kini banyak diproduksi untuk menarik perhatian publik, bukan sekadar menyampaikan informasi. Tidak jarang, konten dibuat demi mengejar klik, menjadi viral, atau membangkitkan reaksi emosional, meskipun isinya belum tentu akurat atau objektif. Ini menjadikan isi media sebagai komoditas bernilai jual tinggi di mata pasar.

Lebih lanjut, khalayak atau pengguna media digital juga menjadi objek komodifikasi. Mereka dianggap sebagai aset penting yang dapat dimonetisasi oleh media. Setiap kunjungan ke situs, klik artikel, hingga waktu yang dihabiskan pengguna menjadi data yang sangat berharga. Media kemudian menjual akses terhadap khalayak ini kepada para pengiklan. Dengan demikian, khalayak tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga bagian dari produk yang diperdagangkan dalam ekosistem ekonomi digital. Oscar Gandy (dalam Fadillah, 2016, hlm. 155) melihat eksploitasi terhadap audiens dalam industri media dilakukan melalui dua cara.

Pertama, penonton atau pengguna diposisikan sebagai produk dari media itu sendiri. Dalam konteks ini, semakin banyak orang yang mengakses dan menghabiskan waktu di suatu situs atau portal media digital, maka semakin tinggi pula peringkat atau rating situs tersebut. Angka rating inilah yang kemudian menjadi “komoditas” yang dijual kepada para pengiklan. Artinya, pemilik media memperlakukan khalayak sebagai barang dagangan, yang nilainya ditentukan oleh seberapa banyak perhatian yang mereka berikan terhadap isi portal tersebut. Di titik ini, terbentuklah relasi pasar antara penyedia platform media dan pengiklan, di mana pemilik media menjual atensi pengguna sebagai produk.

Kedua, publik juga dilihat sebagai pekerja. Aktivitas seperti menjelajahi internet, membaca berita, dan melihat iklan bukanlah kegiatan santai semata, tetapi merupakan kontribusi produktif yang menciptakan nilai ekonomi. Dalam pandangan ini, menatap layar dan berinteraksi dengan konten digital menjadi semacam bentuk kerja digital tanpa bayaran. Pemilik media daring mengkonstruksikan audiens sebagai pekerja yang mendukung bisnis mereka melalui apa yang disebut ekonomi impresi dan ekonomi audiens. Portal berita digital hanya akan dianggap berhasil jika berhasil menarik banyak pengunjung. Sebaliknya, situs yang tidak memiliki lalu lintas pengunjung akan dianggap gagal dan tidak menarik bagi pasar iklan atau mirip seperti sekolah yang hanya dianggap sukses jika muridnya banyak, dan dianggap tidak favorit jika sepi peminat.

Industri media di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, tumbuh dan bergerak dalam kerangka sistem ekonomi kapitalis yang menempatkan keuntungan sebagai orientasi utama. Dalam sistem ini, terdapat sejumlah prinsip yang membentuk dinamika ekonomi media, antara lain:

- a) Struktur ekonomi dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik, hukum, dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Faktor-faktor inilah yang kemudian membentuk pola dan praktik kegiatan usaha media.
- b) Kapitalisme, sebagai sistem dominan, tidak hanya berdampak pada kegiatan ekonomi semata, tetapi juga memengaruhi kehidupan masyarakat dan tata kelola negara secara keseluruhan.
- c) Persoalan ekonomi dalam industri media tidak lepas dari upaya menjawab persoalan pokok terkait proses produksi dan distribusi konten, serta bagaimana konsumsi informasi itu terjadi di tengah masyarakat.
- d) Pemilik perusahaan media, dalam banyak kasus, memiliki kapasitas dan peluang untuk memainkan peran aktif di ranah politik. Hal ini karena media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan memengaruhi keputusan politik, sehingga tidak jarang pemilik media juga bersaing dalam kontestasi kekuasaan.

Dari sudut pandang ekonomi, para pemilik media cenderung mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, fungsi media yang semula diposisikan sebagai institusi sosial perlahan berubah menjadi lembaga ekonomi semata. Dalam konteks ini, media massa turut berperan sebagai penghubung antara sektor produksi dan konsumsi, sehingga mampu menciptakan surplus finansial.

Sayangnya, sangat sulit menemukan media yang sepenuhnya bebas dari pengaruh pasar maupun kekuatan politik, kecuali jika ada reformasi menyeluruh terhadap iklim media di Indonesia. Dalam lanskap ini, masyarakat kerap diposisikan ganda: sebagai objek yang dikendalikan sekaligus sebagai subjek yang dimobilisasi.

Model komunikasi yang tumbuh dari akar rumput sebenarnya lebih ideal dibanding sistem yang dikendalikan oleh pemerintah maupun pasar, karena dinilai lebih netral dan bebas dari konflik kepentingan. Saluran komunikasi yang berangkat dari masyarakat memungkinkan publik untuk menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa tekanan, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam proses pembentukan kebijakan publik.

Agar kanal-kanal ini bisa berkembang, masyarakat perlu diberdayakan untuk menyebarkan informasi faktual demi memperkuat literasi media. Namun dalam era dominasi komersialisasi media, negara perlu turun tangan dengan merumuskan kebijakan yang menutup kesenjangan baik dari sisi konten maupun kepemilikan media. Pemerintah juga dituntut untuk mengarahkan perkembangan teknologi informasi agar mampu menjembatani ketimpangan antara masyarakat yang melek informasi dan mereka yang tertinggal secara akses. Tanpa upaya sistematis seperti ini, partisipasi masyarakat yang hanya

berbasis pada limpahan informasi tidak akan cukup untuk meningkatkan kualitas demokrasi atau daya kritis publik.

Media sosial sebagai bentuk media baru juga mengalami proses komodifikasi. Dorongan dari pasar memengaruhi cara media sosial digunakan dalam ranah politik, mendorong pertumbuhan pengguna, dan membentuk budaya politik dalam negara yang telah mengalami reformasi. Komodifikasi platform ini dalam konteks politik dapat dilihat sebagai akibat alami dari perubahan sistem ekonomi, sosial, dan politik. Media sosial memungkinkan konten politik dikemas sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, didanai oleh politisi, dikonsumsi dan diproduksi oleh pemilih, serta dikelola oleh praktisi atau pelaku bisnis media sosial. (Fadillah, Dani; Lin, 2019, hlm. 1-8).

Namun, kehadiran media sosial juga berisiko merusak integritas isi dari media arus utama, karena penyebaran informasi menjadi sulit dikendalikan. Di Indonesia, fenomena ini kian mencolok, terutama karena pemerintah seolah membiarkan arus informasi berjalan bebas tanpa filter yang ketat. Bahkan sejumlah elit politik turut memanfaatkan platform ini dengan mengorganisasi dan memelihara *buzzer* politik. Padahal, hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai bentuk partisipasi publik yang sehat dalam demokrasi.

Yang menarik untuk dicermati adalah keterlibatan para pemilik media baru yang juga memiliki peran dalam dunia politik nasional. Misalnya, Surya Paloh yang memiliki Metro TV juga merupakan Ketua Umum Partai NasDem. TV One dimiliki oleh keluarga Bakrie, dengan Aburizal Bakrie sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus penasihat partai tersebut. Kedua stasiun ini—Metro TV dan TV One—merupakan saluran berita terbesar di Indonesia, dan karena itu memiliki pengaruh besar terhadap opini publik.

Pada pemilihan umum 2014 dan 2019, keberpihakan media dalam praktik politik terlihat nyata. Alih-alih menjadi kanal informasi yang netral, media justru menjadi alat untuk mendukung pasangan calon tertentu. TV One, ANTV, dan Viva News—yang berada di bawah kendali keluarga Bakrie—memberikan dukungan terbuka kepada pasangan Prabowo-Hatta. Di sisi lain, Metro TV dan Media Indonesia—milik Surya Paloh—secara terbuka mendukung pasangan Jokowi-JK. Grup media milik Hary Tanoesoedibjo seperti RCTI, Global TV, dan MNC TV juga memberikan dukungan terhadap Prabowo-Hatta, sementara grup media Jawa Pos mendukung Jokowi-JK, sejalan dengan sikap politik pemiliknya, Dahlan Iskan.

Ada juga media yang memberikan dukungan secara lebih halus atau tidak terang-terangan, seperti kelompok Tempo dan Kompas, yang cenderung berpihak pada Jokowi. Hal ini bisa dikenali dari narasi dan isi pemberitaan yang mereka sajikan.

Komodifikasi, menurut Karl Marx, merupakan proses yang telah diambil alih oleh kelas borjuis. Secara singkat, kelas borjuis mengubah nilai-nilai

kemanusiaan menjadi nilai ekonomi dan menyamakannya dalam kerangka kapitalis.

Perbedaan yang seharusnya menjadi warna kehidupan sehari-hari justru diseragamkan (Beilharz, 2005, hlm. 275). Marx lebih jauh menjelaskan bahwa berbagai unsur dalam berita dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi yang tinggi. Salah satu aspek informasi yang menjadi objek komodifikasi adalah bagaimana masyarakat memandang proyek *Belt and Road Initiative* (BRI).

Kapitalisasi dalam konteks ekonomi politik kini juga telah merambah ke media sosial. Namun, bentuk kapitalisasi di media sosial berbeda dari yang terjadi di televisi, radio, media daring, maupun surat kabar. Platform seperti X dan Facebook sering kali dikapitalisasi untuk kepentingan politik dan perebutan kekuasaan. Contoh paling mencolok terlihat pada peristiwa Arab Spring, pemilu di Amerika Serikat, dan berbagai isu global lainnya (Lim, 2013). Bahkan di AS, terjadi skandal besar ketika data publik dalam jumlah besar dijual dan dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica demi memenangkan Donald Trump dalam pemilu. Skandal ini mencederai citra negara yang selama ini menjunjung tinggi demokrasi.

Di Indonesia, X dan Facebook menjadi arena perebutan pengaruh politik. Banyak akun otomatis (bot) diciptakan untuk membentuk persepsi publik. Para politisi mulai menyadari bahwa dominasi di media sosial menjadi faktor penting dalam memenangkan kontestasi pemilu. Tahun 2014 menjadi titik balik, di mana opini publik di media sosial turut membentuk citra dan karakter Joko Widodo secara signifikan. Penggunaan masif media sosial dan media arus utama seperti televisi dan surat kabar turut mengantarkan tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak dikenal publik menjadi figur dengan popularitas dan elektabilitas yang tinggi.

Arah perkembangan ekonomi politik media sosial semakin mengarah pada praktik komodifikasi. Jika televisi mengukur dampak melalui rating penonton, maka media sosial mengandalkan jumlah subscribers, followers, komentar, dan retweet sebagai tolok ukur. Angka-angka ini kemudian dijadikan alat tawar dalam dunia politik dan ekonomi. Tidak sedikit artis yang menerima pesanan untuk mengiklankan produk tertentu sebagai bentuk promosi. Hal serupa dilakukan para politisi, yang kerap menggunakan jasa influencer atau figur publik populer untuk menaikkan elektabilitas mereka di dunia politik. Bahkan, tidak jarang pula media sosial digunakan untuk menyerang lawan politik mereka.

Narasi *Belt and Road Initiative* (BRI) dalam Media Baru Indonesia

1) BRI dan peningkatan kerjasama ekonomi

Saat dilakukan pencarian dengan kata kunci “narasi ekonomi proyek BRI Tiongkok di Indonesia” di mesin pencari Google, muncul lebih dari 300.000 hasil artikel dan berita. Isu yang diangkat pun beragam—dari penjabaran umum tentang proyek BRI, aspek konektivitas, hingga manfaat ekonomi yang diklaim telah dirasakan selama implementasi proyek ini. Di sisi lain, diskursus yang lebih spesifik juga muncul, seperti isu utang luar negeri, pekerja, strategi geopolitik kawasan, hingga dampaknya terhadap lingkungan hidup.

Dalam konteks ASEAN, Indonesia termasuk negara yang mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan infrastruktur, meskipun sebelumnya tertinggal dibanding negara seperti Singapura atau Malaysia. Pembangunan selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa, karena sebagian besar penduduk Indonesia—lebih dari 50%—bermukim di wilayah tersebut. Namun, pendekatan ini justru belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi ekonomi nasional dan mempercepat eksploitasi sumber daya alam di luar Jawa.

Pemerintah menanggapi ketimpangan tersebut melalui inisiatif seperti program tol laut, yang bertujuan menyebarkan manfaat pembangunan secara lebih merata dan menurunkan kesenjangan harga barang antarwilayah. Implementasi *Belt and Road Initiative* (BRI) dipandang membawa dampak positif, baik secara sosial maupun ekonomi, karena berfokus pada pembangunan infrastruktur skala besar. Proyek ini juga memperkuat konektivitas antarnegara dalam hal arus barang dan jasa.

Menutup diri dari keterlibatan dalam proyek ini justru dapat merugikan Indonesia, karena akan kehilangan peluang untuk naik kelas menjadi negara maju. Selama ini, banyak peluang strategis yang tidak berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia. (Kusdarjito, 2019, hlm. 42–47).

Salah satu isu yang mencuat dalam pemberitaan proyek BRI di Indonesia adalah masalah neraca perdagangan Indonesia–Tiongkok yang selama beberapa tahun terakhir mengalami defisit. Ketimpangan ini menjadi perhatian karena kehadiran investor Tiongkok dalam proyek-proyek BRI dinilai berpotensi memperbesar angka impor dari Tiongkok.

Hal ini didasari oleh kecenderungan penggunaan komponen, peralatan, dan suku cadang dari Tiongkok dalam berbagai proyek infrastruktur. Pertama, terlepas dari asal sumber pembiayaannya, pembangunan infrastruktur di Indonesia hampir pasti akan mendorong peningkatan impor, sebab, mayoritas komponen vital masih harus diimpor. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperlebar defisit neraca perdagangan Indonesia dan memberikan tekanan terhadap ekonomi nasional.

Kedua, neraca perdagangan semestinya tidak dilihat secara parsial hanya pada relasi Indonesia–Tiongkok, melainkan sebagai bagian dari keseimbangan perdagangan global secara keseluruhan. Peningkatan kualitas infrastruktur, meskipun pada awalnya menyebabkan lonjakan impor, berpotensi mendorong daya saing nasional dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya efisiensi logistik dan konektivitas, kinerja ekspor Indonesia bisa mengalami perbaikan.

Namun demikian, risiko lainnya adalah ketergantungan berlebih terhadap teknologi dari satu negara. Untuk menghindari kerentanan tersebut, Indonesia perlu mengambil langkah strategis untuk mendiversifikasi sumber teknologi. Ini bisa ditempuh dengan memperkuat pendanaan riset nasional dan menjalin kerja sama dengan negara lain yang memiliki kapasitas teknologi tinggi serta terbuka pada transfer pengetahuan.

Di sisi lain, publik dan para pakar juga menyoroti potensi beban fiskal akibat pembiayaan masif proyek infrastruktur di bawah skema BRI. Dalam tiga tahun terakhir, utang pemerintah Indonesia tercatat mengalami peningkatan lebih dari 40 persen. Laju pembangunan infrastruktur yang agresif dinilai menimbulkan kekhawatiran terhadap kapasitas pemerintah dalam mengelola risiko fiskal secara berkelanjutan. Kritik terhadap kebijakan ini banyak datang dari kalangan ekonom dan pengamat keuangan negara. (Damuri et al., 2019, hlm. 1–40).

Sejumlah kalangan menyuarakan kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia dalam proyek BRI dapat menjerumuskan negara ke dalam jeratan utang. Kekhawatiran tersebut tidak muncul tanpa alasan. Masyarakat khawatir apabila Indonesia gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada Tiongkok, maka Tiongkok akan mengambil alih infrastruktur strategis Indonesia—sebagaimana yang terjadi dalam kasus Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka.

Memang, Indonesia memiliki defisit perdagangan dengan Tiongkok, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah utang Indonesia kepada Jepang, utang ke Tiongkok relatif kecil. Sampai tahun 2018, nilai pinjaman Indonesia dari Tiongkok tercatat sebesar US\$ 1.592 juta. Sementara itu, utang kepada Jepang pada periode yang sama mencapai US\$ 12.908 juta, atau delapan kali lebih besar dibanding utang dari Tiongkok. (玥, 2017).

Selain itu, kondisi Sri Lanka dan Indonesia berbeda secara fundamental. Rasio utang Sri Lanka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 77,6%, sementara Indonesia hanya sekitar 30%, jauh lebih rendah dan masih dalam batas aman. Di samping itu, sebagian besar kesepakatan pinjaman antara Indonesia dan Tiongkok berbentuk kerja sama antarperusahaan (*business-to-business*), bukan antarnegara (*government-to-government*). Skema ini melibatkan perusahaan swasta dan BUMN, sehingga jika terjadi kegagalan pembayaran, tidak langsung membebani keuangan negara.

Meskipun terdapat tantangan dalam hubungan ekonomi kedua negara, penting untuk melihat kerja sama Indonesia dan Tiongkok dalam BRI secara objektif dan menyeluruh. Sayangnya, isu utang dan investasi dari Tiongkok kerap kali dipolitisasi dan dibesar-besarkan, sehingga menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Jika terus dibiarkan, wacana yang penuh bias ini justru dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia, tentu saja, tidak menerima begitu saja semua tawaran kerja sama tanpa perhitungan. Pertimbangan untung-rugi selalu dilakukan secara matang. Untuk itu, pemerintah memilih pendekatan yang saling menguntungkan, yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara Indonesia dan Tiongkok. Sebagai tambahan, model kerja sama yang digunakan adalah skema *Business to Business*, bukan *Government to Government*. Dengan begitu, anggaran negara tetap terlindungi dan tidak terbebani langsung oleh proyek-proyek kerja sama tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kekhawatiran publik terhadap potensi jebakan utang dalam proyek BRI. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, namun pemerintah meyakinkan bahwa skema kerja sama yang diterapkan telah dirancang agar tidak membebani anggaran negara secara langsung. (Khairani et al., 2019, hlm. 295-310).

Di sisi lain, kehadiran BRI justru membawa potensi keuntungan bagi Indonesia, terutama dalam pengembangan infrastruktur maritim. Tiongkok menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan finansial dan teknis dalam proyek-proyek strategis tersebut. Dalam berbagai pemberitaan disebutkan bahwa Tiongkok siap membangun sinergi melalui komunikasi dan koordinasi intensif dengan Indonesia, bahkan terbuka untuk kerja sama trilateral dengan negara lain guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Apabila proyek ini dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan domestik dan kerja sama internasional, maka integrasi kawasan Indo-Pasifik dapat semakin diperkuat. (Kosandi, 2014, hlm. 875-883).

Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia secara historis berada di jalur sutra maritim kuno dan mengklaim dirinya sebagai poros maritim dunia. Posisi strategis Indonesia di antara Samudra Hindia dan Pasifik membuka peluang besar untuk menjadi kekuatan utama di kawasan Indo-Pasifik. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk tidak melihat proyek Jalur Sutra Maritim dalam skema BRI sebagai ancaman terhadap ambisi nasional, melainkan sebagai peluang untuk bersinergi dan memperkuat posisi strategis negara. (De Jaegher, 2015).

Namun, sinergi ini memerlukan kesiapan dari dalam negeri. Pemerintah harus menyelesaikan persoalan konektivitas antarwilayah di dalam negeri terlebih dahulu, seperti memperkuat tol laut yang menghubungkan pulau-

pulau di nusantara. Ketika persoalan konektivitas domestik ini teratasi, maka kolaborasi dengan BRI dalam jalur sutra maritim akan lebih efektif dan menguntungkan. Ketersambungan yang baik di tingkat nasional akan memperlancar integrasi dengan jaringan perdagangan dan logistik global. Untuk itu, pembangunan dan modernisasi pelabuhan serta pengembangan industri perkapalan di berbagai daerah menjadi kebutuhan yang mendesak. (Marnani, Sri. Rumambi et al., 2016, hlm. 53-70).

Investasi dalam infrastruktur pelabuhan diperkirakan memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi kawasan pesisir Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh berbagai studi dan pendekatan teoretis kontemporer mengenai peran kota pelabuhan dalam mendorong pembangunan ekonomi regional.

Sebuah riset terbaru mengungkapkan adanya hubungan erat antara aktivitas pelabuhan dan laju pertumbuhan ekonomi di berbagai kota di Indonesia. Data yang dikumpulkan antara tahun 2001 hingga 2010 dari 56 kota menyimpulkan bahwa kota-kota yang memiliki pelabuhan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan kota yang tidak memiliki pelabuhan, dengan rasio pertumbuhan mencapai 3:1. Pelabuhan menjadi sumber utama peningkatan aktivitas ekonomi, mobilitas sosial, serta perdagangan antardaerah maupun internasional.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai dan kota pesisir dalam jumlah besar, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan pelabuhan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, proyek-proyek BRI yang berfokus pada pembangunan pelabuhan bisa dimanfaatkan secara strategis oleh Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonominya melalui pengembangan kota-kota pelabuhan baru yang tersebar di berbagai wilayah. (Lovina et al., 2017, hlm. 161-177).

2) Hubungan Naratif BRI dengan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Ketika masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir pada tahun 2014, inisiatif BRI yang baru saja diluncurkan belum mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh sifat kepemimpinan SBY yang cenderung berhati-hati dan menghindari kontroversi di tengah masyarakat. Dampaknya, pembangunan di era tersebut berjalan secara moderat dan belum mencapai skala besar.

Sebaliknya, ketika Joko Widodo (Jokowi) mulai menjabat sebagai presiden, arah kebijakan berubah drastis. Pemerintahannya memperlihatkan komitmen besar terhadap pembangunan infrastruktur berskala nasional. Salah satu langkah yang menonjol adalah mempererat hubungan dengan Tiongkok melalui kerja sama dalam proyek BRI. Namun demikian, pemerintahan Jokowi

tetap perlu mencermati sejumlah hal yang bisa menjadi potensi penghambat hubungan bilateral ini.

Isu strategis yang patut diwaspadai adalah sektor pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, “pertahanan” merujuk pada potensi ancaman dari luar negeri, sementara “keamanan” lebih mengacu pada kondisi dan potensi gangguan dari dalam negeri. Kedua aspek ini harus dikelola dengan baik agar pelaksanaan proyek BRI tidak terganggu oleh ketegangan politik atau instabilitas sosial.

Rute pelayaran yang dipublikasikan oleh pemerintah Tiongkok dalam konteks Jalur Sutra Maritim Modern mencakup sejumlah wilayah strategis di Indonesia. Titik-titik penting yang masuk dalam rute ini berpotensi memberikan dampak langsung terhadap aspek pertahanan dan keamanan maritim nasional. Di antaranya adalah wilayah kedaulatan di sekitar Kepulauan Natuna, jalur pelayaran strategis di perairan Indonesia seperti Selat Malaka, serta dinamika ketegangan yang terus berkembang di kawasan Laut Cina Selatan.

Jalur perdagangan laut saat ini memainkan peran vital dalam sistem ekonomi global. Komoditas utama seperti minyak dan gas, produk pangan, bahan mentah, hingga barang konsumsi, sebagian besar didistribusikan melalui transportasi laut. Tren ini merupakan konsekuensi dari globalisasi yang mempercepat arus barang dan manusia lintas negara melalui perairan internasional.

Dalam konteks tersebut, penguatan sistem keamanan laut menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Maraknya ancaman keamanan di kawasan Indo-Pasifik menuntut adanya sistem pertahanan maritim yang lebih terintegrasi. Oleh karena itu, sinergi antara visi Poros Maritim Dunia milik Indonesia dan proyek BRI milik Tiongkok sangat penting untuk diwujudkan. Tujuannya adalah menciptakan sistem keamanan laut yang dapat mengantisipasi berbagai ancaman, seperti penyelundupan, perompakan, praktik illegal fishing, hingga bencana alam.

Sistem keamanan yang ideal semestinya melibatkan negara-negara yang memiliki kepentingan strategis di wilayah laut tersebut. Karena proyek Jalur Sutra Maritim BRI akan meningkatkan frekuensi pelayaran kapal di Selat Malaka, maka permintaan atas berbagai barang dan jasa di jalur ini juga akan meningkat. Konsekuensinya, Tiongkok dan negara-negara mitra perlu bekerja sama dalam pengembangan pelabuhan, infrastruktur pelayaran, dan fasilitas pendukung lainnya di sepanjang rute perdagangan maritim tersebut. (Dai, 2020; Fitriani, 2018; Kusdarjito, 2019; Minghao, 2015; Van Alphen, 2015; Zhixin, 2018).

Sejumlah persoalan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan hingga kini memang belum sepenuhnya terselesaikan. Meski begitu, situasi mulai membaik seiring adanya kemajuan dalam proses

dialog dan penyelesaian sengketa. Tiongkok sendiri memperlihatkan sikap terbuka terhadap inisiatif ASEAN mengenai penerapan *Code of Conduct* (Kode Etik) sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan. Kesadaran akan pentingnya keamanan regional menjadi kepentingan bersama, terutama bagi Tiongkok, mengingat Laut Cina Selatan merupakan jalur strategis yang mendukung keberlangsungan proyek BRI di kawasan Asia-Pasifik (Damuri et al., 2019; De Castro, 2016).

Ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan suatu negara tidak hanya bersumber dari luar negeri, tetapi juga dapat muncul dari dalam negeri sendiri—dan justru sering kali lebih nyata. Berbagai konflik dan ketegangan sosial dapat terjadi karena perbedaan pandangan, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi melalui media sosial, serta dampak dari pelaksanaan proyek BRI. Informasi yang menyebar dengan cepat di media sosial sering kali berasal dari sumber yang tidak jelas dan sulit diverifikasi kebenarannya. Isu-isu yang berkaitan dengan distribusi manfaat ekonomi yang dianggap tidak adil, konflik agraria akibat pengambilalihan lahan tanpa kompensasi layak, masalah ketenagakerjaan, hingga kerusakan lingkungan seperti degradasi lahan pertanian, hutan, dan perairan dapat memicu keresahan masyarakat. Lebih jauh lagi, narasi terkait jebakan utang atau defisit neraca perdagangan bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik, yang pada akhirnya memperbesar potensi instabilitas sosial (Kusdarjito, 2019, hlm. 42–47).

Proyek kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok diprediksi akan semakin signifikan ke depannya. Indonesia menghadapi keterbatasan dalam hal pendanaan dan teknologi guna menunjang pembangunan infrastrukturnya. Sementara itu, Tiongkok memiliki keunggulan dalam aspek pendanaan dan teknologi. Oleh karena itu, kolaborasi antara keduanya menciptakan bentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).

Meskipun tidak semua inisiatif yang ditawarkan melalui proyek BRI sepenuhnya sejalan dengan prioritas nasional Indonesia, namun dalam kondisi tertentu, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menerimanya sebagai sumber pembiayaan yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional (Negara, 2020, hlm. 1–41). Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kelompok kepentingan di dalam negeri yang memandang proyek BRI dengan kecurigaan atau sikap negatif terhadap Tiongkok. Kelompok ini umumnya terdiri dari pihak oposisi, termasuk pemimpin beberapa organisasi keagamaan Islam, kalangan akademisi, pensiunan perwira tinggi militer, mantan pejabat negara, serta kaum intelektual.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa BRI membuka peluang ekonomi strategis dengan cara memanfaatkan investasi Tiongkok secara optimal. Sebaliknya, bagi Tiongkok, fokus utamanya adalah mendorong perluasan perdagangan serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam konteks

ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah, elite politik, media utama, dan para tokoh masyarakat untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada publik. Dengan demikian, masyarakat memperoleh pemahaman yang jernih, yang pada akhirnya mendukung terciptanya ketenangan sosial, stabilitas, dan keamanan politik nasional.

Ringkasan

Jumlah penduduk di dunia sangat besar dan tersebar luas, dipisahkan oleh berbagai latar belakang seperti etnis, bangsa, budaya, dan agama. Selain itu, perbedaan ideologi dan struktur negara juga turut memperkuat sekat-sekat antarmanusia. Melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok berupaya menciptakan konektivitas global yang lebih efisien dan mudah diakses. Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

Pertama, relasi antara Indonesia dan Tiongkok bukanlah hal yang baru. Hubungan ini telah berlangsung selama berabad-abad, jauh sebelum era modern dimulai. Sejak zaman dahulu, para pedagang Tiongkok telah datang dan bermukim di Nusantara, hingga kemudian menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Populasi keturunan Tionghoa di Indonesia kini mewakili lebih dari 2% dari total penduduk. Jejak diplomasi antara kedua bangsa juga dapat dilihat melalui tokoh-tokoh sejarah seperti Laksamana Cheng Ho yang mengunjungi Nusantara sebagai utusan dari kekaisaran Tiongkok. Fakta ini menggambarkan bahwa hubungan antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok telah terjalin erat dan harmonis sejak masa lampau.

Kedua, implementasi proyek BRI di Indonesia membawa harapan baru, terutama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi angka pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pencapaian pembangunan yang terlihat, seperti bertambahnya panjang jalan tol dari hanya sekitar 300 km menjadi hampir 2.000 km, serta pembangunan dan revitalisasi bandara dan pelabuhan, mengindikasikan kemajuan signifikan yang mungkin sulit dicapai tanpa adanya kerja sama strategis melalui skema seperti BRI. Hal ini menjadi refleksi penting: kapan lagi Indonesia dapat membangun infrastruktur dalam skala sebesar dan secepat ini tanpa kolaborasi global?

Ketiga, peran media, baik yang bersifat konvensional maupun digital, sejatinya adalah menyampaikan informasi yang benar dan membangun kesadaran publik. Namun, dalam praktiknya, banyak media massa—terutama televisi dan surat kabar—berada dalam kendali segelintir elit. Para pemilik media ini umumnya adalah aktor politik, pejabat publik, atau kelompok pemodal besar, sehingga independensi pemberitaannya sering kali dipertanyakan.

Harapan akan adanya ruang informasi yang lebih netral dan demokratis pun kemudian dialihkan ke media sosial.

Sayangnya, ekspektasi itu tidak sepenuhnya terpenuhi. Media sosial, yang awalnya dianggap sebagai saluran bebas dan merdeka, ternyata juga tidak luput dari pengaruh kekuasaan. Di dalamnya tumbuh subur praktik manipulasi opini publik melalui kehadiran *buzzer* yang disponsori oleh kelompok oligarki untuk membentuk narasi tertentu.

Sementara itu, masyarakat umum turut aktif memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan pandangan mereka. Namun, rendahnya literasi digital di sebagian kalangan membuat ruang digital justru dipenuhi informasi yang menyesatkan, provokasi, dan ujaran kebencian. Hal ini terutama terlihat pada kelompok yang berada di luar lingkaran kekuasaan—mereka yang menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kerja sama dengan Tiongkok dalam proyek BRI, sering kali disampaikan secara bias dan emosional. Bahkan tidak jarang, bantuan dari negara lain yang seharusnya dilihat sebagai peluang pembangunan justru dicurigai sebagai bentuk kolonialisme baru atau eksploitasi sumber daya nasional.

BAGIAN 3

Menelaah Fungsi Media Sosial dalam Jaringan BRI

Pandemi Covid-19 telah mengubah wajah dunia secara drastis. Aktivitas yang sebelumnya menjadi penggerak utama roda perekonomian—seperti perjalanan wisata, acara olahraga, dan perdagangan ritel—terpaksa berhenti. Hotel-hotel ditutup, pusat perbelanjaan gulung tikar, dan maskapai penerbangan mengalami kerugian besar. Semua itu adalah gambaran konkret bagaimana mobilitas fisik manusia yang selama ini dianggap tidak tergantikan, tiba-tiba lumpuh oleh krisis kesehatan global.

Namun di balik krisis tersebut, muncul sinyal penting tentang masa depan: ketika konektivitas fisik melemah, maka konektivitas digital justru menemukan momentumnya. Di sinilah peran Jalur Sutra Digital (*Digital Silk Road*) menjadi semakin relevan. Ketika dunia menahan napas menghadapi pembatasan fisik, transformasi digital melaju pesat melampaui batas-batas geografis. Globalisasi dalam bentuk fisik mungkin surut, tetapi globalisasi digital justru tumbuh dan menantang batas-batas lama dengan cara baru. (Buckley, 2020)

Fenomena ini mengingatkan kita bahwa dunia kini memang “datar”—sebagaimana digambarkan oleh Thomas Friedman—karena arus informasi mengalir begitu cepat dari satu belahan dunia ke belahan lainnya. Di balik kecepatan itu, berdiri infrastruktur digital yang menopangnya. Sayangnya, infrastruktur ini belum tersebar merata. Di banyak wilayah, kesenjangan akses internet masih menjadi tantangan utama.

Di sinilah letak pentingnya proyek Jalur Sutra Digital dalam kerangka Inisiatif Belt and Road (BRI). Dengan mengedepankan investasi dalam teknologi informasi, banyak perusahaan asal Tiongkok mulai membangun jaringan digital di negara-negara yang sebelumnya tertinggal secara teknologi. Upaya

ini tidak hanya soal pembangunan fisik seperti kabel optik atau menara BTS, melainkan juga tentang membentuk cara baru dalam membangun realitas sosial—dunia yang terkoneksi secara digital. (Deqiang, Ji dan Zhengrong, 2018; Mensah & Jianing, 2016; H. Shen, 2018).

Salah satu bentuk konstruksi realitas sosial baru yang ingin diwujudkan dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) adalah lahirnya Jalur Sutra Digital, yang diperkenalkan secara resmi pada tahun 2015. Inisiatif ini berupaya mentransformasi cara barang, jasa, nilai-nilai budaya, dan ekonomi bergerak—dari yang semula bersifat fisik menjadi berbasis teknologi digital. Dalam kerangka ini, setiap negara yang terlibat dalam BRI didorong untuk mengutamakan pembangunan berbasis inovasi. Hal ini mencakup kolaborasi yang lebih intens di bidang kecerdasan buatan (AI), nanoteknologi, dan komputasi kuantum, serta pemanfaatan teknologi seperti *big data*, *cloud computing*, dan pembangunan kota pintar—sehingga seluruh sistem bergerak menuju digitalisasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, penting bagi negara-negara peserta BRI membangun jaringan transfer teknologi dan mengembangkan inovasi bersama di tingkat kawasan. Dalam hal ini, peran kekayaan intelektual sangat krusial untuk mendorong percepatan pertumbuhan inovatif. Oleh karena itu, setiap negara diminta tidak hanya menghormati hak kekayaan intelektual, tetapi juga menjaganya, memanfaatkannya dengan bijak, dan mengembangkan sistem perlindungan yang kuat terhadap hasil-hasil inovasi tersebut.

Tiongkok saat ini menjadi negara yang paling siap menyambut era Jalur Sutra Digital, baik dari sisi infrastruktur, kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, maupun pengaruh geopolitiknya. Para ilmuwan dan pengamat internasional pun telah mengajukan beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh dalam proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) di bidang teknologi informasi.

Pertama, membangun Jalur Sutra Digital sebagai infrastruktur utama untuk mendukung ekspansi perusahaan-perusahaan Tiongkok ke pasar global. Selain sebagai penggerak konektivitas digital, jalur ini juga diharapkan dapat membantu Tiongkok memasarkan kelebihan produksi bajanya ke berbagai negara. Perlu dicatat, baja merupakan salah satu komponen vital dalam pembangunan infrastruktur digital ini.

Kedua, percepatan internasionalisasi mata uang Renminbi. Melalui keterlibatan banyak negara dalam proyek BRI, Tiongkok melihat peluang untuk menguatkan posisi Renminbi dalam transaksi perdagangan global—yang selama ini masih didominasi oleh dolar Amerika dan euro. Bahkan, Tiongkok mulai menggagas pembentukan lembaga keuangan baru sebagai alternatif terhadap dominasi lembaga-lembaga seperti Bank Dunia atau IMF yang berbasis di Barat.

Ketiga, membangun jaringan infrastruktur internet global yang terpusat di Tiongkok. Selain untuk kepentingan bisnis dan keamanan data, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas pengaruh geopolitik. Saat ini, infrastruktur internet global masih terkonsentrasi di negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang memicu kekhawatiran banyak negara terkait keamanan data dan kedaulatan digital.

Keempat, dimensi ideologis dari Jalur Sutra Digital juga tidak kalah penting, yakni penguatan narasi tentang “globalisasi inklusif”. Konsep ini dimaksudkan sebagai tandingan atas model globalisasi dominan yang cenderung eksklusif dan berpihak pada kekuatan-kekuatan besar tertentu.

Lebih jauh, seorang ilmuwan, Wenshan Jia pada tahun 2009 pernah mengusulkan konsep yang disebut Chiglobalization. Menurutnya, selama ini narasi globalisasi selalu datang dari Barat, terutama Eropa dan Amerika. Chiglobalization adalah tawaran arah baru: sebuah globalisasi alternatif yang muncul dari Timur, dengan karakter khas Tiongkok. Gagasan ini sejalan dengan visi besar Presiden Xi Jinping sejak 2013, yakni mewujudkan Impian Tiongkok melalui Inisiatif Belt and Road.

Namun, kritik juga bermunculan. Banyak pakar menilai bahwa proposal mengenai Jalur Sutra Digital dan Chiglobalization terlalu berat sebelah karena lebih mencerminkan kepentingan nasional Tiongkok ketimbang semangat kerja sama multilateral. Tantangan ke depan adalah bagaimana diplomasi antarnegara mampu menghadirkan kritik yang konstruktif terhadap gagasan tersebut—agar dunia tidak sekadar bergeser dari satu dominasi global (Barat) ke dominasi global lainnya (Tiongkok) dengan tampilan baru.

Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan proyek Jalur Sutra Digital adalah belum meratanya infrastruktur internet dan media baru di berbagai negara yang terlibat dalam Inisiatif Belt and Road (BRI). Ketimpangan ini menjadi kendala yang signifikan dalam percepatan transformasi digital lintas negara. Selain itu, pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah mengubah pola hidup masyarakat secara drastis. Pembatasan mobilitas fisik memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk interaksi sosial, aktivitas ekonomi, hingga pendidikan.

Dalam situasi tersebut, gagasan Jalur Sutra Digital menjadi semakin relevan. Meski wacana ini telah diperkenalkan sebelum pandemi berlangsung, kebutuhannya kini semakin mendesak. Jalur Sutra Digital diharapkan mampu menjadi jawaban atas perubahan zaman dengan menawarkan konektivitas virtual sebagai alternatif dari interaksi fisik yang terbatas.

Epistemologi *Inisiatif Belt and Road* sebagai Wacana Kritis Media Sosial

Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa wacana mengenai *proyek Inisiatif Belt and Road* (BRI) kerap berfokus pada aspek ekonomi (Finance, 2018; Johnson, 2016; Villafuerte et al., 2016; 韩永辉, 韦东明, 2021). Meskipun pendekatan ini tidak sepenuhnya keliru, namun juga tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan dimensi BRI. Proyek ini sejatinya mencakup lebih dari sekadar kerja sama ekonomi. Terdapat berbagai aspek lain yang turut menjadi bagian dari inisiatif ini, antara lain pertukaran budaya, kerja sama di bidang pendidikan, mobilitas manusia, serta isu-isu lingkungan hidup (Solmecke, 2016, hlm. 9–27).

Dalam kajiannya, Sun menemukan bahwa topik yang berkaitan dengan BRI terbagi ke dalam beberapa kategori utama: politik (19,4%), ekonomi (35,5%), budaya (12,9%), dan kategori lainnya sebesar 32,2%. Sementara itu, Li dan Zhang mencatat bahwa isu-isu kebijakan menempati proporsi 35%. Apabila kategori fasilitas, perdagangan, dan keuangan digabungkan, maka cakupan isu ekonomi secara keseluruhan meningkat hingga mencapai 43%. Meski hasil kedua penelitian ini tidak identik, keduanya mengindikasikan bahwa dimensi ekonomi tetap menjadi aspek dominan dalam pembahasan mengenai proyek BRI (Chen, 2018, hlm. 1–102).

Proyeksi dan porsi pemberitaan media terhadap Inisiatif Belt and Road (BRI) juga dapat diamati melalui berbagai platform media baru. Jika kita menelusuri istilah “Belt Road Initiative” atau “One Belt One Road” di Google, hasil pencarian umumnya menyoroti proyek-proyek infrastruktur yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, studi kasus di Albania mengungkapkan bahwa media massa di negara tersebut cenderung mengutamakan pemberitaan seputar aspek finansial dalam kerangka kerja sama BRI. Sementara itu, liputan mengenai kerja sama kebudayaan antara Tiongkok dan Albania, pembangunan sosial, isu politik, olahraga, informasi umum tentang Tiongkok, pendidikan, maupun sejarah, hanya mendapat porsi perhatian yang jauh lebih kecil.

Media-media swasta di Albania umumnya berfokus pada sisi ekonomi BRI, seperti terlihat pada proporsi pemberitaan di Shekulli (53%), Dita (50%), Shqiptarja (64%), Panorama (50%), Telegraph (44%), dan Javanews (59%). Namun demikian, media seperti Shqiptarja, Javanews, dan Telegraph juga turut mengangkat isu-isu budaya dan politik. Berbeda halnya dengan media Amerika seperti Voice of America (VOA) yang cenderung menyoroti dimensi politik BRI. Di sisi lain, media-media dari Tiongkok sendiri menempatkan fokus utama pada aspek ekonomi (43%) dan pembangunan (21%) dari inisiatif tersebut (Sylaj, 2020, hlm. 1–18).

Banyak kajian akademik dan telaah telah dilakukan untuk membandingkan proporsi pemberitaan media massa terkait proyek Inisiatif Belt and Road (BRI). Sebagian besar temuan mengindikasikan bahwa media cenderung memberi penekanan lebih besar pada dimensi ekonomi dibandingkan aspek-aspek lainnya. Isu politik umumnya berada di posisi kedua, kemudian diikuti oleh topik-topik seperti kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Padahal, terdapat dimensi lain yang tidak kalah penting dan bahkan memiliki prospek menjanjikan dalam kerangka BRI, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan media baru. Kedua aspek ini membuka peluang besar bagi penguatan konektivitas digital dan mendorong inovasi lintas negara, khususnya dalam konteks globalisasi yang semakin berbasis teknologi.

Belt and Road Initiative (BRI) antara Media Baru dan Dunia Maya

Inisiatif Belt and Road (BRI) kerap dipandang oleh para ekonom, pengamat, serta lembaga keuangan sebagai wajah baru dari hegemoni ekonomi global yang berpotensi memperkuat dominasi kelompok oligarki finansial. Meski poros globalisasi mulai bergeser dari Barat ke Timur, esensinya dianggap tetap sama, yang berubah hanyalah kemasannya.

Namun demikian, BRI juga menyimpan peluang sebagai terobosan untuk mengatasi dominasi tersebut. Secara khusus, BRI dapat dimanfaatkan oleh media baru untuk memperluas ruang dialog lintas budaya dan lintas peradaban—baik antar etnis, antaragama, maupun antarbangsa. Terdapat setidaknya tiga alasan utama yang mendukung hal ini.

Pertama, hadirnya saluran multimedia yang bersifat konvergen melalui Jalur Sutra Digital. Platform ini memungkinkan integrasi antara teks, gambar, dan materi audiovisual yang dapat diproduksi, disunting, disebarluaskan, dan dikonsumsi secara cepat melalui komputer maupun perangkat seluler. Popularitas konten audiovisual di media sosial dan aplikasi daring menggambarkan kecenderungan baru dalam pola konsumsi media masyarakat global.

Kedua, munculnya keragaman gaya komunikasi yang sesuai dengan kebiasaan audiens. Dalam masyarakat yang mulai jenuh dengan media konvensional, konten dalam bentuk video pendek lebih diminati dibandingkan film layar lebar, serial televisi, atau program hiburan tradisional. Gawai seluler menjadi sarana utama konsumsi hiburan digital di era kini.

Ketiga, teknologi informasi dan komunikasi modern memungkinkan media untuk menjangkau audiens yang jauh lebih luas, bahkan secara internasional. Media baru memiliki keunggulan dalam mengenali dan menganalisis karakteristik pengguna secara real time—suatu hal yang belum dapat dilakukan

oleh media tradisional. Dengan demikian, media baru berpotensi menjadikan khalayak global sebagai pelanggan aktif.

Dengan tiga keunggulan tersebut, BRI melalui Jalur Sutra Digital bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga tentang membangun jejaring komunikasi lintas batas yang lebih inklusif dan dinamis di era globalisasi digital. (Deqiang, Ji & Zhengrong, 2018; Kang et al., 2018; Moscato, 2018).

Selain berperan sebagai sarana komunikasi publik, media baru juga memiliki potensi besar dalam memperkuat promosi proyek Inisiatif Belt and Road (BRI). Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan media baru, terutama dengan meningkatkan pendanaan dan investasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Upaya ini termasuk membangun platform media baru yang mampu menjangkau khalayak internasional dengan berbagai pilihan bahasa. Kehadiran kantor-kantor media di negara-negara yang dilalui proyek BRI juga penting untuk mengembangkan layanan berbasis media digital, seperti televisi internet, penyiaran melalui jaringan daring, televisi seluler, hingga siaran langsung berbasis perangkat mobile.

Penggunaan teknologi media baru dalam mendukung produksi dan penyebaran konten BRI harus dilakukan secara berkelanjutan agar isi siaran terus berkembang dan semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat global. Strategi ini akan mendorong terbentuknya mekanisme jangka panjang dalam kerja sama media lintas negara.

Selain memperluas jangkauan informasi, strategi ini juga dapat menarik minat media asing untuk ikut serta menyuarakan narasi kerja sama dalam kerangka BRI. Dengan memanfaatkan karakteristik utama media baru—yakni kecepatan, interaktivitas, dan daya jangkau global—informasi mengenai BRI dapat dikemas secara lebih menarik dan menjangkau publik yang lebih luas. Pada akhirnya, media baru akan menjadi jembatan komunikasi yang menyampaikan pesan kolaborasi dan manfaat bersama bagi negara-negara yang tergabung dalam proyek BRI. (Kaiqiang & Chen, 2013, hlm. 47–50)

Media baru memiliki potensi besar dalam memperluas pengaruh Inisiatif Belt and Road (BRI) melalui penyebaran informasi secara real-time. Dibandingkan dengan media konvensional, media baru memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas waktu dan lokasi. Informasi dapat diproduksi, diproses, dan disebarluaskan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh batasan geografis maupun waktu.

Keunggulan ini memungkinkan distribusi informasi yang cepat kepada publik melalui beragam saluran komunikasi digital yang bersifat dinamis dan interaktif. Dengan memanfaatkan media baru, informasi mengenai proyek

BRI dapat disebarluaskan secara lebih efektif ke negara-negara yang berada di sepanjang jalur inisiatif ini.

Selain itu, sifat interaktif dari media baru membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Tidak seperti media tradisional yang bersifat satu arah—di mana informasi hanya disampaikan dari media kepada khalayak—media baru memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Teknologi digital yang digunakan memungkinkan masyarakat untuk memberikan tanggapan secara langsung, berinteraksi dengan konten, dan bahkan ikut serta dalam membentuk narasi.

Dengan demikian, media baru tidak hanya menjadi alat penyampai informasi, tetapi juga ruang partisipatif yang dapat memperkuat kolaborasi dan dukungan terhadap pembangunan proyek Belt and Road. (Cao & Alon, 2020, hlm. 1–41; Yuni & Gita, 2021, hlm. 27–38).

Oleh karena itu, dalam proses pembangunan Inisiatif Belt and Road, media baru memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk turut menyampaikan pendapat serta masukan secara terbuka. Platform digital yang tersedia memungkinkan publik untuk terlibat dalam diskusi, menyuarakan aspirasi, bahkan mengoreksi rencana-rencana yang berkaitan dengan proyek BRI. Dengan adanya interaktivitas yang ditawarkan media baru, masyarakat tidak lagi menjadi penonton pasif, tetapi dapat berperan aktif sebagai peserta yang turut menentukan arah pembangunan.

Lebih dari itu, media baru dengan karakteristik konvergensi dan kemampuannya untuk menjalin komunikasi dua arah telah mendorong terbentuknya lanskap peradaban baru. Di Indonesia, muncul istilah generasi milenial dan generasi Z sebagai representasi kelompok usia yang tumbuh dan berkembang bersama kemajuan teknologi informasi. Di tingkat global, kita mengenal istilah *post-truth*, yaitu sebuah era di mana banjir informasi tidak selalu sejalan dengan kebenaran dan objektivitas. Informasi masuk tanpa penyaringan yang memadai, sehingga kebenaran kerap dikaburkan oleh emosi dan opini subjektif.

Fenomena ini berdampak langsung pada narasi publik terkait proyek BRI di Indonesia. Generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, sering kali menjadi sasaran dan sekaligus pelaku dalam arus informasi yang belum tentu terverifikasi. Berbagai informasi menyesatkan atau hoaks beredar luas, seperti klaim bahwa jutaan pekerja asal Tiongkok datang ke Indonesia tanpa keahlian, hingga tuduhan bahwa proyek infrastruktur merupakan barter atas kedaulatan negara. Tidak hanya hoaks, sentimen bernuansa SARA juga kerap diselipkan dalam ujaran kebencian yang menyasar proyek ini. Maka, literasi digital dan kemampuan kritis menjadi sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan.

Dalam konteks dinamika sosial politik di Indonesia, berbagai persoalan yang muncul kerap kali dikaitkan dengan Tiongkok. Narasi yang berkembang di ruang publik, baik secara implisit maupun eksplisit, cenderung menempatkan Tiongkok sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berbagai isu domestik. Hal ini berlaku tidak hanya bagi entitas negara Tiongkok, tetapi juga terhadap identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Salah satu contohnya adalah spekulasi terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, yang disebut-sebut karena letaknya lebih dekat secara geografis ke Beijing dibandingkan Jakarta. Argumen semacam ini jelas tidak memiliki dasar logis yang kuat, namun tetap menyebar luas melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan X.

Fenomena ini semakin menguat pada masa pandemi, ketika banyak individu berlomba-lomba menciptakan konten demi meraih perhatian warganet. Isu-isu sensitif seperti pekerja asing asal Tiongkok, komunisme, hingga propaganda asing sering kali dimanfaatkan sebagai bahan konten yang provokatif. Tujuannya tak lain untuk mendapatkan jumlah penonton, pelanggan (subscriber), atau interaksi yang tinggi di platform digital. Praktik ini, tanpa disadari, dapat meracuni opini publik dan membentuk persepsi negatif yang tidak berdasar.

Dalam situasi ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran teknologi informasi. Penindakan terhadap penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian, dan provokasi di media digital harus dilakukan secara tegas dan adil tanpa pandang bulu. Namun, langkah pemerintah ini kerap ditafsirkan secara berbeda oleh kelompok oposisi. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi warga negara, padahal penegakan hukum diperlukan demi menjaga kualitas demokrasi dan ketertiban ruang publik digital.

Internet sebagai Pilar Utama Inisiatif Jalur Sutra Digital

Presiden Xi Jinping pernah menyatakan bahwa Jalur Sutra kuno telah menjadi jembatan penting dalam menjalin kerja sama antarbangsa. Jalur ini mewariskan semangat perdamaian, keterbukaan, serta semangat untuk saling belajar dan berbagi manfaat. Nilai-nilai tersebut kini dianggap sebagai warisan peradaban manusia yang tidak ternilai, dan patut untuk terus dikembangkan melalui inisiatif modern, salah satunya adalah Jalur Sutra Digital.

Dalam konteks ini, media baru—yang ditopang oleh infrastruktur internet—memiliki peranan strategis yang memungkinkan terjadinya komunikasi fleksibel, cepat, dan lintas batas negara. Oleh karena itu, Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) harus mampu memanfaatkan potensi media baru sebagai wadah

untuk memperkuat dialog antarkebudayaan dan antarperadaban di dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung.

Namun, kondisi faktual di lapangan menggambarkan bahwa infrastruktur internet masih belum merata di seluruh negara yang terlibat dalam proyek BRI. Ketimpangan akses ini menjadi tantangan besar sekaligus pekerjaan rumah penting, terutama bagi negara-negara berpengaruh seperti Tiongkok, dalam upaya mewujudkan keadilan konektivitas digital. Di sisi lain, kesenjangan ini juga mengindikasikan adanya potensi strategis—bahwa pengembangan infrastruktur digital di negara mitra dapat menjadi bentuk kontribusi nyata untuk menciptakan hubungan yang lebih setara dan saling menguntungkan.

Dengan kata lain, media baru yang bergerak di bawah payung proyek BRI bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga sarana diplomasi yang mampu memperkuat rasa saling percaya, solidaritas, dan kerja sama antarnegara. Dalam dunia yang semakin terhubung, kehadiran internet menjadi tulang punggung bagi penguatan hubungan internasional yang berlandaskan pada nilai-nilai inklusivitas, keterbukaan, dan kolaborasi antarbangsa.

Dengan semakin meluasnya penggunaan internet, ponsel pintar, dan jaringan nirkabel, kehadiran media baru telah menembus batas-batas yang selama ini dimiliki oleh media tradisional. Media baru tidak hanya mengaburkan sekat antara wilayah geografis, sistem administrasi, dan peran antara penyampai dan penerima pesan, tetapi juga menghadirkan ruang komunikasi yang lebih demokratis dan lintas batas.

Sebagai bentuk media paling maju di era digital saat ini, media baru memiliki potensi besar mendukung kerja sama ekonomi dan pertukaran budaya lintas negara. Dalam konteks ini, Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) tidak hanya dilihat sebagai proyek infrastruktur semata, melainkan juga sebagai kelanjutan dari semangat Jalur Sutra kuno—jalur yang dahulu menyatukan bangsa-bangsa melalui perdagangan, kebudayaan, dan persahabatan.

Proyek BRI kini mencakup lebih dari 60 negara dan menyentuh kehidupan sekitar 4,4 miliar jiwa. Pertukaran dan interaksi antarnegara semakin intens, membuka peluang besar untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor. Visi dan rencana aksi BRI pun menekankan pentingnya membangun kerja sama tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga melalui pertukaran budaya, kegiatan akademik, pengembangan talenta, kolaborasi antar-media, keterlibatan orang muda dan perempuan, hingga program sukarelawan lintas negara.

Berbagai inisiatif tersebut menjadi landasan yang kuat untuk memperdalam kerja sama bilateral maupun multilateral antarnegara peserta BRI. Dalam kerangka tersebut, kerja sama media memainkan peran strategis sebagai sarana diplomasi publik yang efektif. Melalui media, narasi besar mengenai

perdamaian, pembangunan bersama, dan saling pengertian dapat disampaikan secara luas dan mendalam kepada masyarakat global.

Interaksi komunikasi yang terbangun melalui media baru membuka peluang terwujudnya diplomasi publik dalam berbagai level, baik satu arah maupun dua arah. Dalam konteks negara-negara yang tergabung dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI), media baru dapat dimanfaatkan sebagai sarana diplomasi publik yang efektif dan fleksibel. Salah satu prasyarat utama keberhasilan upaya ini adalah perhatian yang serius terhadap pembangunan infrastruktur internet serta kematangan teknologi digital di tiap negara (Hongxiu, 2018, hlm. 219-236).

Di sepanjang jalur BRI, pemanfaatan media baru kini mulai diarahkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda yang telah beralih dari media cetak seperti buku dan surat kabar ke platform digital. Media baru telah mendapatkan popularitas yang tinggi di banyak negara, menjadi sarana utama untuk memperoleh dan menyebarkan informasi secara luas dan cepat.

Meskipun tingkat pembangunan ekonomi antarnegara peserta BRI belum sepenuhnya setara, tren penggunaan telepon seluler dan teknologi digital tetap mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan ini juga dapat diamati secara nyata di wilayah-wilayah yang terlibat langsung dalam implementasi proyek BRI. Dalam konteks tersebut, media baru berperan penting dalam membuka akses informasi dan mempercepat penyebaran pengetahuan di kawasan ini (Hongxiu, 2018, hlm. 219-236).

Tiongkok telah meluncurkan Jalur Sutra Digital sebagai bagian integral dari *Belt and Road Initiative* (BRI), yang dikenal sebagai salah satu proyek infrastruktur terbesar di dunia. Jalur Sutra Digital kini menjadi elemen kunci dalam strategi BRI, di mana Tiongkok menawarkan bantuan keuangan, dukungan politik, serta berbagai bentuk bantuan teknis kepada negara-negara mitra. Inisiatif ini juga memberikan dukungan signifikan bagi ekspor perusahaan teknologi Tiongkok terkemuka, seperti Huawei, Ali Baba, Baidu, Tencent, dan ZTE (Vila Seoane, 2020).

Tujuan utama dari Jalur Sutra Digital adalah meningkatkan infrastruktur digital di negara-negara peserta melalui pembangunan jaringan telekomunikasi yang andal, penguatan kemampuan kecerdasan buatan (AI), pengembangan *e-commerce* dan sistem pembayaran berbasis digital, penerapan teknologi pengawasan, serta pengembangan kota pintar dan berbagai sektor teknologi tinggi lainnya. Jalur ini, yang juga dikenal sebagai “Jalur Sutra Informasi”, memungkinkan penyediaan teknologi informasi mutakhir bagi negara-negara mitra BRI.

Raksasa teknologi seperti Huawei, Tencent, Ali Baba, dan ZTE menjadi motor penggerak utama inisiatif ini, dengan menawarkan solusi digital

termasuk kabel serat optik berstandar tinggi dengan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan produk serupa dari pesaing di Eropa dan Amerika Serikat (Kadi, 2019; Su & Flew, 2020; Vila Seoane, 2020).

Jalur Sutra Digital dirancang untuk mengintegrasikan sektor telekomunikasi, media, dan teknologi sebagai pendorong utama dalam memperluas cakupan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) di berbagai negara. Tiga komponen kunci dari inisiatif ini meliputi penyediaan perangkat telekomunikasi, pembangunan pusat data (data center), serta pengembangan infrastruktur penyimpanan digital yang dibangun oleh Tiongkok di sepanjang jalur ekonomi BRI. Melalui infrastruktur ini, perusahaan-perusahaan Tiongkok kemudian mengeksport berbagai teknologi canggih, termasuk platform interpretasi data kota pintar berbasis sensor (Huadong, Guo; Shirazi; Dong, 2018).

Selain itu, teknologi *Internet of Things* (IoT) diposisikan sebagai penggerak utama dalam ekonomi digital, yang memiliki potensi besar untuk mempercepat laju pertumbuhan proyek-proyek BRI di berbagai wilayah mitra. IoT memungkinkan konektivitas antarperangkat dan sistem, yang pada akhirnya dapat menciptakan jaringan informasi yang cerdas dan efisien dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik berbasis teknologi (Front, 2019).

Sejumlah akademisi menyimpulkan bahwa media baru menjadi salah satu instrumen diplomasi publik yang sangat efektif dalam mendukung pengembangan proyek Jalur Sutra Digital. Dalam konteks ini, media baru memiliki tiga tujuan strategis yang dapat dimanfaatkan, yaitu: menarik perhatian media asing, menyebarkan pesan-pesan yang bersifat propaganda aktif, serta mendorong terjalinnya kerja sama dan komunikasi antara media Tiongkok dan negara-negara mitra (Hongxiu, 2018, hlm. 219–236).

Jika ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan secara optimal, maka diplomasi publik di negara-negara yang terlibat dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) akan menjadi lebih kondusif. Masyarakat di masing-masing negara dapat saling memahami budaya satu sama lain, memperkuat identitas budaya masing-masing, serta memperdalam rasa saling percaya. Lebih jauh, hal ini juga akan mendorong pembangunan bersama, mempererat kerja sama ekonomi, dan memperkuat kemitraan strategis antarnegara (Dai, 2020, hlm. 787–790).

Proyek Jalur Sutra Digital yang didukung oleh infrastruktur internet berperan besar dalam mendorong kemajuan berbagai sektor industri. Perkembangan industri yang berbasis pada platform digital membuka peluang partisipasi yang luas dari berbagai pihak. Tidak hanya melibatkan aktor negara, tetapi juga menarik minat organisasi internasional, perusahaan multinasional, lembaga keuangan global, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk turut terlibat dalam inisiatif ini.

Media Sosial dalam Cengkeraman Ideologi Globalisasi Barat

Perdebatan mengenai asal mula globalisasi terus menjadi diskursus di kalangan akademisi dan cendekiawan. Sebagian berpendapat bahwa globalisasi muncul pada era modern, sementara yang lain menelusurinya jauh sebelum itu. Namun, setidaknya sejak ekspansi kapitalisme Eropa pada awal abad ke-16, tanda-tanda globalisasi mulai tampak. Fenomena ini semakin menguat menjelang akhir Perang Dunia II, ditandai oleh meningkatnya perdagangan internasional dan investasi lintas negara. Terlepas dari perdebatan tentang waktu kemunculannya, globalisasi secara nyata telah mengubah lanskap dunia—menciptakan ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju, antara kelompok miskin dan kaya. Oleh karena itu, globalisasi sering dianggap sebagai jaringan kekuatan yang bernuansa kapitalistik (Paggi, 2017), terfragmentasi oleh arus industrialisasi dan modernisasi yang menyodorkan bentuk penjajahan baru: tidak melalui kekuatan militer, tetapi melalui dominasi ekonomi dan politik.

Martin Albrow dan Elisabeth King mendefinisikan globalisasi sebagai proses yang menyatukan umat manusia dalam satu komunitas dunia. Roland Robertson menyebutnya sebagai proses pemadatan dunia. Sedangkan Gullen mencoba menggabungkan keduanya dengan menjelaskan globalisasi sebagai hubungan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial secara global. Istilah “globalisasi” sendiri dipopulerkan oleh Theodore Levitt, yang kemudian menjadi istilah kunci dalam wacana internasional modern (Paggi, 2017).

Selama ini, negara-negara Barat, terutama di Eropa Barat dan Amerika Serikat, telah memainkan peran dominan dalam membentuk dan mengendalikan arah globalisasi. Mereka menguasai sistem keuangan global melalui lembaga seperti IMF dan Bank Dunia, mengendalikan teknologi dan informasi digital melalui perusahaan raksasa seperti Microsoft, Google, Facebook, dan YouTube, serta mengarahkan kebijakan politik internasional melalui institusi seperti PBB yang berbasis di New York. Hegemoni ini tidak hanya mencerminkan kekuatan ekonomi, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai kapitalisme dan imperialisme dalam proses globalisasi. Dalam praktiknya, globalisasi versi Barat sering kali menjadi instrumen untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan ekonomi melalui cara-cara nonmiliter.

Dampaknya dapat dirasakan di berbagai belahan dunia, termasuk di Timur Tengah yang kerap dilanda konflik akibat intervensi geopolitik Barat. Di Indonesia, pengaruh globalisasi terlihat dari dominasi perusahaan-perusahaan tambang asing yang telah lama beroperasi, seperti Freeport dan Chevron. Semua bentuk dominasi ini tidak lepas dari dukungan infrastruktur media dan teknologi informasi, termasuk media baru yang saat ini menjadi saluran utama dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik.

Menariknya, pemimpin besar Tiongkok, Mao Zedong, pada tahun 1919 pernah membacakan Manifesto Komunis di Universitas Peking. Dalam pandangannya, globalisasi harus ditanggapi secara kritis, terutama karena pengaruh militerisme Amerika dan dominasi regional Jepang yang pada saat itu dianggap feodal dan semi-kolonial. Namun, seiring waktu, Mao menyadari bahwa globalisasi tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, ia memilih untuk menyerap nilai-nilai komunisme dan nasionalisme ke dalam kerangka globalisasi sambil menolak hegemoni gaya Amerika-Jepang (Klinger, 2017).

Oleh karena itu, gagasan globalisasi yang ditawarkan oleh Tiongkok, dengan ciri khas yang berbeda dari versi Barat, menghadirkan harapan baru bagi terciptanya tatanan global yang lebih setara. Konsep ini berusaha menghindari dominasi kekuasaan negara mana pun serta tidak didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme dan imperialisme. Salah satu bentuk konkret dari pendekatan ini adalah pembangunan ekonomi digital melibatkan banyak pihak.

Tiongkok memainkan peran strategis dalam mendorong percepatan transisi menuju era ekonomi digital. Saat ini, pertumbuhan ekonomi global tidak lagi bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ekonomi digital bahkan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari struktur perekonomian di berbagai negara maju. Negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Prancis mencatat kontribusi yang sangat tinggi terhadap ekonomi digital global, masing-masing berada di kisaran 87,6% hingga 89,4%. Di sisi lain, Tiongkok juga mencatatkan lonjakan signifikan, dengan kontribusi ekonomi digital yang mencapai 77,2% pada tahun 2016.

Namun, kesiapan negara-negara peserta proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dalam mengembangkan ekonomi digital belum merata. Tantangan utama terletak pada ketersediaan teknologi tinggi, tingkat impor dan ekspor produk informasi dan teknologi, penetrasi jaringan pita lebar, serta sistem server yang aman. Berdasarkan analisis terhadap 42 negara yang terlibat dalam proyek BRI—yang tersebar di kawasan ASEAN, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Selatan—ditemukan bahwa kesenjangan digital masih cukup signifikan, terutama pada aspek infrastruktur informasi. Selain itu, laju pertumbuhan penggunaan internet berbasis seluler jauh lebih cepat dibandingkan dengan internet kabel, menandakan adanya pergeseran kebutuhan dan pola akses informasi di era digital saat ini (Front, 2019).

Salah satu platform yang ditawarkan dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) adalah *Electronic World Trade Platform* (eWTP), yang diinisiasi oleh Ali Baba. Platform ini merupakan wujud dari ide kontra-hegemoni yang bertujuan menggeser pusat gravitasi perdagangan global dari Barat ke Timur, dengan Tiongkok sebagai pemimpinnya. Meski eWTP dianggap sebagai

langkah progresif dalam mendukung pembangunan ekonomi digital di negara-negara mitra BRI, terdapat beberapa catatan penting yang perlu dicermati.

Pertama, meskipun membawa semangat baru, platform ini masih dipandang mengandung unsur-unsur neoliberalisme yang selama ini menjadi ciri khas dominasi Barat. Kedua, konsep eWTP masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik yang konkret dan aplikatif di berbagai negara. Ketiga, tata kelola serta model internet yang mendasari eWTP memerlukan pembahasan dan konsensus bersama antarnegara agar tidak menciptakan ketimpangan digital. Keempat, ada kekhawatiran bahwa sifat eWTP yang cenderung eksklusif justru dapat membuat negara-negara mitra terperangkap dalam ketergantungan terhadap infrastruktur digital milik Tiongkok (Vila Seoane, 2020).

Pemerintah Tiongkok telah menyatakan kesiapannya untuk menginvestasikan dana sebesar 1 triliun dolar Amerika di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa. Dalam konteks ini, proyek Jalur Sutra Digital tidak hanya dimaknai sebagai proyek infrastruktur semata, melainkan juga sebagai inisiatif yang berlandaskan pada semangat kepentingan bersama, kolaborasi pemikiran, kerja kolektif, pembelajaran lintas budaya, penciptaan bersama, serta inovasi berbasis sinergi.

Pendekatan ini menekankan pentingnya kepemilikan bersama atas hasil dan kecerdasan kolektif yang dibangun secara berkelanjutan. Ketika proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) diintegrasikan dengan infrastruktur digital dan sistem manajemen data milik berbagai perusahaan, maka akan terbentuk suatu ekosistem kerja yang terkoordinasi meskipun tersebar di berbagai wilayah. Hal ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap praktik tanggung jawab sosial perusahaan, keberlanjutan rantai pasok, pengelolaan data, pelaporan perusahaan, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. (Seele dkk., 2019, hlm. 1–7).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, media baru mencakup beragam komponen teknologi yang memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar atau *big data*. Informasi digital semacam ini memiliki nilai strategis yang tinggi dan berpotensi untuk dimanfaatkan secara positif, tetapi juga bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Beberapa platform media sosial yang paling populer saat ini antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan TikTok. Dari semua platform tersebut, hanya TikTok yang berasal dari Tiongkok; selebihnya merupakan produk dari perusahaan teknologi besar berbasis di negara-negara Barat. Kehadiran media sosial telah memberikan dampak besar terhadap dinamika sosial dan politik global. Salah satu contoh paling menonjol adalah peran media sosial dalam memobilisasi gerakan Arab Spring di kawasan Timur Tengah.

Namun, terdapat persoalan yang tidak dapat diabaikan. Dalam sejumlah kasus, jika isu atau gerakan sosial yang muncul dianggap sejalan dengan kepentingan negara-negara Barat, konten-konten terkait cenderung dibiarkan beredar secara luas. Sebaliknya, jika gerakan tersebut bertentangan atau tidak sejalan dengan agenda dominan, perusahaan media sosial kerap kali melakukan intervensi. Intervensi ini bisa berupa penangguhan akun, pembatasan distribusi informasi, hingga penghapusan konten.

Situasi tersebut mencerminkan bahwa kebebasan berekspresi di dunia digital tidak sepenuhnya netral atau merdeka. Media sosial, meskipun tampak sebagai ruang terbuka dan demokratis, tetap berada di bawah kendali struktur ideologis dan ekonomi global yang cenderung berpihak.

Dari uraian di atas, terdapat dua hal penting yang dapat dimaknai. Pertama, secara ekonomi, perusahaan penyedia platform media sosial memperoleh keuntungan yang sangat besar melalui berbagai layanan dan aplikasinya. Sebagai contoh, Mark Zuckerberg—pendiri dan pemilik Facebook, Instagram, dan WhatsApp—telah menjadi salah satu tokoh terkaya di dunia berkat dominasi perusahaannya dalam industri digital global.

Kedua, di balik kesuksesan finansial tersebut, tersirat adanya agenda ideologis yang lebih luas. Banyak pihak menilai bahwa platform media sosial global tidak semata-mata menjadi alat komunikasi, tetapi juga bagian dari proyek hegemoni globalisasi Barat. Melalui kendali terhadap arus informasi dan konstruksi wacana publik, media sosial dapat menjadi sarana untuk memperkuat dominasi nilai-nilai, kepentingan politik, dan pengaruh ekonomi dari negara-negara maju di Barat terhadap masyarakat global, termasuk negara-negara berkembang.

Sebagai respons terhadap dominasi media sosial global yang mayoritas berasal dari negara-negara Barat, Tiongkok memilih untuk mengembangkan platform mediana sendiri. Langkah ini dinilai sebagai strategi yang cerdas dan visioner. Dengan populasi yang mencapai 1,3 miliar jiwa, Tiongkok memiliki pasar domestik yang sangat besar bagi pengguna media digital. Di samping itu, tingkat literasi serta penetrasi internet di Tiongkok berkembang dengan sangat pesat, menjadikannya salah satu yang tercepat di dunia.

Platform media sosial seperti Weibo, WeChat, Ali Babaa, TikTok, dan Taobao merupakan hasil inovasi lokal yang tidak tunduk pada pengaruh kepentingan ekonomi maupun geopolitik negara-negara Barat. Keberadaan media sosial tersebut menjadi simbol kemandirian digital dan perlindungan terhadap data warganya.

Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, sebenarnya memiliki potensi pasar digital yang sangat strategis. Banyaknya pengguna internet di Tanah Air membuat berbagai platform asing berlomba-lomba masuk dan beroperasi. Oleh karena itu, Indonesia sepatutnya mempertimbangkan

untuk mengikuti jejak Tiongkok dalam membangun ekosistem media sosial nasional. Upaya ini penting untuk menjamin keamanan data, menjaga kedaulatan ekonomi digital, dan mewujudkan independensi dari pengaruh geopolitik eksternal.

Interseksi antara Komunikasi Digital, Arus Global, dan Strategi Tiongkok

Tiongkok telah melalui proses panjang dalam mencari bentuk globalisasi yang berbeda dari dominasi Barat. Untuk itu, negara ini mengerahkan seluruh sumber daya media barunya guna membangun dialog lintas budaya yang lebih inklusif, memperluas kepentingan bersama, dan menciptakan pemahaman yang lebih mendalam terkait konektivitas digital antarperadaban. Media baru memainkan peran penting dalam menyampaikan narasi alternatif Tiongkok kepada dunia, sebagai respons terhadap model globalisasi konvensional yang bercorak Barat (Deqiang, Ji & Zhengrong, 2018, hlm. 1–10).

Konektivitas digital yang diusung dalam Jalur Sutra versi baru menjadi batas geopolitik masa kini, di mana kecerdasan mobilitas, sistem jaringan, dan mekanisme tata kelola memadukan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan rancangan sosial, politik, dan ekonomi. Presiden Xi Jinping secara tegas menekankan pentingnya inovasi dan teknologi dalam pembangunan bangsa, termasuk pengembangan ekonomi digital, kecerdasan buatan, nanoteknologi, serta komputasi kuantum yang diperkuat oleh *big data* untuk mewujudkan kota-kota pintar. Semua ini diarahkan untuk membentuk Jalur Sutra Digital abad ke-21.

Menindaklanjuti visi tersebut, pemerintah Tiongkok bergerak cepat dengan memimpin pertumbuhan jumlah pengguna internet, peningkatan volume perdagangan daring (*e-commerce*), serta pengembangan teknologi seluler. Tidak berhenti di situ, Tiongkok juga menginisiasi Jalur Sutra luar angkasa melalui peluncuran satelit guna mendukung sistem komunikasi beresolusi tinggi dan penginderaan jarak jauh. Serangkaian langkah ini menggambarkan peran sentral teknologi informasi dan komunikasi sebagai tulang punggung utama proyek BRI, yang diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap perubahan struktur tatanan global (Lele & Roy, 2019).

Sebelum mendalami konektivitas teknologi dalam mendukung proyek BRI, penting untuk memahami terlebih dahulu visi strategis dalam pengembangan TIK. Proyek BRI memiliki tujuan utama memperkuat infrastruktur fisik, perdagangan, investasi, sistem keuangan, dan kerja sama antarbangsa. Salah satu visi kunci adalah “menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta Jalur Informasi *Superhighway* sebagai poros untuk memperkuat kolaborasi

dan mengembangkan ekonomi digital di negara-negara yang terlibat dalam Sabuk dan Jalan.”

Jalur Informasi *Superhighway* ini dirancang untuk menciptakan jaringan komunikasi digital yang efisien dan luas, mencakup lebih dari 65 negara peserta. Proyek ini diharapkan mampu mendorong layanan digital seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-health*, dan *e-learning* secara merata. Untuk itu, pengembangan TIK dalam proyek BRI dibangun berdasarkan empat prinsip utama, yaitu: (1) kolaborasi, (2) keberlangsungan operasional, (3) ketahanan sistem, dan (4) evolusi teknologi (Cui Fanglei, 2018, hlm. 1–98).

Dalam implementasinya, pemerintah Tiongkok menggunakan pendekatan visual yang kuat untuk menyampaikan narasi strategis terkait proyek BRI—baik dalam ranah infrastruktur, maritim, maupun digital. Visualisasi digunakan tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media untuk memperkuat identitas dan budaya Tiongkok. Strategi naratif ini diposisikan secara ontologis dan metodologis dalam kerangka teknologi informasi dan telah menjadi perhatian para observer serta pengamat hubungan internasional (van Noort, 2020).

Globalisasi ala Tiongkok dan Barat

Banyak ilmuwan meyakini bahwa untuk mencapai kemajuan, suatu negara perlu menerapkan sistem demokrasi, termasuk dalam sektor ekonomi. Dalam pandangan ini, peran sektor swasta harus diperluas dan diberi ruang sebesar-besarnya. Namun, Tiongkok membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat juga dapat dicapai melalui pendekatan yang berbeda, yakni sistem sosialis-komunis yang dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi terbuka.

Kunci keberhasilan Tiongkok terletak pada stabilitas politik yang dijaga secara ketat oleh negara, serta penguasaan penuh atas regulasi dan tata kelola pembangunan. Dengan kondisi tersebut, proses pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Di satu sisi, pendekatan ini mencerminkan paradoks dalam globalisasi: Tiongkok mampu membaca celah dalam sistem global, lalu memanfaatkannya untuk memainkan peran strategis yang tidak dilakukan negara lain, seperti membangun pusat-pusat industri dan teknologi informasi di kawasan pesisir timur negaranya.

Fase baru dari globalisasi ditandai oleh kecenderungan homogenisasi dalam ekonomi, masyarakat, dan budaya. Arus perdagangan dan investasi global kini mengalir lebih deras ke negara-negara berkembang. Sejak dekade 1970-an, globalisasi telah memperluas dan memperdalam integrasi ekonomi dunia dalam skala yang belum pernah dibayangkan oleh para ekonom klasik (Crawford, 2020; Ten Brink, 2013). Tiongkok mengambil peran signifikan dalam era ini, terutama setelah melakukan reformasi budaya dan membuka

diri terhadap kebijakan ekonomi global. Dari semula hanya sebagai peserta, Tiongkok kini menjelma menjadi salah satu aktor utama globalisasi.

Transformasi ini memberi dampak besar, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik secara drastis (翔, 2018). Dalam praktiknya, globalisasi modern tidak lagi murni kapitalistik, melainkan hadir sebagai suatu konstelasi hibrida—memadukan kekuatan ekonomi global dengan latar budaya yang beragam dan kompetitif (Crawford, 2020).

Sebaliknya, globalisasi versi Barat memiliki karakteristik yang dapat ditelusuri dalam pemikiran tokoh-tokoh seperti Anthony Giddens, Frederic Jameson, David Held, Roland Robertson, dan James Mittelman. Setidaknya ada empat ciri utama dalam globalisasi Barat. Pertama, aktivitas sosial berlangsung melampaui batas-batas geografis, politik, dan ekonomi. Kedua, terdapat hubungan saling ketergantungan antarnegara dan aktor global, sehingga krisis di satu tempat bisa berdampak luas. Ketiga, terdapat intensifikasi dan percepatan dalam pertukaran gerakan sosial. Keempat, terjadi perluasan jejaring sosial dan interdependensi, baik secara objektif maupun subjektif (Mathias, 2019).

Pada dasarnya, globalisasi Barat menciptakan sistem ketergantungan yang kompleks melalui teknologi, regulasi, dan jaringan komunikasi. Amerika Serikat, sebagai pelopor globalisasi Barat, memperkuat hegemoninya dengan menekan negara-negara lain untuk mengikuti kebijakan yang telah dirancangnya. Hal ini dilakukan melalui lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia.

Banyak negara berkembang menilai bahwa globalisasi yang selama ini dipimpin oleh Amerika Serikat cenderung bersifat hegemonik. Alih-alih menciptakan kesetaraan, globalisasi justru memperdalam jurang kesenjangan ekonomi antara negara-negara di belahan bumi utara dan selatan. Selain itu, dampak lain yang cukup signifikan adalah ancaman terhadap kelestarian lingkungan global, meningkatnya potensi konflik antarnegara, dan munculnya aksi-aksi terorisme. Dalam konteks ini, Tiongkok dipandang perlu mengambil peran strategis dan tanggung jawab baru dalam membentuk arah globalisasi yang lebih inklusif. Globalisasi ala Tiongkok menekankan pada prinsip saling menguntungkan, perdamaian, keharmonisan, serta penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tercipta stabilitas politik dan ekonomi yang merata di seluruh kawasan, dan semua negara mendapatkan manfaatnya (Khan et al., 2018).

Terdapat pula pandangan yang menyebut bahwa kekuasaan Partai Komunis Tiongkok telah melonggarkan kendalinya terhadap badan-badan usaha milik negara (BUMN). Perusahaan-perusahaan negara Tiongkok dikatakan lebih bersikap pragmatis dan berorientasi pada keuntungan semata, mirip

dengan perusahaan kapitalis. Salah satu indikatornya adalah diberlakukannya Undang-Undang tahun 1994 yang banyak mengadopsi prinsip-prinsip hukum korporasi dari Barat, termasuk pencatatan perusahaan-perusahaan negara di bursa saham (Karnia, 2012).

Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas. Faktanya, pengelolaan BUMN di Tiongkok tetap berada dalam kerangka kepemimpinan partai yang kuat, disertai tata kelola perusahaan yang berbasis hukum dan menjunjung tinggi kesetaraan hak serta tanggung jawab. Dalam konteks ini, proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang digagas Tiongkok tidak bertujuan untuk membanjiri dunia dengan produk-produk Tiongkok, tetapi justru menawarkan alternatif globalisasi yang berbeda dari sistem neoliberal Barat.

BRI dikembangkan dengan semangat membangun komunitas masa depan bersama bagi negara-negara berkembang yang selama ini tersingkir dari peta globalisasi Barat. Pendekatan yang digunakan adalah pembangunan bersama yang taat pada aturan main yang disepakati semua pihak, agar setiap negara merasa dilibatkan dan berkontribusi. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pertumbuhan kolektif yang berakar pada kolaborasi lintas perbedaan dan keberagaman (Mathias, 2019).

Globalisasi memiliki hubungan yang erat dengan sistem kapitalisme. Namun, sebagian kalangan bersikap skeptis terhadap kemungkinan bahwa budaya Tiongkok sejalan dengan prinsip-prinsip kapitalisme. Pandangan ini dikenal sebagai pendekatan Weberian terhadap agama. Menurut Max Weber, kapitalisme modern muncul di Eropa Barat berkat etika kerja kaum Protestan, khususnya aliran Calvinisme, yang menekankan asketisme dan rasionalitas dalam kehidupan duniawi. Sebaliknya, dalam konteks budaya Tiongkok, dinilai tidak terdapat tradisi keagamaan yang mendukung orientasi duniawi semacam itu. Sebagian ilmuwan bahkan menilai budaya Tiongkok cenderung mistis dan tidak rasional dalam memandang dunia (Crawford, 2020; Jomo & Folk, 2013).

Namun, realitas yang kita saksikan saat ini justru bertolak belakang dengan pandangan tersebut. Tiongkok tumbuh sebagai kekuatan ekonomi global tanpa berakar pada etika Protestan maupun nilai-nilai religius yang mendasari kapitalisme ala Barat. Inilah salah satu perbedaan mendasar antara globalisasi Barat dan globalisasi yang ditawarkan oleh Tiongkok. Jika globalisasi Barat dilandasi oleh semangat kapitalisme neoliberal yang seringkali berbenturan dengan nilai-nilai lokal, maka pendekatan Tiongkok lebih bersifat sosialistik, kolektif, dan tidak berakar pada doktrin keagamaan tertentu.

Merespon pesatnya perkembangan ekonomi dan perdagangan Tiongkok, negara-negara Barat—terutama Amerika Serikat—sering kali memandang proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dari sudut pandang geopolitik. Jika cara pandang ini tidak diperjelas secara objektif, maka berpotensi membentuk

persepsi negatif terhadap Tiongkok. Dalam konteks ini, tantangan yang muncul dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama: geosentris, geoekonomi, geopolitik, dan geokultural. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, mengungkapkan kekhawatiran bahwa keberadaan BRI akan menggeser posisi dominan mereka di masa depan (Zhang Xiaotong, 2016).

Adapun karakteristik globalisasi versi Barat dapat dirinci sebagai berikut: Pertama, globalisasi telah memperlebar kesenjangan kekayaan antara negara dan antarindividu. Prinsip neoliberal yang mendasarinya menciptakan situasi di mana kelompok kaya semakin kaya, sementara kelompok miskin tetap terpinggirkan. Kedua, globalisasi membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku bisnis untuk berekspansi lintas negara tanpa batas. Ketiga, globalisasi dapat memicu berbagai persoalan, termasuk munculnya radikalisme, kekerasan, dan terorisme global. Keempat, globalisasi Barat sering kali bersifat agresif, menuntut negara lain untuk membuka diri, mengadopsi sistem demokrasi ala Barat, dan mematuhi berbagai standar yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Kelima, globalisasi membuat sistem ekonomi rentan, terutama terhadap ancaman nontradisional seperti wabah penyakit menular dan disrupsi sistemik lainnya. Terakhir, globalisasi ala Barat berorientasi pada kepentingan pribadi dan mengedepankan pasar bebas, dengan keterlibatan pemerintah yang minim. Hal ini membuka peluang terjadinya monopoli dan dominasi oleh segelintir korporasi (Y. Deng & Moore, 2004; Mathias, 2019).

Berbeda dengan model globalisasi Barat yang cenderung liberal dan kapitalistik, Tiongkok menawarkan pendekatan alternatif melalui konsep globalisasi sosialis. Pendekatan ini memiliki sejumlah karakteristik utama. Pertama, Tiongkok menekankan pada perluasan inovasi dan akumulasi keuntungan sebagai strategi antisipatif terhadap potensi krisis global. Dalam era globalisasi yang saling terhubung, krisis di satu negara—terutama yang memiliki kekuatan geoekonomi dan geopolitik besar—dapat dengan cepat menular ke negara-negara lain. Oleh karena itu, ketahanan ekonomi menjadi prioritas utama.

Kedua, Tiongkok berhasil mengelola persoalan distribusi dan eksploitasi pekerja secara efektif. Sistem pembagian kerja yang hierarkis namun tetap adil, disertai dengan kebijakan pengupahan yang memadai, telah mendorong kemajuan sosial. Ratusan juta warga berhasil keluar dari garis kemiskinan, berkat tersedianya lapangan kerja dan sistem penggajian yang terstruktur. Lembaga politik Tiongkok menyediakan kerangka industri yang kuat, mulai dari tata kelola administrasi, pembangunan infrastruktur, hingga pengaturan keamanan dan ketertiban umum. Pemerintah juga mampu menyinergikan kebebasan berwirausaha dengan perencanaan strategis yang terukur, sehingga tercipta kemitraan solid antara negara, masyarakat, dan sektor swasta (Ten Brink, 2013).

Sebagai ilustrasi, Tiongkok menegaskan posisinya dalam mempertahankan kedaulatan sistem keuangan domestik. Ketika krisis global tahun 2008 melanda, bank-bank swasta di Tiongkok merespons dengan menurunkan suku bunga dan mengalihkan alokasi kredit guna mendukung proyek-proyek pemerintah. Kebijakan ini sangat berbeda dengan pendekatan yang diambil negara-negara Barat, di mana bank-bank swasta sering kali enggan mengikuti arahan pemerintah. Dalam konteks ini, tampak jelas bahwa peran negara sangat dominan dalam mengarahkan kebijakan ekonomi, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait alokasi kredit dan penerimanya (Ten Brink, 2013).

Dengan demikian, Tiongkok tidak sekadar beradaptasi terhadap tatanan global yang ada, tetapi juga menciptakan kerangka global baru yang sesuai dengan identitas dan kebutuhannya sendiri. Negara ini mampu membangun zona kerja sama ekonomi lintas negara tanpa harus menggunakan kekuatan militer, melainkan melalui kebijakan yang terukur, komunikasi strategis, dan konektivitas antarwilayah yang terintegrasi. Upaya ini kini terlihat semakin nyata dalam realisasi proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang sedang dijalankan (Paggi, 2017).

Model globalisasi yang ditawarkan oleh Tiongkok sangat berbeda dengan pendekatan globalisasi versi Barat. Dalam pendekatan Tiongkok, integrasi sosial, kerja sama ekonomi, serta pembangunan antarnegara tidak disertai dengan penyertaan nilai-nilai politik tertentu. Tiongkok memandang bahwa urusan internal, seperti sistem politik dan kebijakan domestik, adalah hak kedaulatan masing-masing negara, sehingga tidak seharusnya dicampuri oleh pihak luar.

Salah satu bentuk konkret dari model globalisasi Tiongkok ini adalah implementasi proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Melalui BRI, Tiongkok tidak berusaha untuk mengekspor sistem politiknya, ideologi, nilai-nilai budaya, maupun model pembangunan nasionalnya kepada negara mitra. Sebaliknya, BRI lebih ditekankan sebagai strategi diplomasi ekonomi berbasis soft power, yang bertujuan membangun jaringan kerja sama dan konektivitas global tanpa tekanan ideologis (Mathias, 2019).

Ekonomi Politik Sosialis Tiongkok

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok memperkenalkan bentuk sosialisme yang didefinisikan ulang, bukan sekadar sebagai ideologi ekonomi, tetapi sebagai pendekatan global yang membawa semangat harmoni antarbangsa. Konsep kuno Tianxia—dunia yang menyatu dalam kedamaian—kembali dihidupkan untuk membangun tatanan dunia baru yang inklusif dan berkeadaban. Semangat ini tercermin dalam berbagai inisiatif besar Tiongkok,

termasuk Jalur Sutra Modern dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI), yang tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan hubungan antarbudaya dan pertukaran pengetahuan.

Dalam pandangan ekonom seperti Yasheng Huang, ledakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok bukanlah hasil dari kapitalisme liberal ala Barat. Sebaliknya, Tiongkok mengembangkan sistem kapitalisme yang dikendalikan negara—terpusat di kawasan urban, berpihak pada pengentasan kemiskinan, dan menolak dominasi swasta secara ekstrem. Negara memiliki peran aktif dan tegas dalam mengatur sistem ekonomi, sehingga tidak memberi ruang bagi tumbuhnya oligarki atau monopoli kekuasaan ekonomi.

Berbeda dengan model globalisasi Barat yang cenderung liberal dan hegemonik, Tiongkok mengusung gagasan globalisasi yang bercorak sosialis. Prinsipnya adalah kerja sama yang setara, tidak memaksakan nilai ideologis tertentu, dan terbuka terhadap perbedaan. Inilah yang disebut sebagai sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Di dalam negeri, Tiongkok menjalankan kendali ketat terhadap tata kelola dan pembangunan; sementara di luar negeri, ia bersikap terbuka, membangun relasi dengan negara lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Tiongkok tidak ingin mendikte negara lain, seperti yang kerap dilakukan oleh kekuatan global Barat melalui lembaga-lembaga internasional seperti IMF atau Bank Dunia. Alih-alih mengekspor ideologi atau sistem politik, Tiongkok menawarkan bentuk kerja sama ekonomi yang fleksibel, dan bahkan disebut sebagai bentuk hegemoni yang baik hati—sebuah istilah yang mengandung makna bahwa kekuatan besar pun bisa memberi manfaat tanpa harus mendominasi.

Perjalanan sosialisme Tiongkok sendiri terbentuk melalui proses panjang yang terbagi dalam empat fase utama. Dimulai pada era Deng Xiaoping yang menekankan pentingnya “menempuh jalan sendiri”, kemudian dilanjutkan oleh Jiang Zemin yang menekankan produktivitas sebagai inti sosialisme. Hu Jintao meneruskan dengan gagasan masyarakat sosialis yang harmonis. Kini, Xi Jinping menargetkan Tiongkok menjadi masyarakat modern besar yang ditandai dengan kemakmuran, keunggulan budaya, dan keberlanjutan.

Secara konseptual, ekonomi politik sosialis Tiongkok memiliki empat ciri utama. Pertama, mendorong peningkatan jumlah tenaga produktif sebagai tulang punggung kemajuan ekonomi. Kedua, memperhatikan aspek perlindungan lingkungan sebagai bagian dari keberlanjutan pembangunan. Ketiga, menyesuaikan sistem produksi dan hubungan kerja agar selaras dengan perkembangan tenaga produktif. Keempat, menjadikan pengembangan kapasitas produktif masyarakat sebagai inti dari misi globalisasi Tiongkok—dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Melalui pendekatan ini, Tiongkok menggambarkan adanya pendekatan berbeda dalam memandang dan mengelola globalisasi, bukan dengan mengejar dominasi, melainkan melalui kolaborasi. Konsep globalisasi sosialis yang diusung Tiongkok menawarkan alternatif terhadap sistem liberal global, dengan tetap menekankan prinsip keadilan sosial, stabilitas politik, dan pemerataan kesejahteraan.

***Belt and Road Initiative* dan Wacana Teknologi dalam Konsep Globalisasi**

Teknologi informasi kini menjadi medan strategis dalam persaingan global. Tiongkok, sebagai salah satu kekuatan besar dunia, menyadari bahwa sektor ini menjadi peluang sekaligus pijakan penting untuk mengambil posisi sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok tidak hanya membangun infrastruktur jalan dan pelabuhan, tetapi juga merancang “Jalur Sutra Digital”—sebuah jaringan konektivitas digital lintas negara yang mencakup kabel optik bawah laut, pusat data, sistem navigasi satelit, hingga kecerdasan buatan dan teknologi kuantum.

Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan jaringan BeiDou, sistem navigasi satelit milik Tiongkok yang menjadi alternatif GPS. Program ini telah mencakup lebih dari 30 negara peserta BRI dan mencerminkan bagaimana Tiongkok membangun jaringan informasi global yang terintegrasi. Di baliknya, tersimpan filosofi sosialisme pasar ala Tiongkok—yang berbeda dari model kapitalisme Barat yang dianggap sarat muatan imperialisisme modern.

Tiongkok menempatkan dirinya dalam kerangka globalisasi yang disebut sebagai Chiglobalisasi, yakni bentuk globalisasi yang berakar dari nilai-nilai Konfusianisme, sosialisme Maois, serta pragmatisme ekonomi Deng Xiaoping. Ini adalah bentuk globalisasi baru yang menekankan harmoni, saling menguntungkan, dan tidak memaksakan model pembangunan tertentu kepada negara lain. Chiglobalisasi ingin memindahkan poros globalisasi dari dominasi Barat menuju pola yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai Timur.

Dalam narasi ini, teknologi bukan semata alat ekonomi, tetapi juga sarana untuk diplomasi, pembangunan sosial, dan budaya. Jalur Sutra Digital, misalnya, mencakup pengembangan kota pintar, layanan kesehatan daring (telemedicine), perdagangan digital lintas negara (*e-commerce*), hingga diplomasi digital yang mempromosikan kedaulatan siber di forum-forum internasional. Tiongkok juga aktif menetapkan standar teknologi global melalui organisasi multilateral, termasuk PBB.

Namun, seperti halnya kekuatan besar lainnya, inisiatif ini tidak lepas dari sorotan. Ada kekhawatiran bahwa dominasi teknologi dan data oleh Tiongkok

bisa menjadi bentuk baru dari kontrol global, menggantikan dominasi Barat yang selama ini dikritik. Maka dari itu, partisipasi negara-negara dalam proyek BRI harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan transparansi, agar globalisasi tidak kembali menjadi alat hegemoni—hanya dengan wajah yang berbeda.

Tiongkok menunjukkan keseriusannya melalui perusahaan-perusahaan raksasa teknologi seperti Ali Baba, Tencent, dan Baidu. Ketiganya tidak hanya mendukung proyek BRI dalam bentuk layanan digital seperti penerjemahan otomatis, sistem pembayaran daring, dan komputasi awan, tetapi juga turut serta dalam pelestarian budaya tradisional Tiongkok melalui digitalisasi. Berbeda dari perusahaan teknologi Barat yang lebih bebas dari intervensi negara, perusahaan-perusahaan Tiongkok tetap dalam orbit kebijakan pemerintah, menjaga semangat nasionalisme dan kedaulatan data.

Dengan pendekatan ini, Tiongkok mengajukan visi global yang berbeda—bukan sekadar menyaingi, melainkan mengusulkan alternatif terhadap model globalisasi yang selama ini didominasi oleh nilai-nilai kapitalisme neoliberal. Masyarakat dunia, khususnya negara-negara berkembang, diundang untuk menjadi mitra dalam tatanan global yang baru ini. Namun, seperti pesan terakhir dalam narasi ini: dunia harus tetap waspada. Globalisasi yang adil tidak boleh hanya berganti wajah—dari Washington ke Beijing—tanpa mengubah logika dominasi itu sendiri.

Di tengah menguatnya dominasi digital Tiongkok, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Baidu, Ali Baba dan Tencent tetap bergantung pada dukungan pemerintah. Relasi yang terbentuk antara perusahaan-perusahaan swasta ini dan negara bukan sekadar hubungan ekonomi biasa, melainkan suatu bentuk simbiosis mutualisme. Negara memberikan perlindungan politik dan regulasi yang mendukung, sementara perusahaan-perusahaan tersebut menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan agenda global Tiongkok di ranah teknologi dan diplomasi digital (Su & Flew, 2020).

Ketika posisi Amerika Serikat mulai melemah dalam peta global—baik dari sisi pengaruh politik, ekonomi, maupun teknologi—Tiongkok dengan cekatan membaca peluang. Apa yang dahulu hanya menjadi gagasan dalam forum akademik, kini menjelma menjadi kenyataan. Teori tentang globalisasi bercorak Tiongkok yang dirumuskan sekitar satu dekade lalu, kini telah terealisasi dalam bentuk kebijakan luar negeri dan proyek-proyek besar seperti *Belt and Road Initiative* (BRI).

Tiongkok menunjukkan komitmennya untuk mengikuti mekanisme pasar secara global, sambil tetap menjaga stabilitas politik domestik melalui reformasi yang khas. Semua ini diarahkan untuk mencapai visi besar: modernitas yang harmonis. Dengan pendekatan ini, Tiongkok tidak hanya menyaingi model globalisasi Barat, tetapi juga mulai dipandang sebagai prototipe baru bagi

model globalisasi masa depan—yang menjanjikan pembangunan bersama, kolaborasi lintas budaya, dan penguatan kedaulatan nasional di era digital (L. Hong & Dalong, 2018; Paggi, 2017).

Proyek BRI dan Representasi Media Baru di Era Postmodernisme

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah mengaburkan batas antara informasi dan hiburan. Konsep *compression of time and space* dalam era pascamodern menandai perubahan radikal dalam cara manusia mengakses dan merespons informasi. Internet dan media baru mempercepat perubahan itu. Dalam konteks ini, Proyek Sabuk dan Jalan (BRI), khususnya dalam skema digitalnya, hadir sebagai jawaban atas dinamika zaman yang kian kompleks dan bergerak menuju otomatisasi serta kecerdasan buatan.

Perubahan paradigma global saat ini menuntut narasi baru yang lebih fleksibel dan adaptif. Di sinilah media baru memainkan peranan penting dalam membentuk citra dan menyebarkan wacana positif terkait proyek BRI. Platform digital yang efisien, interaktif, dan dapat diakses lintas batas memungkinkan penyebaran nilai-nilai Jalur Sutra—baik dalam bidang politik, budaya, pendidikan, maupun ekonomi—untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

Contoh konkret dapat ditemukan di Pakistan, di mana kerja sama antara Tiongkok dan Pakistan dalam kerangka proyek BRI menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Meski sempat berkembang narasi negatif terkait kehadiran pekerja asal Tiongkok, hasil studi lapangan justru mengindikasikan bahwa sebagian besar warga Pakistan merespons positif kerja sama ini karena mereka merasakan langsung dampaknya terhadap perekonomian lokal.

Di tengah kebutuhan akan konektivitas, beberapa negara Asia Pasifik bahkan mengusulkan pembentukan Jalur Cepat Asia Pasifik guna meningkatkan infrastruktur broadband dan memperkuat fondasi teknologi digital. Tidak hanya mencakup perangkat keras seperti kabel optik dan pusat data, penguatan ini juga menuntut pembangunan sistem perangkat lunak berbasis *big data*, *Internet of Things* (IoT), dan kecerdasan buatan (AI).

Konsep *big data*—yang merujuk pada besarnya volume informasi digital—telah menjadi pilar penting dalam mengelola era *zettabyte*. Sumber data utamanya berasal dari interaksi di media sosial dan koneksi mesin-ke-mesin (M2M). Dalam konteks ini, kecepatan memproses informasi menjadi krusial, dan IoT hadir sebagai jawaban. IoT memungkinkan objek fisik untuk mengirimkan data secara mandiri melalui jaringan, tanpa peran manusia atau komputer sebagai pengendali utama.

IoT berjalan bersama teknologi kecerdasan buatan yang dibuat untuk meniru cara manusia berpikir—seperti saat mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, atau membuat perkiraan. Teknologi ini bekerja menggunakan langkah-langkah yang disebut algoritma, serta metode pembelajaran dari data seperti machine learning dan deep learning, yang membantu sistem belajar dari pengalaman dan memberikan hasil yang lebih tepat.

Namun, kemajuan teknologi yang begitu cepat memerlukan pengaturan yang adil dan bertanggung jawab. Pelindungan terhadap privasi, keterbukaan informasi, dan kejelasan siapa yang bertanggung jawab menjadi hal penting yang tidak bisa diabaikan dalam mengelola data digital. Karena itu, aturan tentang pelindungan data, hak atas data, dan keamanan digital perlu disusun dan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jika semuanya berjalan seimbang, inovasi digital bisa terus berkembang dengan aman dan bermakna

Salah satu terobosan penting dalam konteks ini adalah kehadiran *electronic World Trade Platform* (eWTP) oleh Ali Baba. Platform ini dirancang untuk mendorong pelaku usaha kecil, pemuda kreatif, dan perempuan agar dapat bersaing secara global, menandingi dominasi perusahaan transnasional besar. Ali Baba telah mengembangkan model ini di berbagai negara seperti Pakistan, Indonesia, Singapura, hingga negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Huawei juga tidak ketinggalan, turut mendirikan laboratorium kolaboratif, kota pintar, hingga program 5G dan literasi digital di beberapa negara berkembang.

Sayangnya, inisiatif Tiongkok melalui Jalur Sutra Digital ini tidak lepas dari gangguan geopolitik. Negara-negara seperti Amerika Serikat kerap mendiskreditkan proyek ini di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Namun demikian, proyek ini tetap menjanjikan keuntungan besar, antara lain dalam hal peningkatan konektivitas, mendorong perdagangan lintas batas, memperkuat jejaring sosial dan modal sosial, serta pelestarian lingkungan melalui pemantauan digital. Kawasan Asia Tengah seperti Kirgistan dan Kazakhstan kini mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, meski masih menghadapi tantangan berupa mahalnya biaya internet, rendahnya literasi digital, dan pengawasan yang terlalu terkonsentrasi. Penelitian di 43 negara peserta BRI juga mencatat adanya tantangan struktural yang beragam, mulai dari infrastruktur yang belum merata hingga lemahnya inovasi dan daya saing nasional.

Era disrupsi menandai perubahan radikal dalam komunikasi manusia. Kehadiran perangkat digital telah memengaruhi cara kita bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Ini adalah ciri khas Era Komunikasi Siber, di mana media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga ruang untuk membentuk jaringan sosial dan menjadi produsen informasi.

Di satu sisi, dunia digital bisa menjadi “kawan” karena memudahkan kehidupan. Namun di sisi lain, ia bisa menjadi “musuh” yang membahayakan

privasi individu. Komodifikasi media, seperti jumlah pengikut dan konten yang viral, telah mengubah media sosial menjadi pasar bebas yang mengejar popularitas. Tidak jarang, konten yang menyesatkan, provokatif, dan tidak etis menjadi sajian utama demi mengejar *clicks* dan keuntungan ekonomi. Maka, tantangannya hari ini adalah memastikan bahwa perkembangan teknologi dan media baru tidak lepas dari kontrol etika. Sebab, ketika informasi menjadi komoditas, maka tanggung jawab terhadap kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan menjadi semakin penting.

Ringkasan

Tidak ada yang menduga bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang begitu menantang bagi umat manusia. Pandemi COVID-19 melumpuhkan banyak aspek kehidupan: mobilitas manusia terhambat, aktivitas ekonomi runtuh, dan krisis sosial ekonomi muncul di berbagai belahan dunia. Di tengah krisis itu, kebutuhan akan konektivitas digital menjadi semakin mendesak. Di sinilah urgensi proyek Jalur Sutra Digital menjadi relevan—sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi global berbasis teknologi dan jaringan digital.

Pertama, Jalur Sutra Digital berperan penting dalam membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang berpusat di Tiongkok. Kehadiran infrastruktur ini tidak hanya sekadar membangun jaringan internet, melainkan juga memperkuat peran media baru dalam menghubungkan masyarakat lintas negara, memperkuat kesejahteraan, dan mendorong kolaborasi antarbudaya. Di era digital, konektivitas menjadi kunci terbentuknya tatanan sosial baru—yakni sistem ekonomi global yang terintegrasi dan lebih inklusif. Harapannya, negara-negara yang selama ini tertinggal secara ekonomi dapat memanfaatkan konektivitas digital ini sebagai batu loncatan menuju kemajuan yang lebih merata.

Kedua, keberhasilan jalur sutra digital sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur internet yang memadai dan merata. Fakta menunjukkan bahwa negara-negara dengan ekonomi kuat dan teknologi maju telah memiliki ekosistem digital yang baik. Namun, sebagian besar proyek BRI justru menyasar negara-negara berkembang yang masih kesulitan dalam hal akses dan pemerataan infrastruktur. Di sinilah peran penting Tiongkok sebagai negara penggagas: tidak hanya menawarkan kerja sama ekonomi, tetapi juga membantu membangun fondasi digital agar negara-negara mitra bisa tumbuh bersama dalam lanskap ekonomi global baru.

Ketiga, Jalur Sutra Digital merupakan perwujudan dari bentuk globalisasi baru yang ditawarkan oleh Tiongkok—yang kerap disebut Chiglobalisasi. Berbeda dengan model globalisasi Barat yang cenderung neoliberal, globalisasi

ala Tiongkok berupaya menggabungkan nilai-nilai tradisional Konfusianisme dengan kecanggihan teknologi modern. Nilai-nilai seperti harmoni, kerja keras, dan kemandirian menjadi fondasi bagi pembangunan masyarakat kapitalis modern versi Tiongkok. Dalam hal ini, pemerintahan yang kuat dan terarah memainkan peran sentral. Jika nilai-nilai ini berhasil disemai dan diadopsi oleh negara-negara mitra BRI, maka bukan tidak mungkin akan terbentuk bangsa-bangsa yang lebih mandiri, berdaulat, dan tangguh secara ekonomi.

BAGIAN 4

BRI, Inovasi Tiongkok Merancang Realitas Sosial Baru

Menafsir ulang Media Sosial sebagai Medium Pengetahuan

Penolakan terhadap pendekatan positivistik dalam ilmu sosial melahirkan tradisi baru yang lebih menekankan makna dan pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pendekatan fenomenologi, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui teori konstruksi realitas sosial.

Berger dan Luckmann memandang bahwa pengetahuan tidak semata-mata dibentuk dari institusi formal atau sains objektif, tetapi juga dari interaksi sosial sehari-hari antara individu dengan lingkungannya. Artinya, realitas sosial merupakan hasil dari proses dialogis, di mana individu dan kelompok secara aktif menciptakan dan menegosiasikan makna bersama. Dalam konteks ini, manusia adalah aktor yang dinamis, bukan objek pasif dari struktur sosial yang kaku.

Konsep konstruksi sosial sendiri berasal dari akar pemikiran konstruktivisme, yang telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno, dan kemudian berkembang menjadi pijakan teoritis dalam ilmu pengetahuan modern. Di tangan Berger dan Luckmann, gagasan ini dipertajam melalui pendekatan sosiologi pengetahuan, dengan menarik pengaruh dari pemikiran Karl Marx. Mereka menegaskan bahwa pengetahuan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan bukanlah yang bersifat absolut, tetapi yang lahir dari rutinitas empiris masyarakat—yaitu kebiasaan, pengalaman, dan tindakan sosial yang terus-menerus direproduksi dalam kehidupan bersama.

Dalam kerangka ini, media sosial menjadi ruang konstruksi yang sangat signifikan. Kehadirannya memungkinkan individu untuk menyusun dan

menyebarkan realitas, bahkan merekonstruksi identitas budaya dan sosial secara luas. Terbukanya akses terhadap informasi, baik melalui media massa maupun media sosial, membuat transformasi budaya dan pemaknaan terhadap realitas menjadi lebih cepat, cair, dan kompleks.

Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat global, termasuk dalam konteks proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), tidak hanya menjadi penerima pasif atas perubahan globalisasi, tetapi juga pembentuk realitas yang baru. Mereka membangun narasi, menyusun identitas kolektif, dan mengkritisi atau mendukung wacana global, termasuk melalui interaksi digital yang terus berlangsung di berbagai platform media sosial.

Dengan demikian, memahami konstruksi realitas sosial dalam era digital saat ini menjadi penting—bukan hanya untuk membaca arah transformasi masyarakat, tetapi juga untuk menyadari bahwa dalam dunia yang semakin terhubung, realitas sosial adalah hasil cipta, bukan semata fakta objektif yang berdiri sendiri.

Dalam teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, proses individu dalam memahami dan membentuk realitas sosial berlangsung dalam tiga tahap utama, yaitu eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi.

Tahap pertama, eksternalisasi, merupakan proses di mana individu menyesuaikan diri dengan dunia sosial dan budaya yang ada. Adaptasi ini dilakukan melalui bahasa, tindakan, simbol, atau perilaku sehari-hari. Dunia sosial yang dibentuk manusia kemudian menjadi kerangka hidup yang memengaruhi kesadarannya.

Tahap kedua, internalisasi, terjadi saat individu mulai mengidentifikasi diri dengan norma, nilai, dan institusi sosial di sekitarnya. Individu menjadi bagian dari tatanan sosial yang sudah dibentuk oleh masyarakat, dan tatanan itu menjadi bagian dari cara pandangnya terhadap dunia.

Tahap terakhir, objektivasi, adalah momen ketika realitas yang dibangun bersama seolah-olah menjadi sesuatu yang objektif dan tidak dapat diperdebatkan lagi. Realitas ini menjadi struktur yang diterima oleh masyarakat secara luas dan berlangsung dalam interaksi sosial yang terus-menerus.

Dalam konteks globalisasi dan revolusi digital, konstruksi sosial ini mengalami percepatan dan perluasan ruang. Dunia kini terasa “datar”, karena informasi dari berbagai penjuru bumi bisa diakses siapa saja dalam waktu singkat. Internet dan teknologi informasi menjadi katalis penting dalam membentuk realitas sosial baru, terutama melalui media sosial yang bersifat interaktif, dinamis, dan tidak terbatas oleh ruang geografis.

Namun demikian, penyebaran infrastruktur internet yang menjadi tulang punggung media baru tidak merata di semua negara. Banyak kawasan di

dunia, terutama negara berkembang, masih tertinggal dalam hal konektivitas digital. Melihat kondisi ini, Tiongkok melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), terutama dalam sub-proyek Jalur Sutra Digital (*Digital Silk Road/DSR*), mengambil peran strategis.

Proyek DSR bertujuan memperluas konektivitas digital global melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pusat data, dan sistem teknologi tinggi lainnya. Negara-negara penerima proyek ini mendapatkan dukungan teknologi dan keuangan dari Tiongkok. Perusahaan teknologi besar seperti Huawei dan ZTE memainkan peran utama dalam menyediakan kabel serat optik, teknologi jaringan nirkabel, dan perangkat kota pintar dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan pesaing dari Barat.

Lebih dari itu, proyek ini juga melibatkan teknologi kecerdasan buatan, *e-commerce*, sistem pembayaran digital, dan pengawasan kota cerdas, sehingga menciptakan ekosistem digital baru yang lebih terintegrasi. Beberapa negara bahkan telah mengadopsi sistem navigasi satelit BeiDou buatan Tiongkok, yang menjadi alternatif dari sistem GPS milik AS.

Melalui DSR, Tiongkok tidak hanya memperluas infrastruktur digital, tetapi juga mengonstruksi realitas sosial baru di negara-negara mitra BRI. Dengan memadukan telekomunikasi, teknologi informasi, dan media, Tiongkok membangun jalur digital yang memengaruhi cara masyarakat terhubung, berbisnis, dan membentuk pemaknaan baru dalam kehidupan sosial mereka.

Inilah gambaran nyata bahwa media sosial dan teknologi informasi bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam pembentukan realitas sosial yang baru, lintas batas negara dan budaya. Dalam konteks BRI, proyek ini juga menjadi bagian dari diplomasi teknologi dan strategi pengaruh global Tiongkok di abad ke-21.

Pada dasarnya, sistem navigasi global seperti GPS yang selama ini digunakan secara luas memiliki potensi besar untuk tujuan pengawasan. Namun, Tiongkok mengambil jalur berbeda dengan mengembangkan dan menggunakan sistem pelacakan satelit BeiDou sebagai bagian dari strategi kemandirian teknologinya. Sistem ini menjadi elemen penting dalam proyek Jalur Sutra Digital (*Digital Silk Road/DSR*), yang menjadi bagian integral dari *Belt and Road Initiative* (BRI).

Menurut laporan Triolo (2020), media mencatat bahwa DSR tidak hanya memperluas konektivitas digital antarnegeri, tetapi juga mendorong perkembangan pesat di berbagai sektor layanan digital. Di antaranya adalah perdagangan elektronik lintas batas (*cross-border e-commerce*), pengembangan kota pintar (*smart city*), *telemedicine*, dan sistem keuangan berbasis internet. Tidak hanya itu, DSR juga berperan dalam mempercepat kemajuan teknologi mutakhir, seperti komputasi awan (*cloud computing*), *big data*, *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, hingga komputasi kuantum.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa hampir semua aspek teknologi informasi dan komunikasi yang strategis kini telah berada dalam koordinasi jalur DSR. Dengan kata lain, Tiongkok melalui DSR tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga merancang ekosistem digital global versi mereka sendiri, yang dapat bersaing langsung dengan dominasi teknologi Barat.

Ekonomi Digital dan Cara Baru Memandang Dunia Global

Salah satu bentuk konstruksi realitas baru yang diharapkan terwujud melalui Prakarsa Sabuk dan Jalan adalah terbentuknya ekonomi digital. Dalam model ekonomi ini, barang dan jasa tidak lagi bergantung pada bentuk fisik semata, melainkan mengalami transformasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Semua pihak yang terlibat dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan didorong untuk mendorong pembangunan berbasis inovasi serta memperkuat kerja sama lintas sektor.

Berbagai teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, nanoteknologi, dan komputasi kuantum memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan *big data*, komputasi awan, dan penciptaan kota cerdas. Ketiganya membentuk fondasi penting bagi digitalisasi di berbagai sektor. Untuk itu, negara-negara peserta Prakarsa Sabuk dan Jalan perlu membangun jaringan koordinasi guna mendukung transfer teknologi, serta mendorong inovasi regional secara terpadu.

Dalam konteks ini, kekayaan intelektual menjadi unsur krusial. Pelindungan terhadap hasil inovasi harus dijalankan secara serius, baik melalui penghormatan atas hak kekayaan intelektual, pemanfaatan yang tepat, maupun pembentukan sistem pelindungan yang efektif dan komprehensif (Nation, 2020).

Perubahan ini juga turut mengubah wajah pemasaran. Kini, pelaku usaha tidak perlu lagi bergantung pada lokasi fisik atau pekerja dalam jumlah besar. Efisiensi biaya dapat dicapai melalui platform digital. Pengalaman berbagai perusahaan rintisan (startup) seperti Amazon, Ali Babadaan Taobao mengilustrasikan bahwa pemasaran dan transaksi jual beli dapat dilakukan sepenuhnya secara daring. Di Indonesia, Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia adalah contoh konkret bagaimana digitalisasi telah merevolusi dunia usaha. Bahkan layanan transportasi pun telah terdigitalisasi melalui platform seperti Gojek, Grab, dan Uber, yang mempermudah aktivitas harian masyarakat (Onitsuka et al., 2018).

Di sisi lain, kecerdasan buatan semakin memainkan peran strategis, tidak hanya dalam menyelesaikan persoalan, tetapi juga dalam menganalisis kebutuhan pasar. Negara dan perusahaan kini mampu membuat profil konsumen secara akurat melalui pemanfaatan algoritma dan *big data*. Informasi

dari media sosial seperti Instagram, X, dan Facebook dimanfaatkan untuk memahami kecenderungan pasar, menciptakan produk baru, dan menangani keluhan pelanggan secara lebih responsif (M. Guo, 2017).

Tiongkok menjadi salah satu negara yang paling siap membangun realitas sosial baru berbasis ekonomi digital. Hal ini ditopang oleh infrastruktur, kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, serta posisi geopolitik yang strategis. Melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) di bidang teknologi informasi, sejumlah pakar menyarankan beberapa langkah strategis.

Pertama, pembangunan Jalur Sutra Digital sebagai infrastruktur dasar untuk memperluas pasar global perusahaan Tiongkok. Dalam hal ini, kelebihan produksi baja Tiongkok juga dapat dipasarkan secara digital ke berbagai negara karena baja merupakan komponen vital dalam sektor industri.

Kedua, mendorong internasionalisasi mata uang Renminbi. Selama ini, mayoritas transaksi perdagangan internasional masih bergantung pada dolar Amerika Serikat dan euro. Dengan melibatkan banyak negara dalam proyek BRI, Tiongkok berpeluang mempromosikan penggunaan Renminbi sebagai alternatif. Bahkan, pembentukan lembaga keuangan tandingan seperti bank pembangunan alternatif yang tidak berada di bawah dominasi Amerika Serikat dan IMF juga menjadi pertimbangan serius (Bergman & Schufle, 2017; Burke, 1995; Chen, 2018; Z. Hong, 2018; Shahriar, 2020; H. Zhang & Wu, 2017).

Ketiga, membangun infrastruktur jaringan internet global yang dipusatkan di Tiongkok. Mengingat dominasi geografis arus data digital saat ini sebagian besar masih dikuasai oleh kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat, maka langkah ini dianggap penting untuk menjaga kedaulatan data, sekaligus memperluas pengaruh geopolitik Tiongkok.

Keempat, menegaskan dimensi ideologis dari Jalur Sutra Digital, yang dikenal dengan istilah “globalisasi inklusif”. Konsep ini menawarkan pendekatan alternatif terhadap globalisasi yang tidak hegemonik, tetapi lebih menekankan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan keterlibatan aktif semua negara (Front, 2019; H. Shen, 2018).

Dengan berbagai strategi tersebut, Prakarsa Sabuk dan Jalan tidak hanya menjadi proyek pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi jalan menuju transformasi ekonomi global yang lebih digital, inklusif, dan terdesentralisasi.

Tentu saja, negara-negara di luar Tiongkok yang turut ambil bagian dalam proyek Jalur Sutra Digital (*Digital Silk Road*/DSR) memiliki peluang yang setara untuk meraih manfaat strategis. Selama ini, pusat kemakmuran global cenderung terkonsentrasi di belahan bumi utara, terutama di negara-negara maju. Namun, Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) justru membuka ruang baru bagi negara-negara berkembang di belahan bumi selatan, seperti kawasan ASEAN dan Afrika, untuk ikut serta dalam arus ekonomi digital global.

Dengan dukungan media sosial serta teknologi informasi dan komunikasi, negara-negara berkembang memiliki kesempatan untuk memasarkan produk-produk unggulan mereka secara lebih efisien, tanpa terbatas oleh kendala geografis maupun infrastruktur konvensional. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan dalam kerangka BRI turut memperkuat kelancaran arus distribusi barang ekspor dan impor.

Apabila potensi ini dimanfaatkan secara optimal, negara-negara peserta dapat menikmati akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kesempatan untuk berdiri sejajar dengan negara seperti Tiongkok bukanlah hal mustahil, asalkan ada komitmen terhadap penguatan kapasitas digital, inovasi lokal, serta tata kelola ekonomi yang adaptif terhadap era konektivitas global.

BRI di Tengah Perebutan Narasi Global

Proyek *Belt and Road Initiative* dapat dipahami sebagai sebuah bentuk aksi sosial yang berskala besar dan melibatkan banyak negara. Di balik proyek ini, terdapat jutaan individu yang turut berkontribusi, baik sebagai pengambil kebijakan, pelaksana teknis, maupun sebagai penerima dampak. Ketika sebuah inisiatif lintas negara dijalankan, tentu saja diperlukan beragam perangkat pendukung—mulai dari sumber daya manusia, sistem manajemen yang efektif, pendanaan yang kuat, hingga infrastruktur dan peralatan teknologi.

Mengelola semua unsur tersebut dalam satu kerangka kerja bersama bukanlah tugas yang sederhana. Dalam konteks sosiologi komunikasi, fenomena semacam ini dikenal sebagai aksi kolektif. Aksi kolektif merupakan respons bersama yang lahir dari kesadaran sosial dan fakta-fakta objektif yang dihadapi masyarakat atau kelompok secara bersama-sama. (Jacobs, 2015).

Sebelum memahami lebih jauh bagaimana proyek BRI menjadi arena bagi jurnalisme naratif Marxis untuk melawan kooptasi media global, penting untuk terlebih dahulu menempatkannya dalam kerangka teori aksi kolektif. Dengan demikian, kita dapat melihat proyek ini tidak hanya sebagai pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai proses sosial yang menuntut sinergi kesadaran, solidaritas, dan kolaborasi lintas batas negara.

Kesadaran kolektif menjadi salah satu konsep penting dalam memahami perilaku sosial dalam proyek-proyek besar seperti *Belt and Road Initiative* (BRI). Dalam perspektif Marxis maupun pasca-Marxis, perilaku kolektif berakar pada kesadaran bersama yang tumbuh dari pengalaman hidup yang serupa, terutama dalam hal penguasaan atas sumber daya material.

Karl Marx menempatkan kesadaran kolektif dalam kaitannya dengan struktur kelas sosial. Bagi Marx, kesadaran manusia dibentuk oleh kondisi

material kehidupannya. Ketika terjadi pembagian kelas yang tajam—antara mereka yang mengendalikan alat produksi dan mereka yang hanya menjual tenaganya—maka muncul kesenjangan nilai yang disebut sebagai “nilai lebih” (*surplus value*). Dalam kerangka ini, siapa pun yang mampu menguasai alat produksi akan memegang kendali atas masyarakat. Karena sifat produksi bersifat eksploitatif, maka hubungan antar kelas tidak pernah netral, melainkan penuh ketegangan. Inilah yang mendorong perjuangan kelas, yang menurut Marx, menjadi motor penggerak sejarah manusia (Fuchs & Mosco, 2015; Manca & Karl, 2015; Ritzer, 2016).

Narasi Barat terhadap BRI sering kali dibingkai dalam kacamata kritik kelas ala Marx. Dengan kekuatan ekonominya yang besar, Tiongkok dituduh sedang mereproduksi relasi kuasa yang timpang melalui skema utang dan infrastruktur. Bagi banyak pengamat dari Barat, proyek BRI dianggap sebagai bentuk dominasi baru, di mana negara-negara peserta bisa terjebak dalam ketergantungan finansial terhadap Tiongkok.

Berbeda dengan Marx, Émile Durkheim memandang kesadaran kolektif sebagai entitas yang berbeda dari kesadaran individu. Dalam kerangka teorinya, ketika individu berkumpul dan terlibat dalam kerja-kerja kolektif—misalnya membangun jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, atau bandara—mereka terdorong oleh energi sosial yang lebih besar daripada motivasi pribadi. Di situlah kesadaran kolektif bekerja. Masyarakat bersedia bekerja keras, bahkan dalam kondisi yang melelahkan, karena ada dorongan bersama untuk menciptakan perubahan.

Durkheim juga membedakan dua bentuk solidaritas sosial: solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Solidaritas mekanis muncul dari kesamaan yang direayasa atau dirancang, misalnya lewat proyek pembangunan terencana seperti BRI. Sementara solidaritas organik tumbuh secara spontan dari latar belakang pengalaman hidup yang sama dalam masyarakat. Dalam konteks BRI, skema besar ini menciptakan peluang bagi terbentuknya solidaritas mekanis—di mana komunitas dan negara peserta membangun hubungan melalui interaksi terstruktur yang bertumpu pada infrastruktur, teknologi, dan konektivitas digital.

Menariknya, di era teknologi informasi dan media sosial, komunikasi tidak lagi bersifat satu arah. Orang-orang kini lebih mudah membentuk komunitas secara daring, bahkan dengan tujuan sederhana seperti hiburan. Namun, dari sinilah kesadaran kolektif baru juga bisa tumbuh—lebih cair, lebih cepat, dan lebih terhubung secara global (Davis, 2011).

Dalam kerangka Marxis, komunikasi bukan sekadar proses pertukaran informasi. Ia merupakan bagian dari produksi dan reproduksi hubungan sosial. Dengan demikian, komunikasi memiliki dimensi ekonomi dan politik. Marx mengkritik pandangan deterministik terhadap teknologi, karena menurutnya,

teknologi hanya akan mengulang kembali ketimpangan relasi produksi, yang berujung pada konflik kelas (Shan Bo & Feng Ji-hai, 2019). Oleh karena itu, ia menyerukan pembentukan masyarakat komunikatif—masyarakat yang tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga kesetaraan, solidaritas, dan cita-cita komunal.

Tiongkok merupakan salah satu negara yang secara nyata menerapkan praktik jurnalisme Marxis. Dalam model ini, media tidak berdiri sebagai entitas independen yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai bagian dari sistem yang dikoordinasikan oleh enam kekuatan besar: partai politik, pemerintah, masyarakat, pebisnis, praktisi media, dan kekuatan budaya. Keenam kekuatan ini bekerja secara kolaboratif untuk mengarahkan dan memengaruhi kerja pers, dengan tujuan menciptakan sinergi antara kepentingan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Dari segi kepemilikan, media di Tiongkok berada dalam genggamannya beberapa aktor utama: partai, negara, modal, dan individu. Keempat aktor ini memiliki kapasitas untuk mengendalikan media secara langsung. Sementara itu, profesionalisme dan kekuatan budaya memengaruhi media melalui jalur yang lebih lunak—melalui nilai, etika, dan praktik sehari-hari di ruang redaksi. Sistem regulasi di Tiongkok pun menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan utama, meski keputusan akhir sering kali dipengaruhi oleh dinamika antarkekuatan yang ada, termasuk dorongan dari masyarakat atau profesional media. (Luo, 2015)

Sistem media di Tiongkok dapat dilihat sebagai cerminan kompleksitas ideologi yang saling berkelindan—memadukan budaya tradisional Tiongkok, liberalisme terbatas, komunisme, otoritarianisme, partisipasi demokratis, dan profesionalisme. Kolaborasi antar unsur tersebut membentuk ekosistem media yang—setidaknya secara teoritis—tepat secara politik, menguntungkan secara ekonomi, dan membangun secara kultural. Masing-masing aktor merasa memiliki ruang kontribusi, sekaligus kepemilikan atas sistem media itu sendiri.

Dalam kerangka itu, pemerintah Tiongkok terus berupaya memperkuat fondasi media dengan melakukan reformasi pendidikan jurnalisme. Jumlah lembaga pendidikan tinggi yang membuka program studi komunikasi dan jurnalisme meningkat pesat. Salah satu langkah penting adalah pendirian Universitas Komunikasi Tiongkok yang menjadi pusat pengembangan pemikiran dan praktik jurnalisme nasional. Di bangku kuliah, para mahasiswa diajarkan tentang pentingnya nilai-nilai jurnalisme seperti etika profesi, akurasi, objektivitas, ketepatan waktu, dan dampak sosial dari produk jurnalistik. Reformasi ini dilakukan sebagai strategi jangka panjang untuk membangun media yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga loyal terhadap visi kebangsaan dan sosialisme berciri khas Tiongkok.

Namun demikian, hasil praktik jurnanisme di Tiongkok masih menuai perdebatan. Beberapa studi mengindikasikan bahwa meskipun nilai-nilai objektivitas dan profesionalisme ditekankan, produk jurnalistik yang dihasilkan tetap mengandung muatan propaganda negara. Namun, propaganda tersebut disampaikan dengan cara yang jauh lebih halus dan persuasif dibandingkan dengan model-model propaganda yang konfrontatif.

Sementara itu, media yang lebih berorientasi pasar memosisikan dirinya sebagai aktor yang tetap bisa menawarkan perspektif yang lebih cair. Mereka berupaya mencari sisi unik dari sebuah isu dan mengemasnya dalam narasi yang menarik dan menjual. Hal ini menciptakan ruang kompromi dalam sistem politik Tiongkok yang pada dasarnya cukup tertutup, namun masih memberi ruang bagi ekspresi wacana yang lebih lentur. (Yang, 2012)

Kondisi inilah yang kemudian menjadi sorotan banyak peneliti. Fokus utama mereka adalah melihat kontradiksi antara kontrol negara dan dinamika pasar. Di satu sisi, media membutuhkan kebebasan untuk menarik perhatian khalayak dan meningkatkan pendapatan iklan. Di sisi lain, partai tetap memegang kontrol penuh terhadap konten dan arah pemberitaan. Dalam praktiknya, struktur pendanaan media di Tiongkok sangat bergantung pada iklan. Oleh karena itu, hubungan antara komite propaganda partai, pebisnis lokal, departemen periklanan, dan redaksi menjadi sangat strategis.

Beberapa kajian menyimpulkan bahwa media di Tiongkok telah mampu bertahan dan bahkan berkembang dengan cara yang khas. Alih-alih tunduk pada tekanan liberalisasi ala Barat, media Tiongkok justru mengembangkan dirinya sebagai alat kekuatan sosial yang terstruktur. Media tidak lagi hanya berfungsi sebagai kanal informasi, melainkan sebagai instrumen untuk menggerakkan nilai-nilai bersama dalam proyek sosial dan politik nasional seperti BRI (*Belt and Road Initiative*). (Creemers, 2013; Sparks, 2010; Yang, 2012)

Dengan kata lain, Tiongkok telah menciptakan sistem jurnanisme naratif yang tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi makna, mengelola persepsi publik, dan memobilisasi solidaritas sosial sesuai dengan arah ideologi negara. Model ini bisa disebut sebagai jurnanisme Marxis versi Tiongkok—sebuah pendekatan yang menempatkan media sebagai bagian dari proses transformasi sosial, politik, dan ekonomi yang terencana dan terpusat.

Dalam dinamika sistem media global, peran negara dalam mengendalikan media di Tiongkok menawarkan pendekatan yang sangat berbeda dari kebebasan pers yang dominan di negara-negara Barat. Tiongkok menerapkan sistem pengendalian yang dinamis—yakni pengawasan yang tidak bersifat represif, melainkan strategis dan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional. Pola seperti ini memungkinkan negara untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi dengan menyinergikan tiga elemen penting: instrumen komersial, instrumen politik, dan partisipasi publik, yang semuanya tetap berada dalam kerangka profesionalisme media.

Sebaliknya, media di negara-negara Barat kerap berada dalam cengkeraman sistem kapitalisme yang sangat dominan. Liberalisme dan demokrasi, meski menjanjikan kebebasan dan layanan publik yang objektif, tidak jarang justru menjadi tirai bagi komersialisasi yang tidak terkendali. Dalam kondisi demikian, media tidak lagi berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, melainkan menjadi alat bagi kepentingan pasar dan kelompok elit tertentu. Dengan kata lain, sistem media di Barat kerap terkooptasi oleh kekuatan kapital tanpa kendali negara yang memadai, sehingga gagal menjalankan fungsi etis dan sosial secara utuh. (Luo, 2015; Y. Zhao, 2011)

Di sisi lain, sistem media di Tiongkok merepresentasikan sebuah ekuilibrium yang khas. Ternyata, di tengah kontrol negara, masih terdapat ruang partisipasi rakyat dan etos profesionalisme. Kolaborasi antara negara dan masyarakat ini tidak hanya memperkuat peran media dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk membentuk solidaritas sosial dan memperkuat kesadaran kolektif di masyarakat. Media, dalam hal ini, menjadi perpanjangan tangan dari moralitas sosial—yakni tindakan sadar yang mengarah pada kebaikan bersama.

Dalam konteks proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), peran media menjadi sangat strategis. Kerja sama antara pemerintah Tiongkok dan negara-negara mitra BRI didasarkan pada prinsip kesetaraan, kesukarelaan, serta penghormatan terhadap etika dan nilai moral universal. Tidak ada paksaan, melainkan kesadaran bersama untuk membangun kesejahteraan lintas negara melalui penguatan infrastruktur, konektivitas, dan kerja sama teknologi.

Contoh yang menarik dapat ditemukan dalam pemberitaan media Rusia terkait proyek BRI. Analisis terhadap laporan media Rusia antara tahun 2013 hingga 2015 mengindikasikan bahwa proyek BRI diliput dalam berbagai bingkai (*framing*) yang beragam, bahkan ada yang diskursif dan bersifat mendukung, namun ada pula yang bersifat kritis. Hal Ini mencerminkan bahwa meskipun Rusia merupakan negara penerus dari Uni Soviet dan masih mengusung nilai-nilai Marxisme, media di sana tidak selalu tunduk pada penyensoran ketat. Sebaliknya, ruang perdebatan tetap terbuka. (Kuteleva & Vasiliev, 2020)

Hal ini membuktikan bahwa jurnalisme Marxis tidak identik dengan pembungkaman suara. Justru, esensi utama dari jurnalisme Marxis adalah mengungkap ketimpangan, membongkar ketidakadilan, serta menyuarakan kepentingan rakyat terhadap penguasa dan pemilik modal. Dalam kerangka ini, jurnalisme berfungsi sebagai alat kritik yang konsisten, tidak hanya terhadap sistem liberal, tetapi juga terhadap penyimpangan dalam sistem

sosialis itu sendiri. Tujuan utamanya tetap satu: mengarahkan masyarakat menuju keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif.

Dengan demikian, proyek BRI dan sistem media yang menyertainya—baik di Tiongkok maupun di negara-negara mitra—dapat menjadi arena penting untuk menerapkan nilai-nilai jurnanisme yang berakar pada kepedulian sosial, integritas moral, dan semangat kolektif. Model seperti ini menjadi alternatif penting bagi dunia yang selama ini didominasi oleh narasi tunggal liberalisme media Barat.

Pembentukan Opini Publik

Dalam konteks pembangunan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), peran media menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk opini publik yang konstruktif. Namun, sejarah media di berbagai negara mengindikasikan bahwa kebebasan pers yang tidak diiringi tanggung jawab kerap menimbulkan fragmentasi sosial dan ketegangan politik. Pengalaman pemilu di Amerika Serikat dan Indonesia memberikan gambaran nyata akan hal ini.

Di Amerika Serikat, saat pemilihan Presiden Donald Trump, media menjadi sangat terpolarisasi. The New York Post secara terang-terangan mendukung Hilary Clinton, sementara The Huffington Post memberikan dukungan kuat kepada Donald Trump. Situasi serupa terjadi pula di Indonesia. Pada Pemilu 2014 dan 2019, sejumlah media massa terlihat mendukung kandidat tertentu secara eksplisit. Metro TV, misalnya, dikenal sebagai pendukung kuat Joko Widodo, sedangkan TV One lebih condong kepada Prabowo Subianto. Bahkan media cetak seperti Kompas dan jaringan televisi milik Grup MNC pun mengalami perubahan arah dukungan sesuai dengan dinamika politik dan kepentingan pemiliknya. Fenomena ini erat kaitannya dengan sistem oligarki media, di mana pemilik media juga memegang posisi penting dalam partai politik atau pemerintahan (Jandevi, 2019).

Akibatnya, ruang publik sering kali tidak mencerminkan diskusi demokratis yang sehat, melainkan justru dimonopoli oleh elit politik yang mengejar kekuasaan dan akumulasi kapital. Rakyat, dalam kondisi seperti ini, hanya menjadi objek politik—diperlukan saat pemilu, lalu dilupakan. Polarisasi pun tidak bisa dibendung, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia, menciptakan kubu-kubu sosial yang saling berseberangan. Dalam kasus Indonesia, perpecahan ini bahkan merambah ke isu-isu agama dan ideologi, memperuncing ketegangan sosial yang sebelumnya tersembunyi (Fadillah & Lin, 2019).

Sebagai alternatif atas kondisi tersebut, jurnanisme Marxis menawarkan kerangka kerja yang berupaya menyeimbangkan kekuatan politik dan kapital dengan kendali negara yang bertanggung jawab. Dalam sistem ini, pemerintah

memegang peran penting untuk memastikan bahwa media tidak dijadikan alat dominasi elit, melainkan sarana edukatif dan integratif bagi masyarakat. Dalam konteks proyek BRI, pendekatan seperti ini dapat menciptakan narasi pembangunan yang inklusif dan meminimalisasi disinformasi.

Di sisi lain, kehadiran media sosial seperti X dan Facebook memberikan saluran alternatif bagi publik untuk mengekspresikan pandangan mereka. Media sosial berperan sebagai penyeimbang arus utama opini publik, karena setiap individu memiliki kesempatan yang relatif setara untuk menyampaikan suara dan versinya sendiri atas suatu isu. Contohnya, pada tahun 2021, ketika Rektor Universitas Indonesia mendapat sorotan publik karena merangkap jabatan sebagai komisaris di bank milik negara, gelombang kritik di media sosial akhirnya mendorong yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.

Namun, meskipun media sosial menjanjikan keterbukaan informasi, rendahnya literasi digital masyarakat juga membuka ruang bagi penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian (Santoso & Nugroho, 2019). Dalam konteks ini, prinsip jurnalisme Marxis yang menekankan peran negara dalam menjaga keseimbangan sosial dapat menjadi acuan untuk mengatur tata kelola media sosial. Pengawasan yang terukur dan berlandaskan etika akan membantu menjaga ruang digital agar tetap sehat dan produktif.

Pemanfaatan media sosial dalam mendukung proyek BRI pun sudah mulai dilakukan secara aktif. Sebuah studi yang dilakukan oleh Abbasi dan tim (2021) menggambarkan bahwa tagar seperti #BeltRoad dan #BRI banyak digunakan oleh diplomat, jurnalis, dan masyarakat umum dalam percakapan daring tentang proyek BRI. Di Pakistan, tagar #CPEC (Tiongkok–Pakistan Economic Corridor) bahkan sempat menjadi trending topik, menandakan adanya antusiasme publik terhadap proyek tersebut. Namun, sebagaimana biasa dalam ruang publik digital, respons yang muncul tidak sepenuhnya positif. Sejumlah kritik datang dari negara-negara Barat yang memandang proyek BRI sebagai bentuk dominasi ekonomi baru oleh Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok memanfaatkan media sosial, khususnya X, sebagai sarana strategis dalam membangun narasi positif mengenai proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Dalam periode antara 1 Oktober 2016 hingga 24 Oktober 2017, tercatat sebanyak 53.670 cuitan dipublikasikan melalui tiga akun resmi pemerintah Tiongkok. Cuitan-cuitan tersebut tidak hanya tersebar luas, tetapi juga mendapatkan respons yang tinggi dari warganet, dengan total tanggapan mencapai 255.857 kali (Nip & Sun, 2018).

Lebih jauh, media resmi Tiongkok pun turut memanfaatkan platform digital seperti Facebook dan X untuk memperluas jangkauan pembentukan opini publik. Sejumlah media milik pemerintah—antara lain CGTN, CGTN America, CGTN Africa, Global Times, People's Daily, dan Xinhua—telah mengunggah lebih dari 43.230 konten berita yang berkaitan dengan proyek BRI. Aktivitas

ini mencerminkan adanya upaya sistematis untuk menyampaikan informasi secara luas kepada publik global (Liang, 2019).

Seiring dengan meningkatnya distribusi informasi tentang Tiongkok di media sosial, terjadi pula peningkatan diskusi publik di berbagai platform digital. Fakta ini mengindikasikan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai kanal komunikasi satu arah, melainkan juga menjadi ruang interaktif dalam membangun opini publik. Dengan demikian, media sosial terbukti efektif dalam membentuk citra positif proyek BRI di mata masyarakat internasional.

Pembentukan Budaya Masyarakat

Kemajuan suatu bangsa tidak dapat diraih dalam waktu semalam. Ia menuntut proses panjang yang penuh dedikasi, pembelajaran, dan ketekunan. Sejarah mencatat bagaimana Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mencapai kemajuannya melalui siklus berdarah—konflik, revolusi, dan transformasi sosial-politik yang panjang. Di Asia, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru, bukan karena keberuntungan, melainkan karena kerja keras, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah. Mereka bekerja saat dunia masih terlelap, dan beristirahat ketika dunia mulai beranjak tidur. Dari situlah, budaya bangsa terbentuk.

Di era digital, konvergensi media dan konektivitas internet menghadirkan peluang besar untuk membangun peradaban baru. Interseksi antara teknologi dan kehidupan sehari-hari telah memanjakan manusia dengan berbagai kemudahan. Tiongkok, dengan kecerdikannya, menangkap peluang ini dengan baik. Negara itu berhasil memadukan teknologi dengan model bisnis inovatif yang menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam bidang teknologi informasi. Raksasa-raksasa teknologi seperti Ali Baba, Huawei, Tencent, ZTE, dan WeChat menjadi wajah dari kebangkitan Tiongkok di ranah global (W. Zhao, 2015).

Platform media sosial—baik buatan Tiongkok maupun dari Barat—seperti WeChat, Micro-Blog, Wiki, Facebook, X, YouTube, dan TikTok—telah menjadi kanal virtual yang aktif dalam pertukaran informasi publik antarnegara (Hongxiu, 2018). Tiongkok bersaing ketat dengan kekuatan Barat dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka melakukannya dengan modal budaya kerja keras, etos disiplin, dan kecakapan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi. Salah satu bukti konkret adalah fitur multifungsi yang ditawarkan oleh aplikasi WeChat, yang tidak hanya berfungsi sebagai media sosial, tetapi juga sebagai alat pembayaran digital harian.

Melalui proyek *Digital Silk Road* (DSR), Tiongkok semakin menegaskan posisinya sebagai pemimpin teknologi global. Dalam ekosistem media baru, budaya kerja keras dan ketekunan kini dapat terbentuk lebih cepat karena media

menyediakan akses informasi yang luas dan instan. Di sektor pelayanan publik, misalnya, penggunaan teknologi digital memungkinkan proses administrasi berlangsung lebih transparan dan efisien. Mekanisme pembayaran daring tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga mengurangi potensi suap, korupsi, dan praktik percaloan. Inilah wajah dari budaya baru yang mulai mengakar. Di Tiongkok, pembayaran melalui WeChat atau Alipay telah menjadi bagian dari keseharian. Sementara itu, di Indonesia, praktik serupa masih berkembang secara terbatas.

Proyek DSR dan Inisiatif Sabuk dan Jalan bukan hanya mempromosikan kerja keras dan transparansi, tetapi juga mendorong budaya inovasi dan adopsi teknologi tinggi (M. Guo, 2017; Shahriar, 2020; Solmecke, 2016). Tidak bisa dimungkiri, peran Tiongkok dalam inovasi teknologi telah menginspirasi banyak negara. Mereka telah berkontribusi dalam pembangunan jembatan, bandara, sistem pengolahan limbah, hingga pelestarian ekosistem lingkungan hidup. Bahkan, berbagai pemberitaan menyebutkan bahwa Tiongkok berhasil memecahkan rekor pembangunan gedung dalam waktu sangat singkat tanpa mengesampingkan kualitas.

Pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari dukungan inovasi teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki. Para pekerja yang dikirim untuk menangani proyek-proyek BRI di berbagai negara merupakan tenaga profesional, ahli di bidangnya, dan terbiasa bekerja dengan standar tinggi. Dengan demikian, proyek BRI tidak hanya menjadi proyek infrastruktur semata, tetapi juga menjadi sarana penyebaran nilai-nilai budaya kerja unggul yang dimiliki Tiongkok kepada negara-negara mitra.

Merawat Nasionalisme dan Kepedulian pada Sesama

Nasionalisme adalah bentuk nyata dari rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dalam dunia politik dan budaya, nasionalisme menjadi fondasi penting bagi tegaknya sebuah negara. Namun, rasa nasionalisme bukan sesuatu yang tumbuh secara instan. Merupakan hasil dari proses Panjang, dibentuk melalui pengalaman sejarah, pendidikan, budaya, dan sistem nilai yang diwariskan antargenerasi.

Tiongkok merupakan salah satu contoh menarik dalam membangun nasionalisme sebagai sebuah identitas bangsa. Rasa cinta tanah air di negeri tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, bahkan hingga ke ranah hiburan. Banyak film dan serial televisi Tiongkok yang dengan bangga menampilkan unsur-unsur budaya lokal seperti pakaian tradisional, adat istiadat, serta kisah-kisah kolosal berlatar kerajaan dan dinasti masa lampau. Dengan cara ini, rasa nasionalisme tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diwariskan melalui media populer.

Dalam memapak era globalisasi, Tiongkok tidak sekadar beradaptasi, melainkan juga menciptakan alternatif arah globalisasi dengan karakter khas: globalisasi yang berkarakter sosialis. Salah satu pilar penting dalam pendekatan ini adalah pembangunan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx, negara yang kuat adalah negara yang memiliki kontrol atas sumber daya dan alat produksi, serta mampu menciptakan pemerataan ekonomi. Untuk itu, Tiongkok mengembangkan sistem ekonomi berbasis inovasi ilmiah yang terkoordinasi, terbuka, ramah lingkungan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat (Y. Hong, 2020).

Globalisasi ala Tiongkok bukanlah proyek egois. Sebaliknya, dibangun di atas prinsip solidaritas antarbangsa, terutama kepada negara-negara berkembang dan negara-negara di kawasan selatan dunia. Model sosialisme revolusioner yang dianut Tiongkok menekankan pentingnya kedaulatan nasional yang berdiri sejajar, tanpa dominasi satu bangsa atas bangsa lainnya. Konsep ini menekankan kolaborasi ekonomi sebagai jalan untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan (Lin, 2019).

Melalui proyek BRI, Tiongkok memperkenalkan bentuk globalisasi yang memadukan semangat sosialisme dengan dinamika kapitalisme global. Di sinilah terlihat bagaimana negara-negara peserta BRI dapat belajar dari pendekatan Tiongkok—bukan hanya mengadopsi, tetapi juga menyesuaikan dan menambahkan inovasi sesuai konteks kebijakan masing-masing negara untuk mengejar kemajuan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, Tiongkok menerapkan regulasi yang ketat. Mulai dari hukuman berat terhadap pelaku korupsi, penindakan tegas terhadap praktik monopoli, hingga kebijakan distribusi kerja yang menjamin keadilan ekonomi.

Tujuan dari kebijakan tersebut adalah mencegah terbentuknya oligarki ekonomi dan memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit. Dalam konteks ini, penting untuk melihat secara obyektif: bukan tergesa-gesa menghakimi, tetapi mencoba memahami pendekatan yang ditawarkan. Di berbagai negara Barat, kritik terhadap Tiongkok kerap disuarakan dengan nada curiga, karena mereka melihat Tiongkok sebagai pesaing dalam perebutan pengaruh global. Namun bagi negara-negara berkembang, proyek BRI bisa menjadi peluang baru. Bukan untuk ikut serta dalam konflik kepentingan global, melainkan untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera melalui kerja sama ekonomi yang berkeadilan.

Dengan melibatkan lebih dari 65 negara dalam proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok menegaskan komitmennya untuk menyebarkan gagasan globalisasi yang berwatak sosialis. Tujuan utamanya adalah menciptakan kemajuan dan kemakmuran ekonomi yang tidak hanya dinikmati oleh rakyat dan negara Tiongkok, tetapi juga dirasakan oleh negara-negara mitra yang tergabung dalam proyek ini. Semangat inklusivitas dan kolaborasi

ini patut diapresiasi, terutama di tengah kondisi dunia yang masih berjuang memulihkan diri dari dampak pandemi global. Di saat banyak negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif, proyek BRI tampil sebagai salah satu inisiatif yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global. (Buckley, 2020; Y. Hong, 2020).

Keberhasilan Tiongkok dalam menjalankan proyek ini tidak lepas dari visi yang kuat dan program kerja yang terstruktur. Dalam rangka menyebarluaskan gagasan globalisasi bercorak sosialisme serta sebagai sarana sosialisasi dan pengawasan, kantor berita Xinhua memanfaatkan kekuatan media sosial. Mereka mengelola akun resmi di berbagai platform seperti Weibo, X, Facebook, YouTube, dan Instagram. Di kanal-kanal ini, Xinhua menghadirkan satu narasi resmi tentang “Tiongkok Baru” yang konsisten dan seragam.

Melalui pusat media barunya, Xinhua juga melakukan pemantauan terhadap konten yang beredar di akun domestik, dengan tujuan membangun preferensi kolektif masyarakat dan memperkuat identitas nasional. Strategi ini menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan “kisah Tiongkok yang baik” kepada komunitas global. Dengan cara itu, Tiongkok tidak hanya mengembangkan citra nasional yang positif, tetapi juga memperluas jejaring kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain yang menjadi mitra dalam proyek BRI. (Nie, 2019).

Sarana Sosialisasi Program Negara dan Pemerintah

Di era saat ini, penyebaran informasi tidak lagi bergantung semata pada media konvensional seperti radio, surat kabar, atau televisi. Kemajuan teknologi informasi yang ditandai dengan konvergensi media dan meningkatnya konektivitas internet telah menghadirkan peluang besar bagi pemerintah untuk menjangkau masyarakat secara lebih cepat, luas, dan interaktif. Media sosial menjadi kanal baru yang strategis dalam menyosialisasikan program-program pemerintah kepada publik. Platform seperti Facebook, X, WeChat, TikTok, Instagram, hingga YouTube kini sangat populer, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena ini menjadikan media sosial sebagai sarana efektif untuk menyampaikan kebijakan, peringatan bencana, serta edukasi publik. (Prasty, 2011).

Sebagai contoh, ketika pemerintah mendeteksi potensi bencana alam, seperti: tsunami, badai tropis, atau hujan lebat, informasi dapat segera disebarluaskan melalui media sosial. Dengan demikian, masyarakat memiliki cukup waktu untuk mengantisipasi dan mengikuti arahan tanggap darurat yang diberikan. Respons cepat ini tentu sangat penting untuk meminimalkan korban, baik secara material maupun jiwa. (Zhang et al., 2020).

Pengalaman Tiongkok dalam menangani pandemi Covid-19 menjadi ilustrasi penting dari keberhasilan penggunaan teknologi informasi dalam menyosialisasikan kebijakan publik. Meskipun merupakan negara dengan populasi terbanyak di dunia, Tiongkok mampu menekan angka penyebaran dan kematian akibat Covid-19 secara signifikan. Capaian ini tidak hanya disebabkan oleh sistem kesehatan yang kuat, tetapi juga oleh penerapan teknologi informasi yang efisien serta pendekatan sosialis yang terkoordinasi dengan baik. Pemerintah Tiongkok menggunakan aplikasi di gawai masyarakat untuk memantau perkembangan kasus, menyampaikan imbauan kesehatan, dan mengedukasi publik tentang pentingnya tindakan pencegahan. Informasi yang dikirimkan secara terpusat dan jelas ini memungkinkan masyarakat untuk bergerak secara kolektif, sehingga penanganan pandemi berjalan efektif. (Kobayashi et al., 2020).

Sebagai penggagas proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), khususnya *Digital Silk Road* (DSR), Tiongkok juga menawarkan pengalaman ini kepada negara-negara mitra. Penerapan teknologi informasi yang telah berhasil mereka jalankan diyakini dapat membantu pemerintah negara lain dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan menanggulangi krisis. Program-program infrastruktur digital yang diinisiasi melalui BRI, seperti pembangunan pusat data, jaringan internet, dan sistem komunikasi terpadu, turut mendorong transformasi digital di negara-negara berkembang. (Huadong Guo et al., 2018).

Di samping itu, media sosial juga dimanfaatkan untuk menjalankan diplomasi digital. Pemerintah Tiongkok aktif menggunakan Facebook dan X untuk menyampaikan narasi positif seputar proyek BRI kepada dunia. Penelitian Fan Liang mencatat bahwa media resmi Tiongkok secara konsisten menggunakan pendekatan *soft power* dalam mempromosikan kebijakan luar negeri mereka di platform-platform ini. Upaya tersebut tidak hanya membentuk persepsi global yang lebih seimbang terhadap Tiongkok, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat internasional terhadap nilai-nilai dan tujuan proyek BRI. (Liang, 2019).

Inisiatif BRI, Saluran Nilai Budaya

Masih banyak masyarakat dan kalangan elite politik yang memahami proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) sebatas proyek pembangunan infrastruktur fisik semata, seperti jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, bandara, hingga pembangkit listrik. Padahal, skema besar ini jauh melampaui proyek infrastruktur. Proyek BRI juga mencakup jalur ekonomi digital, teknologi informasi, pengembangan media baru, pertukaran budaya, kerukunan antaragama, hingga kampanye pendidikan lintas negara. (景嘉伊, 2019).

BRI dapat dipahami sebagai refleksi komunikasi antarperadaban, yang melibatkan masyarakat multiagama dan multietnis. Ini menjadi dasar bagi

penciptaan saluran konektivitas tidak hanya dalam aspek ekonomi dan politik, tetapi juga dalam ranah budaya dan sosial. (不明, 2019).

Berbagai seminar dan simposium internasional telah diselenggarakan oleh kalangan akademisi untuk membahas beragam potensi proyek BRI. Dari diskusi-diskusi tersebut, muncul setidaknya tiga pendekatan potensial dalam pengembangan wacana komunikasi dalam kerangka BRI. Pertama, membangun aliansi media antara negara-negara peserta dengan pemerintah Tiongkok, sebagai upaya untuk membentuk reorientasi komunikasi yang baru. Kedua, mendorong dialog intensif antara negara-negara berkembang dan menantang pandangan yang menganggap Tiongkok sebagai ancaman. Ketiga, memaksimalkan potensi media digital dalam menciptakan ruang komunikasi antarindividu lintas batas.

Media digital memungkinkan pertukaran pesan secara langsung dan real-time. Di satu sisi, lonjakan wisata dan mobilitas pendidikan lintas negara memungkinkan kontak fisik antarperadaban. Di sisi lain, media sosial memperluas koneksi virtual, memungkinkan siapa pun untuk mendapatkan informasi langsung dari negara tujuan melalui laman resmi atau bertukar pesan melalui platform sosial seperti WeChat, Facebook, hingga TikTok.

Lebih lanjut, media baru telah menyusup jauh ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh sebab itu, mempromosikan visi dan program BRI melalui media digital menjadi lebih strategis dibandingkan hanya mengandalkan media tradisional. Media tradisional kerap terperangkap dalam konflik ideologis dan politik antara Tiongkok dan negara-negara lain yang memiliki sistem pemerintahan berbeda. Sementara itu, media baru cenderung lebih fleksibel, tidak mudah dipolitisasi, serta mampu menciptakan ruang komunikasi internasional yang lebih netral dan luas. (Deqiang, Ji & Zhengrong, 2018).

Dengan melibatkan lebih dari 65 negara dan populasi manusia yang sangat beragam, proyek BRI membawa misi yang lebih besar daripada sekadar investasi ekonomi. Proyek ini menciptakan ruang pertemuan antarbudaya dan nilai-nilai yang berbeda. Hubungan yang harmonis antarwarga lintas negara menjadi pondasi penting bagi kemajuan budaya bersama. Banyak negara peserta BRI berasal dari kawasan berkembang dengan tingkat ekonomi yang belum merata. Oleh karena itu, proyek ini juga membuka peluang untuk memperkecil kesenjangan dan memperkuat kerja sama lintas peradaban.

Sejak peluncurannya pada tahun 2013, berbagai kegiatan diplomatik dan pertukaran budaya telah dilakukan sebagai bagian dari program BRI. Langkah-langkah tersebut menjadi jembatan untuk memperkuat saling pengertian dan membangun pengakuan antarbangsa, sekaligus memperkuat fondasi budaya sebagai landasan kerja sama jangka panjang. (Zhang Jiancheng, 2016; Hao Yu & Zhu Jianghua, 2020).

BRI, Media Baru, dan Jejak Oligarki dalam Narasi Global

Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa wacana mengenai *Belt and Road Initiative* (BRI) cenderung terfokus pada isu ekonomi. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya keliru, gambaran tersebut juga belum menggambarkan keseluruhan aspek yang diusung oleh proyek ini. BRI sejatinya mencakup spektrum kerja sama yang lebih luas, antara lain dalam bidang budaya, pendidikan, pertukaran masyarakat, hingga isu lingkungan hidup. (Solmecke, 2016, hlm. 9–27).

Sun dalam penelitiannya menemukan bahwa pembahasan topik yang terkait dengan BRI meliputi isu politik sebesar 19,4%, ekonomi 35,5%, budaya 12,9%, dan kategori lainnya 32,2%. Sementara itu, Li dan Zhang mengungkapkan bahwa topik kebijakan menyumbang 35% dalam wacana BRI. Jika topik fasilitas, perdagangan, dan keuangan digabungkan dalam satu kategori, angka tersebut meningkat menjadi 43%. Meskipun terdapat sedikit perbedaan, kedua hasil penelitian ini sama-sama menegaskan pentingnya aspek ekonomi dalam BRI. (Chen, 2018, hlm. 1–102).

Fenomena serupa juga tercermin dalam proyeksi liputan media. Studi kasus di Albania menunjukkan bahwa media publik di negara tersebut lebih menyoroti dimensi ekonomi dari proyek BRI. Liputan terhadap kerja sama budaya antara Albania dan Tiongkok, pembangunan, urusan politik, olahraga, pendidikan, serta sejarah, mendapat porsi yang lebih kecil. Media swasta Albania pun memperlihatkan kecenderungan serupa. Sebagai contoh, Shekulli meliput aspek ekonomi BRI sebanyak 53%, Dita sebesar 50%, Shqiptarja 64%, Panorama 50%, Telegraph 44%, dan Javanews sebesar 59%. Beberapa media seperti Shqiptarja, Javanews, dan Telegraph juga menampilkan laporan tentang aspek budaya dan politik BRI.

Sementara itu, media Barat seperti *Voice of America* (VOA) lebih menyoroti aspek politik proyek ini. Di sisi lain, media Tiongkok tampak menekankan pada aspek ekonomi (43%) dan pembangunan (21%) dalam narasi mereka mengenai kerangka kerja BRI. (Sylaj, 2020, hlm. 1–18).

Namun demikian, dalam lanskap kapitalisme global, kemajuan ekonomi Tiongkok kerap dipandang sebagai ancaman. Sistem kapitalisme dan imperialisme modern cenderung tidak memberikan ruang toleransi terhadap bangkitnya kekuatan ekonomi baru. Dalam kerangka tersebut, monopoli teknologi dan dominasi oligarki dianggap sebagai cara untuk mempertahankan supremasi global. Maka, meskipun proyek BRI dikemas dalam semangat kerja sama multilateral dan liberalisasi ekonomi, negara-negara Barat tetap memandangnya melalui kacamata geopolitik yang penuh kecurigaan. Komunikasi internasional yang intensif pun menjadi kebutuhan mendesak untuk menjernihkan persepsi tersebut. (宋瑞琛, 2017; 阚, 2019).

Di tengah tekanan ini, Chun Lin (2019) menegaskan bahwa sosialisme dan semangat internasionalisme tetap menjadi dua pilar utama yang dipegang oleh Tiongkok kontemporer dalam menghadapi tekanan imperialisme dan kapitalisme global. Inisiatif Sabuk dan Jalan, dengan demikian, bukan hanya sekadar proyek pembangunan infrastruktur atau perdagangan lintas batas, melainkan juga menjadi alat diplomasi untuk membangun tata dunia baru yang lebih setara dan bebas dari hegemoni oligarki media global.

Media Sosial dan Ruang Perlawanan

Di tengah tuduhan bahwa *Belt and Road Initiative* (BRI) adalah bentuk baru dari hegemoni ekonomi global dan alat pelanggeng oligarki keuangan, hadir pula pandangan yang menawarkan perspektif sebaliknya. BRI dinilai tidak semata-mata sebagai ekspansi ekonomi, melainkan sebagai peluang untuk mendobrak dominasi kapitalisme global melalui jembatan dialog lintas budaya yang dimungkinkan oleh kemajuan media sosial dan teknologi komunikasi digital.

Media sosial telah menciptakan ruang baru yang inklusif dan interaktif, memungkinkan pesan dan gagasan menyebar lintas batas dalam hitungan detik. *Pertama*, konvergensi multimedia menjadi kekuatan utama dalam penyampaian informasi. Media sosial menawarkan platform di mana teks, gambar, dan materi audio-visual dapat diproduksi, diedit, disebarluaskan, dan dikonsumsi secara cepat. Video pendek, infografik, dan konten visual kini lebih digemari dibandingkan media tradisional seperti film atau drama televisi yang cenderung lebih panjang. Hal ini mencerminkan preferensi masyarakat digital yang hidup dalam lingkungan serbacepat dan padat informasi, khususnya di perangkat seluler. (Deqiang, Ji & Zhengrong, 2018).

Kedua, media baru membuka peluang pencarian audiens secara global yang sebelumnya sulit dicapai oleh media konvensional. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pelacakan audiens berdasarkan minat dan perilaku daring mereka. Dengan demikian, pesan-pesan BRI dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran kepada khalayak internasional, sekaligus membangun persepsi yang lebih positif terhadap Tiongkok dan proyek-proyek kolaboratifnya.

Ketiga, dalam kerangka mempromosikan kerja sama melalui BRI, pemerintah Tiongkok juga dituntut untuk terus meningkatkan pendanaan dan investasi pada sektor teknologi media. Salah satu langkah strategisnya adalah membangun platform media multibahasa yang ditempatkan di negara-negara mitra BRI. Hal ini mencakup pengembangan televisi berbasis internet, penyiaran daring, televisi seluler, dan layanan siaran berbasis perangkat pintar. (Kaiqiang & Chen, 2013, hlm. 47–50).

Dengan memanfaatkan kekuatan media baru, diharapkan terbentuk mekanisme jangka panjang untuk kerja sama media antarnegara. Konten BRI pun dapat semakin diperkaya dan disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing negara peserta. Media asing bahkan diundang untuk turut serta dalam produksi konten demi menciptakan narasi bersama yang saling menguntungkan.

Meskipun demikian, kekhawatiran tetap muncul dari sejumlah peneliti dan pengamat politik internasional. Jalur Sutra Digital yang menjadi bagian dari BRI, dipandang sebagai upaya Tiongkok untuk menciptakan infrastruktur digital yang terpusat dan mengeksport kelebihan kapasitas industri teknologinya. Ada pula kecemasan bahwa perluasan pengaruh Tiongkok melalui proyek ini dapat membuka jalan bagi praktik otoritarianisme digital, termasuk pembatasan demokrasi dan hak asasi manusia.

Namun, sejumlah pakar Tiongkok membantah kekhawatiran tersebut. Mereka menekankan bahwa Jalur Sutra Digital dirancang sebagai proyek yang berfokus pada teknologi dan konektivitas digital, dengan empat komponen utama yang saling terkait: pembangunan infrastruktur digital, pengembangan teknologi canggih, promosi perdagangan digital lintas negara, dan diplomasi digital dalam kerangka kerja sama multilateral. Fokus utamanya tetap pada pertumbuhan ekonomi bersama, pertukaran teknologi, dan kemajuan inklusif di era transformasi digital global.

Pertama, Tiongkok berinvestasi secara masif dalam pengembangan infrastruktur digital di luar negeri. Fokus utama investasi ini meliputi pembangunan jaringan seluler generasi terbaru, pemasangan kabel serat optik baik di darat maupun bawah laut, serta pembangunan pusat-pusat data berstandar internasional. Semua ini dimaksudkan untuk memperluas konektivitas dan mendukung transformasi digital di negara-negara mitra BRI.

Kedua, Tiongkok juga menaruh perhatian besar pada pengembangan teknologi strategis, seperti sistem navigasi satelit, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan komputasi kuantum. Teknologi ini dinilai penting, tidak hanya bagi daya saing ekonomi, tetapi juga bagi kepentingan pertahanan dan keamanan global di masa depan.

Ketiga, kesadaran akan saling ketergantungan ekonomi global mendorong Tiongkok untuk memanfaatkan Jalur Sutra Digital sebagai sarana memperluas perdagangan elektronik lintas negara. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan zona perdagangan bebas digital dan pengembangan pusat logistik regional, yang diharapkan mampu mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan efisiensi distribusi barang.

Keempat, Tiongkok berupaya membentuk lingkungan digital internasional yang ideal dengan cara mendorong diplomasi digital dan tata kelola multilateral. Salah satu upayanya adalah menggunakan forum-forum internasional,

termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menetapkan standar global dalam bidang teknologi, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur telekomunikasi dan kedaulatan siber. (crf.org, 2019).

Transformasi digital yang dilakukan Tiongkok di dalam negeri telah mendorong kebangkitan ekonomi secara signifikan. Dalam kerangka dinamika kapitalisme global, Tiongkok membawa semangat Konfusianisme sebagai etika dasar pembangunan. Etika ini mencakup pandangan holistik terhadap budaya, daya saing industri, stabilitas politik domestik, dan pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai warisan leluhur yang tetap relevan bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. (Jomo & Folk, 2013).

Demokrasi Barat, Media Arus Utama, dan Manuver Tiongkok

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia mulai menjalani era demokrasi yang meniru sistem demokrasi liberal ala Barat. Namun, dalam praktiknya, demokrasi ini belum sepenuhnya terbebas dari cengkeraman elite politik dan pemilik modal. Justru yang terjadi adalah munculnya wajah baru oligarki. Dalam konteks ini, oligarki merujuk pada kelompok elite yang memiliki kekuasaan ekonomi, politik, sekaligus mengendalikan media massa. (McCoy, 2019).

Fenomena ini sangat terlihat dalam pelaksanaan pemilu Indonesia, terutama pada pemilu 2014 dan 2019. Peran media dalam kedua pemilu tersebut bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga menjadi alat propaganda yang berpihak kepada calon tertentu. Beberapa pemilik media secara terbuka menggunakan platform mereka untuk mendukung kandidat pilihan mereka, sehingga terjadi dominasi opini publik. Media bukan lagi ruang diskusi yang netral, tetapi menjadi perpanjangan tangan kekuatan politik dan ekonomi. (Tapsell, 2015).

Di Indonesia, setidaknya terdapat dua pola umum terkait keterlibatan media dalam politik: pertama, media dimanfaatkan oleh oligarki untuk membentuk narasi yang sesuai dengan kepentingan mereka; kedua, kandidat yang tidak didukung oleh oligarki harus menyewa ruang media demi menjangkau masyarakat luas. Situasi ini memperlihatkan bahwa sistem demokrasi sekalipun dapat melahirkan ketimpangan ketika media dikendalikan oleh segelintir elite.

Kondisi serupa juga terjadi di negara-negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat. Pada masa pemilu, media massa kerap memperlihatkan keberpihakan yang tajam. Misalnya, saat pemilu antara Donald Trump dan Hilary Clinton, media-media seperti The New York Post dan The Huffington Post secara jelas memperlihatkan afiliasi politik masing-masing. Akibatnya,

ketika hasil pemilu tidak memuaskan satu pihak, ketegangan meningkat hingga terjadi insiden penyerbuan Gedung Capitol oleh para pendukung Trump. Peristiwa ini menjadi potret nyata dari dampak sistem media yang liberal dan tidak terkendali.

Dalam konteks ini, perbedaan sistem media antara negara dengan demokrasi liberal dan negara seperti Tiongkok menjadi sorotan. Jika di negara-negara Barat, media bergerak mengikuti arah pasar dan kepentingan pemilik modal, maka di Tiongkok, media beroperasi dalam kerangka yang dikendalikan oleh negara. Tujuannya bukan semata-mata untuk menjaga kekuasaan, tetapi untuk memastikan stabilitas sosial, keamanan politik, dan arah pembangunan ekonomi yang terorganisasi.

Deng Xiaoping, salah satu arsitek reformasi ekonomi Tiongkok, pernah mengungkapkan ungkapan yang terkenal: “Tidak masalah apakah kucing itu berwarna putih atau hitam, yang penting ia dapat menangkap tikus.” Ungkapan ini merefleksikan pendekatan pragmatis yang diambil Tiongkok. Bagi mereka, sistem politik yang diterapkan bukan soal label demokrasi atau otoritarianisme, melainkan soal efektivitas dalam membawa kesejahteraan rakyat dan stabilitas negara.

Di sektor media, Tiongkok melakukan reformasi dengan menggabungkan prinsip bisnis modern dan kontrol ideologis negara. Media diubah menjadi entitas bisnis publik, diberikan keleluasaan dalam hal pendanaan dan teknologi, serta diperbolehkan mengakses konten luar negeri. Namun, kontrol pusat tetap dijaga dengan ketat. Negara mengawasi arus informasi di internet untuk mencegah penyebaran konten yang dapat memicu separatisme, terorisme, dan konflik horizontal. Pendekatan ini dinilai perlu demi menjaga stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (Creemers, 2013).

Oligarki, dalam arti sesungguhnya, adalah pemusatan kekuasaan pada segelintir elite. Di negara-negara yang mengadopsi sistem pers liberal, kepemilikan media sering kali dikuasai oleh korporasi besar atau individu kaya. Berbeda dengan itu, di Tiongkok, media dikuasai negara. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi elite swasta untuk mengendalikan narasi media demi keuntungan politik atau ekonomi pribadi.

Dalam perspektif Marxis, oligarki adalah wujud dari imperialisme kapitalis. Lenin menggambarkan imperialisme sebagai fase tertinggi dari kapitalisme, yang ditandai dengan pemusatan modal, dominasi monopoli, dan penggabungan kekuatan keuangan serta industri. Monopoli internasional, menurutnya, dapat memecah dunia menjadi negara kreditor dan debitor. (Fuchs & Mosco, 2015). Model seperti ini berpotensi melahirkan ketidakadilan ekonomi dan politik global.

Demokrasi Barat di Ujung Tanduk, Membaca Ramalan Levitsky dan Ziblatt

Dalam bukunya *How Democracies Die* (2018), Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menyampaikan prediksi yang menggelisahkan: demokrasi ala Barat tidak akan runtuh karena kudeta berdarah, seperti yang lazim terjadi dalam sejarah abad ke-20. Sebaliknya, ia akan mati perlahan melalui jalan yang tampak sah: lewat pemilu, melalui pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Namun, menurut Levitsky dan Ziblatt, kematian demokrasi tidak berarti hilangnya institusi secara formal. Parlemen tetap berjalan, pemilu tetap digelar, dan konstitusi tetap ada. Akan tetapi, substansi demokrasi perlahan dikikis dari dalam oleh aktor-aktor politik yang seharusnya menjaganya.

Setidaknya terdapat empat indikator yang menandai kemunduran demokrasi gaya Barat, diantaranya yaitu:

- Melemahnya komitmen terhadap aturan dasar demokrasi, termasuk penghormatan terhadap supremasi hukum, pemilu yang bebas dan adil, serta pembatasan kekuasaan pemerintah.
- Penolakan terhadap legitimasi oposisi politik, yakni ketika aktor-aktor politik tidak lagi menganggap lawan politik sebagai pihak yang sah, melainkan sebagai musuh yang harus disingkirkan.
- Toleransi terhadap kekerasan politik, baik oleh aparat keamanan maupun kelompok-kelompok paramiliter atau relawan pendukung partai.
- Pembatasan terhadap kebebasan sipil, seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan kebebasan pers.

Permasalahan-permasalahan ini timbul karena banyak politisi yang tidak memiliki komitmen kuat terhadap nilai dan prinsip demokrasi. Mereka berhenti sebagai “pejabat terpilih”, bukan sebagai negarawan. Akibatnya, aturan main demokrasi dianggap sekadar formalitas yang dapat dilanggar, diubah sewaktu-waktu, atau bahkan diabaikan demi kepentingan politik jangka pendek.

Lebih lanjut, Levitsky dan Ziblatt menggarisbawahi bahwa ketika elit politik mulai membangun aliansi yang eksklusif, menyerang lawan secara personal, serta menciptakan polarisasi sosial, demokrasi berada dalam ancaman serius. Dalam konteks ini, perpecahan sosial bukan hanya akibat dari kontestasi politik, melainkan juga sengaja dipelihara sebagai komoditas politik lima tahunan.

Ironisnya, demokrasi gaya Barat menuntut standar etika politik yang tinggi—setara dengan monarki yang mengharuskan rajanya menaati hukum dan menjaga stabilitas kekuasaan. Jika prinsip-prinsip ini tidak dipegang, baik demokrasi maupun bentuk pemerintahan lainnya akan gagal mewujudkan

tujuan dasarnya: menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat.

Proyek BRI, Wacana Media dan Kekuasaan

Media massa tidaklah bebas nilai. Arah dan isi pemberitaan sering kali dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan pemilik media. Dalam konteks ini, informasi yang disajikan kepada publik tidak sepenuhnya netral, tetapi melalui proses konstruksi yang dipengaruhi oleh sudut pandang ideologis dan dominasi wacana tertentu.

Untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui media, teori hegemoni Antonio Gramsci menjadi alat analisis yang relevan. Gramsci berpendapat bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja secara represif melalui kekuatan fisik, melainkan lebih efektif melalui pengaruh ide dan nilai yang diinternalisasi secara sukarela oleh masyarakat. Ketika suatu kelompok berhasil membuat kelompok lain menerima nilai-nilainya sebagai sesuatu yang wajar dan sah, di situlah hegemoni bekerja.

Menurut Gramsci, hegemoni terdiri dari dua struktur utama, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik.

Pertama, masyarakat sipil mencakup institusi-institusi nonpemerintah seperti universitas, sekolah, media massa, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Melalui lembaga-lembaga ini, ideologi dominan disebarluaskan dan diinternalisasi oleh masyarakat luas. Dalam konteks global, media Barat menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menyebarkan dominasi budaya dan pandangan dunia tertentu. Wacana-wacana yang dibangun sering kali mendukung narasi hegemonik yang selaras dengan kepentingan negara-negara kuat, khususnya dalam menanggapi kebijakan negara lain seperti Tiongkok.

Kedua, masyarakat politik merujuk pada institusi-institusi formal negara yang memiliki kewenangan untuk memaksa, seperti militer, kepolisian, sistem peradilan, dan birokrasi pemerintahan. Dalam praktiknya, negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya tidak hanya menggunakan kekuatan lunak melalui media dan diplomasi budaya, tetapi juga kekuatan politik untuk membentuk persepsi global. Proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), misalnya, kerap diposisikan secara negatif dalam wacana media Barat. Tiongkok dituduh melakukan ekspansi ekonomi yang sarat utang dan pengaruh politik terselubung.

Melalui dominasi media global dan tekanan politik, negara-negara Barat berupaya menciptakan opini publik internasional yang kurang bersahabat terhadap proyek BRI. Di sinilah fungsi hegemonik kelompok dominan bekerja,

yaitu menggunakan kekuatan simbolik dan struktur kekuasaan formal untuk menciptakan narasi tunggal yang menguntungkan mereka.

Ruang Publik, dan Kontestasi Wacana Global

Negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar memiliki kapasitas luar biasa dalam membentuk lanskap politik global. Mereka tidak hanya memainkan peran strategis dalam percaturan ekonomi internasional, tetapi juga menciptakan pengaruh kuat melalui kekuatan simbolik seperti media. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat praktis menjadi satu-satunya kekuatan adidaya. Dalam kondisi ini, media massa kerap digunakan sebagai instrumen propaganda untuk membentuk opini publik, baik di dalam negeri maupun dalam arena internasional.

Namun, sebagaimana telah diprediksi oleh Samuel Huntington, dunia tidak akan selamanya unipolar. Tiongkok muncul sebagai kekuatan ekonomi dan politik baru yang digadang-gadang menjadi pesaing serius Amerika Serikat. Dalam konteks ini, proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) menjadi salah satu instrumen geopolitik dan geoekonomi yang menggambarkan bangkitnya Tiongkok di kancah global.

Wacana tentang BRI tidak hanya berkembang di ranah kebijakan atau diplomasi, tetapi juga menyebar ke ruang publik melalui berbagai kanal media. Seperti dikemukakan oleh Jürgen Habermas, ruang publik awalnya adalah wilayah diskusi kelas borjuis, yang membicarakan urusan privat dalam ruang-ruang publik seperti kedai kopi dan salon. Namun seiring waktu, ruang publik menjadi arena diskusi yang lebih luas, melibatkan kelas menengah dan bawah dalam membicarakan isu-isu sosial-politik yang lebih besar. Media massa memainkan peran penting dalam memperluas dan memperdalam wacana ini.

Dalam konteks proyek BRI, media pada awalnya berfungsi sebagai medium komunikasi dan informasi tentang kerja sama ekonomi Tiongkok dengan negara-negara lain. Namun, sebagian media arus utama, terutama media Barat, menggeser fokus peliputannya ke arah pembentukan opini politik yang mengandung kepentingan elit dan kapitalisme global. Kecenderungan ini tampak dalam bagaimana BRI sering kali dikaitkan dengan isu utang, ekspansi politik Tiongkok, dan ancaman terhadap tatanan dunia yang dipimpin Barat.

Sebaliknya, media Tiongkok aktif memproduksi narasi tandingan yang menekankan kontribusi BRI terhadap pembangunan infrastruktur, kerja sama multilateral, dan penciptaan kesejahteraan bersama. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh You Xiao dan kolega, ditemukan bahwa meskipun baik media Tiongkok maupun media Amerika mengakui bahwa BRI melibatkan banyak negara dan membawa potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi

global, keduanya memiliki fokus dan sikap pelaporan yang berbeda. Media Tiongkok lebih menekankan pada aspek teknis, capaian, dan manfaat konkret dari BRI, serta menggunakan bahasa yang cenderung positif. Di sisi lain, media Amerika lebih fokus pada dampak politik dari BRI, dan kerap menggunakan kosakata yang mencerminkan keraguan dan kekhawatiran terhadap ambisi Tiongkok.

Meski demikian, terdapat indikasi bahwa suara-suara positif terhadap proyek BRI semakin meningkat. Hal ini menjadi bukti bahwa narasi hegemonik media Barat mulai mendapat tantangan dari narasi alternatif yang dibangun Tiongkok. Untuk memperkuat posisi wacana globalnya, penting bagi Tiongkok dan negara mitranya untuk membangun rasa saling percaya serta mendorong kerja sama yang setara di bidang media. Dengan begitu, wacana tentang BRI tidak hanya dimonopoli oleh satu pihak, melainkan menjadi arena dialog terbuka yang memperkaya pemahaman internasional tentang proyek besar ini.

Media Sosial dan Sarana Komunikasi Internasional

Presiden Xi Jinping pernah menyampaikan bahwa Jalur Sutra kuno bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga jalur perdamaian, inklusivitas, dan pertukaran pengetahuan antarsipilasi. Semangat inilah yang menjadi warisan peradaban manusia dan kini coba dihidupkan kembali melalui Proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (*Belt and Road Initiative* atau BRI). Dalam konteks kekinian, promosi nilai-nilai Jalur Sutra tidak bisa dilepaskan dari peran media sosial. Media sosial memberikan ruang yang fleksibel dan interaktif untuk menjembatani dialog antarsuku bangsa dan antarperadaban, khususnya di era komunikasi global yang serbacepat dan digital.

Meski demikian, tantangan tidak kecil dihadapi. Salah satunya adalah ketimpangan infrastruktur digital di negara-negara peserta proyek BRI. Internet dan media baru belum sepenuhnya merata, terutama di negara-negara berkembang. Dalam hal ini, Tiongkok sebagai kekuatan utama di balik BRI ditantang untuk membantu menciptakan kesetaraan akses digital. Dengan begitu, media sosial dalam proyek BRI bukan hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi global, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang mempererat rasa saling percaya dan persaudaraan antarnegeri. (Deqiang, Ji & Zhengrong, 2018; 菊, 2018).

Seiring berkembangnya teknologi komunikasi seperti internet, jaringan seluler, dan koneksi nirkabel, media sosial telah berhasil melampaui batasan-batasan tradisional dalam komunikasi massa. Ia tidak hanya menghapus jarak wilayah dan sekat administratif, tetapi juga membuka ruang dialog antara pembuat pesan dan penerimanya. Dalam konteks proyek BRI, media

sosial membawa semangat Jalur Sutra kuno menuju masa depan dengan mempertemukan ekonomi, budaya, dan teknologi dalam satu lanskap digital global.

Menurut Kaiqiang dan Chen (2013), terdapat beberapa keuntungan strategis dari penggunaan media sosial dalam mempromosikan proyek BRI. *Pertama*, media sosial mampu menyampaikan narasi BRI secara utuh dan ekspresif. Berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, dan video dapat digabungkan untuk menyampaikan pesan secara menarik dan mudah dipahami. Ini membantu masyarakat di negara-negara sepanjang Jalur Sutra memahami bahwa proyek BRI bukan semata pembangunan fisik, tetapi juga sarana menjalin persahabatan lintas bangsa.

Kedua, media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan real-time. Dibandingkan media tradisional yang memiliki batasan waktu dan ruang, media sosial dapat menyampaikan informasi kapan pun dan di mana pun. Proses dokumentasi kegiatan dan inisiatif BRI pun dapat langsung diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai kanal digital. Hal ini memperkuat transparansi dan memperluas pengaruh BRI di tingkat global. (Cao & Alon, 2020)

Ketiga, media sosial memberikan ruang interaktivitas yang tinggi antara penyelenggara proyek BRI dan masyarakat. Tidak seperti media konvensional yang bersifat satu arah, media sosial memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih aktif. Masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk terlibat, memberikan tanggapan, menyuarakan pendapat, dan menjadi bagian dari narasi besar pembangunan. Interaktivitas ini membuka peluang partisipasi publik yang lebih luas dan mendorong keterlibatan yang bermakna dari seluruh elemen masyarakat di negara peserta. (Yuni & Gita, 2021).

Dalam pelaksanaan proyek Sabuk dan Jalan, media sosial menyediakan ruang yang komprehensif bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, usulan, maupun kritik. Dengan keterbukaan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, melainkan turut berperan aktif dalam pembangunan proyek tersebut. Media memungkinkan terjadinya partisipasi publik yang luas dan memberikan ruang bagi warga untuk ikut serta dalam membentuk arah pembangunan. (Kaiqiang & Chen, 2013)

Sebagai contoh, media berbahasa Mandarin di Singapura mencatat bahwa Tiongkok memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara tersebut. Komunitas Tionghoa di Singapura menjadi jembatan penting yang menghubungkan Tiongkok dan Singapura dalam mendukung kesuksesan proyek BRI. (Liu Jiahua, 2019). Temuan ini menggambarkan bahwa kerja sama media di berbagai negara menjadi kunci penting dalam memperkuat diplomasi, serta membangun literasi dan edukasi publik yang sejalan dengan semangat Inisiatif Sabuk dan Jalan.

Ringkasan

Belt and Road Initiative (BRI) yang disokong oleh Tiongkok melibatkan lebih dari 65 negara dan sekitar 4 miliar jiwa. Proyek berskala besar ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, tetapi juga infrastruktur digital dan teknologi informasi. Dengan demikian, BRI menjadi proyek lintas sektor yang menghubungkan komunikasi, media, ekonomi, dan teknologi informasi secara global.

Pertama, BRI bertujuan menciptakan konstruksi realitas sosial baru melalui Jalur Sutra Digital. Jalur ini menggabungkan teknologi telekomunikasi, media, dan infrastruktur digital seperti pusat data dan jaringan serat optik, yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkaya kualitas peradaban dengan memperkuat pertukaran budaya, pendidikan, dan kerja sama teknologi.

Kedua, BRI mengadopsi pendekatan jurnalisme Marxis sebagai strategi untuk menghadapi dominasi media arus utama. Dalam konteks Jalur Sutra Digital, media sosial menjadi instrumen penting dalam menyampaikan informasi, menyosialisasikan program pemerintah, serta membangun opini publik dan nasionalisme. Platform digital memberikan keunggulan dalam kecepatan penyebaran informasi dan efektivitas komunikasi massal yang inklusif.

Ketiga, BRI hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni dan oligarki media. Dalam beberapa sistem demokrasi gaya Barat, kebebasan media justru menghadirkan polarisasi dan fragmentasi sosial. Ketika opini publik tidak dikelola dengan kedewasaan, maka konflik sosial dan politik bisa muncul, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas keamanan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Tiongkok menekankan pentingnya kontrol atas media dan internet untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan arah pembangunan tetap sesuai dengan tujuan nasional.

Dalam narasi Barat, demokrasi sering kali disederhanakan sebagai sistem multipartai dan hak pilih universal. Negara-negara yang tidak mengikuti pola tersebut sering kali dilabeli sebagai otokrasi atau kediktatoran. Namun, demokrasi sejatinya adalah partisipasi nyata rakyat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan negara, bukan hanya pada bentuk formalnya. Demokrasi Tiongkok dikembangkan dalam dua bentuk utama: demokrasi elektoral dan demokrasi deliberatif. Meskipun tidak mengikuti model Barat, pendekatan ini bertujuan agar warga negara dapat hidup setara, berpendidikan tinggi, dan terlibat dalam urusan publik secara konstruktif.

Dengan visi tersebut, Tiongkok membangun sistem komunikasi dan media yang mendukung kesejahteraan, stabilitas, dan partisipasi masyarakat luas. Melalui BRI, Tiongkok menawarkan alternatif bentuk pembangunan

dan demokrasi yang bersifat fungsional dan praktis, serta berorientasi pada hasil nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai negara mitra.

BAGIAN V

Konten Laporan Media Sosial tentang Proyek BRI di Indonesia

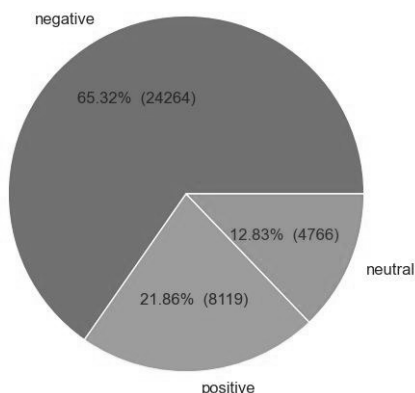
Untuk menelusuri persepsi publik di media sosial terhadap proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) di Indonesia, dilakukan analisis data menggunakan perangkat pemrograman Python. Penelusuran ini difokuskan pada sejumlah kata kunci yang kerap dikaitkan dengan kehadiran Tiongkok dalam proyek-proyek strategis di Indonesia. Kata kunci tersebut meliputi: “TKA Tiongkok (pekerja asing Tiongkok),” “proyek OBOR Tiongkok,” “investasi Tiongkok,” “infrastruktur Tiongkok,” dan “utang Tiongkok.”

Dari proses pengumpulan data tersebut, terkumpul sebanyak 37.149 cuitan (tweet) yang tersebar dalam kurun waktu tertentu dan berasal dari berbagai akun pengguna X. Seluruh data ini kemudian dianalisis menggunakan metode analisis sentimen untuk mengelompokkan ekspresi publik ke dalam tiga kategori utama: positif, netral, dan negatif.

Hasil analisis mengindikasikan bahwa sentimen negatif mendominasi, dengan total 24.264 cuitan atau setara 65,32% dari keseluruhan data. Sementara itu, cuitan dengan sentimen positif berjumlah 8.119 cuitan atau sekitar 21,86%. Adapun sentimen netral tercatat sebanyak 4.766 cuitan, yang membentuk 12,83% dari total data.

Dominasi sentimen negatif ini mengindikasikan adanya kecemasan, kekhawatiran, atau bahkan ketidakpuasan publik terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keterlibatan Tiongkok dalam pembangunan di Indonesia. Meski demikian, kehadiran sentimen positif yang cukup signifikan juga mencerminkan bahwa sebagian masyarakat melihat kerja sama ini sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan investasi, dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Sentiment Polarity on Tweets Data
 All Keywords : 1) Proyek Obor China, 2) TKA China,
 3) Infrastruktur China, 4) Investasi China, 5) Hutang China
 Total Tweets = 37149



Gambar 8 Analisis sentimen dengan semua kata kunci

Secara lebih rinci, analisis sentimen terhadap masing-masing kata kunci yang digunakan dalam pencarian memberikan gambaran yang beragam, meskipun pada umumnya sentimen negatif tetap mendominasi.

Pertama, untuk kata kunci “TKA Tiongkok (pekerja asing Tiongkok)”, tercatat sebanyak 5.914 cuitan. Dari jumlah tersebut, 60,64% mengungkapkan sentimen negatif, sementara 23,13% mencerminkan sentimen positif, dan 16,23% bersifat netral. (Lihat Gambar 10).

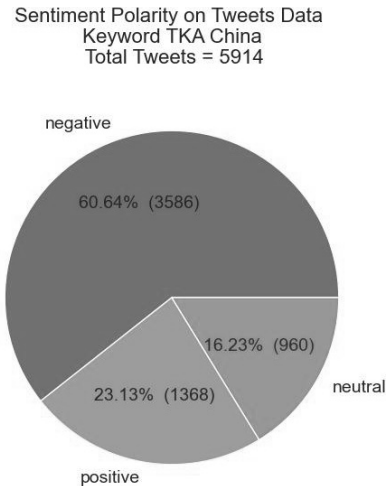
Kedua, kata kunci “infrastruktur Tiongkok” menghasilkan 8.502 cuitan. Pola sentimennya serupa, dengan 60,52% tergolong negatif, 19,91% netral, dan hanya 19,57% yang mengandung sentimen positif. (Lihat Gambar 11)

Ketiga, kata kunci “investasi Tiongkok” mencakup 13.609 cuitan. Meskipun sentimen negatif masih dominan (53,89%), terdapat peningkatan proporsi sentimen positif sebesar 32,63%, sedangkan 13,48% sisanya bersifat netral. (Lihat Gambar 12)

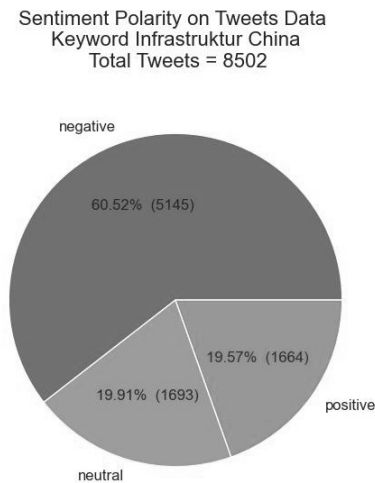
Keempat, untuk kata kunci “proyek OBOR Tiongkok”, ditemukan 683 cuitan, yang memperlihatkan 61,20% sentimen negatif, 27,53% positif, dan 11,27% netral. (Lihat Gambar 13)

Terakhir, kata kunci “utang Tiongkok” memperlihatkan kecenderungan sentimen yang sangat tajam ke arah negatif. Dari total 8.441 cuitan, sebanyak 92,18% bersentimen negatif, sementara hanya 5,43% yang bersifat positif, dan 2,39% lainnya netral. (Lihat Gambar 14)

Data ini mencerminkan bahwa persepsi publik terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Tiongkok di Indonesia, terutama dalam konteks proyek-proyek besar seperti Inisiatif Sabuk dan Jalan, masih cenderung dipenuhi kekhawatiran dan kritik. Isu utang, pekerja asing, dan dominasi pembangunan infrastruktur menjadi sorotan utama yang memicu reaksi negatif dari masyarakat di media sosial. Namun demikian, masih ada ruang optimisme yang terekam dalam sentimen positif, khususnya dalam isu investasi.

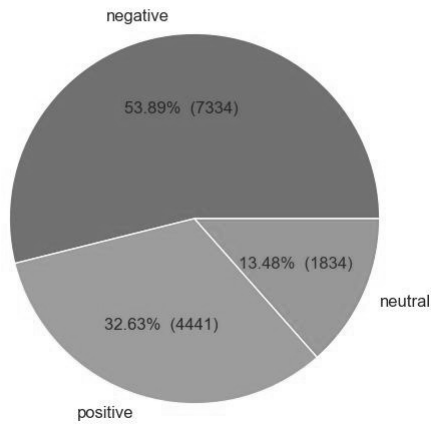


Gambar 9 Polarisasi sentimen Twitter dengan kata kunci “TKA Tiongkok”



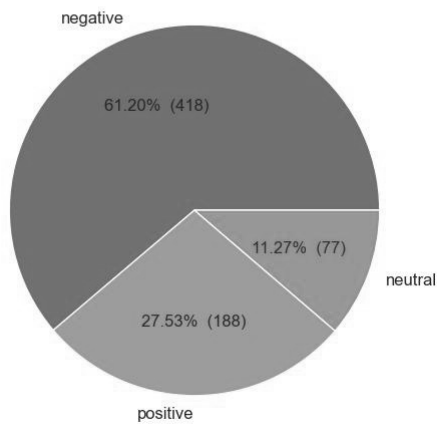
Gambar 10 Polarisasi sentimen Twitter dengan kata kunci “Infrastruktur Tiongkok”

Sentiment Polarity on Tweets Data
Keyword Investasi China
Total Tweets = 13609



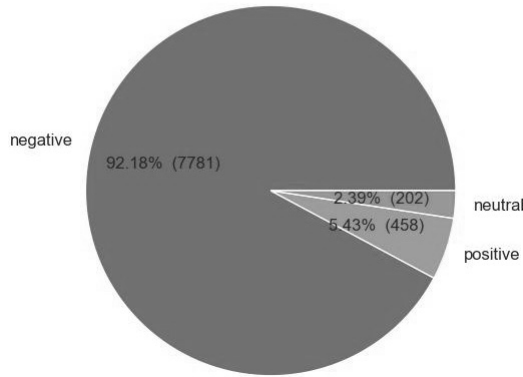
Gambar 11 Polarisasi sentimen Twitter dengan kata kunci “Investasi Tiongkok”

Sentiment Polarity on Tweets Data
Keyword Proyek Obor China
Total Tweets = 683



Gambar 12 Polarisasi Sentimen Twitter dengan Kata Kunci “Tiongkok OBOR Project”

Sentiment Polarity on Tweets Data
Keyword Hutang China
Total Tweets = 8441



Gambar 13 Polarisasi sentimen Twitter dengan kata kunci “utang Tiongkok”

Warganet dan Proyek BRI di Indonesia

Hasil analisis sentimen terhadap 37.149 cuitan Twitter mengindikasikan bahwa mayoritas opini publik cenderung bersifat negatif, yakni mencapai 65,32%. Hanya sekitar 21,86% yang mengandung sentimen positif, dan 12,83% lainnya bersifat netral. Terdapat tiga faktor utama yang turut mendorong tingginya persepsi negatif ini, yakni: keberadaan kelompok oposisi yang solid, keaktifan *buzzer* pro pemerintah, serta munculnya disilusi dari akun relawan pendukung Presiden Joko Widodo.

Kelompok Penyeimbang Kekuasaan yang Terstruktur

Salah satu faktor kuat yang mendorong munculnya opini negatif adalah keberadaan kelompok oposisi yang cukup solid dan memiliki basis pengikut besar di media sosial. Sebagai contoh, tokoh seperti Habib Rizieq Shihab (HRS), meskipun tidak memiliki akun media sosial pribadi, merupakan sosok sentral yang berhasil menggalang jutaan pengikut loyal. Kelompok ini memainkan peran penting dalam membentuk opini publik yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk terhadap proyek-proyek strategis seperti *Belt and Road Initiative* (BRI).

Beberapa tokoh oposisi lain yang aktif di Twitter antara lain: @hnurwahid, @fadlizon, @fahrihamzah, @msaid_didu, @Rockygerung, dan @musniumar, serta sejumlah akun dengan nama samaran seperti @OppositeCerdas, @maspiyuaja, @muslimcyberarmy, dan @Opposite6890. Akun-akun tersebut

secara konsisten menyuarakan kritik terhadap proyek BRI dan kebijakan pemerintah secara umum. Sebagai contoh, akun @Rockygerung sempat diblokir menjelang Pemilu 2019 karena dianggap memengaruhi opini publik secara signifikan, dengan jumlah pengikut yang mencapai lebih dari 1,8 juta.

Akun Pendukung Pemerintah dan Efek Balik Polarisasi

Selain oposisi, muncul pula kelompok pendukung pemerintah yang aktif menyuarakan dukungan terhadap proyek-proyek strategis nasional. Akun seperti @hendrisubiyakto, @mohmahfoedmd, @addiems, @budimanjatmiko, dan @TsamaraDKI turut serta dalam menyampaikan narasi positif. Akun-akun ini memiliki jangkauan yang luas karena basis pengikut yang besar; misalnya, @mohmahfoedmd, seorang menteri, memiliki lebih dari 3,7 juta pengikut. Namun, keberadaan akun-akun ini justru memicu respons keras dari kelompok oposisi, yang menilai bahwa kritik terhadap proyek BRI tidak direspons secara substantif, melainkan ditepis melalui dukungan naratif sepihak.

Transformasi Akun Relawan dan Fenomena '*Buzzerp*' di Media Sosial

Faktor ketiga berasal dari perubahan sikap sebagian akun relawan pendukung pemerintah, yang semula pro-Jokowi, tetapi kemudian berubah menjadi lebih kritis. Akun seperti @_ekokuntadhi, @dennysiregar7, @FerdinanHaen3, dan @adearmando sering kali dituding sebagai "*buzzer* bayaran", yang oleh publik dijuluki dengan istilah "*BuzeRp*"—gabungan dari kata *buzzer* dan Rp (Rupiah). Tuduhan ini menguat setelah beberapa akun tersebut menyebarkan informasi yang dinilai provokatif, bahkan hoaks, sehingga akhirnya dibekukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Label negatif ini memperdalam polarisasi dan memperkuat kritik terhadap proyek-proyek pemerintah, termasuk proyek BRI.

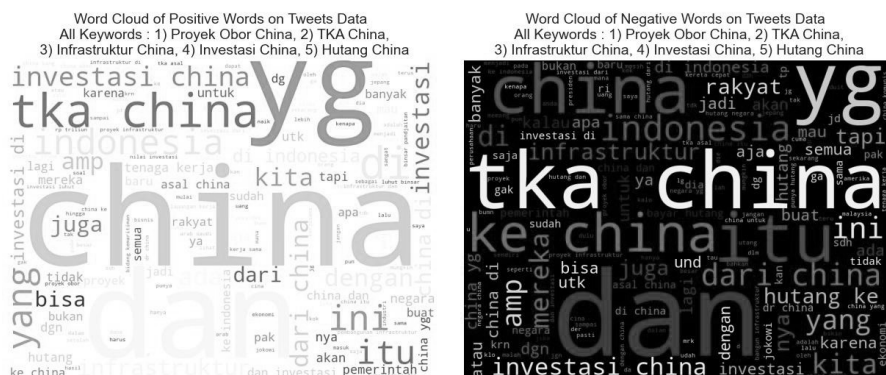
"Utang Tiongkok" dan Proyek Kereta Cepat

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa sentimen negatif paling tajam muncul pada kata kunci "utang Tiongkok", dengan tingkat sentimen negatif mencapai 92,18%. Sebagian besar cuitan dengan sentimen ini muncul pada tahun 2021, saat isu pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung ramai diperbincangkan. Proyek ini memicu kegelisahan publik karena membengkaknya anggaran hingga Rp27 triliun, yang akhirnya harus ditutup menggunakan APBN, padahal pemerintah sempat berjanji tidak akan melibatkan dana negara. Masyarakat menilai langkah tersebut tidak tepat, terutama di tengah krisis ekonomi akibat pandemi. Opini publik berkembang dengan mengusulkan agar dana tersebut lebih baik dialihkan untuk subsidi pendidikan, kesehatan, atau dukungan terhadap UMKM.

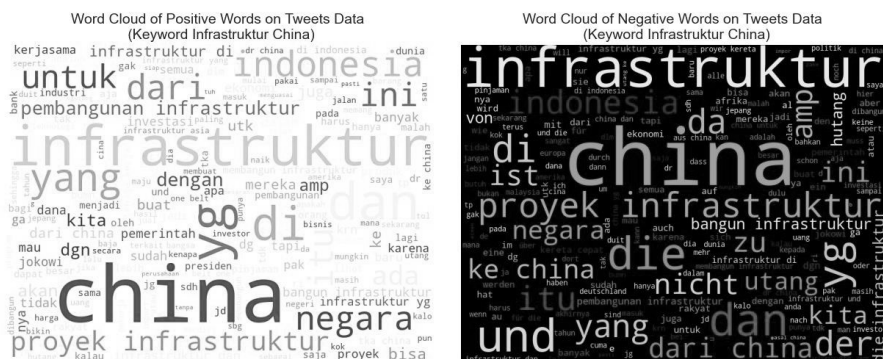
Narasi Positif dan Konotasi Negatif

Dalam analisis word cloud, kata-kata yang dominan dan bernuansa positif antara lain: “Tiongkok,” “pekerja,” “investasi,” “Indonesia,” “infrastruktur,” “OBOR,” “proyek,” “negara,” dan “Belt Road Initiative.” Sementara itu, kata-kata yang muncul dengan konotasi negatif meliputi: “ilegal,” “utang,” “orang,” “ekonomi,” “asing,” dan “pekerja asing.”

Visualisasi kata ini dapat dilihat pada Gambar 15 hingga Gambar 21.



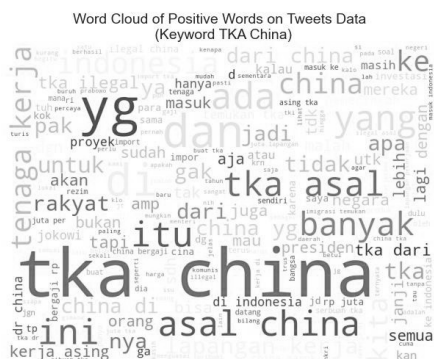
Gambar 15 All keywords are word cloud data tweets’ positive and negative divisions.



Gambar 16 Word cloud data division of positive and negative tweets on the key “China infrastructure”



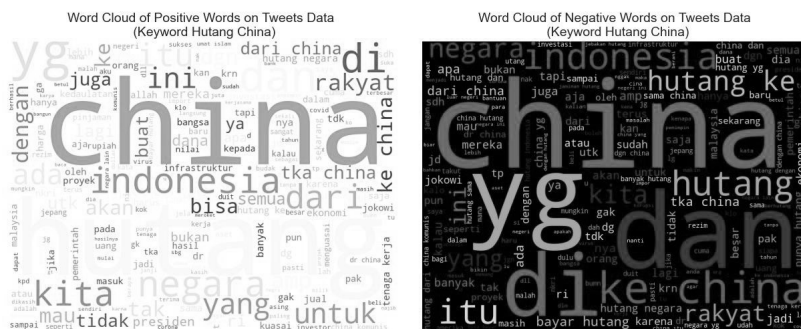
Gambar 17 Word cloud data division of positive and negative tweets on keywords “China Investment”



Gambar 18 Word cloud data division of positive and negative tweets on keywords “Chinese Foreign Workers”



Gambar 19 Word cloud data division of positive and negative tweets on keywords "China OBOR Project"



Gambar 20. Distribusi *Word Cloud* Positif dan Negatif pada Kata Kunci “Utang Tiongkok”

Dalam dinamika perbincangan media sosial mengenai “Utang Tiongkok”, data yang diolah menegaskan adanya polarisasi tajam antara persepsi positif dan negatif. Sentimen negatif mendominasi, mencerminkan kekhawatiran dan ketidakpuasan publik terhadap keterlibatan finansial Tiongkok dalam proyek-proyek strategis nasional. Visualisasi word cloud memperlihatkan bahwa kata-kata seperti “utang”, “asing”, “ilegal”, dan “ekonomi” muncul berulang kali dalam konteks negatif. Sementara itu, narasi positif lebih sering mencantumkan kata “investasi”, “infrastruktur”, dan “kerja sama”, namun jumlahnya jauh lebih kecil.

Dinamika Relawan dan Dukungan Politik Proyek BRI

Keberhasilan Joko Widodo dalam memenangkan dua kali pemilihan presiden tidak terlepas dari kontribusi besar para relawan. Mereka muncul sebagai kekuatan akar rumput yang menyuarakan harapan akan perubahan, membangun semangat kolektif, dan aktif melakukan kampanye dengan dana serta inisiatif mereka sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika internal kelompok relawan ini mengalami perubahan signifikan.

Banyak dari relawan elite yang semula bersatu dalam perjuangan justru terjebak dalam pragmatisme politik. Setelah kemenangan diraih, sebagian dari mereka mengklaim sebagai aktor utama di balik keberhasilan tersebut, dan mulai menuntut posisi strategis di pemerintahan. Ketika harapan mereka tidak terpenuhi, sebagian besar berubah sikap. Kekecewaan pun muncul, dan relasi mereka dengan pemerintahan menjadi renggang.

Akibatnya, saat kebijakan strategis seperti proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) menuai kritik di ruang publik, kelompok relawan ini memperlihatkan sikap pasif dan enggan terlibat. Mereka tidak lagi menggerakkan kekuatan media sosial yang sebelumnya digunakan untuk menyokong kampanye Jokowi. Ketidakhadiran mereka dalam diskursus publik turut memperlemah

narasi positif atas kebijakan BRI, sehingga opini publik dikuasai oleh kelompok kritis dan oposisi.

Fenomena ini terlihat jelas dalam analisis jaringan sosial yang ditampilkan pada Gambar 22, yang memperlihatkan lemahnya keterlibatan akun-akun relawan dalam membentuk opini publik terkait proyek BRI di jagat media sosial.

Salah satu temuan penting dalam analisis konten media sosial tentang proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) di Indonesia adalah minimnya keterlibatan akun-akun resmi pemerintah maupun tokoh negara yang populer di media sosial. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 22, hanya segelintir akun yang teridentifikasi aktif membahas proyek ini, di antaranya @_ekokuntadhi, @dennysiregar7, dan @FerdinanHaen3. Ketiganya bukanlah pejabat negara, melainkan tokoh pro-pemerintah yang dikenal luas di ruang media sosial.

Sebaliknya, akun-akun resmi milik pejabat publik dan tokoh strategis seperti @Fajroelrahman (Juru Bicara Presiden) dan @AliNgabalinNew cenderung tidak menampilkan tanggapan langsung terhadap narasi negatif yang berkembang. Mereka justru lebih sering membahas isu-isu lain yang sedang ramai di masyarakat, seperti sorotan terhadap institusi kepolisian.

Kurangnya tindakan ini dapat dimaklumi jika melihat kondisi politik dan sosial yang cukup kompleks saat itu. Pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan besar, di antaranya kasus kebangkrutan maskapai nasional Garuda Indonesia, proyek infrastruktur seperti Bandara Kertajati dan jalur kereta cepat yang mangkrak, serta sorotan publik terhadap dugaan konflik kepentingan sejumlah menteri dalam bisnis PCR dan vaksinasi Covid-19. Belum lagi berbagai pernyataan pejabat publik yang memicu kontroversi di tengah masyarakat, seperti candaan tak sensitif mengenai pandemi hingga klaim sektarian terkait kementerian agama.

Semua kegaduhan ini menambah beban perhatian pemerintah, sehingga penanganan opini publik mengenai proyek BRI di media sosial menjadi kurang terfokus. Sementara itu, kelompok oposisi justru tampil sangat aktif dan terorganisasi. Mereka memanfaatkan momentum untuk menggiring opini publik secara sistematis dan konsisten.

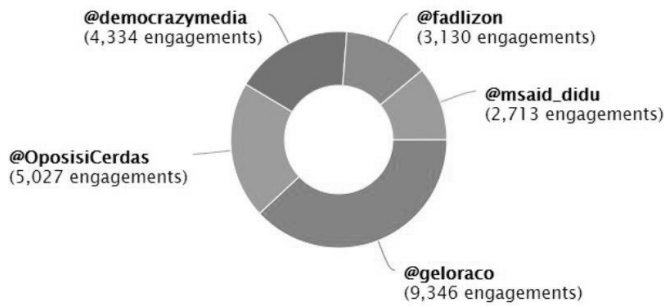
Dalam Gambar 23, terlihat lima akun influencer paling berpengaruh dalam mengkritik proyek BRI di Indonesia, yaitu: @geloraco, @OppositionCerdas, @democrazymedia, @fadlizon, dan @msaid_didu. Di antara kelima akun tersebut, @fadlizon mencatat jumlah pengikut yang besar, yaitu sekitar 1,7 juta, menjadikannya sebagai salah satu tokoh kunci dalam pembentukan opini publik yang kontra terhadap proyek kerja sama Indonesia–Tiongkok.

Kekuatan jaringan media sosial oposisi, yang didukung oleh akun anonim hingga *bot*, mengonfirmasi tingkat militansi yang cukup tinggi. Mereka bukan hanya konsisten dalam menyuarakan kritik, tetapi juga memenuhi

ruang publik digital dengan narasi yang dapat membentuk persepsi kolektif masyarakat, terutama terkait isu utang luar negeri dan dominasi Tiongkok dalam proyek infrastruktur nasional.

Top Influencers

By Collected Mentions - By Total Retweets



Gambar 22 5 Pihak yang Paling Berpengaruh dalam Pengembangan Narasi Proyek BRI Tiongkok di Indonesia

No.	Avatar	Account Name	RT + Reply Count	Retweets	Replies	followers
1		@geloraco	9,346	8,785	561	285,607
2		@OposisiCerdas	5,027	4,811	216	111,471
3		@democrazymedia	4,334	4,188	146	24,228
4		@fadlizon	3,130	3,024	106	1,683,916
5		@msaid_didu	2,713	2,606	107	515,211
6		@CNNIndonesia	1,613	1,349	264	2,069,051
7		@PutraWadapi	1,589	1,514	75	81,918
8		@musniumar	1,355	1,333	21	143,119
9		@Anonymous_2024	1,294	1,257	37	29,779
10		@HukumDan	1,220	1,197	23	118,341
11		@tempodotco	1,135	961	174	1,846,425
12		@InSrikandi	1,080	1,059	21	6,659
13		@tifsembiring	1,079	1,028	51	1,703,714
14		@zarazettirazr	1,050	973	77	327,347
15		@SilumanRi	968	950	18	25,334

Gambar 23 15 influencer yang sering membuat twit tentang proyek BRI Cina

Dalam dinamika wacana media sosial seputar proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok di Indonesia, muncul sejumlah tagar (hashtag) yang menandai topik-topik yang dominan dibicarakan warganet. Sebagaimana terlihat pada Gambar 25, beberapa tagar yang paling sering digunakan

Twitter dan Cerminan Dinamika proyek BRI Tiongkok sejak 2014

Perkembangan opini publik terkait proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat aktivitas masyarakat di media sosial. Konvergensi teknologi dan media telah melahirkan budaya partisipatif yang memungkinkan warga negara tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen dan penyebar opini. Dalam hal ini, platform seperti Twitter dan Facebook menjadi ruang publik digital tempat masyarakat Indonesia membentuk wacana, berorganisasi, melakukan mobilisasi sosial, hingga menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.

Aktivisme sosial di ranah digital telah melampaui sekadar berbagi informasi. Ia telah menjadi arena baru bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan mereka terhadap layanan publik dan isu-isu politik, termasuk proyek-proyek strategis nasional. Media sosial, terutama Twitter, telah menjadi wahana wacana deliberatif yang menjembatani aspirasi warga, sekaligus menjadi alternatif atas dominasi narasi dari media arus utama seperti televisi dan surat kabar (Lim, 2011; Nugroho et al., 2012; Ritonga & Syahputra, 2019).

Kondisi ini mendorong terciptanya semacam “demokrasi virtual,” di mana setiap individu memiliki ruang untuk menjadi jurnalis warga. Mereka dapat dengan leluasa menyampaikan pengalaman, keluhan, dan pendapat mereka mengenai kebijakan pemerintah—termasuk proyek kerja sama Indonesia–Tiongkok dalam kerangka BRI (Lim, 2013).

Dalam konteks hubungan internasional, investor asing perlu memahami lanskap sosial-politik negara yang menjadi tujuan investasinya. Hal ini berkaitan erat dengan stabilitas dan kepastian hukum yang menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan proyek. Di Indonesia, suhu politik sering kali menghangat menjelang pemilihan umum. Presiden Joko Widodo menghadapi tantangan dari kelompok oposisi terkait berbagai kebijakan strategisnya, termasuk dalam implementasi proyek BRI yang menggandeng Tiongkok.

Sejak pencalonannya sebagai presiden pada 2014, sentimen negatif terhadap Jokowi kerap dikaitkan dengan narasi anti-Cina. Isu ini semakin menguat ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)—yang berdarah Tionghoa—naik menggantikan posisi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sentimen tersebut diperparah oleh tuduhan yang menyebut Jokowi sebagai bagian dari jaringan komunis, sebuah narasi yang sesungguhnya telah mengakar sejak era Orde Baru. Dalam praktik politik, isu-isu seperti ini kerap dimanfaatkan sebagai komoditas politik oleh kelompok oposisi. (Duchesne, 2018).

Menanggapi hal ini, sejumlah tokoh publik turut serta dalam wacana digital. Misalnya, Fadjoel Rahman, seorang pendukung Ahok sekaligus juru bicara presiden kala itu, mengunggah komentar yang menegaskan

sikap penolakannya terhadap kelompok radikal yang menolak Ahok sebagai gubernur:

Ernest Prakasa @ernestprakasa, “Tahun 2014 FPI Tolak Ahok Jadi Gubernur, Ahok: Saya Juga Tolak FPI<http://de.tk/6P0Wih>”. (<https://twitter.com/ernestprakasa/status/514021372192768004>)

Dr.M. Fadjroel Rachman @fadjroel” Saya juga! Kami juga menolak FPI woohoo!! FPI Tolak Ahok Jadi Gubernur, Ahok: Saya Juga Tolak FPI” (<https://twitter.com/fadjroel/status/516441986933346304>)

Cuitan tersebut dimaksudkan sebagai respons terhadap berbagai narasi yang menyudutkan dan menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui, Ahok sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur mendampingi Joko Widodo, dan kemudian naik menjadi gubernur setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

Identitas etnis Tionghoa yang melekat pada Ahok menjadi pemantik berbagai isu sentimen rasial dan anti-Tiongkok di ruang publik digital. Sejumlah warganet bahkan meluaskan penolakan terhadap Ahok ke arah penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Tiongkok, termasuk proyek kerja sama antarnegara seperti *Belt and Road Initiative* (BRI).

Namun demikian, narasi tersebut dibantah oleh beberapa tokoh dari kubu oposisi. Ketua Umum Partai Demokrat, Hintja Panjaitan, dan politikus Partai Gerindra, Ahmad Dhani, turut menyampaikan pendapat mereka melalui media sosial. Pernyataan mereka menekankan bahwa penolakan terhadap Ahok tidak semata-mata dilandasi sentimen etnis, melainkan dilihat dari aspek lain, termasuk kebijakan dan orientasi politik yang bersangkutan.

#RepublikDagelan @panca66 “Bukan anti-Tiongkok. Tapi apakah menguntungkan berinvestasi di Tiongkok di sini? Silakan pikir-pikir. Toh, pernyataan SBY itu biasa saja”. (<https://mobile.twitter.com/panca66/status/1100924499124318208>)

Dhani Ahmad Prasetyo @AHMADDHANIPRAST, “Alasan pendukung Ahok (Ahokers): Tolak Ahok artinya Anti Tiongkok, Anti Kristen – ADP” 10:34 · 15 Nov 2016 · yang di Retweet 29 dan 74Suka. (<https://twitter.com/ahmaddhaniprast/status/798368450326343680>).

Situasi politik yang terbelah sejak pemilihan presiden tahun 2014 menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya aktivitas bermuatan kebencian di media sosial, terutama di platform seperti Twitter dan Facebook. Polarisasi politik yang tajam tidak hanya terjadi dalam lingkup elite, tetapi juga

menjalar hingga ke ruang digital masyarakat luas. Sayangnya, media massa arus utama gagal menjalankan peran sebagai penengah yang adil dan objektif dalam meredakan ketegangan antara dua kubu politik yang saling berseteru.

Di tengah krisis kepercayaan terhadap media konvensional yang dinilai telah tersandera oleh kepentingan oligarki politik, jurnalisme warga hadir sebagai alternatif. Masyarakat mulai mengambil peran dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi versi mereka sendiri. Fenomena ini muncul sebagai respons atas ketidakpuasan terhadap pemberitaan media arus utama yang dianggap tidak mewakili suara publik secara utuh (Ritonga & Syahputra, 2019).

Menurut Politicawave, sebuah lembaga pemantau percakapan media sosial, kontestasi politik menjelang Pemilu 2014 diwarnai dengan banyaknya praktik kampanye hitam dan kampanye negatif. Berdasarkan data, bahwa pasangan Joko Widodo menjadi sasaran kampanye hitam sebesar 94,9% dan kampanye negatif sebesar 5,1%. Sementara itu, pasangan Prabowo menerima serangan dalam bentuk kampanye hitam sebanyak 13,5% dan kampanye negatif sebanyak 86,5%. Kedua tim menggunakan media sosial untuk memobilisasi pasukan siber dalam rangka membentuk opini publik yang menguntungkan dan melawan narasi yang dilontarkan oleh pihak lawan (Herdiansah & Sumadinata, 2019).

Kebebasan berpendapat menemukan ruang yang luas dalam era digital. Namun, di balik kemerdekaan tersebut, muncul berbagai persoalan baru. Tumpang tindihnya informasi, provokasi yang tidak bertanggung jawab, serta maraknya ujaran kebencian menjadi sumber kegaduhan yang mengganggu stabilitas politik nasional. Gejala ini tidak hanya terbatas pada isu-isu dalam negeri, tetapi juga merambah pada topik kebijakan luar negeri, termasuk proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas media sosial, kritik terhadap proyek BRI turut mengemuka. Isu yang disoroti publik meliputi kekhawatiran terhadap ideologi negara investor, beban utang yang meningkat, masuknya pekerja asing, serta potensi ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara.

Kelompok oposisi menjadi motor utama dalam menyuarakan kritik terhadap proyek ini. Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto—seteru politik Presiden Jokowi dalam Pemilu 2014—menjadi aktor sentral dalam dinamika ini. Selain Gerindra, partai-partai seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga terlibat aktif dalam mengkritisi proyek BRI. Namun, dari keseluruhan oposisi, PKS dan Partai Demokrat tercatat paling vokal.

Sikap kritis para elite partai tersebut terlihat jelas melalui pernyataan mereka di media sosial, termasuk dalam bentuk cuitan di Twitter. Tokoh-tokoh seperti Hidayat Nur Wahid dari PKS dan Rachland Nashidik dari Partai Demokrat secara terbuka menyampaikan kecaman terhadap kebijakan pemerintah dalam kerja sama dengan Tiongkok.

@hnurwahid, “Pernyataan tegas dan jelas dari Presiden @jokowi saat kampanye pilpres bahwa Natuna (termasuk Natuna Utara) adalah bagian dari wilayah Indonesia. Jadi bagian dari NKRI, (integritas) NKR adalah harga mati. Pernyataan terbuka itu sekarang saatnya untuk membuktikannya.” <https://twitter.com/hnurwahid/status/1213325051082100736>).

Rachland Nashidik @rachlannashidik “Kritik itu berbasis data, bukan sentral,” kata Jokowi. “Kritik itu harus membangun dan memberi solusi,” kata Soeharto. Lebih mirip. Bedanya, Pak Harto tidak pernah meminta demonstrasi untuk mendukungnya. Paling tidak dia tidak menambahkannya secara terbuka”. (<https://twitter.com/rachlannashidik/status/1072306611820077056?lang=ca>).

Narasi tandingan tengah berusaha dibangun oleh kelompok pendukung pemerintah, seperti Twitter berikut ini:

Mohammad Guntur Romli @GunRomli “Saya heran akun-akun pendukung @prabowo masih saja rasis soal ‘Tiongkok’, bahkan bikin hoax soal ini hanya dengan mata sipit: lihat saja Brimob dari Nias, Minahasa, Dayak yang tidak bersalah dari Cina, apakah mereka tidak melihat Lieus Sungkarisma di antara mereka? Atau karena Lieus sudah dianggap sebagai seorang ulama, ya kan?” (<https://twitter.com/gunromli/status/1131968254082134016>).

Dr.M. Fadjoel Rachman @fadjroel “Tiongkok sedang sibuk bangun, dan kita sedang sibuk menghadapi berita bohong, fitnah, bullying, penistaan, kafir, dan sebagainya. Tiongkok sedang maju. Tidakkah kalian terima itu?” (<https://mobile.twitter.com/fadjroel/status/869116566045995009?lang=ar-xfm>)

Dan @zuhairimisrawi, pada bulan Juli 2014, mencuit, “Setelah pemilihan presiden selesai, mari kita bersatu membangun negeri untuk Indonesia tercinta. #gotong royong.” (<https://twitter.com/Jokowi4BJM/status/491569069972144129>).

Dialektika Publik di Media Sosial Jelang Pemilu 2019

Dalam dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, fenomena *buzzer* atau pendengung menjadi salah satu elemen penting yang tidak dapat diabaikan. Setiap tim pemenangan kandidat memiliki sekelompok individu yang secara khusus ditugaskan untuk membangun opini publik, melakukan kampanye daring, serta menyerang lawan politik melalui berbagai platform media sosial. Keberadaan mereka diakui oleh kedua belah pihak yang bertarung dalam kontestasi politik nasional tersebut.

Konsekuensi dari praktik tersebut adalah meningkatnya ketegangan emosional di tengah masyarakat. Opini publik yang terbentuk kerap tidak lagi berpijak pada nalar rasional, melainkan lebih banyak digerakkan oleh emosi partisan. Polarisasi politik pun merambah hingga ke ranah privat dan spiritual. Beberapa isu bahkan melibatkan perdebatan menyangkut keyakinan seseorang terhadap keselamatan setelah kematian, yang semestinya bersifat sangat personal.

Label-label identitas kemudian muncul sebagai bentuk saling ejek antarkubu pendukung. Pendukung Joko Widodo sering disebut “kecebong”, sementara pendukung Prabowo Subianto dijuluki “kampret”. Tidak hanya itu, istilah seperti “Aseng” (merujuk pada mereka yang dianggap pro investasi asing), “kafir”, hingga “kadrun” (singkatan dari kadal gurun) juga dipakai sebagai alat delegitimasi dalam wacana publik. Media sosial menjadi arena pertarungan utama, dengan tagar (#) digunakan sebagai senjata retorik untuk menyatakan dukungan atau penolakan terhadap isu dan tokoh tertentu.

Dalam suasana penuh ketegangan ini, politik digital berkembang menjadi ajang kontestasi narasi. Kemenangan dalam ruang digital menjadi representasi dukungan yang diklaim oleh masing-masing kubu. Hal ini mendorong sejumlah tokoh publik untuk bersuara. Salah satunya adalah budayawan Sujiwo Tejo, yang lewat akun media sosialnya mengomentari keberadaan *buzzer* politik yang mendominasi percakapan daring di Twitter dan platform lainnya.

Jack Separo Gendeng @sudjiwotedjo “Akun ini mungkin diperuntukkan bagi *buzzer* kubu mana pun, yang menyerang pikiran dengan pikiran. Bukan untuk *buzzer* penyelundup kubu mana pun yang menyerang pikiran dengan hinaan, fitnah/jebakan jahat, dsb. Tapi jangan khawatir. Akun ini tidak akan memblokir siapa pun karena karma tidak memblokir setan. baik.” (<https://twitter.com/sudjiwotedjo/status/1360144174381600769?lang=id>)

Fenomena perang tagar (#) yang mewarnai lanskap politik Indonesia, khususnya menjelang Pemilu 2019, dapat dibaca melalui dua konteks utama. Pertama, munculnya polarisasi politik yang semakin mengeras. Setiap

unggahan dari satu kubu akan segera diserbu oleh pendukungnya dengan dukungan, dan sebaliknya, akan mendapatkan kontra narasi atau bahkan cacian dari kelompok lawan politik, meskipun konten unggahan tersebut tidak menyentuh isu publik yang esensial. Inilah medan yang digemari oleh para *buzzer*, yang lebih memilih memperkuat narasi identitas dan permusuhan ketimbang membangun wacana substansial. Jika sebuah topik tidak relevan dengan dikotomi politik yang tengah berkembang, maka besar kemungkinan ia akan diabaikan, betapapun pentingnya isu tersebut.

Kedua, kepercayaan publik terhadap media arus utama semakin menurun. Sebagian besar warganet menilai bahwa media massa telah dikooptasi secara politik. Akibatnya, apapun informasi yang disampaikan oleh media, tetap akan dicurigai sebagai keberpihakan politik tertentu. Inilah yang disebut era *post-truth*, sebagaimana dikemukakan oleh Steve Tesich pada tahun 1992 dalam artikelnya di *The Nation*, yaitu ketika fakta tidak lagi menjadi penentu opini publik, melainkan emosi dan keyakinan personal.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Nugroho (2019) menggambarkan bagaimana sentimen publik di media sosial telah terbelah. Dalam temuan mereka, Joko Widodo menerima sebanyak 4.242 komentar positif dan 758 komentar negatif. Sementara itu, Prabowo Subianto memperoleh 3.824 komentar positif dan 1.176 komentar negatif. Data ini memperlihatkan bahwa baik pendukung maupun penentang dari masing-masing kandidat cukup aktif menyuarakan pandangannya di ruang digital.

Situasi ini diperkeruh dengan penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu contohnya adalah isu mengenai tujuh kontainer berisi surat suara yang diklaim berasal dari Tiongkok. Informasi palsu ini sempat beredar luas dan menimbulkan kegaduhan publik. Namun, informasi tersebut segera dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui akun resmi mereka di Twitter, @KPU_ID, serta mendapat klarifikasi dari akun Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, @psi_id. Kasus ini menggambarkan bagaimana hoak dapat dengan mudah menyebar di tengah atmosfer politik yang panas dan polarisasi yang tajam di media sosial.

KPU RI @KPU_ID “Tidak ada satu pun dari tujuh kontainer yang berisi surat suara yang dicoblos. Tidak benar ada Marinir yang menemukan. Bea Cukai & Marinir juga menyatakan bahwa itu berita bohong...”. (https://twitter.com/kpu_id/status/1080649137819836417).

DPP PSI @psi_id pada 4 Januari 2019, “Dan #LiesAward untuk kategori Kebohongan Terburuk dimenangkan oleh Bapak Andi Arief yang menyebarkan berita bohong tentang tujuh kontainer berisi surat suara.” (https://mobile.twitter.com/psi_id/status/1081080367430287360).

Polarisasi yang mengemuka dalam Pemilu Presiden 2019 tidak hanya membelah opini publik dalam urusan politik elektoral, tetapi juga merembes ke dalam isu-isu strategis, salah satunya adalah pembahasan mengenai proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Pada tahun 2019, proyek-proyek yang berada dalam kerangka kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok ini mulai diimplementasikan, sehingga menempatkannya dalam sorotan politik nasional.

Narasi yang dibangun oleh kelompok oposisi terhadap proyek BRI kerap kali selaras dengan kritik-kritik yang selama ini dilontarkan oleh negara-negara Barat. Beberapa isu yang diangkat mencakup kekhawatiran terhadap potensi “jebakan utang”, ketidakstabilan keamanan di kawasan Laut Tiongkok Selatan, dugaan hegemoni ekonomi-politik Tiongkok, hingga sorotan terhadap kualitas pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak memenuhi standar.

Selain itu, kritik juga diarahkan pada aspek lingkungan hidup, khususnya terkait dampak pembangunan terhadap ekosistem lokal. Isu lain yang mengemuka adalah terkait dengan situasi hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, Tiongkok, yang melibatkan etnis Muslim Uyghur, yang kemudian digunakan sebagai argumen untuk mempertanyakan etika kerja sama dengan negara tersebut.

Di dalam negeri, kelompok oposisi memperkuat narasi tersebut dengan menambahkan berbagai tuduhan, seperti keberadaan pekerja asing ilegal asal Tiongkok, serta pelanggaran izin tinggal dan prosedur ketenagakerjaan. Informasi-informasi ini menyebar luas melalui media sosial, sering kali dibumbui dengan sentimen nasionalisme dan kecurigaan terhadap dominasi asing, sehingga memperkeruh perdebatan publik terkait proyek BRI.

Muhammad Said Didu @msaid_didu, “Pernyataan Menlu ini menggambarkan sikap politik Indonesia terhadap Pulau Natuna. Ada dua antisipasi, yakni (1) siap berdamai namun (2) tidak takut perang jika Tiongkok tidak mau mengakuinya. Jangan sampai terpenjara karena alasan investasi dan utang dalam memilih sikap negara”. (https://twitter.com/msaid_didu/status/1213710841968648192).

@PEOPLEPowergm1, pada 30 Mei 2019, mencuit, “Apakah kalian yakin dan siap dengan proyek OBOR, kawan? Tiongkok akan mengambil semua proyek besar, dan pada akhirnya, kita akan menjadi kuli dan orang-orang yang diperbudak di negara kita sendiri. Itu sudah terjadi di lima negara, termasuk Indonesia, yang sudah mulai berjalan.” (<https://twitter.com/PEOPLEPowergm1/status/1134134956307824640>).

Beberapa akun media sosial sebenarnya telah berupaya membantah atau mengimbangi narasi yang berkembang tersebut. Namun, upaya tersebut

kurang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Akibatnya, kontribusi akun-akun tersebut terhadap pembentukan opini publik dan laporan mengenai perkembangan pembangunan di media sosial menjadi kurang signifikan. Hal ini tergambarkan dalam salah satu unggahan berikut:

@scoty_and mencuit, “Beberapa fakta yang dapat saya rangkum dari proyek kereta cepat ini adalah proyek percontohan antara Indonesia dan Tiongkok. Perusahaan yang memproduksi kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu Tiongkok Railway Material Co Ltd, untuk pertama kalinya tidak menggunakan anggaran negara.” (https://twitter.com/scoty_and/status/1399946346317029376).

Mohammad Guntur Romli @GunRomli “Kalau Cina investasi di Indonesia, pasti akan ada teriakan dari antek-antek “Aseng”, komunis, atheis, eh. Tapi Arab Saudi suka investasi di Cina”. (<https://twitter.com/gunromli/status/837218666395516928>).

Budiman Sudjarmiko (IG: masbud_sudjarmiko) @budimandjarmiko “Tiongkok tahun 2018 (butuh Rp 28 triliun untuk membangun Sili-con Valley ala Tiongkok di lahan 54,87 hektar)”. (<https://twitter.com/budimandjarmiko/status/1406467020640559104>).

@Annisa_1193 mencuit, “Waskita gandeng BUMN Tiongkok garap proyek infrastruktur? Tiongkok, yang lain lolos” dengan menyertakan tautan berita daring kumparan.com. (https://twitter.com/Annisa_1193/status/1401501464422354944).

@Vendra_Deje memposting, “Kita dapat mengamati program Prakarsa Sabuk dan Jalan yang sangat ambisius. Tiongkok dalam proyek ini seperti mengatur ulang geopolitik global dengan mempersempit ruang bagi manuver Barat dalam mengepaskan sayap hegemoninya di berbagai negara. (https://mobile.twitter.com/Vendra_Deje/status/1344575524299935744).

Isu Lingkungan

Beberapa media internasional telah menelaah dampak ekologis dari pelaksanaan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). The Washington Post, misalnya, melaporkan bahwa sejumlah negara di kawasan Amerika Latin menyampaikan kritik terhadap kebijakan BRI yang dinilai belum memberikan perlindungan memadai terhadap sumber daya air. Media tersebut juga menekankan pentingnya peran Tiongkok dalam menegaskan kepedulian

yang lebih besar terhadap isu-isu perubahan iklim global. (C. Yu & Yan, 2020, hlm. 72–78).

Dalam konteks ini, Tiongkok diharapkan dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam mengangkat pentingnya perlindungan lingkungan, serta mengintegrasikannya dengan agenda ekonomi dan sosial. Dengan demikian, publik dapat memahami bahwa proyek BRI bukan semata-mata instrumen untuk memperkuat ekonomi negara-negara peserta, melainkan juga mencakup komitmen terhadap keberlanjutan sosial dan ekologi. Mengarusutamakan isu lingkungan dalam proyek BRI juga dapat menjadi strategi untuk menanggapi kritik negara-negara Barat yang kerap menyoroti aspek politik dan keamanan proyek ini. (Hu, 2019, hlm. 615–623).

Di Indonesia sendiri, opini publik memperlihatkan tingkat kepekaan yang tinggi terhadap dampak lingkungan dari kerja sama infrastruktur dengan Tiongkok. Kekhawatiran masyarakat dipicu oleh maraknya proyek tambang dan pembangunan pembangkit energi yang melibatkan investor Tiongkok. Selain itu, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya ditengarai turut menyebabkan alih fungsi lahan dan penggundulan hutan. Hal ini tercermin dalam berbagai unggahan media sosial yang mengkritisi kerusakan lingkungan akibat proyek-proyek tersebut, seperti yang tampak dalam sejumlah cuitan berikut ini:

99@PartaiSocmed “Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari investasi Tiongkok? Tidak ada keuntungan, tidak ada pekerjaan. Apakah Anda hanya bisa merusak lingkungan dan Covid?” (<https://mobile.twitter.com/partaisocmed/status/1424306046659567621>).

@dadanghrs, pada 9 Mei 2019, mencuit, “KPK ingatkan BUMN agar berhati-hati soal investasi dari Tiongkok. Menurutnya, Tiongkok tidak memiliki standar lingkungan, hak asasi manusia, dan tata kelola perusahaan yang baik. Tautan: KPK Ingatkan BUMN agar Hati-hati Terima Investasi dari Tiongkok <http://detik.id/6vKBKL>”. Tweet ini mendapat 111 retweet dan 141 like. (<https://twitter.com/dadanghrs/status/1126375152764145664>).

Akun Twitter lembaga lingkungan hidup, sebuah LSM, yang menangani isu lingkungan, WALHI JABAR@walhijabar. 13 September 2019. “Kata @kemaritiman. Tiongkok teknologi ramah lingkungan. Patuhi aturan investasi. Faktanya pabrik Grider proyek KCIC tidak berizin di KBB. Ini yang terbaru. <http://rmoljabar.com/read/2019/09/10/105088/Proyek-Kereta-Cepat-Cemari-DAS-Citarum>. (<https://mobile.twitter.com/walhijabar/status/1172209881807327232>).

Di sisi lain, tidak sedikit pula yang memandang bahwa investasi Tiongkok di Indonesia tidak serta-merta membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa kalangan menilai bahwa kerja sama ekonomi antara kedua negara justru dapat membawa manfaat strategis, termasuk dalam hal penerapan teknologi ramah lingkungan. Pandangan ini berangkat dari keyakinan bahwa proyek-proyek yang dijalankan dapat dikawal dengan prinsip keberlanjutan, serta diawasi agar tetap memperhatikan aspek konservasi alam dan keseimbangan ekosistem.

Daeng Uceng @husainabdullah1 pada 7 Mei 2018 mencuit, “Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Jusuf Kalla, saat bertemu dengan PM Tiongkok, Li Keqiang, (7/5 di Jakarta) menegaskan bahwa Investasi Tiongkok; mengutamakan pekerja lokal, menjaga kelestarian lingkungan, memberikan nilai tambah bagi industri hulu/hilir, serta melakukan transfer teknologi dan produk bermutu tinggi Cc@saididu”. (<https://twitter.com/husainabdullah1/status/993459279452557314>).

Ngopi Dulu@Coffee2Talks, pada 28 Oktober, mencuit, “Krisis energi di Tiongkok, Eropa, dan India menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi. Selain itu, Indonesia juga mendukung konsep ramah lingkungan energi dan berkomitmen untuk mengurangi emisi.” Disertai dengan tagar. #IndonesiaPertumbuhan #MenyelamatkanDunia #UntukIndonesiaLebihBaik. (<https://twitter.com/Coffee2Talks/status/1453518174175916038>).

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi @kemenkomarves, “Menko Luhut: Kita tidak akan mengorbankan lingkungan demi ekonomi.”(<https://twitter.com/kemenkomarves/status/1196967840907005955>).

Jakarta Investment Center@jic_jakarta 21 November 2019 “#HaloSobatJIC 21 November 2019. Jakarta Investment Center menerima audiensi dari Pemerintah Daerah Provinsi Anhui (Tiongkok). Audiensi ini membahas kebijakan dan lingkungan investasi setempat”. Sayangnya, postingan tersebut tidak mendapat respons dari netizen, komentar, like, maupun retweet. (https://twitter.com/jic_jakarta/status/1197424307615330304).

Keberatan terhadap dampak lingkungan proyek BRI sejatinya telah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia dan mendukung prinsip-prinsip yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Isu perubahan iklim dan perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek ini. Beragam program telah digulirkan untuk menjawab tantangan

global, seperti kerentanan masyarakat terhadap bencana dan tingginya angka kematian akibat kemiskinan. Di antaranya termasuk Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana, Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dalam konteks ini, prakarsa *Digital Silk Road* (DSR) dari proyek BRI hadir sebagai salah satu upaya konkret untuk mengimplementasikan kerangka kerja internasional berbasis sains, teknologi, dan inovasi. DSR memanfaatkan *Big Earth Data* untuk mendukung perlindungan lingkungan, pengurangan risiko bencana, manajemen sumber daya air, pembangunan wilayah perkotaan, ketahanan pangan, konservasi alam, serta pengelolaan kawasan pesisir.

Secara garis besar, terdapat dua fokus utama dalam kerangka kerja DSR. Pertama, menutup kesenjangan pengetahuan ilmiah mengenai sistem bumi, khususnya respons ekosistem daratan, air tawar, laut, dan wilayah pesisir terhadap perubahan iklim global. Kedua, membangun kolaborasi antara akademisi dan komunitas lintas sektor guna mengintegrasikan sains dan teknologi dalam program kerja sama pembangunan berkelanjutan. Implementasi DSR diawali dengan pengembangan proyek sains untuk menyusun struktur data, metodologi analisis, serta membangun platform berbasis komputasi awan (cloud) guna berbagi dan menganalisis data terkait isu-isu lingkungan global. (Huadong Guo, Zeeshan Shirazi, & Liang Dong, 2018, hlm. 173–182).

Hak Asasi Manusia

Salah satu tantangan esensial dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia adalah persoalan kompetensi dan profesionalisme dalam dunia kerja. Kondisi ini tampak kontras bila dibandingkan dengan praktik ketenagakerjaan di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok cenderung mengirimkan pekerja yang sudah terampil dan memiliki keahlian teknis tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang strategis antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok dalam menyusun kebijakan yang mampu mendorong peningkatan kapasitas pekerja lokal. Tujuannya agar SDM Indonesia memiliki daya saing yang setara, profesional, dan unggul di berbagai sektor. (Ø, 2017).

Di sisi lain, hambatan krusial lainnya dalam pembangunan nasional adalah persoalan korupsi dan lambannya birokrasi. Selama ini, birokrasi di Indonesia dikenal rumit dan tidak efisien, dengan banyaknya tahapan perizinan yang harus dilalui. Praktik penegakan hukum pun kerap mendapat sorotan karena dinilai tidak bebas dari praktik korupsi. Di ruang publik, beredar ungkapan satir yang menyebutkan bahwa polisi di Indonesia mirip karakter dalam film Bollywood (lebih banyak drama daripada solusi). Ungkapan ini menggambarkan kekecewaan publik yang mendalam terhadap sistem hukum.

Tidak mengherankan jika tagar #percumalaportpolisi ramai digunakan sebagai bentuk kritik sosial terhadap aparat penegak hukum. Kritik masyarakat pun mengemuka, menyebut bahwa jika seseorang yang kehilangan seekor ayam, lebih baik tidak melapor karena biaya dan energi yang dibutuhkan bisa setara dengan kehilangan kambing. Hal ini mencerminkan betapa mahal dan tidak efisiennya proses penegakkan hukum.

Sementara itu, isu hak asasi manusia (HAM) juga menjadi perhatian dunia internasional, khususnya dalam konteks implementasi proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Beberapa kritik internasional menyoroti aspek perlindungan pekerja lokal, mulai dari fasilitas kerja, standar upah, hingga proses pembebasan lahan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Namun demikian, di Indonesia sendiri, isu pelanggaran HAM terkait proyek BRI jarang menjadi perbincangan publik. Minimnya pemberitaan dan diskusi di media arus utama maupun media sosial menggambarkan bahwa tidak ada temuan pelanggaran HAM yang signifikan dalam pelaksanaan proyek BRI di Indonesia. Sebab, bila ada, besar kemungkinan isu tersebut akan menjadi perbincangan luas dan bahkan trending di media sosial.

Meski demikian, isu pelanggaran HAM yang sempat mencuat di Twitter Indonesia lebih banyak terkait dengan perlakuan perusahaan pelayaran asal Tiongkok terhadap awak kapal Indonesia. Isu ini mendapat perhatian karena menyangkut martabat dan keselamatan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Rey @reyhantuu. 6 Desember 2020, “Karena ada kasus ABK Indonesia yang mengalami pelanggaran HAM di kapal Tiongkok, di sini saya ingin menambahkan pengalaman yang dibagikan seseorang melalui Quora tentang perbudakan yang dialami ABK Indonesia di laut.” (<https://twitter.com/reyhantuu/status/1258008897601732609>).

⁷@frekuensi52. 6 Desember 2020, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Eksploitasi Manusia, dan Perbudakan oleh Nelayan Tionghoa terhadap ABK Indonesia.” (<https://twitter.com/frekuensi52/status/1257975514490302465>).

Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di luar negeri, khususnya terkait dengan perusahaan-perusahaan asal Tiongkok di sektor kelautan, kerap digeneralisasi oleh pihak oposisi sebagai ancaman yang juga bisa terjadi di Indonesia. Kekhawatiran ini muncul meskipun informasi mengenai perlakuan tersebut belum tentu akurat atau terverifikasi secara menyeluruh. Akibatnya, muncul anggapan bahwa praktik serupa dapat terjadi pada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menjalankan proyek BRI di Indonesia.

Namun, hingga saat ini, tidak terdapat temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran HAM secara spesifik dalam implementasi proyek BRI di Indonesia. Artinya, pelaksanaan proyek BRI relatif tidak menimbulkan konflik yang berkaitan langsung dengan isu HAM di dalam negeri.

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, memang terdapat sejumlah isu pelanggaran HAM yang mencuat dan menjadi perdebatan publik. Beberapa di antaranya termasuk kasus kekerasan di Papua, penembakan terhadap enam anggota Laskar FPI, tewasnya demonstran dalam aksi protes, serta kekerasan yang dilakukan aparat keamanan saat menegakkan hukum. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa seluruh kasus tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan proyek BRI. Isu-isu tersebut muncul dalam konteks sosial-politik yang berbeda dan tidak berhubungan dengan kerja sama infrastruktur antara Indonesia dan Tiongkok melalui inisiatif Belt and Road.

Pekerja Lokal dan Pekerja Asing

Sejak diluncurkannya proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), beragam isu bermunculan di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Kamboja, Myanmar, dan Indonesia. Salah satu persoalan yang sering menjadi sorotan adalah tuduhan bahwa pemerintah Tiongkok mengirimkan tenaga kerja asing (TKA) dengan keterampilan rendah untuk bekerja di proyek-proyek infrastruktur mereka di luar negeri. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keberadaan TKA Tiongkok akan mengurangi peluang kerja bagi pekerja lokal.

Di Indonesia sendiri, posisi pemerintah cukup dilematis. Di satu sisi, kebutuhan akan pekerja terampil masih tinggi, sementara ketersediaan pekerja lokal yang memenuhi standar keterampilan tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa membuka peluang bagi kehadiran TKA demi kelancaran pembangunan infrastruktur yang dicanangkan bersama mitra asing.

Namun demikian, isu ketenagakerjaan ini tidak berhenti sebagai persoalan teknis semata. Dalam konteks sosial-politik, sentimen terhadap TKA asing kerap berkembang menjadi isu ekonomi hingga politik. Kritik dan kekhawatiran masyarakat terhadap proyek BRI dan keberadaan pekerja asing di Indonesia pun kerap mencuat dalam berbagai diskusi, termasuk melalui media sosial, seperti yang tergambar dalam sejumlah cuitan di bawah ini.

Akun Muslim Cyber Army @MCAOps. 8 Agustus mencuit, “Kabar 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok kembali ke negara ini di tengah penerapan karantina wilayah Level4 telah dikonfirmasi oleh Kantor Imigrasi”. (<https://twitter.com/MCAOps/status/1424279460262514694>).

Mbah_Liem @liem_id pada 18 Desember 2020, “Ada komentar?

Luhut menilai tidak ada pelanggaran atas kedatangan puluhan TKA tersebut. Makanya, ia meminta agar masalah ini tidak diperpanjang. Berbeda dengan Menteri Sumber Daya Manusia, Luhut membe-
la 49 TKA Tiongkok di Kendari.” (https://twitter.com/liem_id/status/1240299351802404865).

E-Mang Guepikiran TM @M4ngU5il pada 19 Juni 2020, “...ada yang bilang biaya produksi di Tiongkok murah karena pekerjaanya murah dibanding Indonesia? Padahal di sini gaji TKA Tiongkok berkali-kali lipat lebih tinggi dari TKI kita padahal keahliannya cuma BAGIAN. Di lapangan tanpa malu-malu...hahaha”. (<https://twitter.com/M4ngU5il/status/1273822061614358528>).

ISEAS Yusof Ishak Institute yang berbasis di Singapura pernah merilis hasil survei yang mengungkapkan bahwa sebanyak 50,2% responden di Indonesia menyatakan setuju terhadap kehadiran tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Sebanyak 26,6% responden menolak, sementara 19,9% lainnya mengizinkan TKA asal Tiongkok karena dinilai memiliki keterampilan yang tinggi. (Damuri et al., 2019). Namun, persoalan utama bukan terletak pada izin kerja semata, melainkan pada aspek komunikasi, pengelolaan administrasi, dan koordinasi antarinstansi pemerintah Indonesia sendiri.

Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia mencatat sejarah baru. Ia adalah presiden pertama yang tidak berasal dari kalangan militer, bukan bagian dari elite politik, dan tidak memiliki afiliasi kuat dengan partai politik besar. Kepemimpinannya dipandang lahir dari dukungan murni rakyat. Namun, kepemimpinannya juga menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam urusan administrasi pekerja asing.

Dalam konteks TKA, terdapat kelemahan koordinasi antara sejumlah kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Akibatnya, data tentang keberadaan dan jumlah TKA asal Tiongkok kerap berbeda-beda antarinstansi. Ketidakterpaduan data ini berdampak langsung terhadap lambatnya proses pengambilan kebijakan nasional. Hal ini mencerminkan bahwa sistem demokrasi Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya matang. Selain itu, kepentingan politik dan ekonomi dari berbagai pihak sering kali membuat pengambilan keputusan menjadi tidak efektif dan terhambat.

Tanggapan publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah pun beragam. Kelompok oposisi sering kali bersikap kritis, bahkan tidak jarang menolak kebijakan tertentu. Hal ini terlihat dari berbagai aksi demonstrasi

yang hampir selalu muncul menyertai setiap kebijakan strategis pemerintah. (玥, 2017).

Bila mengacu pada pemberitaan di berbagai media, terdapat sejumlah laporan mengenai pelanggaran visa oleh warga negara Tiongkok. Di antaranya adalah penggunaan visa tinggal untuk bekerja. Kasus-kasus semacam ini menjadi sorotan karena TKA asal Tiongkok dinilai mendominasi pekerja asing di Indonesia, dari jajaran manajemen hingga level pekerja lapangan. Dominasi ini juga berkaitan dengan banyaknya proyek yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan asal Tiongkok, termasuk dalam konteks proyek BRI.

Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok yang mengirimkan pekerja ke Indonesia wajib memberikan pelatihan dan pengenalan budaya serta hukum negara tujuan kepada para pekerjanya. Indonesia sendiri saat ini tengah menghadapi peluang besar berupa bonus demografi, sehingga penyediaan lapangan kerja bagi penduduk lokal harus menjadi perhatian serius. Meski demikian, perlu diingat bahwa bekerja adalah hak asasi setiap manusia. Mobilitas kerja, baik dalam lingkup nasional maupun antarnegara, merupakan hal yang sah secara universal.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan menangani persoalan visa, diperlukan satuan tugas terpadu dari berbagai instansi seperti Imigrasi, Kepolisian, dan Kementerian Pariwisata. Kolaborasi lintas lembaga ini akan membantu memastikan bahwa keberadaan pekerja asing dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan konflik sosial atau pelanggaran hukum.

Menariknya, sejumlah tokoh media sosial (influencer) justru memberikan tanggapan positif terhadap kehadiran pekerja dari Tiongkok. Beberapa di antaranya menyampaikan pandangan bahwa kerja sama dengan Tiongkok, termasuk melalui proyek BRI, dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

@amandasafir4 mencuit, “Perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia harus menggunakan mayoritas pekerja Indonesia,” diikuti oleh tautan berita dari BBC. Berita berjudul “Li Keqiang Instruksikan Perusahaan Tiongkok untuk Menyerap Pekerja Indonesia.” (<https://twitter.com/charliesianipar/status/993731518236274688>).

Deni Siregar @denisiregar07, “Itu video WNA asal Tiongkok yang masuk ke Sulawesi di bandara, selalu diulang-ulang dengan berbagai tema. Ada yang bertema, “TKA Tiongkok menyerbu Indonesia!” Sekarang, “TKA Tiongkok masuk ke Indonesia meski lockdown darurat!”. Kalau hoax, pasti diupdate. Saya nggak pernah bosan dengan video seperti itu.”. Diretweet 670 kali dan dilike 3.333 kali. (<https://twitter.com/Dennysiregar7/status/1411914563906269186>).

Bendera Indonesia Candra Asmara @Candraasmara85, pada 11 Mei 2020. “Ayo Prof @musniumar, sering sekali politisasi TKA ini. Kadrun, siapa yang bisa menggantikan keahlian TKA Tiongkok untuk menghindari PHK massal TKI. Kalau cuma bisa sarkastis tanpa solusi, nggak perlu gelar Prof. Tukang becak juga bisa. Tolong!”. (<https://twitter.com/Candraasmara85/status/1259878026067599360>).

Isu Pekerjaan

Opini publik di Indonesia terus berkembang, khususnya terkait dengan keberadaan pekerja asal Tiongkok. Banyak masyarakat menilai bahwa sebagian besar pekerja asal Tiongkok yang bekerja di Indonesia tidak memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam proyek-proyek strategis. Penilaian ini diperkuat oleh sejumlah pernyataan dan unggahan di media sosial yang mengaitkan keberadaan TKA Tiongkok dengan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan administrasi keimigrasian. Dugaan pelanggaran tersebut antara lain mencakup penyalahgunaan izin tinggal, praktik kerja tanpa keahlian yang memadai, serta kurangnya transparansi dalam proses perekrutan dan distribusi pekerja.

Didi Taksa @Diitaksa1, pada tanggal 27 Desember 2016, “Saya mau tanya siapa sih yang nyebarin isu 10 juta TKA Tiongkok, tapi kalau melanggar TKA Tiongkok ilegal, mereka banyak ditemukan di daerah”. (<https://twitter.com/Diditaksa1/status/813782855918579712>).

#TorangBisa @BiLLRaY2019 Pada tanggal 21 Juni 2020, “Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa pemerintah menyetujui masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok untuk bekerja di Indonesia dalam rangka alih teknologi di Konawe, Sulawesi Tenggara.” (<https://twitter.com/BiLLRaY2019/status/1274668262265982982>).

Kementerian Ketenagakerjaan, @KemnakerRI, pada 31 Agustus 2015. “Dalam kasus PLTU Celukan ditemukan pelanggaran, termasuk dua orang tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok yang tidak memiliki izin langsung diusir dan dideportasi.” (<https://twitter.com/KemnakerRI/status/638337694733504512>).

Pandangan masyarakat terkait pekerja asing asal Tiongkok turut diangkat oleh sejumlah media lokal di Medan. Sebagian media menyampaikan bahwa keberadaan pekerja asal Tiongkok di posisi manajerial dalam proyek-proyek Tiongkok di Medan dianggap tidak menjadi masalah. Hal ini didasari oleh

kebutuhan akan komunikasi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek, terutama ketika berkaitan dengan mitra kerja dari negara asal. Namun demikian, media juga menekankan bahwa pekerjaan pada level menengah ke bawah seharusnya diprioritaskan bagi pekerja lokal. Hal ini penting, apalagi bila ditemukan pelanggaran seperti penyalahgunaan izin tinggal oleh pekerja asing. (Damuri dkk., 2019).

Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 270 juta jiwa, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sekitar 30 juta warga Indonesia masih tergolong miskin, dan salah satu penyebab utamanya adalah terbatasnya kesempatan kerja. Oleh karena itu, keberadaan pekerja asing sering kali menimbulkan kekhawatiran tersendiri di tengah masyarakat, khususnya dalam hal potensi tergesernya peluang kerja bagi warga lokal.

Dalam konteks ini, proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dari Tiongkok diharapkan dapat menjadi solusi yang membuka lapangan kerja lebih luas. Janji Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, yang menyatakan akan mengutamakan pekerja lokal dalam proyek-proyek tersebut memberikan angin segar bagi pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. (Tritto, 2021).

Presiden Joko Widodo juga menegaskan pentingnya investasi sebagai kunci utama dalam penciptaan lapangan kerja. Melalui akun Twitter resminya, beliau mengajak para kepala daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para investor, guna mendukung tumbuhnya sektor-sektor produktif dan menyerap lebih banyak pekerja lokal. Berikut salah satu unggahannya:

“Saya ingatkan kepada para kepala daerah agar memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi. Dengan adanya investasi yang masuk ke suatu daerah, maka perekonomian daerah akan bergerak dan lapangan pekerjaan akan terbuka seluas-luasnya”. (<https://twitter.com/jokowi/status/1382533387148136450>).

Selanjutnya, perusahaan-perusahaan asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia perlu menerapkan regulasi yang ketat dalam pengelolaan pekerja asing. Hal ini mencakup pengawasan menyeluruh terhadap persyaratan keimigrasian, pemenuhan standar tempat tinggal dan konsumsi yang layak, serta pemberian perlakuan yang adil dan manusiawi kepada semua pekerja, tanpa diskriminasi. (玥, 2017).

Dalam konteks pelaporan pelanggaran oleh perusahaan atau pekerja asing, prinsip dasar jurnalistik menekankan pentingnya verifikasi di lapangan. Informasi yang beredar tidak boleh hanya bersandar pada klaim sepihak atau

pernyataan resmi tanpa melalui proses konfirmasi dan pengecekan langsung. Jika ditemukan pelanggaran, baik yang terkait dengan visa, ketenagakerjaan, maupun aspek lainnya, maka pelanggaran tersebut harus dilaporkan berdasarkan fakta dan data yang akurat. Pendekatan ini merupakan bagian dari kontrol publik yang sah dalam memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama, khususnya dalam proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa semua regulasi dijalankan dengan konsisten. Kerja sama bilateral dengan Tiongkok dalam hal ini sangat penting. Sebagai contoh, Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui akun Twitter resminya, @KemnakerRI, pernah mengumumkan bahwa pemerintah Tiongkok telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah-langkah tegas terkait pelanggaran pekerja asing.

Ruhut Sitompul @ruhutsitompul, pada 12 Mei 2021, mencuit, “Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia karena ingin bekerja untuk membandingkan investasi mereka yang sudah ada di Indonesia, jadi tolong bantu. Yang sakit hati, jangan banyak bicara.” (<https://twitter.com/ruhutsitompul/status/1392337523939020803>).

Naomicin @andy_nomicin, pada 13 Juli 2020, “Sejak awal jangan sebar rumor dan asumsi keliru bahwa tenaga ahli Tiongkok menyerbu dan merebut lapangan pekerjaan di Indonesia. Bukti nyata, kedatangan tenaga ahli Tiongkok sebenarnya untuk menyiapkan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal.” (https://twitter.com/andy_nomicin/status/1282571614530371585).

Adindaoky @Adindaoky1, pada 20 Mei 2020, Balas ke @CowokBaik-BGT @LubisAmin23 dan tiga lainnya “Orang Tionghoa punya modal investasi di Indonesia. Wajar saja kalau jadi bos. Infrastruktur yang kurang memadai juga dipilih yang punya keahlian di bidangnya. Dan tenaga kerja orang Indonesia juga masih lebih banyak dari tenaga kerja asing. Jadi carilah informasi data resmi, jangan karena banyak mendengar tenaga kerja asing terus ngomong tanpa tahu alasannya”. (<https://twitter.com/Adindaoky1/status/1262915225088593921>).

Akun @AcehKadrun21 pada 13 Juni 2020 “Sudah ditegaskan oleh Bapak JK (Jusuf Kalla) bahwa TKA itu orang Tionghoa & dari beberapa negara asing (bukan hanya dari Tiongkok tapi PKS untuk membingkai suara merdu (hanya tenaga kerja asing Tiongkok). Semua tenaga kerja asing ini adalah High Skill dengan tujuan untuk mengajarkan keterampilan kepada tenaga kerja lokal. **3000 tenaga kerja asing

datang untuk membuka 300.000 lapangan pekerjaan”. (<https://twitter.com/AcehKadrun21/status/1271645817892483072>).

Gareng G@GarengHallu, pada 1 Juli 2020, “Keahlian tenaga kerja asing asal Tiongkok sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Konawe. Membantu tenaga kerja lokal dalam mempelajari dan menyerap keterampilan mereka sebelum pekerjaan diserahkan kepada tenaga kerja lokal. #TolakAksiDitengahPandemi.” (<https://twitter.com/GarengHallu/status/1278210172872126465>).

Permasalahan ketenagakerjaan bersifat kasuistik dan tidak hanya terbatas pada pekerja asal Tiongkok, melainkan juga dapat melibatkan tenaga kerja dari berbagai negara lain. Pelanggaran terhadap aturan keimigrasian atau perilaku yang tidak selaras dengan norma sosial dan budaya Indonesia dapat saja dilakukan oleh satu atau dua individu. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menggeneralisasi dan menilai keseluruhan tenaga kerja dari negara asal yang sama. Pendekatan yang proporsional dan berbasis bukti menjadi penting dalam menyikapi persoalan ini, agar tidak menimbulkan prasangka kolektif yang tidak berdasar.

Populisme Islam

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki dinamika historis yang kompleks dalam hubungannya dengan Tiongkok. Sejumlah catatan sejarah mencatat ketegangan hubungan kedua negara, terutama pascapemberontakan gerakan komunis pada pertengahan abad ke-20 (Gunn, 2020). Meskipun demikian, anggapan bahwa Indonesia memiliki sejarah buruk dengan Tiongkok tidak sepenuhnya benar. Di sisi lain, relasi antara masyarakat Tionghoa dan komunitas Islam di Indonesia telah terjalin sejak lama dan berjalan harmonis dalam banyak konteks.

Salah satu bukti sejarah yang menegaskan relasi positif ini dapat ditemukan di Pulau Bintan, tempat bermukimnya komunitas Tionghoa Muslim yang berasal dari daerah Chaoshan, Guangdong, dan Fujian sejak abad ke-18. Kawasan ini juga menjadi bagian penting dari jalur sutra maritim pada masa lampau (De Jaegher, 2015). Bahkan, Laksamana Cheng Ho—seorang utusan dari Tiongkok yang beragama Islam—pernah melakukan pelayaran dan bermukim sementara di berbagai wilayah Nusantara. Jejak-jejak keberadaannya masih dapat dilacak hingga kini, sebagai simbol hubungan historis antara peradaban Tiongkok dan dunia Islam, termasuk Indonesia.

Namun, dalam konteks politik kontemporer Indonesia, munculnya kelompok Islam konservatif atau garis keras yang bersikap kritis terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo turut memengaruhi persepsi publik terhadap

kerja sama bilateral dengan Tiongkok, termasuk dalam proyek BRI. Salah satu peristiwa yang mencolok terjadi pada tahun 2016, saat Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab memimpin aksi massa untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), atas dugaan penistaan agama. Meskipun peristiwa tersebut tidak berkaitan langsung dengan etnisitas Ahok yang keturunan Tionghoa, narasi identitas sempat dimanfaatkan dalam mobilisasi massa dan menjadi isu yang menyulut ketegangan sosial dan politik.

Situasi tersebut menciptakan kekhawatiran terhadap stabilitas politik dalam negeri, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan investor asing. Bahkan sempat muncul slogan politik seperti “Turunkan Jokowi” yang menandakan ketegangan antara kelompok oposisi dan pemerintah.

Dalam lanskap politik Indonesia, simbol-simbol agama kerap digunakan sebagai alat mobilisasi politik. Menurut cendekiawan Xu Liping, kritik yang diarahkan kepada pemerintah Jokowi oleh kelompok-kelompok tersebut bukan semata-mata ditujukan kepada Tiongkok atau etnis Tionghoa, melainkan lebih pada resistensi terhadap kebijakan ekonomi dan investasi asing yang dinilai merugikan kepentingan bisnis elite lokal. Hal ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari struktur relasi kuasa yang terbentuk selama era Orde Baru, di mana terjadi hubungan erat antara elite politik dan pelaku bisnis lokal (玥, 2017).

@jen_l4u 4 Juli 2021, “Diskusi difokuskan pada kedatangan beberapa pekerja asing Tiongkok (yang seharusnya sudah divaksinasi & di-PCR sebelum masuk). Ya, Anda tampaknya tidak khawatir dengan penurunan mata pencaharian rekan senegara Anda karena adanya pembatasan wilayah yang sedang berlangsung. Apakah Anda rasis atau hanya fokus menyerang pemerintah....”. (https://twitter.com/jen_l4u/status/1411649722289328129)

@ALakaUCAY, pada 21 Maret 2020, “Saya tidak mengerti. Masih ada orang yang mudah dicap ‘rasis’ jika mereka mengkritik kebijakan Tiongkok atau mengkritik kasus pemerintah dengan Tiongkok, yang tidak berpihak pada rakyat. Apakah menyalahkan album Public Enemy juga merupakan tindakan rasis? Di situlah terkadang saya bertanya-tanya. Saya berpikir muka”. (<https://twitter.com/ALakaUCAY/status/1241149805759352833>)

Sayangnya, tanggapan terhadap pernyataan sejumlah tokoh oposisi yang menegaskan bahwa kritik mereka ditujukan pada kebijakan pemerintah—bukan suku bangsa tertentu—justru ditanggapi secara emosional oleh sebagian kelompok pro-pemerintah. Mereka menuding oposisi bersikap rasis. Tuduhan

semacam ini tidak hanya tidak produktif, tetapi juga berpotensi mengalihkan perhatian dari substansi kritik yang seharusnya dijawab secara rasional dan argumentatif. Seharusnya, fokus tanggapan berada pada isi kritik, bukan pada pelabelan identitas.

Di sisi lain, terdapat sejumlah kelompok Islam konservatif di Indonesia yang memiliki agenda politik tersendiri, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Kedua organisasi ini telah dibubarkan oleh pemerintah karena dinilai ingin mengubah dasar negara dan ideologi bangsa. Beberapa kelompok Islam radikal lainnya, seperti Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Tauhid, bahkan dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh negara. Keberadaan mereka semakin terpinggirkan seiring dengan penindakan hukum yang tegas. Kelompok-kelompok ini kerap mengusung bentuk Islam populis yang lebih menonjolkan simbol-simbol keagamaan dibandingkan substansi nilai. Ironisnya, simbol tersebut kerap digunakan untuk mobilisasi politik dan kampanye oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo, termasuk dalam isu-isu yang berkaitan dengan kerja sama proyek BRI dengan Tiongkok.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan sistem politik multi partai dan memadukan model presidensial serta parlementer. Dalam sistem ini, presiden dan DPR memiliki kedudukan yang setara. Ideologi utama yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila—sebuah landasan filosofis dan ideologis yang digali dari nilai-nilai luhur budaya dan sejarah bangsa. Indonesia tidak secara dogmatis menolak liberalisme, sosialisme, atau kapitalisme, tetapi menempatkan Pancasila sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun demikian, wacana publik di Indonesia kerap dipenuhi dengan isu-isu sensitif seperti sentimen keagamaan, ketakutan terhadap komunisme, serta narasi solidaritas terhadap Muslim di Xinjiang, Tiongkok. Isu-isu ini sering dijadikan bahan kampanye oleh kelompok tertentu untuk mendiskreditkan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia. Sebagian dari narasi tersebut berasal dari propaganda politik negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang secara konsisten mengangkat isu hak asasi manusia di Xinjiang sebagai alat tekanan terhadap Tiongkok.

Di Indonesia sendiri, isu komunisme masih menjadi momok bagi sebagian masyarakat. Berdasarkan survei Median pada tahun 2021, sekitar 46% responden meyakini bahwa komunisme masih menjadi ancaman di Indonesia (CNN Indonesia, 2021). Namun, survei dari SMRC mengungkapkan bahwa 84% masyarakat tidak percaya bahwa ideologi komunisme akan bangkit kembali (Abdi, 2021). Sentimen ini kerap dimanfaatkan oleh politisi tertentu sebagai komoditas politik menjelang pemilu untuk memperoleh simpati publik. Padahal, secara umum, hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar

menyimpan sentimen negatif terhadap Tiongkok atau komunisme secara ideologis.

Isu komunisme kembali mencuat setiap bulan September karena peristiwa sejarah kelam pada 1965. Kudeta yang menewaskan tujuh jenderal TNI menjadi titik balik lahirnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Peristiwa tersebut menyebabkan pembunuhan massal terhadap sekitar 500.000 orang yang dituduh sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan lebih dari satu juta lainnya ditahan tanpa proses pengadilan (Roosa, 2008). Meskipun mengusung nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, negara-negara Barat seperti Amerika Serikat tidak memberikan reaksi terhadap tragedi kemanusiaan tersebut. Hal ini menandakan inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang mereka kampanyekan.

Dengan demikian, pemanfaatan isu ideologi, agama, dan kebangsaan sebagai alat politik tidak hanya membahayakan kohesi sosial bangsa, tetapi juga merusak nalar publik dalam memahami kerja sama internasional seperti proyek BRI. Pemerintah dan masyarakat perlu terus mendorong pendekatan rasional, berbasis data, dan menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional dalam menyikapi berbagai dinamika global yang berdampak pada Indonesia.

Media Barat, termasuk media Amerika Serikat, sering kali memilih untuk tidak memberikan tanggapan terhadap isu kebangkitan komunisme di Indonesia yang umumnya mencuat setiap bulan September atau Oktober. Ketika narasi ini kembali muncul di ruang publik Indonesia, media Barat cenderung diam. Hal ini mengindikasikan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara Barat pada dasarnya memiliki kepentingan politis atas isu komunisme di Indonesia, yang kerap kali digulirkan secara strategis oleh pihak tertentu. (Hakim, 2018).

Diamnya Barat bukan tanpa alasan. Secara politis dan ideologis, isu komunisme menjadi alat yang dapat dimanfaatkan sesuai kepentingan mereka. Apalagi, dalam konteks Tiongkok, komunisme dan sosialisme tidak lagi dipahami secara ortodoks, melainkan justru telah terintegrasi secara pragmatis dalam sistem pembangunan ekonomi nasional. Tiongkok mampu menggabungkan semangat kolektivitas, etos kerja, dan kedisiplinan sebagai nilai-nilai khas sosialisme yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks narasi anti-Tiongkok yang berkembang di media dan ruang publik Indonesia, sejumlah isu yang sering diangkat dengan dalih “bahaya komunisme” kerap digunakan untuk mendiskreditkan kerja sama Indonesia-Tiongkok, terutama dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Narasi tersebut biasanya mencakup kekhawatiran terhadap infiltrasi ideologi komunis, dominasi ekonomi Tiongkok, serta hubungan historis yang dianggap sensitif secara ideologis dan politik. Isu-isu ini, meskipun tidak selalu berdasar

pada fakta yang kuat, terus digunakan sebagai alat untuk membentuk opini negatif terhadap Tiongkok di tengah masyarakat Indonesia.

Adhie M Massardi @AdhieMassardi, pada 24 Sep 2020, “Tiongkok Komunis menyelundupkan ideologi komunis dalam paket investasi. Presiden seumur hidup dalam budaya modern menjadikan Xi Jinping seperti monster komunis raksasa.” (<https://twitter.com/AdhieMassardi/status/1309104615019999235>).

🇮🇩🇨🇸 @MCAOps, pada 9 Mei 2021 “Pengamat: “Kedatangan pekerja asing Tiongkok gelombang demi gelombang menarik perhatian publik. Belum lagi kedekatan beberapa partai politik dengan Partai Komunis Tiongkok. Waspadalah terhadap investasi yang dapat berubah menjadi infiltrasi, aneksasi, dan eliminasi.” (<https://twitter.com/MCAOps/status/1391174007626485760>).

Isu mengenai kelompok Muslim Uighur di Xinjiang telah menjadi perhatian serius dalam pemberitaan media Barat. Narasi yang dibangun secara konsisten menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur, termasuk penyiksaan, pemisahan keluarga, serta penahanan massal di kamp-kamp pendidikan ulang yang kerap disebut sebagai “kamp konsentrasi”. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa warga Uighur dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi demi mendukung ekspor produk sandang dari Tiongkok.

Di Indonesia sendiri, isu ini menyebar dengan cepat, terutama melalui media sosial, dan sering dimanfaatkan oleh kelompok oposisi politik untuk menyerang kredibilitas Presiden Joko Widodo. Karena pemerintahan Jokowi memiliki hubungan kerja sama yang erat dengan Tiongkok, propaganda mengenai Uighur kerap dijadikan bahan untuk mendelegitimasi kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam kerangka kerja sama proyek *Belt and Road Initiative* (BRI).

Narasi populisme keagamaan di Indonesia pun kerap menjadikan isu Uighur sebagai alat mobilisasi dukungan, dengan menampilkan pemerintah seolah-olah tidak membela umat Islam. Padahal, persoalan yang terjadi di Xinjiang tidak sederhana dan membutuhkan pendekatan multidimensional, termasuk aspek politik domestik Tiongkok, keamanan, serta dinamika etno-agama. Meski demikian, simplifikasi isu ini dalam ruang politik Indonesia telah menyebabkan proyek BRI turut terseret dalam pusaran sentimen keagamaan yang bernuansa populis.

Fadli Zon (Youtube: Fadli Zon Official) @fadlizon “Indonesia harus ikut mengutuk perlakuan Tiongkok terhadap minoritas Uighur. Ini

jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia.” (<https://twitter.com/fadlizon/status/1451918042460426243>).

Hidayat Nur Wahid @hnurwahid, pada 11 Juli 2019, mencuit, “22 Negara bersama Dewan HAM PBB mendesak Pemerintah Tiongkok untuk Mengakhiri Penahanan & Pelanggaran HAM terhadap Umat Muslim di Xinjiang. Indonesia sebagai Negara yang Mencalonkan Diri Menjadi Calon Anggota Dewan HAM Internasional sudah seharusnya bersama 22 negara tersebut”. (<https://twitter.com/hnurwahid/status/1149208306247860226>).

Mustofa Nahrawardaya @TofaTofa_id pada 24 Oktober 2020 “Sedih sekali membaca berita @SINDOnews ini. Indonesia yang mayoritas Muslim, tidak peduli dengan pelanggaran HAM di Uighur/Xinjiang. Kekhawatiran negara lain, di mana Islam adalah minoritas, terhadap Uighur membuat saya malu. ~Pendapat Pribadi~”. (https://twitter.com/TofaTofa_id/status/1452056710265257985).

@kasmaw.AW @kasmawinzaghi, pada tanggal 16 Desember 2019, “AS dan Tiongkok berkelahi, kenapa kita yang suruh orang muslim berkelahi...”. (<https://twitter.com/kasmawinzaghi/status/1206515729538772992>).

TEMPO.CO @tempodotco pada 13 Maret 2019, “Amerika Serikat mengutuk Cina atas kekerasannya terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang dan Tibet. #TempoDunia”. (<https://twitter.com/tempodotco/status/1370566885125672962>).

Pemerintah Indonesia bersama sejumlah tokoh dan perwakilan dari organisasi Islam pernah diundang secara resmi oleh otoritas Tiongkok untuk mengunjungi wilayah Xinjiang. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menyaksikan secara langsung kondisi kehidupan masyarakat di sana. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, mereka secara terbuka menyatakan bahwa tuduhan yang disebarkan oleh sejumlah media Barat tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Dalam berbagai pernyataan publik, termasuk melalui media sosial seperti Twitter, lembaga pemberitaan seperti “Kabar Indonesia” serta sejumlah cendekiawan Muslim menyampaikan bantahan terhadap narasi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini diembuskan. Mereka menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti mengenai kerja paksa, pelanggaran kebebasan beragama, maupun upaya penghilangan identitas budaya masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Pernyataan tersebut menjadi salah satu bentuk kontra-narasi terhadap dominasi informasi Barat yang kerap mempolitisasi isu Xinjiang dalam konteks geopolitik dan rivalitas global.

Kabar Indonesia @KabarSiang, pada 8 November 2018, “Soal Muslim Uighur, Tiongkok Bantah Memburuknya Kondisi HAM <https://ift.tt/2SSknQk>”. (<https://twitter.com/KabarSiang/status/1060444920165601280>).

Savic Ali @savicali pada 21 Desember 2019, “Setiap kali ada insiden yang berkaitan dengan umat Islam, pasti ada penggalangan dana untuk para korban. Namun, apakah korban akan memberikan dana tersebut? Bagaimana dengan pasangannya di sana? Tidak cukup jelas. Terutama Xinjiang, yang berada di bawah kendali ketat Tiongkok.” (<https://twitter.com/savicali/status/1208221777337278464>).

Khazanah GNH @na_dirs, “Gak usah diungkit-ungkit lagi pilpres dan kunci surga. Baik kubu Jokowi maupun kubu Prabowo yang bicara pilpres dengan kunci surga, sama-sama gila. Yakin nih? kamu tidak terkunci Surga tidak ditentukan oleh kotak suara. Oke?!”. (https://twitter.com/na_dirs/status/1051091663005708289).

Pemerintah Tiongkok saat ini sedang menggalakkan program internalisasi nilai-nilai patriotisme, deradikalisasi, dan pelatihan vokasional bagi generasi muda, khususnya di wilayah Xinjiang. Langkah ini tidak terlepas dari konteks sejarah, di mana pada awal tahun 2000-an wilayah tersebut sempat mengalami gangguan keamanan akibat aksi kelompok teroris yang menimbulkan kerusakan. Untuk menanggulangi kondisi tersebut, pemerintah Tiongkok memilih pendekatan ideologis dan pendidikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Dua dekade yang lalu, kawasan barat Tiongkok memang tergolong tertinggal, baik dari segi pendidikan maupun pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang menjalankan pembangunan besar-besaran guna mendorong kemajuan wilayah tersebut. Salah satu upaya penting adalah penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat etnis Uighur, dengan tujuan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja nasional maupun global. Program-program ini, menurut pemerintah Tiongkok, telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pemerataan pembangunan di wilayah Xinjiang.

Dalam perspektif hubungan internasional dan prinsip diplomasi, kebijakan yang diterapkan oleh Tiongkok terhadap wilayah kedaulatannya merupakan urusan domestik yang berada dalam yurisdiksi negara tersebut. Berdasarkan prinsip non-intervensi, tidak sepatutnya negara lain mencampuri urusan dalam negeri negara berdaulat. Intervensi semacam itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan. Selama ini, sejumlah negara Barat sering kali dituding melakukan campur tangan terhadap kebijakan domestik negara

lain, bahkan tidak jarang bersikap seperti mendikte. Praktik semacam ini tentu perlu dikritisi dan dilihat secara proporsional dalam konteks tatanan dunia yang menghormati kedaulatan negara-negara merdeka.

Jebakan Utang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan tersebut mencakup lahan yang subur, wilayah laut yang luas, dan kandungan tambang yang berlimpah, seperti minyak bumi, batu bara, emas, tembaga, dan timah. Hutan Indonesia menghasilkan komoditas unggulan seperti kayu dan kelapa sawit, sementara sektor pertanian memproduksi padi, jagung, singkong, serta aneka buah dan sayuran.

Namun demikian, pemanfaatan kekayaan alam tersebut belum optimal. Berbagai pendapat publik yang berkembang mengindikasikan bahwa kendala utama terletak pada lemahnya tata kelola dan sistem pengelolaan yang belum efektif. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya berkontribusi pada pembangunan nasional secara maksimal.

Dalam konteks inilah, investasi asing dipandang sebagai kebutuhan penting untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam akun media sosial resminya @jokowi. Dalam pernyataannya, Presiden menekankan bahwa investasi merupakan salah satu kunci untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fitriani, 2018).

“Komitmen investasi terbaik adalah yang terealisasi. Komitmen investasi yang tidak terealisasi bisa jadi karena masalah lahan yang belum tuntas dan sulitnya perizinan. Untuk itu, saya selalu berpesan kepada investor agar dilayani dengan baik.” (<https://twitter.com/jokowi/status/1217390038083760133>).

Selama ini, investor asing yang paling menonjol di Indonesia adalah Amerika Serikat dan Jepang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, posisi mereka mulai tergeser oleh kehadiran Tiongkok sebagai pemain baru dalam lanskap investasi di Indonesia. Kehadiran Tiongkok ini tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Dalam perspektif psikologis dan geopolitik, kehadiran pesaing baru kerap menimbulkan ketidaksukaan, terlebih bila dianggap mengancam dominasi ekonomi yang telah lama mereka kuasai.

Salah satu isu yang menjadi sorotan publik di Indonesia adalah dugaan jebakan utang (debt trap) yang dikaitkan dengan proyek-proyek BRI. Kekhawatiran ini mencuat setelah AidData, sebuah lembaga penelitian berbasis di Amerika Serikat, merilis laporan pada 29 September 2021 mengenai “utang

tersembunyi” (hidden debt) yang berasal dari pinjaman Tiongkok. Laporan tersebut menyebutkan bahwa total utang tersembunyi dari proyek BRI di seluruh dunia mencapai sekitar 385 miliar dolar AS. Indonesia, dalam laporan tersebut, disebut memiliki utang tersembunyi sebesar 17,28 miliar dolar AS, atau sekitar 1,6% dari produk domestik bruto (PDB).

Temuan dari AidData ini segera mendapat sorotan luas dari media-media nasional dan menjadi rujukan utama dalam berbagai diskusi publik. Dalam waktu singkat, isu ini menyebar cepat di media sosial, khususnya Twitter, hingga menjadi trending topik. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak memiliki akses informasi yang utuh langsung mempercayai informasi tersebut tanpa mempertanyakan validitas atau konteksnya. Akibatnya, berkembanglah opini negatif yang cukup kuat di Indonesia bahwa proyek BRI identik dengan praktik jebakan utang dari Tiongkok. Opini ini diperkuat oleh sejumlah cuitan publik yang menyuarakan kekhawatiran serupa di berbagai kanal media sosial.

DPP PKS @PKSejahtera, pada 22 Oktober 2021, “PKS menyoroti utang tersembunyi Indonesia kepada Tiongkok. AidData menemukan bahwa utang tersembunyi Indonesia kepada Tiongkok diperkirakan mencapai Rp 245 triliun untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah. “Jangan remehkan temuan ini.” (<https://twitter.com/PKSejahtera/status/1451395347159207936>)

KRMT Roy Suryo @KRMTRoySuryo2, “Sekali lagi, mari kita pahami “Jebakan Badman” (bukan hanya Batman). Proyek KCIC/Kereta Cepat Indonesia Tiongkok/TATTLE: - Sudah 347 tahun tidak balik modal (sudah ada perhitungan di tweet sebelumnya), - Indonesia terlilit utang dengan Tiongkok Development Bank, - Penipuan Intelektual APBN-P (baca: Mengingkari Janji). AMBAYAR”. (<https://twitter.com/KRMTRoySuryo2/status/1447893962455277570>).

Democracy_Is_Dead @Romelah_mel, pada 10 Mei 2019. “Tiongkok tidak menjajah dengan senjata, tetapi dengan perangkap utang! Itu ide yang cerdas. Zimbabwe, Angola, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka adalah beberapa negara yang telah menjadi korban perangkap utang mereka. Bahkan Zimbabwe mengubah mata uangnya menjadi Yuan. Kompensasi tidak dapat membayar utang!”. (https://twitter.com/Romelah_mel/status/1126604757362044928).

Muhammad Said Didu @msaid_didu pada 7 Oktober, “Jika tidak hati-hati, Indonesia bisa jadi salah satu negara yang terjebak utang dari Tiongkok seperti yang dialami banyak negara. Perangkap “investasi” Tiongkok lewat program BRI (Belt and Road Investment).” (https://mobile.twitter.com/msaid_didu/status/1446050220970692609).

Mas Piyu @maspiyuaja. “Tere Liye: Proyek kereta cepat, jebakan utang Tiongkok, rakyat menderita.” Diretweet 369 kali, dikutip 22 kali, dan disukai 1.014 kali. (<https://twitter.com/maspiyuaja/status/1447697263824752643>).

Istilah “utang tersembunyi” merujuk pada pinjaman yang diterima oleh negara berkembang namun tidak tercatat secara resmi sebagai utang negara. Hal ini terjadi karena pinjaman tersebut tidak dilakukan melalui pemerintah secara langsung, melainkan melalui badan usaha milik negara (BUMN), bank, atau sektor swasta. Akibatnya, utang semacam ini tidak tercatat dalam laporan utang resmi suatu negara, sehingga sering luput dari perhatian publik maupun lembaga pengawasan fiskal.

Sayangnya, informasi penting semacam ini kurang mendapatkan perhatian serius dari warganet. Fokus perhatian publik cenderung pada narasi besar bahwa proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Tiongkok memiliki potensi menjerat negara penerima dalam lingkaran utang. Kekhawatiran yang mengemuka adalah apabila pinjaman-pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi, maka kedaulatan nasional dikhawatirkan akan tergadaikan—baik secara ekonomi, politik, maupun strategis. Inilah opini publik yang banyak berkembang di Indonesia.

Sejumlah akun media sosial yang berpihak pada pemerintah sebenarnya telah berupaya menjelaskan konteks dan mekanisme utang tersembunyi ini. Namun, penjelasan tersebut tidak selalu efektif dalam membendung narasi negatif yang sudah lebih dahulu berkembang dan menyebar luas di masyarakat, terutama di ruang-ruang digital.

Deni Siregar @denisiregar07, “Cara Tiongkok itu keren. Mereka mengambil pendekatan ekonomi, bukan model kolonialisme dan pemisahan ala AS. Itulah sebabnya Tiongkok populer di beberapa negara Afrika. Dengan memiliki sekutu di mana-mana, dominasi dolar AS mulai terancam karena Yuan Tiongkok diperdagangkan di sana.” <https://twitter.com/Dennysiregar7/status/1429344231143792645>).

Staf Ahli Menteri Keuangan @prastow Yustinus Prastowo mencuit, “Banyak dibicarakan soal ‘hutang terselubung’ atau utang terselubung versi Tiongkok AidData. Agar tidak membingungkan dan jelas, kami jelaskan masalahnya. Informasi yang disampaikan tidak akurat dan rentan gosong. Itu bukan utang pemerintah, tetapi terkait.” Disukai 1822 kali dan di-retweet 780 kali. (<https://twitter.com/prastow/status/1448868033951195139>).

Akun majalah Tempo @tempodotco, “Tidak benar kalau Tiongkok

memberi utang terbesar ke Indonesia. Itu konyol.” Sebuah tautan berita, komentar dari tokoh ekonomi Faisal Basri, menyertainya. (<https://twitter.com/tempodotco/status/1111256063121096705>).

Namun, narasi mengenai “jebakan utang” Tiongkok dibantah secara tegas oleh sejumlah tokoh publik dan pejabat, salah satunya adalah Yustinus Prastowo, staf ahli Menteri Keuangan, serta Denny Siregar, aktivis media sosial yang dikenal sebagai pendukung pemerintah. Melalui unggahan di berbagai platform digital, keduanya menegaskan bahwa angka utang yang disebutkan dalam laporan *AidData* sebagian besar merupakan utang dari sektor swasta, bukan pinjaman langsung kepada pemerintah Indonesia. Dalam penjelasannya, mereka juga menyampaikan bahwa pendekatan Tiongkok terhadap negara-negara mitra, termasuk Indonesia, lebih bersifat ekonomi ketimbang militer. Hal ini mengindikasikan perbedaan fundamental antara strategi kerja sama Tiongkok dengan pendekatan geopolitik yang selama ini sering diasosiasikan dengan kekuatan Barat.

Majalah Tempo, salah satu media arus utama yang kredibilitasnya tidak diragukan, juga pernah merilis laporan yang menyanggah anggapan bahwa Tiongkok adalah kreditor terbesar Indonesia. Dalam laporan tersebut ditegaskan bahwa komposisi utang luar negeri Indonesia lebih kompleks dan melibatkan berbagai negara serta lembaga keuangan internasional, bukan semata-mata didominasi oleh Tiongkok.

Di sisi lain, isu mengenai dominasi investor asing juga mencuat dalam polemik seputar Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Indonesia. Banyak kalangan, terutama mahasiswa dan aktivis sosial, menyuarakan keberatannya karena menganggap UU ini terlalu berpihak kepada kepentingan pemodal asing dan berpotensi mengancam kedaulatan atas sumber daya alam nasional. Sebagai bentuk perlawanan, berbagai gerakan revitalisasi diskursus publik pun muncul di media sosial, dipelopori oleh kelompok-kelompok aktivis yang peduli pada keadilan sosial dan ekonomi.

Jumhur Hidayat @jumhurhidayat, 7 Okt 2020 “UU ini memang untuk Investor Primitif dari RRC dan pengusaha rakus. Untuk investor beradab, begini bunyinya: 35 Investor Asing Ungkap Kekecewaan Mereka terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja, Klik untuk baca: <http://kmp.im/AGA6m2>”. Telah di-Retweet 334 kali, di-Kutip 10 kali, di-Tweet 692 kali Like. (<https://mobile.twitter.com/jumhurhidayat/status/1313649613933473792>)

Syahganda Nainggolan @syahganda, pada 13 Okt 2020, “Makan malam makin gila lihat orang bugil. Sekarang Menhan Jokowi malah menuduh WNA yang demo. Wah, tidak konsisten, KAMI atau WNA

yang kalian salahkan????? Twitter ini mendapat 1.283 Retweet, 116 Quoted Tweet, dan 4.417 Like. (<https://twitter.com/syahganda/status/1315733067416313856>).

Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan menjadi dua tokoh yang menyuarakan kritik keras terhadap pemerintah, khususnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menilai bahwa UU tersebut sarat dengan kepentingan asing dan cenderung merugikan rakyat Indonesia. Kritik mereka terutama disampaikan melalui media sosial, yang kemudian dianggap oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk ujaran kebencian dan hasutan untuk melakukan tindakan anarkis.

Akibat unggahan mereka, keduanya ditangkap oleh kepolisian dan diproses secara hukum. Penangkapan ini memicu reaksi luas di masyarakat. Banyak pihak, termasuk pegiat hak asasi manusia dan aktivis prodemokrasi, menyayangkan langkah aparat tersebut. Pemerintah pun dituding sebagai pihak yang antikritik dan kurang toleran terhadap perbedaan pendapat, yang justru berpotensi melemahkan iklim demokrasi di Indonesia.

Setelah melalui proses peradilan, Jumhur dan Syahganda divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan. Vonis ini menjadi preseden penting dalam dinamika hubungan antara kebebasan berekspresi, media sosial, dan ketegangan antara negara dan warganya dalam ruang publik digital.

Kedaulatan Negara

Kekhawatiran terhadap proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari media-media Barat yang cukup vokal. Misalnya, *The Washington Post* dalam laporannya menyatakan kekhawatiran bahwa teknologi Huawei yang digunakan di Bangladesh dan sejumlah negara peserta BRI dapat dijadikan sarana pengawasan intelijen oleh pemerintah Tiongkok (Yu & Yan, 2020, hlm. 72–78). Narasi semacam ini lambat laun merembes ke opini publik di Indonesia dan membentuk semacam ‘penyakit kecemasan’ kolektif terhadap agenda tersembunyi di balik proyek BRI.

Beberapa isu yang berkembang antara lain adalah tuduhan adanya jebakan utang, ancaman terhadap kedaulatan wilayah seperti di Laut Cina Selatan, serta potensi hilangnya wibawa negara. Ketakutan semacam ini menggiring publik pada satu kesimpulan fatalistik: bahwa negara peminjam akan secara otomatis berada di bawah bayang-bayang pengaruh negara pemberi pinjaman. Pandangan ini memang tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak bisa digeneralisasi sebagai kebenaran universal.

Sebagai contoh, Amerika Serikat sendiri memiliki utang luar negeri yang besar kepada negara-negara seperti Inggris, Kanada, dan Jepang. Bahkan,

utang AS kepada Tiongkok tercatat mencapai US\$1,7 triliun atau sekitar 15% dari total utang luar negeri negara tersebut (Cahyani, 2021). Namun demikian, fakta ini tidak membuat Amerika Serikat tunduk atau terjajah oleh Tiongkok. Dalam praktiknya, AS justru tetap memperlihatkan sikap superior dan tidak segan berkonfrontasi dengan Tiongkok dalam berbagai isu, baik perdagangan maupun diplomasi.

Apa yang dapat dipetik dari kasus tersebut adalah bahwa kerja sama dan pinjaman luar negeri bukan semata-mata persoalan siapa mendominasi siapa, melainkan sangat bergantung pada bagaimana sebuah pemerintahan mengelola hubungan diplomatik dan menjaga martabatnya di hadapan mitra kerja sama. Indonesia pun tidak perlu merasa terancam soal kedaulatan jika setiap perjanjian dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan kesetaraan.

Muhammad Rizki @Muhamma64893401, pada 16 Sep 2021, Balas ke @Bobby4564075885 dan @Dennysiregar7 “Bukan cuma isu yang dibesar-besarkan. Ada isu pasukan Cina masuk ke Indonesia. Pekerja proyek beralih ke isu pekerja yang tidak produktif. Padahal jelas yang bikin rel ini pasti punya keahlian dari situ. Sayang politik cengeng merusak kerja presiden dengan berbagai cara. Hasilnya kayak anak kecil.” (<https://twitter.com/Muhamma64893401/status/1438470920100737035>).

#99@PartaiSocmed “Apakah investasi/utang Tiongkok merupakan “diplomasi jebakanutang” dalam kasus sengketa kepemilikan di Laut Natuna? Apakah Anda berkenan memperhatikan tanggapan para jenderal tua ini, baik Luhut maupun Prabowo? Mereka berdua berinvestasi lebih besar daripada kepemilikan negara mereka.” (<https://twitter.com/partaisocmed/status/1213109045864759296>).

kumparan@kumparan, “Luhut meminta semua pihak tidak ribut soal pelanggaran Tiongkok. Khawatir mengganggu investasi. (<https://twitter.com/PartaiSocmed/status/1213109045864759296>)

Fadli Zon (Youtube: Fadli Zon Official) @fadlizon mencuit pada 29 April 2020. “Soal TKA Tiongkok yang Masuk Indonesia, Fadli Zon: Ini Penghinaan terhadap Kewarasan Kita.” (<https://twitter.com/fadlizon/status/1255350125888712704>)

Benny K Harman @BennyHarmanID, “Fahri Hamzah: Mengadopsi UU Hak Cipta dari Sistem Komunis Tiongkok. Benar. Tapi di sana, hukum adalah alat kaum kapitalis. Negara adalah alat mereka. Lebih parah lagi, presiden adalah boneka para baron. Itu di sana. Di negara kita? Gra-

tis!”. Twitt, pemimpin Partai Demokrat, menyindir negara Indonesia. (<https://twitter.com/BennyHarmanID/status/1316948796073443328>)

Akun Alvin Lie @alvinlie21, “Sangat mengecewakan, investasi di wilayah kedaulatan negara seolah-olah hanya Tiongkok yang mampu berinvestasi di Indonesia, dan Indonesia hanya bisa ditawarkan ke Tiongkok. Sebagai warga negara Indonesia, saya kecewa dan malu serta tidak bisa menerima logika Pak Menko.” Alvin Lie adalah komisioner Ombusmen dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Tweet tersebut disukai 1.385 kali dan di-retweet 830 kali. (<https://twitter.com/alvinlie21/status/1213298261303296000>).

Sejumlah akun media sosial sebenarnya telah mencoba membantah narasi-narasi yang menimbulkan kekhawatiran terkait isu kedaulatan Indonesia dalam konteks proyek BRI. Mereka memberikan klarifikasi serta menyajikan data dan argumen yang bertujuan menyeimbangkan informasi di ruang publik. Namun, sayangnya upaya tersebut tidak mendapatkan perhatian yang cukup luas dari masyarakat. Klarifikasi yang mereka sampaikan tidak menyebar secara masif dan kurang mendapat tanggapan dari warganet. Akibatnya, narasi tandingan yang seharusnya bisa meredam keresahan justru tenggelam di tengah dominasi opini negatif yang terus bergulir di media sosial.

@monitorindonesia mencuit, “Tangan dingin Menteri Luar Negeri Retno membuah hasil, membentuk poros Tiongkok-Indonesia.” Dengan menyertakan tautan berita dari bizlaw. Id. (<https://twitter.com/monitorindo/status/1296761235287896065>)

Jimly Asshiddiqie @JimlyAs, pada 22 Oktober 2020, “Setelah kunjungan Menlu AS, akan semakin jelas bahwa AS akan terus berusaha membujuk Indonesia agar tidak berpihak pada Tiongkok. Ini adalah kesempatan emas untuk menekan AS agar menandatangani perjanjian pemindahan pabrik industrinya dari Tiongkok ke Indonesia. Kalau perlu, buat undang-undang/peraturan pemerintah yang khusus untuk memfasilitasi investasi mereka. Bisa jadi UU Cipta Kerja tidak relevan.” (<https://twitter.com/JimlyAs/status/1319271734403461120>)

iNews @OfficialiNewsTV “JK: Saling Menguntungkan adalah Prinsip Utama Kerja Sama Indonesia-Tiongkok, (<https://twitter.com/OfficialiNewsTV/status/1121692893905813505>)

Abdillah Toha @AT_AbdillahToha, 3 September 2019, Amien Rais berkata: Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan mendukung Cina dalam merebut kepemilikan Indonesia. Mengapa

kebencian dan dendam orang ini terhadap Jokowi belum padam? (https://twitter.com/AT_AbdillahToha/status/1168893181645271042).

Dr.M. Fadjoel Rachman @fadjroel “Tidak ada tawar-menawar atas kedaulatan nasional Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo. Pagi ini Rabu (8/1/2020), Presiden @jokowi berpesan kepada #NATUNA untuk mengecek kesiapan pasukan TNI dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia & menggarap pembangunan perikanan ~ #Jubir @Puspen_TNI @GUIDE_ID”. (<https://twitter.com/fadjroel/status/1214829605619560454>).

Poros Maritim

Banyak warganet Indonesia di Twitter memberi perhatian lebih pada isu Laut Tiongkok Selatan—juga sebagai Laut Natuna Utara—dengan nada pesimistis. Sentimen yang berkembang umumnya tentang kekhawatiran terhadap risiko pelanggaran kedaulatan wilayah, ketimpangan kekuatan militer antara Indonesia dan Tiongkok, serta dugaan bahwa proyek kerja sama ekonomi seperti BRI dapat menjadi jalan masuk kepentingan geopolitik Tiongkok di kawasan.

Musni Umar @musniumar, pada 9 Januari 2020, mencuit, “Indonesia tidak perlu takut dengan Tiongkok dalam kasus di Laut Natuna. Amerika Serikat misalnya, bisa dilawan oleh Iran. Indonesia, negaranya dirampas hak miliknya. Tidak berani melawan. Kuncinya adalah bangsa Indonesia yang kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. (<https://twitter.com/musniumar/status/1215262992490647554>).

#FahriHamzah2021 @Fahrihamzah “Teori Ibu tentang bertambahnya jumlah ikan setelah tayangan “pengeboman” itu bohong belaka. Kepala ikan di laut saja tidak usah dihitung, 75% bumi, dan 75% nusantara. Kepala orang berpenghasilan rendah saja tidak bisa dihitung. Poros maritim Jokowi tidak jelas. Di laut, kita binasa.” (<https://twitter.com/Fahrihamzah/status/1017257110055161858>).

Dr. Rizal Ramli @RamliRizal “Tidak seperti AS, Tiongkok punya ambisi teritorial. AS, meski ingin berpengaruh, tidak punya ambisi teritorial. Rakyat Indonesia tidak bisa menerima ambisi teritorial ini. Harus dilawan.” (<https://twitter.com/RamliRizal/status/1325146778627309575>).

Di tengah gelombang kritik dari sejumlah tokoh oposisi seperti Musni Umar, Rizal Ramli (alm), dan Fahri Hamzah yang menelisik agresivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan, muncul pula narasi tandingan yang

menekankan pentingnya pembangunan dan penguatan kedaulatan Indonesia. Narasi positif ini memandang bahwa keterlibatan Tiongkok melalui proyek Jalur Sutra Maritim bukan semata ancaman, melainkan peluang strategis untuk memperkuat infrastruktur maritim nasional, memperluas konektivitas perdagangan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

@DianaAurora, “Berbicara di Universitas Xiamen, Rokhmin Dahuri menjelaskan jalur sutra Tiongkok di Indonesia. Saya suka penjelasan Pak Rokhmin Dahuri tentang jalur sutra Tiongkok di Indonesia.” Disertai tautan web berita di monitor.co.id. Rokhmin Dahuri adalah politikus dari partai berkuasa, PDIP. Selain itu, ia juga mantan menteri kelautan dan perikanan. Jadi, ia sudah lama menjadi birokrat. (<https://twitter.com/DianaAurora96/status/1178299925534167040>)

Akun Menteri Kelautan dan Perikanan 2018, Susi Pujiastuti, melalui akun @susiPujiastuti, mencuit, “Indonesia berdaulat karena Bapak Presiden sudah memerintahkan kita untuk menjaga kedaulatan sejak awal.” (<https://twitter.com/susipudjiastuti/status/1077424333595697152>).

Bahkan Panglima TNI Hadi Tjahjanto @TjahjantoHadi pada 30 Desember 2018 mencuit, “Natuna ibarat beranda rumah di pinggir pantai yang langsung berhadapan dengan laut lepas. Peresmian Matra Terpadu 3 Satuan TNI di Ranai untuk memastikan kepemilikan Indonesia tetap tegak dan utuh. Mari bersama-sama kobarkan semangat bela negara dan cinta tanah air. Bendera merah putih”. (<https://twitter.com/TjahjantoHadi/status/1079330426194259969>).

Mahfud MD @mohmahfudmd, “Natuna itu indah, subur, dan kaya. Masyarakatnya dan budayanya juga santun. Negara harus hadir bukan hanya secara de jure, tetapi juga secara de facto. Hari ini bersama Menteri Kelautan dan pejabat sipil dan militer, Pusat dan Daerah, kami ke Natuna. Kami mengadakan pertemuan di atas Kapal Republik Indonesia”. (<https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1217349085620920325>).

Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan resmi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Panglima TNI, menegaskan kedaulatan Indonesia di wilayah Laut Natuna. Klaim ini penting untuk diperkuat dalam forum diplomatik bilateral, terutama jika ada negara lain yang memiliki klaim serupa. Namun, persoalan menjadi lebih kompleks apabila negara-negara ketiga seperti Amerika Serikat, Australia, India, atau Jepang turut campur dalam konflik yang seharusnya diselesaikan antarnegara terkait. Ironisnya, opini publik di Indonesia yang

berkembang di media sosial justru sering kali dimanfaatkan sebagai alat politik. Sebagaimana diuraikan dalam teori ekonomi politik Vincent Mosco, ketika isi media atau opini publik dipakai sebagai komoditas untuk kepentingan tawar-menawar kekuasaan, maka terjadilah proses komodifikasi konten yang berisiko mengaburkan substansi kedaulatan itu sendiri.

Narasi Sosial tentang Proyek BRI di Indonesia

Peneliti dari Institut Studi Internasional Shanghai, Zhou Yuyuan, menilai bahwa Indonesia merupakan mitra strategis dalam pembangunan ekonomi Tiongkok, khususnya selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap memiliki komitmen kuat terhadap investasi dari Tiongkok, termasuk dalam kerangka proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Namun demikian, Zhou juga mencatat bahwa dinamika politik domestik Indonesia menjadi tantangan tersendiri, seperti kuatnya dominasi oligarki lokal, lemahnya tata kelola akibat desentralisasi atau otonomi daerah, serta eksistensi kekuatan oposisi konvensional yang cukup signifikan (Zhou Yuyuan, 2016).

Hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok yang telah terjalin selama lebih dari 70 tahun juga menjadi perhatian Presiden Jokowi. Dalam percakapan via telepon dengan Presiden Xi Jinping, Jokowi menyampaikan harapan agar kerja sama kedua negara semakin kokoh dan menguntungkan. Sebagai bentuk keseriusan, Jokowi mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk melakukan dialog langsung dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok terkait pelaksanaan investasi strategis. Namun sayangnya, komitmen di tingkat elite ini belum sepenuhnya menjangkau mayoritas masyarakat Indonesia, yang masih bergulat dengan kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah.

Di saat yang sama, rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat tidak hanya berlangsung dalam bidang ekonomi dan militer, melainkan juga merambah ke perang wacana di media sosial. Analisis terhadap tagar #southTiongkoksea mencerminkan adanya pertarungan narasi antara media Tiongkok dan media Amerika. Media Barat, seperti yang ditunjukkan dalam riset Nip dan Sun (2018), cenderung lebih agresif dalam mendistorsi agenda pemberitaan dengan memanfaatkan akun-akun manipulatif. Meskipun media resmi Tiongkok seperti Xinhua, People's Daily, dan CGTN telah membangun narasi yang cukup signifikan di media sosial, dominasi media Barat tetap kuat dan bahkan memengaruhi opini publik secara global, termasuk di Indonesia. Tidak mengherankan jika sejumlah tokoh oposisi di Tanah Air menggunakan narasi dari media Barat untuk mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia terkait proyek BRI.

Selain tantangan eksternal, terdapat pula permasalahan internal dalam manajemen komunikasi dan pelaksanaan kebijakan oleh para elit politik di Indonesia. Pertama, lemahnya koordinasi dalam membangun narasi publik, terlihat dari perbedaan pendapat antara Menko Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan tidak ada pelanggaran ketenagakerjaan oleh tenaga kerja Tiongkok di Indonesia, dengan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengakui ada pelanggaran, meski jumlahnya sedikit dan telah ditindaklanjuti melalui kerja sama bilateral. Hal ini mengindikasikan ketidaksinambungan komunikasi antarpejabat tinggi yang justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Kedua, komunikasi publik di tingkat juru bicara kepresidenan pun dinilai belum efektif. Misalnya, Fadjoel Rachman yang dikenal sebagai aktivis sejak masa Orde Baru, tetapi dianggap belum cukup tajam dalam membendung kritik dari pihak oposisi. Hal yang sama juga terlihat pada staf khusus Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, yang sering kali dikritik karena penyampaian argumennya yang dianggap kurang kuat dan tidak konsisten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa koordinasi komunikasi strategis di lingkaran istana belum sepenuhnya solid dalam konteks merespon tantangan isu-isu strategis seperti proyek BRI.

Kalangan intelektual Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar: pendukung pemerintah, oposisi, dan kelompok netral. Kelompok yang netral biasanya memilih untuk tidak banyak bersuara di ruang publik. Sebaliknya, mereka yang mendukung pemerintah cenderung vokal, termasuk dalam menyuarakan dukungan terhadap proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang digagas Tiongkok dan dijalankan di Indonesia melalui berbagai proyek infrastruktur.

Salah satu tokoh yang aktif menyuarakan dukungannya terhadap proyek BRI adalah Budiman Sudjatmiko. Ia dikenal sebagai intelektual dan aktivis reformasi yang kemudian menjadi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam berbagai kesempatan, Budiman memandang proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara yang dibangun dalam kerangka BRI sebagai capaian signifikan. Ia menyebut bahwa pembangunan masif seperti itu biasanya hanya bisa dilakukan di bawah rezim otoriter. Namun di era Presiden Jokowi, hal tersebut bisa diwujudkan dalam iklim demokrasi.

Dukungan juga datang dari kalangan seniman dan musisi, salah satunya Addie MS. Pemilik akun Twitter @addiems ini merupakan salah satu pendukung setia Presiden Jokowi yang aktif membela kebijakan pemerintah melalui media sosial, termasuk proyek-proyek infrastruktur. Addie MS bahkan menyatakan bahwa dirinya telah mengalami masa pemerintahan dari Presiden Soekarno hingga Jokowi, dan menyebut bahwa Jokowi adalah presiden yang tetap tenang menghadapi kritik tajam dari lawan-lawan politiknya. Baginya,

pembangunan infrastruktur di masa Jokowi adalah bentuk nyata dari upaya pemerataan pembangunan, bukan sekadar janji politik.

Tak hanya dari dalam negeri, apresiasi juga datang dari luar Indonesia. Kishore Mahbubani, seorang cendekiawan asal National University of Singapore (NUS), menulis artikel bertajuk *The Genius of Jokowi* yang diterbitkan oleh Project Syndicate pada 6 Oktober 2021. Dalam artikelnya, Mahbubani memuji Jokowi sebagai pemimpin yang berhasil menyatukan dua kelompok masyarakat yang sempat terbelah pasca pemilu, sekaligus menggerakkan pembangunan infrastruktur skala besar dalam sistem demokrasi yang terbuka—sebuah capaian yang menurutnya tidak mudah di era media sosial yang penuh dinamika opini.

Sementara itu, dari pihak oposisi, nama Rocky Gerung kerap muncul sebagai kritikus paling “keras” terhadap pemerintahan Jokowi. Pengajar filsafat di Universitas Indonesia ini dikenal dengan gaya kritiknya yang tajam dan retorik. Rocky tidak segan-segan menyebut Jokowi dengan istilah “presiden kelas kakap” yang hanya sibuk membangun proyek tanpa konsep atau visi jangka panjang yang jelas. Rocky juga kerap menggambarkan proyek BRI dan infrastruktur besar lainnya sebagai “kosmetik politik” yang menarik dari luar namun bermasalah dari dalam. Menurutny, banyak kebijakan pemerintah tidak lebih dari tampilan luar tanpa perencanaan strategis yang matang.

Amien Rais, salah satu tokoh intelektual paling berpengaruh dalam proses reformasi 98 yang menggulingkan pemerintahan Orde Baru, hingga kini juga masih aktif melontarkan kritik terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo. Pendapatnya sering kali dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, Amin dianggap memiliki kepekaan terhadap berbagai celah kebijakan pemerintah. Namun, di sisi lain, posisinya sebagai pendukung fanatik calon presiden yang menjadi rival Jokowi—yakni Prabowo Subianto—menyebabkan sebagian pihak memandang kritiknya sebagai bentuk keberpihakan politik. Terlepas dari itu, Amien Rais memang dikenal sebagai figur vokal yang konsisten menyuarakan pendapatnya sejak era sebelum reformasi. Sebagai profesor yang pernah menempuh pendidikan doktoral di University of Chicago, Amien memiliki basis intelektual yang cukup kuat. Meskipun tidak memiliki akun Twitter, pemikirannya tetap tersebar luas melalui para pendukungnya, yang masih setia mengamplifikasi pandangannya di ruang publik.

Sementara itu, Rizal Ramli (kini alm), tokoh ekonom sekaligus mantan menteri di kabinet pertama Jokowi, juga menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap pemerintah, termasuk terhadap proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang digagas oleh Tiongkok. Rizal sering mengomentari berbagai kebijakan ekonomi dan politik, termasuk menilai proyek BRI sebagai “pedang bermata dua.” Menurutny, kerja sama ini berpotensi menyeret negara-negara penerima ke dalam jebakan utang dan membuka jalan bagi Tiongkok untuk

menguasai aset strategis negara mitra. Bahkan, Rizal sempat menyebut Presiden Jokowi sebagai “kaki tangan Beijing”—pernyataan yang tentu saja menimbulkan reaksi keras dari pendukung pemerintah. Pernyataan tersebut segera ditanggapi dan dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang dikenal sebagai tokoh kunci dalam pengelolaan investasi strategis di bawah pemerintahan Jokowi.

Adapun para intelektual netral itu antara lain; seperti Sujiwo Tejo, seniman dan budayawan. Pemilik akun Twitter, Jack Separo Gendeng @sudjiwotedjo, berpenampilan cukup nyentrik dengan rambut gondrong. Dalam profil akun Twitter-nya, presiden Jancuker itu menuliskan, “Akun ini boleh digunakan oleh *buzzer* mana pun, yang menyerang pikiran dengan pikiran. Bukan *buzzer* penyelundup dari kubu mana pun yang menyerang pikiran dengan hinaan, fitnah/framing jahat, dan sebagainya. Tapi jangan khawatir. Akun ini tidak akan memblokir siapa pun karena karma juga tidak memblokir setan.”

Memang, dalam berbagai kesempatan di media, Sujiwo Tejo, seniman sekaligus budayawan yang dikenal dengan pandangan kritisnya, kerap melontarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, sorotan utamanya tidak sepenuhnya tertuju pada substansi kebijakan, melainkan pada kondisi demokrasi dan kebebasan berekspresi di ruang publik, khususnya di media sosial. Tejo menyayangkan maraknya akun *buzzer* yang mendukung pemerintah tetapi justru memperkeruh suasana diskusi publik. Menurutnya, keberadaan *buzzer* yang menggunakan bahasa kasar, menyampaikan opini secara provokatif, dan bahkan merundung pihak-pihak yang berbeda pandangan, telah merusak iklim demokrasi yang sehat dan menghancurkan semangat dialog yang konstruktif di masyarakat.

Faisal Basri (alm), ekonom senior dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef), dikenal sebagai sosok intelektual independen yang memilih berada di luar lingkaran kekuasaan. Meski beberapa kali ditawarkan jabatan publik oleh Presiden Jokowi maupun presiden sebelumnya, ia lebih memilih untuk tetap bebas menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu kritik keras yang ia lontarkan adalah soal masuknya tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia. Melalui akun Twitter-nya, Faisal menyampaikan bahwa selama masa pandemi saja tercatat lebih dari 10.000 pekerja asing asal Tiongkok masuk ke Indonesia. Bahkan, ketika pemerintah menerapkan larangan masuk bagi warga negara asing pada awal 2021, tercatat masih ada 433 pekerja Tiongkok yang masuk pada Januari dan 1.027 orang pada Februari. Meskipun begitu, Faisal menegaskan bahwa dirinya tidak menolak investasi dari Tiongkok. Ia justru menyoroti pentingnya kewaspadaan. Sebab, meskipun investasi Tiongkok masih berada di peringkat ke-22 dan tertinggal jauh dari Singapura, pemerintah Indonesia tetap harus memastikan bahwa fasilitas strategis tidak jatuh ke tangan asing begitu saja.

Untuk diketahui, bahwa di era digital, media memiliki peran strategis bukan hanya sebagai corong promosi proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), tetapi juga sebagai garda depan dalam merespon berbagai serangan narasi negatif terhadap Tiongkok. Salah satu contoh menarik adalah kerja sama media antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang diposisikan sebagai bagian dari diplomasi publik. Sejak pembentukan kawasan perdagangan bebas pada tahun 2001, hubungan media antara Tiongkok dan ASEAN terus berkembang melalui pertukaran informasi, pertemuan antarmenteri bidang informasi, dan forum media yang difasilitasi oleh *People's Daily*. Meski begitu, realitas di lapangan menegaskan adanya tarik-menarik kepentingan di dalam tubuh media itu sendiri.

Banyak media terjebak dalam dilema antara pragmatisme untuk memburu sensasi dan idealisme atau menyampaikan informasi secara objektif. Akibatnya, kerja jurnalistik sering kali tak lepas dari tekanan struktural. Jurnalis harus mengikuti arah kebijakan redaksi, redaksi tunduk pada kebijakan pimpinan media, dan pada akhirnya semua bermuara pada pemilik media sebagai pemegang kuasa menentukan arah pemberitaan. Dalam konteks ini, independensi pers kerap diuji oleh kepentingan ekonomi dan politik yang saling bertabrakan.

Di Indonesia, kepemilikan media umumnya berada di tangan para oligark, yakni para pengusaha besar yang sekaligus merangkap sebagai elite partai politik. Posisi ganda ini menciptakan ruang kepentingan yang kompleks. Logikanya sederhana: selama para pengusaha tersebut mendapat proyek atau posisi strategis dari penguasa, maka media milik mereka akan menampilkan citra positif tentang pemerintah. Namun, ketika akses terhadap kekuasaan terganggu, maka pemberitaan bisa berbalik menyerang. Fenomena ini dapat diamati, misalnya, dalam pemberitaan oleh Metro TV, TVOne, MNC Group, dan Tempo Group yang kadang tampak condong pada dinamika kekuasaan, tergantung siapa yang mereka dukung.

Contoh menarik terjadi pada Arya Sinulingga, yang pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi RCTI. Pada Pemilu 2014, ia diketahui mendukung Prabowo Subianto. Bahkan, sempat beredar kabar bahwa Arya meminta seluruh jaringan televisi di bawah MNC Group untuk mendukung kampanye Prabowo dan menyudutkan Jokowi. Ketika seorang bawahannya tidak mematuhi arahan tersebut, Arya memberikan surat peringatan yang kemudian bocor ke publik dan memicu polemik luas. Ia juga mendirikan lembaga survei yang merilis hasil berbeda dari lembaga lain, dengan menempatkan Prabowo sebagai pemenang. Menariknya, pada Pemilu 2019, Arya justru berbalik mendukung Jokowi dan kemudian diangkat menjadi staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir—pergeseran sikap yang mencerminkan betapa dinamisnya loyalitas politik dalam ekosistem media.

Kisah serupa terlihat dalam sosok Suryopratomo dari Metro TV. Sejak Pilpres 2014, Metro TV terlihat konsisten mendukung Jokowi, seiring dengan posisi pemiliknya, Surya Paloh, sebagai Ketua Umum Partai NasDem, salah satu partai koalisi utama pendukung Jokowi. Framing pemberitaan Metro TV pun kerap dinilai condong pada Jokowi dan cenderung kritis terhadap Prabowo, hingga pada titik tertentu dianggap sebagai media partisan. Suryopratomo kemudian dipercaya menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura.

Tak hanya itu, beberapa tokoh media lain juga masuk ke lingkaran kekuasaan Jokowi, seperti Usman Kansong yang sebelumnya Direktur Utama Media Berita Indonesia dan kemudian menjadi Direktur Komunikasi Politik di tim kampanye Jokowi. Ada pula Yadi Hendriyana, mantan Pemimpin Redaksi iNews TV, yang ditunjuk sebagai Direktur Komunikasi dan Informasi di tim pemenangan yang sama. Semua ini menggambarkan bagaimana relasi antara media dan kekuasaan di Indonesia sebagai arena negosiasi politik yang kompleks dan saling menguntungkan.

Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampai informasi, tetapi juga menjadi ruang penting dalam pembentukan dan analisis realitas sosial. Fairclough (dalam Susanti, 2015) menjelaskan bahwa media merupakan sebuah wacana, tempat bahasa, pengetahuan, dan kekuasaan saling berkelindan. Dalam konteks ini, media memiliki peran ideologis: ia membentuk pandangan dunia tertentu melalui pilihan bahasa, gaya, ekspresi, dan kosakata, sekaligus menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan atau realitas. Oleh karena itu, media menjadi alat strategis untuk membangun wacana dominan yang memengaruhi persepsi publik terhadap pembangunan ekonomi dan modernitas. Di tengah upaya kerja sama ekonomi demi kemakmuran bersama, masih terdapat sekelompok kecil pihak yang meragukan arah pembangunan tersebut, meskipun keberatan mereka seringkali tertutup oleh data dan fakta yang lebih kuat.

Proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) juga menarik perhatian luas di media sosial. Riset yang dilakukan oleh Zhao Changyu dan Wu Yaping (2019) mengungkap bahwa sepanjang tahun 2017 terdapat lebih dari 60.000 unggahan di Twitter yang menyinggung proyek ini. Sentimen positif dalam unggahan tersebut umumnya berkaitan dengan isu konektivitas, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, sentimen negatif hanya sedikit dan lebih banyak terkait pada aspek keamanan dan kebijakan luar negeri. Tidak dapat dimungkiri, banyaknya unggahan tersebut dipicu oleh keterlibatan para aktivis media sosial dan influencer digital yang aktif di platform seperti Twitter.

Di Indonesia sendiri, influencer di media sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. *Pertama*, mereka yang menjadikan media sosial sebagai ladang ekonomi. Kelompok ini umumnya adalah kreator konten yang mengandalkan kreativitas untuk menarik perhatian publik dan mendapatkan

penghasilan dari iklan, sponsor, atau endorsement. *Kedua*, influencer yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk meraih kepopuleran politik. Tokoh-tokoh publik, termasuk Presiden Jokowi, pernah memanfaatkan media sosial untuk membangun citra dan elektabilitas politik. *Ketiga*, terdapat influencer yang menjalankan peran ganda—menjadi penggerak opini publik sekaligus pencari penghasilan. Kelompok ini dikenal luas sebagai “buzzer” atau dalam istilah populer Indonesia, “BuzzeRp”. Mereka tidak bermaksud menjadi politisi, namun menerima bayaran untuk mempromosikan tokoh atau agenda politik tertentu di media sosial, termasuk menyerang pihak lawan. Laporan dari Universitas Oxford dalam The Global Disinformation Order 2019 yang disusun oleh Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard menyebutkan bahwa para *buzzer* ini dapat memperoleh bayaran hingga Rp50 juta untuk setiap isu yang mereka kawal, dan para koordinatornya bahkan bisa meraup pendapatan hingga miliaran rupiah. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial telah menjadi medan baru dalam kontestasi politik dan ekonomi, tidak hanya di ruang ide tetapi juga dalam praktik nyata yang melibatkan uang, kekuasaan, dan opini publik.

Beberapa individu yang dikenal sebagai *buzzer* yang mendukung kemenangan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 dan 2019, kemudian diangkat menduduki posisi strategis di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Ulin Ni’am Yusron, misalnya, dikenal aktif menggalang dukungan untuk Jokowi melalui media sosial. Namun, pada Mei 2019, ia sempat membuat tuduhan keliru dengan membocorkan identitas seseorang yang diduga menyebarkan ancaman kekerasan terhadap Presiden Jokowi, yang belakangan terbukti tidak akurat. Ulin juga dituding beberapa kali melakukan doxing terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan politik, namun tidak pernah dikenai sanksi hukum, sehingga memunculkan kesan bahwa posisinya membuatnya kebal dari tindakan hukum. Selain itu, Kristia Budiarto, *buzzer* pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019, saat ini menjabat sebagai komisaris di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Sementara itu, Dyah Kartika Rini, yang merupakan Koordinator Relawan Media Sosial Maju Jokowi (Jasmev) dan turut berperan sejak Pilkada DKI Jakarta 2012 hingga Pilpres 2014, diangkat menjadi Komisaris Independen di PT Jasa Raharja (Widhana, 2020).

Kelompok oposisi menilai penempatan para *buzzer* di posisi-posisi strategis pemerintahan sebagai bentuk balas jasa politik. Sebelumnya, mereka aktif berkampanye di media sosial untuk mendukung Jokowi dalam pemilu. Setelah kemenangan diraih, beberapa di antaranya diberikan jabatan publik, termasuk di badan usaha milik negara. Situasi ini memicu kemarahan dari kalangan oposisi yang merasa bahwa individu-individu yang pernah menyebarkan provokasi, hoaks, bahkan ujaran kebencian, justru tidak diproses secara hukum, melainkan diberi penghargaan berupa jabatan. Akibatnya, kritik

terhadap pemerintah dari pihak oposisi kian tajam dan emosional, sering kali disampaikan tanpa pertimbangan yang matang.

Kontak sosial Prakarsa BRI di Indonesia

Di era media baru yang berbasis digital, masyarakat memperoleh kemudahan akses informasi melalui keunggulan konvergensi teknologi. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan, seperti sulitnya memverifikasi kebenaran informasi yang beredar dan munculnya disrupsi terhadap tatanan sosial. Akibatnya, krisis identitas pun mengemuka, ketika sebagian masyarakat mulai melepaskan keterikatan terhadap nilai dan budaya bangsa (Xiao Jun, 2021).

Perkembangan media sosial juga mendorong terbentuknya opini publik yang tidak selalu terkendali. Fenomena ini terlihat jelas, baik di Amerika Serikat dalam pertarungan antara pendukung Donald Trump dan Joe Biden, maupun di Indonesia, yang mengalami polarisasi tajam pasca Pemilu 2014 dan 2019. Polarisasi ini sengaja dipelihara oleh elite politik sebagai komoditas kekuasaan: kelompok kanan dengan populisme berbasis agama, sementara kelompok kiri mengusung semangat nasionalisme. Stigmatisasi saling dilontarkan, dari tuduhan radikalisme hingga pelabelan kafir, yang diperparah oleh eksploitasi isu agama, suku, dan etnis demi kepentingan politik dan ekonomi kelompok oligarki. Akibatnya, ruang publik digital diwarnai ujaran kebencian, hoaks, dan provokasi yang memecah belah masyarakat.

Di sisi lain, aparat pemerintah kerap dinilai bersikap represif terhadap kelompok pengkritik dan oposisi. Aksi demonstrasi mahasiswa, misalnya, sering kali dibubarkan secara paksa, menyebabkan sejumlah peserta luka-luka, bahkan ada yang meninggal dunia. Sikap represif tersebut juga tampak dalam pencopotan mural-mural yang berisi kritik sosial, disertai pemanggilan dan interogasi terhadap para pembuatnya. Di ruang digital, laporan atas ujaran kebencian dan provokasi pun marak, terutama dari individu yang merasa nama baiknya tercemar. Namun, penegakan hukum sering kali dianggap tidak adil: aparat dinilai lebih sigap memproses laporan dari pendukung pemerintah dibandingkan laporan terhadap pendukung oposisi. Hal ini menimbulkan kesan ketimpangan hukum. Sejumlah tokoh oposisi, seperti Ahmad Dhani, Shahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Gus Nur, dan Habib Rizieq Shihab, telah diproses hukum dan dipenjara atas pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara itu, laporan terhadap ujaran kebencian yang dilakukan oleh pihak pendukung pemerintah diproses dengan lambat atau bahkan tidak ditindaklanjuti. Situasi ini turut memengaruhi dinamika opini publik yang sedang berkembang dan

memperkuat persepsi tentang ketidakadilan dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Menurut pandangan kelompok oposisi, sejumlah *buzzer* yang dikenal pro-pemerintah, seperti Ade Armando, Eko Kunthadi, Ulin Yusron, Abu Janda, Deni Siregar, dan Ninoy Karundeng, juga kerap melakukan provokasi di ruang digital. Meskipun telah berulang kali dilaporkan, tidak satu pun dari kasus mereka yang diproses secara hukum, sehingga memunculkan kesan ketimpangan dalam penegakan hukum. Hal ini memperkuat rasa ketidakadilan dan memperbesar semangat perlawanan kelompok oposisi dalam mengkritik pemerintah.

Keberadaan *buzzer* dari kedua kubu, baik pendukung maupun penentang pemerintah membuat ruang publik digital semakin keruh. Saling serang antar kelompok menjadi fenomena umum, terutama ketika satu narasi berhasil mendominasi dan menjadi *trending topik* di media sosial. Kemenangan narasi dianggap sebagai kemenangan simbolik dalam perang opini.

Dalam konteks ini, banyak pihak menilai bahwa tindakan represif aparat, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta kondisi media sosial yang penuh polarisasi menjadi indikator menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia (Putra, 2021). Ketika sebuah negara telah memilih jalan demokrasi, maka konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsipnya, seperti supremasi sipil, kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan di depan hukum, dan pembatasan kekuasaan merupakan keniscayaan yang tidak boleh diabaikan.

Budaya

Karakter diplomasi budaya Tiongkok mulai terbentuk secara lebih sistematis pasca Perang Dingin, dengan penekanan pada perlindungan dan pertukaran budaya, promosi keberagaman budaya, serta konsolidasi identitas budaya Tiongkok baik secara internal maupun eksternal. Strategi ini menjadi bagian penting dari upaya Tiongkok untuk memperkuat peran budayanya dalam percaturan global. Diplomasi budaya diposisikan sebagai instrumen utama dalam menghadapi tantangan globalisasi, di mana budaya Tiongkok didorong untuk tampil sebagai kekuatan lunak yang berpengaruh di panggung dunia. Seiring berkembangnya teori “benturan peradaban” yang dikemukakan oleh ilmuwan politik Amerika Serikat pada awal 1990-an, Tiongkok justru menanggapi dengan narasi alternatif: bahwa perbedaan sejarah, latar belakang sosial, budaya, gaya hidup, dan etnis tidak mesti menjadi sumber konflik, tetapi dapat dijembatani melalui pertukaran budaya yang konstruktif. Dalam konteks inilah, Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) juga diproyeksikan sebagai platform yang bukan hanya berfokus pada konektivitas ekonomi, tetapi juga

sebagai medium pertukaran peradaban antara Tiongkok dan dunia Islam, India, serta budaya Barat lainnya.

Indonesia adalah negara yang secara ideologis berakar pada nilai-nilai keagamaan yang menyatu dengan adat dan budaya lokal. Dalam konteks ini, proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang ditawarkan Tiongkok bukan hanya mencerminkan pembangunan fisik, tetapi juga membawa pesan pertukaran peradaban yang beradab, multietnis, dan multikultural. Jalur sutra—yang dalam sejarah menyatukan peradaban besar seperti Yunani, Mesir, Babilonia, India, dan Tiongkok—juga menjadi jalur penyebaran berbagai agama besar dunia, seperti Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, dan Hindu.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim (sekitar 90%), Indonesia memiliki tradisi mudik saat Idulfitri yang memiliki dampak ekonomi signifikan, yakni perputaran uang dari kota ke desa yang meningkatkan daya beli dan perekonomian daerah. Momentum besar-besaran ini membutuhkan infrastruktur transportasi yang andal, seperti jalan bebas hambatan, pelabuhan, bandara, dan sistem energi yang memadai, yang sebagian besar menjadi fokus pembangunan dalam kerangka proyek BRI.

Selain itu, masyarakat Indonesia juga dikenal memegang teguh tradisi dan ritual keagamaan, seperti tahlilan (doa) pada hari ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 setelah seseorang wafat, atau berbagai bentuk selamatan menjelang kelahiran anak. Tradisi-tradisi ini menandakan pentingnya konektivitas antardaerah karena masyarakat di kota akan pulang ke desa untuk berpartisipasi dalam upacara keagamaan tersebut. Dengan demikian, proyek BRI yang menawarkan pembangunan damai, saling menguntungkan, dan konektivitas lintas kawasan dianggap relevan dengan kebutuhan lokal, meskipun tetap menjadi sorotan tajam dari kelompok oposisi yang kritis terhadap kebijakan Presiden Jokowi.

Selain budaya religius dan tradisi adat yang mengakar, masyarakat Indonesia juga memiliki karakter budaya birokrasi yang khas dan kompleks. Banyak warga yang memandang profesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau aparat penegak hukum sebagai puncak karier yang menjanjikan kestabilan ekonomi dan status sosial. Hal ini disebabkan oleh jaminan penghasilan tetap, tunjangan pensiun, fasilitas kesehatan, tunjangan keluarga, serta citra sosial sebagai “orang negara”. Dalam logika ideal, PNS semestinya berperan sebagai pelayan masyarakat, mengingat mereka digaji melalui pajak rakyat. Namun dalam praktiknya, posisi PNS justru sering kali dipersepsikan sebagai simbol kekuasaan dan prestise sosial.

Fenomena ini berdampak pada merebaknya praktik korupsi dalam proses rekrutmen dan pengelolaan birokrasi. Banyak pelamar rela menyuap untuk lolos seleksi, yang pada akhirnya melahirkan aparatur yang minim integritas dan profesionalisme. Tidak sedikit PNS yang menjalankan tugas secara

formalitas semata—masuk kerja hanya untuk mencatatkan kehadiran, tanpa semangat pelayanan dan pengabdian. Meritokrasi masih menjadi cita-cita yang belum sepenuhnya terwujud. Praktik nepotisme dan pelayanan berbasis koneksi masih lumrah terjadi. Pelayanan publik kerap kali dirasakan rumit dan tidak efisien bagi warga yang tidak memiliki “jalur dalam”. Tak heran jika adagium satir “Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah?” masih relevan menggambarkan kondisi birokrasi Indonesia saat ini.

Budaya birokrasi di Indonesia, sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah menjadi salah satu kendala dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, termasuk bagi para investor yang terlibat dalam proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Presiden Joko Widodo sendiri telah berulang kali menegaskan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, pentingnya reformasi pelayanan publik. Ia mendorong jajarannya untuk memberikan layanan yang cepat, ramah, dan profesional, terutama kepada para investor. Namun demikian, publik menyadari bahwa perubahan budaya birokrasi bukan perkara mudah. Meski kebijakan dan sistem yang dirancang di tingkat pusat sering kali progresif dan layak diapresiasi, implementasinya di lapangan kerap terhambat oleh mentalitas aparat birokrasi di tingkat bawah yang belum sejalan dengan semangat reformasi. Akibatnya, instruksi presiden kerap tidak diterjemahkan secara efektif oleh para pelaksana di lapangan, sehingga niat baik pemerintah pusat tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Politik

Di era gempuran digital dan *post truth* (pascakebenaran), dinamika budaya politik Indonesia menggambarkan keterkaitan erat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya media baru sejak era reformasi telah mendorong partisipasi publik yang lebih luas, menciptakan ruang bagi liberalisasi informasi. Fenomena ini turut menggeser opini publik menjadi lebih kritis terhadap dominasi politik penguasa, dan sekaligus memicu resistensi terhadap politik primordial. Namun, liberalisasi informasi tersebut tak jarang menjadi tidak terkendali, terutama ketika identitas agama dan etnis dijadikan alat mobilisasi politik, seperti terlihat dalam polarisasi tajam pada Pemilu 2014 dan 2019. Politik identitas dan populisme berkembang dalam bungkus demokratisasi informasi dan wacana publik (Herdiansah & Sumadinata, 2019, hlm. 378–389). Media digital pun berubah menjadi arena pertempuran politik identitas yang tidak sehat, diwarnai oleh stigmatisasi melalui label seperti “kadrun” (kadal gurun), “kafir,” “kecebong,” “kampret,” “radikal,” hingga “Taliban”.

Dalam konteks ideologi, konfigurasi politik Indonesia cenderung terbagi ke dalam dua kutub besar: nasionalis dan religius. Partai-partai berideologi

nasionalis antara lain PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra. Sementara partai yang berideologi religius meliputi PKB, PKS, PAN, dan PPP. Kendati demikian, batas ideologis di antara kedua kelompok ini bersifat cair, terbukti dari kecenderungan membentuk koalisi lintas ideologi dalam kontestasi politik. Misalnya, dalam Pemilu Presiden 2014 dan 2019, Jokowi didukung oleh koalisi partai nasionalis (PDIP, Demokrat, Golkar, Nasdem) dan partai religius seperti PKB dan PPP. Di sisi lain, Prabowo memperoleh dukungan dari Gerindra (nasionalis), serta PAN dan PKS (religius). Polarisasi ini memperlihatkan kompleksitas diaspora ideologi dalam politik Indonesia yang tidak sepenuhnya kaku, tetapi sangat dipengaruhi oleh strategi elektoral dan kepentingan kekuasaan.

Dua kutub ideologi partai di Indonesia, yakni nasionalis dan religius, pada praktiknya tidak bersifat kaku. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pragmatis para elite politik yang lebih mengutamakan pencapaian kekuasaan dibandingkan konsistensi terhadap doktrin ideologi. Dalam konteks ini, orientasi politik menjadi sangat fleksibel, bahkan oportunistik. Koalisi antarkedua kutub ideologi pun kerap terjadi, bergantung pada kalkulasi politik jangka pendek, bukan pada kesamaan prinsip. Namun, berbeda dengan elite, sebagian masyarakat justru memaknai politik secara rigid. Hal ini terlihat, misalnya, dalam reaksi publik terhadap bergabungnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno—yang sebelumnya merupakan rival Jokowi pada Pilpres 2019—ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Para pendukung Prabowo merasa dikhianati dan tetap mengambil posisi sebagai oposisi di ruang publik, termasuk dalam mengkritisi proyek-proyek besar seperti *Belt and Road Initiative* (BRI), tanpa memedulikan kualitas atau substansi kebijakan yang dibuat pemerintah.

Di sisi lain, sistem politik presidensial yang dianut Indonesia memungkinkan rakyat secara langsung memilih Presiden, Gubernur, hingga Wali Kota. Sistem ini meningkatkan keterwakilan dalam demokrasi, namun membawa tantangan serius: mahal biaya politik. Untuk maju dalam kontestasi, seorang calon kepala daerah dapat menghabiskan dana miliaran rupiah, bahkan hingga triliunan untuk skala pemilihan presiden. Padahal, pendapatan resmi dari jabatan tersebut selama satu periode tidak mampu menutup biaya kampanye. Konsekuensinya, para calon kerap menggandeng pemodal besar dari kalangan pengusaha untuk membiayai kampanye, dengan imbal balik berupa kemudahan dalam proyek-proyek pemerintah, perizinan usaha, penguasaan sumber daya alam, dan sebagainya. Praktik ini melahirkan simbiosis antara elite politik dan oligarki ekonomi yang membuka ruang terjadinya korupsi dan kolusi. Bahkan, jaringan ini kerap menyusup ke lembaga penegak hukum, memperlihatkan betapa dalamnya akar permasalahan tata kelola politik dan hukum di Indonesia.

Perilaku elite politik yang kerap diwarnai tipu daya, praktik korupsi, dan konspirasi kekuasaan telah menimbulkan kekecewaan publik yang mendalam. Kekecewaan ini diperparah oleh keterlibatan aparat penegak hukum dalam skandal serupa, sehingga memperburuk citra institusi negara dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Akibatnya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi, termasuk proyek strategis seperti *Belt and Road Initiative* (BRI), turut terdampak oleh persepsi negatif publik yang dipengaruhi oleh konteks politik dalam negeri.

Perpecahan masyarakat pasca Pilpres 2014 dan 2019 pun belum terselesaikan secara memadai. Meskipun tokoh-tokoh utama dari kubu yang kalah, seperti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, telah bergabung dalam pemerintahan sebagai menteri, langkah ini tidak secara otomatis menyatukan basis pendukung mereka. Banyak simpatisan yang tetap mengambil posisi sebagai oposisi dan menjadikan setiap kebijakan pemerintah sebagai objek kritik. Lemahnya rekonsiliasi nasional tercermin dari dua hal. Pertama, tidak adanya upaya serius dari Presiden Jokowi maupun Prabowo untuk secara langsung berdialog dengan kelompok oposisi guna merangkul dan mendengarkan aspirasi mereka. Kedua, sebagian oposisi terbentuk bukan hanya karena kekalahan dalam kontestasi, tetapi karena ketidakberdayaan dalam mengakses kekuasaan. Dalam hal ini, oposisi lebih merupakan ekspresi dari kelompok-kelompok yang tidak terakomodasi dalam struktur kekuasaan dan merasa kepentingannya tidak terpenuhi.

Ekonomi

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, yakni sekitar 270 juta jiwa, menjadikannya negara dengan populasi keempat terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, sekitar 9,78 persen atau setara 26,42 juta jiwa tergolong miskin, dengan garis kemiskinan yang ditetapkan bagi pendapatan di bawah US\$30 per bulan (Badan Pusat Statistik, 2020). Pandemi COVID-19 turut memperburuk kondisi tersebut, memunculkan berbagai kisah tragis yang tersebar luas, seperti orang tua yang terpaksa menukar ponsel pintar anaknya demi kebutuhan belajar daring, hingga peristiwa bunuh diri akibat tekanan ekonomi. Tak sedikit pula masyarakat yang terseret dalam jaringan kriminal, termasuk pengedaran narkoba, sebagai jalan pintas untuk bertahan hidup.

Tingkat pengangguran juga menjadi tantangan serius, dengan sekitar 19,1 juta orang atau 9,3 persen dari total penduduk Indonesia tidak memiliki pekerjaan pada tahun 2021 (BPS, 2021). Pengangguran ini berkontribusi pada meningkatnya berbagai persoalan sosial, seperti kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, dan praktik mengemis. Rendahnya daya saing sumber

daya manusia—baik dari segi literasi pendidikan maupun kompetensi tenaga kerja profesional—membuat posisi Indonesia di kawasan ASEAN tertinggal. Presiden Joko Widodo pun menyampaikan kekecewaannya karena investor lebih banyak memilih Vietnam sebagai tujuan investasi.

Di sisi lain, Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari pertambangan batu bara, nikel, timah, hingga kekayaan hutan tropis dan hasil perkebunan seperti kelapa sawit. Sayangnya, pengelolaan yang belum optimal membuat kontribusi sektor ini terhadap pendapatan negara masih jauh dari potensial. Bahkan, kekayaan alam tersebut banyak dikuasai oleh segelintir elite politik dan kelompok borjuis yang tergabung dalam jaringan oligarki. Akibatnya, kesejahteraan tidak tersebar merata dan jurang ketimpangan sosial pun terus melebar.

Sistem politik Indonesia memiliki karakteristik yang menuntut pembiayaan tinggi, terutama bagi para kandidat yang ingin maju dalam pemilihan umum seperti pemilihan presiden, gubernur, atau wali kota. Dalam praktiknya, banyak calon pejabat yang membutuhkan dukungan finansial dari para pengusaha atau sponsor besar. Dukungan ini tentu tidak bersifat cuma-cuma. Sebagai timbal balik, para sponsor akan meminta akses atau kemudahan dalam mengelola sumber daya alam ketika kandidat yang mereka dukung berhasil terpilih. Praktik semacam ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh oligarki ekonomi terhadap kebijakan publik dan tata kelola sumber daya di Indonesia.

Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah Indonesia pada akhirnya mengambil pilihan yang realistis, yaitu mencari investor asing untuk membiayai berbagai proyek strategis demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak masa awal kemerdekaan, Amerika Serikat sempat menjadi pemberi bantuan terbesar bagi Indonesia, sebelum peran tersebut diambil alih oleh Jepang selama empat dekade. Kemudian, pada 2011, Australia mencatatkan diri sebagai negara pemberi bantuan utama menggantikan Jepang. Meskipun demikian, Jepang tetap menjadi mitra dagang strategis, terutama dalam sektor otomotif - sekitar 70 persen kendaraan bermotor di Indonesia berasal dari Jepang, yang menegaskan besarnya pengaruh ekonomi negara tersebut terhadap pasar domestik.

Namun, sejak diluncurkannya proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) oleh Tiongkok, investasi Tiongkok di Indonesia mulai menunjukkan peningkatan. Meski demikian, dalam hal nilai investasi, Tiongkok masih belum melampaui dominasi Amerika Serikat atau Jepang. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika geopolitik dan persaingan strategis di kawasan, di mana Indonesia menjadi medan tarik-menarik kepentingan ekonomi global.

Ringkasan

Berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa respons masyarakat Indonesia dan komunitas internasional terhadap proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang digagas Tiongkok sangat beragam. Sebagian menyambut positif karena peluang pembangunan dan investasi, namun tak sedikit pula yang memperlihatkan sikap kritis dengan berbagai alasan. Pemerintah Indonesia sendiri secara resmi telah menyatakan dukungannya terhadap proyek ini, serta berkomitmen untuk mengawal pelaksanaannya. Meski demikian, opini publik yang berkembang di media sosial justru cenderung negatif. Terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi kecenderungan ini.

Pertama, lemahnya komunikasi publik dari kelompok pendukung pemerintah. Hal ini tercermin dari narasi yang tidak terkoordinasi dan kurang fokus. Banyak pejabat menyampaikan pernyataan yang saling bertentangan di ruang publik, melempar tanggung jawab, dan terkadang menyampaikan komentar yang tidak proporsional dalam menanggapi isu penting. Ditambah lagi, juru bicara pemerintah kurang memiliki kapasitas dalam menyampaikan argumen yang meyakinkan mengenai pentingnya proyek BRI, baik dari sisi investasi, diplomasi, hingga budaya.

Kedua, menguatnya kelompok oposisi yang lebih solid dalam membentuk dan menyebarkan narasi di media sosial. Kelompok ini diuntungkan oleh lemahnya komunikasi dari kubu pemerintah, dan kian diperkuat oleh eksistensi *buzzer* pendukung pemerintah yang kerap menggunakan bahasa provokatif, kasar, bahkan menyebarkan hoaks. Kekecewaan masyarakat terhadap janji-janji kampanye yang belum terealisasi juga memperparah ketidakpercayaan publik terhadap proyek-proyek strategis, termasuk BRI.

Ketiga, dalam sistem demokrasi, kritik adalah bagian dari partisipasi warga negara. Pendekatan represif terhadap penyebar informasi kritis, seperti memburu pembuat video atau unggahan media sosial yang menyuarakan keresahan publik, justru kontraproduktif. Yang lebih diperlukan adalah klarifikasi berbasis data dan transparansi informasi.

Keempat, ekspektasi tinggi terhadap janji politik yang belum terpenuhi turut memperburuk persepsi publik. Kekecewaan ini sering kali diperluas hingga ke wilayah kerja sama internasional, seperti proyek BRI. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara aktif memverifikasi dan mempublikasikan capaian janji kampanye serta kontrak-kontrak proyek yang telah berhasil dijalankan. Sebab, kegagalan pemerintah dalam memenuhi komitmennya justru berimbas pada melemahnya legitimasi kerja sama bilateral yang strategis seperti BRI. Dalam konteks ini, proyek BRI menjadi “korban” dari masalah domestik yang belum tertangani secara komprehensif.

Jika opini publik mengenai proyek Jalur Sutra (BRI) yang diinisiasi Tiongkok berkembang secara negatif di Indonesia, hal ini berpotensi mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah sangat bergantung pada investasi asing untuk mendorong pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta cepat, bendungan, hingga ibu kota negara baru. Ketergantungan ini menempatkan kerja sama dengan Tiongkok dalam posisi yang sangat penting, baik dari segi pembiayaan, transfer teknologi, maupun suplai material dan tenaga kerja. Maka, munculnya narasi negatif terhadap proyek BRI bukan hanya dapat menciptakan ketegangan diplomatik, tetapi juga menurunkan minat Tiongkok untuk berinvestasi lebih jauh.

Oleh sebab itu, persepsi publik yang cenderung negatif terhadap proyek ini perlu disikapi dengan strategi komunikasi yang tepat. Pemerintah harus proaktif menyampaikan informasi yang faktual dan transparan kepada masyarakat mengenai manfaat jangka panjang dari proyek BRI. Selain itu, penting untuk memitigasi hoaks, opini yang menyesatkan, dan narasi provokatif yang tersebar di media sosial.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika opini publik, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan multidisipliner. Penelitian ini dapat menggunakan kombinasi analisis wacana, konten, framing berita, hingga semiotika, serta memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Kajian semacam ini akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana proyek BRI diterima di kalangan masyarakat Indonesia, baik secara emosional, ideologis, maupun pragmatis.

Dalam konteks demokrasi, media memang memainkan peran penting dalam membentuk agenda publik. Karena itu, proyek sebesar BRI—yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional dan geopolitik global—tak lepas dari tarik-menarik politik domestik. Kelompok oposisi kerap memanfaatkan opini publik sebagai alat untuk mengkritisi bahkan melemahkan legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, membangun citra positif terhadap proyek BRI bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat diplomasi ekonomi dan menjaga stabilitas politik dalam negeri.

BAGIAN VI

Media Sosial dan Geliat Opini Publik Proyek BRI di Indonesia

Sebuah studi yang dilakukan oleh kelompok riset Universitas Peking pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling “lancar” dalam menjalin kerja sama dengan Tiongkok dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI). Dari 63 negara partisipan, Indonesia menempati posisi kelima dalam keberhasilan pelaksanaan proyek BRI, khususnya dalam hal komunikasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, kelancaran perdagangan, integrasi keuangan, dan hubungan antar masyarakat. Temuan ini menandakan bahwa secara umum, Indonesia telah mampu mengelola kemitraan strategis ini dengan cukup baik.

Namun demikian, di balik capaian tersebut, terdapat tantangan serius dalam dinamika opini publik, khususnya terkait berkembangnya narasi negatif dari Barat yang kerap mempersoalkan proyek BRI, baik dari aspek utang, dampak sosial-ekologis, hingga dugaan pelanggaran HAM. Persepsi semacam ini menyusup pula dalam wacana publik di Indonesia, terutama melalui media sosial yang menjadi arena utama pertarungan opini.

Oleh karena itu, penting untuk mendeskripsikan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia selama pelaksanaan proyek BRI—baik dalam aspek pembangunan ekonomi maupun psikologi budaya masyarakat. Analisis ini juga perlu mengaitkan antara narasi-narasi propaganda Barat dengan realitas objektif pelaksanaan proyek BRI di lapangan. Pemahaman ini dibutuhkan tidak hanya untuk melihat persepsi masyarakat secara lebih utuh, tetapi juga untuk memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah Indonesia dan Tiongkok dalam memperbaiki tata kelola, strategi komunikasi publik, serta mendorong terciptanya opini publik yang lebih positif dan rasional terhadap proyek BRI di masa mendatang.

Imbas Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia

Kemajuan ekonomi merupakan fondasi penting dalam pembangunan peradaban suatu bangsa. *Belt and Road Initiative* (BRI), sebagai proyek raksasa yang diprakarsai oleh Tiongkok, menjadi salah satu instrumen yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lintas negara. Respon berbagai negara terhadap proyek ini pun beragam, tak terkecuali di Indonesia, di mana perdebatan internal turut mengiringi pelaksanaannya.

Afghanistan, misalnya, memandang Tiongkok sebagai mitra strategis utama yang mampu membimbing kebangkitan ekonomi nasional mereka untuk terintegrasi dalam pasar global. Penelitian Hatef dan Luqiu (2018) menjelaskan bahwa di Afghanistan, kepercayaan publik terhadap Tiongkok dalam konteks proyek BRI tergolong tinggi. Kerangka kerja yang dibangun berdasarkan nilai dan kepentingan ekonomi dianggap lebih efektif daripada propaganda, dan tidak mampu dengan mudah memanipulasi opini publik.

Hal yang sama terjadi di Indonesia. Sebagai mitra dagang strategis, Tiongkok memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun, hal ini juga memicu kritik, terutama karena dominasi produk Tiongkok di pasar dalam negeri dinilai menyebabkan defisit perdagangan dan memukul usaha kecil menengah yang memiliki jenis produksi serupa (Fitriani, 2018). Meski demikian, banyak pihak mengakui bahwa produk-produk Tiongkok yang murah dan mudah diakses telah memenuhi kebutuhan pasar Indonesia secara luas. Ardhi Wardhan dari harian Kedaulatan Rakyat menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur lewat proyek BRI tak hanya berdampak pada akses ekonomi, tetapi juga menyentuh ranah budaya, sosial, dan pendidikan. Ia juga menyoroti ketahanan ekonomi Tiongkok yang terbukti kuat pasca-pandemi dan berbagai bencana alam (Wardhan, 2021).

Dua peneliti dari Universitas Ohio, James A. Schnell dan Brian L. Schnell (2017), membandingkan langkah ekspansi ekonomi Tiongkok dengan pola yang pernah dijalankan oleh Inggris dan Amerika Serikat pada abad ke-19. Menurut mereka, ekspansi pasar sebagai solusi atas surplus produksi turut membuka jalan bagi dominasi budaya dan kekuatan geopolitik. Meski demikian, konteks Tiongkok berbeda secara historis dan ideologis dengan Barat. Oleh karena itu, tudingan terhadap BRI sebagai bentuk “imperialisme baru” masih menjadi perdebatan terbuka. Dalam konteks ini, peran lembaga-lembaga internasional menjadi penting untuk memastikan bahwa kerja sama global melalui proyek BRI berlangsung adil dan tidak menimbulkan ketimpangan baru dalam tatanan dunia (Asmoro, 2021).

Kekhawatiran sebagian intelektual Barat terhadap proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) sebagai bentuk imperialisme politik dan ekonomi perlahan memudar. Pitlo (2019) mencatat bahwa BRI lebih merupakan upaya memperkuat identitas ekonomi, budaya, dan sejarah lintas negara, daripada alat ekspansi

dominasi. Dalam kerangka BRI, fokus hubungan antarnegara dialihkan dari isu-isu keamanan dan pertahanan menuju kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Proyek ini menekankan kemitraan, bukan pembentukan aliansi atau konfrontasi, serta mendorong negara peserta untuk menyelesaikan perselisihan secara mandiri tanpa campur tangan eksternal.

Pandangan serupa disampaikan oleh Simon Saragih, jurnalis Harian Kompas, yang melihat bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memang sangat membutuhkan investasi. Dalam kondisi global saat ini, Tiongkok tampil sebagai salah satu pemasok dan investor utama barang dan jasa dunia. Dengan asumsi kondisi lain tetap (*ceteris paribus*), Saragih menilai saat ini adalah momentum terbaik bagi dunia untuk menyambut investasi dari Tiongkok. Ia mengacu pada teori pendulum dalam sejarah pembangunan ekonomi, yang menggambarkan pergeseran pusat pertumbuhan dari Eropa ke Amerika Serikat, lalu ke Asia—dari Jepang ke Tiongkok. Dalam kerangka tersebut, kebangkitan ekonomi Tiongkok melalui BRI mencerminkan dinamika global yang alami.

Lebih lanjut, Saragih menegaskan bahwa dominasi investasi dan industri Tiongkok juga membawa dampak langsung bagi masyarakat kelas menengah dan bawah, contohnya lewat produk-produk teknologi seperti Xiaomi, Huawei, dan ZTE yang terjangkau. Kehadiran produk tersebut menggambarkan bagaimana Tiongkok memanfaatkan daya saing ekonominya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi, bukan sebagai alat dominasi budaya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan potensi ancaman, masyarakat Indonesia cenderung lebih merasakan manfaat konkret dari pembangunan ekonomi Tiongkok ketimbang memunculkan sentimen negatif yang signifikan (Saragih, 2021).

Dalam konteks proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok menegaskan bahwa tujuan utama dari inisiatif ini adalah pertumbuhan bersama, khususnya dalam sektor ekonomi global. Pemerintah Indonesia pun merespons positif dengan menawarkan proyek-proyek bernilai ribuan triliun rupiah kepada Tiongkok dalam kerangka BRI. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (Rahman, 2019). Namun demikian, Simon Saragih, wartawan senior Harian Kompas, mengutip pandangan Mearsheimer yang menyatakan bahwa semakin asertif posisi Tiongkok dalam politik dan ekonomi global, maka semakin besar pula potensi kekhawatiran secara psikologis dari negara-negara Barat. Padahal, menurut Saragih, pandangan tersebut kurang memahami sejarah panjang Tiongkok yang lebih menekankan pada budaya damai dan kerja sama ekonomi ketimbang ekspansi militer (Saragih, 2021).

Tiongkok memang kian kuat secara ekonomi dan secara teoritis juga memiliki potensi kekuatan militer. Namun, persepsi ini tidak seragam

di seluruh dunia. Negara-negara Asia, yang selama ini relatif stabil dan damai, tidak melihat Tiongkok sebagai ancaman langsung. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah berinteraksi dan bekerja sama secara terbuka, bukan mencurigai dan membatasi ruang gerakannya (Saragih, 2021). Untuk memperkuat transparansi dan mencegah kesalahpahaman, pemerintah Tiongkok menggerakkan perusahaan-perusahaan milik negara untuk mendanai proyek BRI. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi risiko utang serta menegaskan bahwa BRI bukanlah sekadar jalan untuk menjual kelebihan produksi industri Tiongkok kepada negara-negara mitra (He, 2020). Selain itu, peran diaspora Tiongkok juga dioptimalkan untuk mempercepat realisasi konektivitas Jalur Sutra modern (兴, 2019).

Dalam dinamika globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, Tiongkok hadir dengan gagasan reformasi tata kelola ekonomi dunia yang berbeda dari pendekatan negara-negara Barat. Jika globalisasi Barat kerap dikritik karena membawa kepentingan sepihak, maka Tiongkok menawarkan model globalisasi ekonomi yang lebih inklusif dan multipolar (翔, 2018). Dengan semangat keterbukaan, kolaborasi budaya, serta pemanfaatan teknologi informasi, proyek BRI diposisikan sebagai sarana untuk menciptakan peradaban dunia yang berkeadilan, sejahtera, dan saling menguntungkan (Swaine, 2015).

Nilai-nilai Sosial dan Persepsi Kolektif Masyarakat

Proyek Tiongkok-Pakistan *Economic Corridor* (CPEC), bagian dari inisiatif Belt and Road (BRI), menghadirkan berbagai respons positif, khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, stabilitas politik, serta kemajuan di bidang pendidikan dan budaya. Meski demikian, muncul pula sentimen negatif, terutama yang berkaitan dengan isu keamanan di kawasan seperti India, Afghanistan, dan Kashmir, yang dikaitkan dengan masalah utang dan stabilitas regional (Qianqian & Yijun, 2020, hlm. 1–23).

Sementara itu, di kawasan Timur Tengah, hubungan Tiongkok dengan dunia Islam mengalami peningkatan seiring berjalannya proyek BRI. Peningkatan tersebut mencakup komunikasi strategis, penelitian mengenai dunia Islam, serta pendekatan inovatif dalam komunikasi lintas budaya. Semua itu menjadi harapan bagi masa depan peradaban global (景嘉伊, 2019). Munajat (2021), seorang birokrat Indonesia yang telah lama tinggal di Timur Tengah, menilai keterlibatan Tiongkok perlu disambut positif. Menurutnya, selama ini Amerika Serikat cenderung mempertahankan hegemoni dan justru menjadi salah satu penghambat perdamaian abadi, seperti dalam konflik Palestina-Israel, Suriah, Irak, maupun ketegangan dengan Iran. Kehadiran Tiongkok diharapkan bisa memberikan alternatif solusi dan meredakan konflik di kawasan tersebut.

Dampak positif proyek BRI juga tampak dalam penguatan hubungan bilateral Tiongkok dengan berbagai negara, termasuk Afghanistan. Mediasi Tiongkok dalam konflik antara pemerintah Afghanistan dan Taliban, misalnya, dilaporkan secara luas oleh media setempat dan dinilai berkontribusi terhadap stabilitas kawasan. Stabilitas ini juga bermanfaat bagi keamanan wilayah Xinjiang yang berbatasan langsung dengan Afghanistan (Hatef & Luqiu, 2018, hlm. 551–569).

Namun demikian, sebagian media Barat seperti The Washington Post mengkhawatirkan meningkatnya pengaruh budaya Tiongkok melalui proyek BRI, terutama dengan keberadaan Institut Konfusius di berbagai negara mitra. Institut ini dianggap sebagai instrumen ekspor budaya Tiongkok. Di sisi lain, keberadaan lembaga tersebut juga membuka peluang positif di bidang pendidikan, seperti pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal. Media tersebut menekankan pentingnya keharmonisan dan koeksistensi budaya dalam pelaksanaan proyek BRI (Yu & Yan, 2020, hlm. 72–78).

Dalam konteks ini, sensitivitas budaya dalam pendekatan pedagogi juga menjadi penting. Hal ini dapat diimplementasikan melalui peran kantor urusan internasional di perguruan tinggi, terutama yang memiliki mahasiswa internasional, guna mendukung program harmonisasi budaya global (Akhtar et al., 2019, hlm. 1–25).

Komunikasi lintas budaya melalui media digital menuntut pendekatan berbasis paradigma digital dan struktur teknologi informasi yang adaptif. Berbeda dengan komunikasi sosial secara langsung, komunikasi di ruang digital belum sepenuhnya berkembang secara bijak dan cerdas. Ketidakteraturan dalam ekspresi, ucapan, dan interaksi di dunia maya kerap memicu krisis identitas dan berujung pada konflik sosial (Xiao & Jun, 2021).

Fenomena ini tercermin dalam dinamika opini publik di Indonesia, khususnya terkait proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Media sosial menjadi arena perdebatan yang tajam antara pendukung pemerintah dan kelompok oposisi. Polarisasi ini tidak terlepas dari dampak politik pascapemilihan presiden tahun 2014 dan 2019, yang masih membekas hingga kini. Kelompok pendukung pemerintah umumnya menyambut baik proyek BRI, sementara kelompok oposisi cenderung bersikap kritis. Kerentanan ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat Indonesia.

Padahal, salah satu harapan utama dari proyek BRI adalah membangun infrastruktur digital yang lebih andal, sekaligus membuka jalur baru untuk memperkuat komunikasi lintas budaya. Pemerintah Tiongkok sendiri berharap bahwa jalur digital ini akan memfasilitasi pemahaman lintas budaya yang lebih luas serta membangun kesadaran kolektif atas nilai-nilai budaya antarbangsa (Xiao & Jun, 2021).

Ke depan, hal ini dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Misalnya, beberapa daerah di Indonesia kini mulai melirik wisatawan asal Tiongkok sebagai pangsa pasar strategis. Jika infrastruktur seperti jalan tol dan sarana transportasi pendukung telah terbangun, maka konektivitas akan meningkat dan potensi pengembangan ekonomi daerah dapat dioptimalkan (Wardhan, 2021).

Sejumlah akademisi menilai bahwa media baru sangat potensial sebagai alat diplomasi budaya dalam mendukung keberhasilan proyek BRI. Media ini dinilai memiliki tiga fungsi utama: menarik perhatian media asing, menyebarkan narasi atau propaganda aktif, serta menjalin komunikasi dan kerja sama yang erat antara media Tiongkok dan media negara mitra (Hongxiu, 2018, hlm. 219–236). Bila strategi ini dijalankan secara tepat, maka diplomasi publik akan lebih mudah menjangkau masyarakat negara-negara peserta BRI. Dampaknya adalah terbentuknya pemahaman antarbudaya yang lebih dalam, penguatan identitas budaya lokal, serta meningkatnya rasa saling percaya. Dalam jangka panjang, hal ini diyakini akan memperkuat kerja sama ekonomi dan membangun kemitraan strategis lintas negara (Dai, 2020, hlm. 787–790).

Dampak Hubungan Diplomatik di Bidang Pendidikan

Di Indonesia, implementasi proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan persepsi antara Tiongkok dan Indonesia yang dipengaruhi oleh perbedaan ideologi politik, latar belakang ras dan agama, serta tingkat pendidikan masyarakat kedua negara. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, perlu adanya penguatan pertukaran antarmasyarakat yang lebih intensif. Kolaborasi di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan budaya dinilai mampu membangun ikatan emosional antarwarga negara, di luar kepentingan ekonomi semata (Yuniarto, 2019). Tentu saja, persoalan serupa juga sangat mungkin terjadi di negara-negara lain yang terlibat dalam inisiatif ini.

Komunikasi antarbudaya melalui media baru dapat menjadi jembatan penting dalam konteks ini. Platform digital berfungsi sebagai alat diplomasi publik dalam skema Jalur Sutra Modern. Negara-negara peserta Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road) sebaiknya memperhatikan pengembangan infrastruktur digital dan pemanfaatan media baru. Di banyak negara berkembang, media sosial dan internet menjadi alat utama dalam memperoleh informasi. Meski terdapat ketimpangan pembangunan ekonomi, pertumbuhan pengguna telepon seluler di negara-negara peserta BRI mengindikasikan tren positif yang signifikan. Dengan demikian, media baru memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran informasi dan mendukung keterlibatan publik yang lebih luas (Hongxiu, 2018, hlm. 219–236).

Dalam konteks *Digital Silk Road* (DSR), integrasi teknologi informasi dan media digital juga mendorong kemajuan di sektor pendidikan, terutama selama pandemi Covid-19. Di Indonesia, pembelajaran jarak jauh menjadi bagian dari kebijakan nasional sejak pandemi merebak. Pemerintah menetapkan skema belajar dari rumah untuk semua jenjang pendidikan, sembari tetap membuka layanan publik esensial seperti keuangan, perdagangan, dan kesehatan. Perubahan ini secara tidak langsung menggeser budaya belajar dan pola interaksi sosial masyarakat (Fanani, 2021).

Namun, pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia juga menghadapi berbagai hambatan struktural. Menurut praktisi pendidikan, Sartianawati (2021), tantangan utama meliputi keterbatasan perangkat teknologi, kuota internet, dan infrastruktur jaringan yang belum merata. Tidak semua keluarga memiliki perangkat gawai yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar daring. Bahkan dalam satu keluarga, gawai kerap digunakan bergantian antara orang tua dan anak-anak. Sementara itu, kebutuhan kuota internet yang tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian besar keluarga miskin memperparah kesenjangan akses pendidikan. Bantuan kuota dari pemerintah memang tersedia, tetapi tidak selalu cukup.

Di tengah tantangan tersebut, inisiatif DSR yang didorong oleh Tiongkok dan pengembangan teknologi 5G diyakini mampu memberikan kontribusi positif, khususnya dalam memperkuat sistem pendidikan digital dan pemerataan akses informasi di kawasan (Sartianawati, 2021). Selain itu, media sosial dan berbagai aplikasi pembelajaran menjadi peluang besar untuk mengembangkan pembelajaran daring yang inklusif, efektif, dan terjangkau.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan *Belt and Road Initiative* (BRI) serta upaya untuk memajukan sektor pendidikan di negara-negara mitra, pada Juli 2016 Kementerian Pendidikan Tiongkok meluncurkan Rencana Aksi Pendidikan BRI. Dokumen kebijakan ini menggarisbawahi bahwa pendidikan harus sejalan dengan visi, prinsip, dan prioritas kerja sama lintas negara yang dirumuskan dalam kerangka BRI (Gao & Wu, t.t.).

Penelitian oleh Dani Fadillah (2020) terhadap mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Nanjing, Tiongkok, mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka telah mengetahui proyek BRI dan menilai proyek tersebut berdampak positif terhadap pembangunan di Indonesia. Selain itu, keberadaan mereka di Tiongkok juga memberikan pengalaman budaya yang memperkaya wawasan antarbudaya. Proses pendidikan lintas negara ini tidak hanya memperluas cakrawala akademis, tetapi juga memperkuat pemahaman lintas budaya yang semakin relevan di era globalisasi (Fadillah, 2020, hlm. 63-71).

Dalam konteks pengembangan jangka panjang, sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak generasi muda yang unggul

secara akademis dan memiliki kompetensi internasional. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok juga didorong untuk memperkuat kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di kalangan pelajar dan tenaga pendidiknya. Literasi budaya dan keterampilan komunikasi antarbudaya menjadi aspek penting untuk ditanamkan dalam dunia pendidikan agar mampu merespons dinamika kerja sama global yang semakin kompleks (敏, 2018).

Penguatan pendidikan internasional menjadi kunci strategis dalam mendukung keberhasilan inisiatif Belt and Road (BRI), khususnya di negara-negara mitra yang memiliki hambatan bahasa. Zhang Yalong (2018) menekankan pentingnya kebijakan pendidikan internasional Tiongkok di kawasan BRI karena kendala linguistik sering kali menjadi penghalang utama dalam kerja sama lintas negara.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah Tiongkok menjalin berbagai perjanjian bilateral di bidang pendidikan dengan negara-negara peserta BRI. Kerja sama tersebut tidak hanya mempererat hubungan antarnegara, tetapi juga terbukti berdampak positif terhadap peningkatan skala perdagangan dan daya saing pendidikan secara global (Jing, Wang, & Xu, 2021). Komitmen Tiongkok ditunjukkan melalui penyediaan beasiswa dan kemudahan bagi pelajar asing, termasuk dari Indonesia, untuk menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Tiongkok. Hal ini sekaligus menandai tumbuhnya Tiongkok sebagai salah satu destinasi pendidikan unggulan sejak diluncurkannya proyek BRI (Akhtar et al., 2019, hlm. 1-25).

Ada sejumlah hal yang dapat dipetik dari kebijakan pendidikan Tiongkok ini. Pertama, program ini membuka ruang luas untuk pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berperan penting dalam membangun masyarakat berdaya saing dan memperkuat fondasi peradaban. Kedua, akulturasi dan pemahaman lintas budaya yang terbangun melalui interaksi antarmahasiswa dari berbagai negara menjadi sarana untuk menumbuhkan toleransi dan sikap terbuka, serta mencegah berkembangnya prasangka berbasis ras atau budaya. Ketiga, kerja sama pendidikan ini memperkuat dukungan terhadap proyek BRI karena lulusan yang memahami bahasa, budaya, dan sistem kerja di Tiongkok akan lebih siap menjalin kolaborasi dengan lembaga, perusahaan, atau pemerintah Tiongkok di negara asalnya (Gong & Gu, 2019).

Rencana Aksi Pendidikan dalam kerangka Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) menekankan pentingnya kolaborasi menyeluruh di antara komunitas pendidikan dari negara-negara peserta. Dalam konteks ini, peran aktif Tiongkok menjadi sangat krusial. Tiongkok diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai sumber daya dan pengetahuan untuk memperkuat internasionalisasi pendidikan melalui BRI. Hal ini menjadi relevan terutama bagi negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan rendahnya tingkat literasi (King, 2020).

Secara umum, masyarakat memahami bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi signifikan adalah Institut Konfusius, yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok untuk menyebarluaskan budaya dan bahasa Mandarin ke berbagai negara. Berdasarkan kajian literatur dalam basis data CNKI (*Tiongkok National Knowledge Infrastructure*), kehadiran Institut Konfusius dalam konteks BRI terbukti mendorong pertumbuhan jumlah publikasi akademik. Meskipun proporsi penelitian yang menyoroti tema budaya, sejarah, dan komunikasi masih tergolong rendah, trennya menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu (Duan Shifei, 2018; Zheng & Yang, 2017; Wang & Wu, 2019).

Peneliti Bowen Xu (2021) memandang hubungan antara pendidikan dan proyek BRI dari perspektif budaya ekonomi-politik. Menurutnya, praktik pendidikan dalam konteks ini bukan hanya bersifat instrumental, tetapi juga strategis dalam membentuk pemahaman kolektif dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan praktisi pendidikan Yazid Fanani (2021), yang menekankan bahwa pendidikan dalam proyek BRI tidak cukup dipahami sebagai aktivitas teknis atau disiplin tunggal, tetapi harus dilihat sebagai proses sosial yang dinamis. Pendidikan menjadi arena tempat berlangsungnya penciptaan makna, relasi kuasa, kohesi sosial, dan interaksi antarkelompok.

Jurnalis senior Kompas, Simon Saragih (2021), juga menggarisbawahi bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok diperkuat melalui berbagai kerja sama, mulai dari bidang sosial, budaya, hingga pendidikan-termasuk pemberian beasiswa. Ia mencatat bahwa relasi historis antara kedua negara didukung oleh keberadaan komunitas Tionghoa di Indonesia. Kehadiran diaspora ini dapat menjadi katalisator dalam menjalin kedekatan emosional dan memperkuat diplomasi budaya. Lebih jauh, Saragih menekankan bahwa nilai-nilai khas Asia yang menjunjung saling menghormati perlu dijaga untuk mempertahankan hubungan bilateral yang harmonis dan berkelanjutan.

Opini Publik dan Implikasi Proyek BRI di Indonesia

Opini publik masyarakat Indonesia yang cenderung negatif terhadap proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) memiliki dampak yang tidak dapat diabaikan, baik secara psikologis maupun politis. Salah satu implikasi utamanya adalah terganggunya hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, terutama dari sisi kepercayaan publik dan citra antarnegara. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, dapat merasa tertekan atau bahkan malu jika proyek strategis nasional justru menuai penolakan dari sebagian rakyatnya. Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan

upaya konkret, seperti menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui percepatan proyek pembangunan strategis, termasuk proyek ibu kota baru di Pulau Kalimantan. Pembangunan ibu kota baru diharapkan tidak hanya menjadi simbol pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga menyerap jutaan tenaga kerja dan memperkuat pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah perlu memperluas pendekatan komunikatifnya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan opini publik. Kelompok keagamaan, organisasi masyarakat sipil, kelompok adat, serta serikat pekerja perlu dilibatkan secara aktif sebagai opinion leader. Mereka dapat membantu membangun narasi positif tentang proyek-proyek pemerintah, termasuk kerja sama dengan Tiongkok, di berbagai platform media, khususnya media sosial.

Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk lebih cermat dalam mengelola komunikasi internal. Para relawan atau pendukung pemerintah yang aktif di media sosial sebaiknya diarahkan untuk menyampaikan narasi dengan data yang valid, bahasa yang santun, serta tidak menimbulkan kegaduhan. Selama ini, tidak sedikit relawan yang terkesan emosional dan tidak argumentatif dalam membela kebijakan pemerintah. Padahal, publik saat ini lebih menyukai argumen yang rasional dan berbasis bukti. Oleh karena itu, penting bagi para juru bicara pemerintah, menteri, serta pejabat tinggi partai koalisi untuk menyampaikan informasi kepada publik secara konsisten, tidak saling menyalahkan atau mempertontonkan konflik internal. Juru bicara presiden khususnya harus mampu menjadi penerjemah strategis atas visi kepala negara kepada masyarakat luas, bukan sekadar membalas kritik dengan narasi yang lemah dan tidak berbasis fakta.

Isu lain yang turut memperkeruh persepsi publik adalah informasi tentang keberadaan tenaga kerja asing asal Tiongkok. Munculnya isu terkait jumlah tenaga kerja asing yang dinilai terlalu besar, kualitas keterampilan mereka yang dipertanyakan, hingga isu gaji di bawah standar, memperburuk sentimen masyarakat. Apalagi, banyak dari mereka yang datang pada masa pandemi, saat aktivitas warga lokal justru dibatasi. Pemerintah Indonesia dan Tiongkok perlu merespons hal ini secara bijak dengan mengklarifikasi dan menyampaikan data yang akurat kepada publik.

Dalam konteks ini, keberadaan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang telah lama menjadi bagian dari bangsa Indonesia juga dapat diberdayakan. Mereka memiliki posisi strategis sebagai jembatan budaya dan sosial yang bisa turut menyampaikan narasi positif terkait kerja sama Indonesia–Tiongkok. Tokoh keturunan Tionghoa yang kini menjabat sebagai politisi maupun pejabat publik dapat dilibatkan dalam kampanye informasi publik yang bertujuan membangun pemahaman yang lebih baik terhadap proyek BRI dan tujuan kemitraan bilateral yang lebih luas.

Ringkasan

Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok bukanlah fenomena yang baru muncul dalam satu atau dua dekade terakhir. Jalinan kedekatan ini telah berlangsung selama ribuan tahun, bahkan tercatat dalam sejarah bahwa beberapa dinasti Tiongkok mengirim utusan untuk membangun hubungan diplomatik dengan nusantara. Selain itu, migrasi warga Tiongkok ke Indonesia telah berlangsung lama dan sebagian dari mereka kemudian menetap serta menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kedekatan antara Indonesia dan Tiongkok pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebetulnya bukan sesuatu yang mengejutkan atau asing. Kerja sama dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) pun selayaknya dipandang sebagai bentuk kolaborasi timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun demikian, kelompok oposisi justru membangun opini publik yang cenderung negatif terhadap proyek BRI. Perlu dicatat bahwa kelompok ini terdiri dari pihak-pihak yang kecewa karena dua kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden.

Respon publik yang bernada negatif terhadap proyek BRI di Indonesia dapat dianalisis melalui teori tindakan sosial dan teori konstruksi realitas sosial. Secara umum, opini publik yang tumbuh saat ini merupakan bentuk reaksi terhadap lemahnya komunikasi publik pemerintah dalam menjelaskan detail proyek BRI. Lemahnya peran institusi kepresidenan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat menyebabkan munculnya spekulasi dan ketidakpastian. Dalam perspektif konstruksi realitas sosial, respons masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Media sosial, khususnya Twitter, menjadi arena dominasi narasi oleh kelompok oposisi. Ketika satu narasi mendominasi ruang publik, kelompok yang tidak sejalan cenderung memilih diam dan mengikuti arus utama. Situasi ini mencerminkan keberhasilan oposisi dalam membangun realitas sosial yang mereka kehendaki.

Narasi yang berkembang di media sosial terkait proyek BRI mencerminkan keberhasilan propaganda Barat dalam membentuk persepsi negatif terhadap Tiongkok. Sebaliknya, ini juga menjadi cerminan kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengelola komunikasi publik secara efektif. Ketidakhadiran narasi tandingan yang kuat dari pihak pemerintah membuat citra proyek BRI terdegradasi dan berpotensi memicu ketegangan dalam hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin proyek BRI akan dijadikan alat legitimasi bagi kelompok Barat maupun oposisi dalam negeri untuk menyudutkan kerja sama strategis tersebut.

BAGIAN VII

Kontra Narasi atas Isu BRI

Setiap negara memiliki latar belakang politik, budaya, ideologi, dan sejarah yang berbeda-beda. Karakter khas tersebut turut membentuk sikap dan tanggapan masing-masing negara terhadap berbagai isu global, termasuk terhadap proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang digagas oleh Tiongkok. Tidak semua negara bersikap seragam dalam menanggapi inisiatif ini. Ada negara yang menerima proyek BRI secara terbuka dan antusias, ada pula yang bersikap hati-hati dan mempertimbangkan banyak aspek sebelum terlibat, serta tak sedikit yang menolaknya secara tegas.

Tulisan ini akan memetakan posisi sejumlah negara terhadap proyek BRI dengan mengacu pada persepsi publik yang terekam melalui hasil riset dan liputan media. Selain itu, akan dijelaskan pula bagaimana propaganda dari negara-negara Barat turut memengaruhi arah kebijakan dan pemberitaan terkait proyek BRI di berbagai belahan dunia. Terakhir, pembahasan juga akan menyoroti respons dari para intelektual, politisi, tokoh media, dan influencer di Indonesia—baik yang mendukung maupun mengkritik proyek kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam kerangka BRI.

Narasi Media Global atas Ambisi BRI Tiongkok

Untuk memudahkan analisis terhadap pemberitaan global mengenai proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang digagas oleh Tiongkok, klasifikasi berdasarkan letak geografis, serta kedekatan budaya dan ideologi menjadi penting. Pembahasan pertama dimulai dari wilayah Amerika Serikat dan sekitarnya, yang selama ini cenderung menampilkan narasi kritis terhadap proyek BRI.

Media-media arus utama di Amerika Serikat, seperti The New York Times, CNN, dan CNBC, menyoroti BRI sebagai bagian dari persaingan global antara Tiongkok dan AS, khususnya dalam aspek ekonomi, politik, dan militer (Guo & Wang, 2020; Hu, 2019; Niu, 2019). Narasi yang berkembang bukan sekadar tentang kerja sama pembangunan infrastruktur global, melainkan mencerminkan kekhawatiran terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok di panggung internasional (Arifon et al., 2019; Li, 2021; Ravitsky, 2018).

Sikap media Amerika ini juga selaras dengan kebijakan luar negeri “America First” yang dipopulerkan Presiden Donald Trump, yang menantang berbagai kerja sama multilateral termasuk BRI (Deng, 2020; Yu & Yan, 2020). Analisis terhadap laporan media Tiongkok Daily (368 laporan) dan The New York Times (154 artikel) selama 2017–2018 menggambarkan perbedaan fokus yang mencolok: jika Tiongkok Daily lebih menekankan pada manfaat ekonomi proyek BRI, The New York Times justru lebih banyak menyoroti potensi ekspansi kekuatan geopolitik dan militer Tiongkok (Li, 2021; Xiao et al., 2019).

Pandangan serupa juga terlihat dalam liputan media Inggris, seperti Financial Times, yang menilai proyek BRI sebagai bentuk ekspansi otoritarianisme Tiongkok dan ancaman terhadap tatanan geopolitik dunia (Zhang & Wu, 2017). Pengaruh pemberitaan dari media Barat seperti ini bahkan turut memengaruhi persepsi masyarakat dan media di negara-negara Eropa Timur seperti Hungaria dan Slovakia, yang mulai memandang BRI dengan kacamata politis, meskipun sebagian laporan tetap berusaha menjaga nada netral (Matura, 2018; Miao, 2021).

Sementara itu, Italia menjadi contoh menarik dalam keberhasilan diplomasi ekonomi Tiongkok di kawasan Eropa Barat. Media arus utama di Italia lebih menyoroti aspek positif BRI dalam konteks pembangunan ekonomi, meskipun tetap mewaspadaai risiko politik yang mungkin ditimbulkan. Pendekatan inklusif Tiongkok ini mencerminkan upaya membangun narasi kerja sama yang seimbang dan saling menguntungkan (董丹, 2018).

Di kawasan Asia-Pasifik, media Australia memperlihatkan kecenderungan narasi negatif terhadap BRI. Kajian terhadap 164 laporan media dari ABC News, The Australian, The Sydney Morning Herald, dan lainnya selama periode 2013–2017, mencatat bahwa sekitar 43,9% dari total berita tentang BRI bernada negatif. Narasi yang dibangun kerap berputar pada isu “ketakutan dan keresakahan”, khususnya berkaitan dengan pengaruh politik dan keamanan regional yang dianggap terancam oleh supremasi Tiongkok (Zhixin, 2018). Posisi Australia sebagai sekutu AS dan bagian dari NATO tampaknya turut memengaruhi cara media mereka membingkai isu ini.

Analisis ini mengindikasikan bahwa sebagian besar media di negara-negara Barat cenderung menyoroti proyek BRI melalui lensa geopolitik dan ideologis. Narasi dominan yang dibangun tidak hanya membentuk persepsi

publik di negara masing-masing, tetapi juga berdampak luas terhadap opini internasional, termasuk di kawasan Asia dan Afrika. Penafsiran BRI sebagai bentuk hegemoni modern Tiongkok menjadi persepsi yang umum, meskipun belum tentu mencerminkan kenyataan objektif di lapangan (Li, 2021).

Respons media terhadap proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) di berbagai wilayah dunia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, sejarah, dan budaya lokal. Dalam konteks ini, tiga kawasan yang memiliki respons signifikan terhadap proyek BRI—yakni Amerika Latin, Timur Tengah, serta Eropa Timur dan Asia Tengah—menawarkan sudut pandang yang beragam.

Amerika Latin, antara Kecurigaan dan Kemitraan Strategis

Media massa di Amerika Latin secara umum mengembangkan dua narasi utama dalam meliput investasi Tiongkok. Narasi pertama menggambarkan kehadiran Tiongkok sebagai potensi ancaman terhadap keberlangsungan lapangan kerja dan eksploitasi sumber daya lokal. Sebaliknya, narasi kedua justru menampilkan Tiongkok sebagai mitra ekonomi strategis, yang memberikan akses terhadap pendanaan, pinjaman luar negeri, dan peluang dagang yang signifikan (Widyanto, 2019).

Dominasi sentimen positif terhadap proyek BRI di kawasan ini tidak terlepas dari kecenderungan politik negara-negara Amerika Latin yang berpihak pada sosialisme, serta identitas budaya dan etnis yang berbeda dari Amerika Utara dan Eropa Barat. Oleh karena itu, keterbukaan terhadap model pembangunan alternatif dari Tiongkok menjadi lebih dapat diterima.

Selanjutnya Timur Tengah. Turki menjadi studi kasus menarik dalam memahami pengaruh politik Barat dan tanggapan domestik terhadap proyek BRI. Media arus utama di Turki cenderung mengadopsi perspektif pro-Barat, sebagian karena warisan Perang Dingin dan keterbatasan pemahaman jurnalis lokal tentang Tiongkok. Namun, media pro-pemerintah seperti *Modern Pek Yolu* dan *CRITürk* justru mengambil peran sebagai instrumen diplomasi lunak Tiongkok. Editor *CRI Türk*, Kamil Erdoğan, bahkan menyatakan bahwa propaganda adalah “cara terbaik untuk menyebarkan kebenaran” (Özsu, 2019, hlm. 291–304).

Penelitian Banu Dagtas menggambarkan bahwa hampir semua spektrum media—baik pro-pemerintah, oposisi sosialis, maupun nasionalis—menyoroti BRI sebagai upaya memajukan perdamaian, kesejahteraan, dan stabilitas kawasan. Namun, kelompok oposisi tetap menaruh curiga terhadap hubungan dekat Presiden Erdoğan dengan Tiongkok, yang dianggap dapat mengukuhkan gaya kepemimpinan otoriter (Dagtas, 2019, hlm. 276–290).

Meski begitu, secara umum, pandangan terhadap proyek BRI di Turki cenderung positif, terutama dalam aspek ekonomi dan pembangunan

infrastruktur. Namun demikian, aspek negatif juga muncul dalam isu keamanan budaya dan dinamika bilateral yang kompleks. Oleh karena itu, penguatan pemahaman publik terhadap maksud dan cakupan proyek BRI sangat penting (Akçay & Qingye, 2020).

Sementara itu, masyarakat Arab pada umumnya menyambut baik proyek BRI, melihatnya sebagai peluang untuk mendorong kemajuan ekonomi di tengah situasi konflik yang kronis. Meskipun demikian, diperlukan komunikasi yang efisien dan adaptif untuk membangun citra Tiongkok secara objektif. Dalam hal ini, Xuming (2018) menekankan pentingnya jurnalis Tiongkok lebih terlibat dengan masyarakat Arab serta memiliki pemahaman kontekstual terhadap budaya setempat.

Adapun di Eropa Timur dan Asia Tengah, media arus utama di Rusia memperlihatkan dukungan yang kuat terhadap proyek BRI, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kerja sama antara Rusia dan Tiongkok dalam kerangka BRI dipandang sebagai strategi melawan dominasi politik dan ekonomi Amerika Serikat. Selain itu, proyek ini juga dinilai mampu memacu pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah yang dilewati jalur BRI.

Namun demikian, aspek komunikasi dan diplomasi tetap harus diperhatikan. Sejarah dominasi Rusia atas negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Uzbekistan menimbulkan sensitivitas tersendiri. Di sisi lain, kekhawatiran muncul terhadap potensi masuknya tenaga kerja Tiongkok ke kawasan Siberia, yang dapat menimbulkan persoalan kelebihan kapasitas tenaga kerja dan tekanan sosial di wilayah perbatasan tersebut.

Sedangkan Media arus utama di Albania, seperti RTSH dan ATA, serta media swasta seperti Shqiptarja.com, Gazeta Shekulli, Gazeta Panorama, Gazeta Dita, Gazeta Telegraf, dan Javanews, menyoroti proyek BRI dengan fokus utama pada aspek ekonomi. Hal ini berbeda dengan pendekatan media Barat seperti Voice of America (VOA), yang lebih menyoroti isu geopolitik dengan kekhawatiran bahwa kehadiran Tiongkok akan menggeser pengaruh tradisional Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Namun, studi mengindikasikan bahwa propaganda Barat sejauh ini belum banyak memengaruhi opini media dan publik di Albania serta kawasan Balkan lainnya. Justru hubungan diplomatik dan ekonomi antara Albania dan Tiongkok kian erat. Dalam sepuluh liputan media Albania yang diteliti, kata-kata yang dominan ditemukan adalah “kerja sama” dan “pembangunan” (Sylaj, 2020, hlm. 1–18), mencerminkan optimisme terhadap kolaborasi bilateral tersebut.

Media dari berbagai negara di Asia Tengah memfokuskan pada peran budaya sebagai jembatan dalam pelaksanaan proyek BRI. Liputan media di kawasan ini tidak hanya membahas aspek infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pertukaran budaya untuk membangun perdamaian dan memperkuat peradaban bersama. Pandangan ini menjadi

penyeimbang dari narasi politik dan keamanan yang sering mendominasi di media negara lain (Dai, 2020). Sebagai contoh, Today Daily dari Uzbekistan menekankan pentingnya kerja sama budaya dalam proyek BRI (Yurkov, 2018).

Selanjutnya di Asia Selatan. Negara seperti Afghanistan menjadi penting secara geopolitik bagi Tiongkok karena letaknya yang strategis, berdekatan dengan wilayah Xinjiang dan Pakistan. Namun, media Tiongkok seperti People's Daily dan Global Times cenderung menghindari liputan yang terlalu mencermati isu keamanan di Afghanistan. Hal ini diyakini akan mengganggu narasi positif proyek BRI. Sebaliknya, media tersebut lebih banyak menekankan kontribusi ekonomi dan kesejahteraan Tiongkok, dibandingkan dengan pendekatan politik yang dilakukan Amerika Serikat (Hatef & Luqiu, 2018, hlm. 551–569).

Sementara itu, media India responnya lebih kritis. Surat kabar seperti Times of India dan Economic Times mengembangkan narasi ancaman dan kompetisi terhadap proyek maritim Jalur Sutra dan Jalur Sutra Digital. Pandangan negatif ini diperkuat oleh konflik perbatasan yang masih berlangsung antara India dan Tiongkok, serta keprihatinan atas kedekatan Tiongkok dengan Pakistan—rival geopolitik utama India di Asia Selatan (Leonardo, 2020; Van Alphen, 2015; Jan et al., 2018; Haiqing, 2018; Niu, 2019).

Kerangka liputan yang dominan di media India cenderung menggambarkan proyek BRI sebagai ekspansi pengaruh Tiongkok yang membahayakan stabilitas regional dan daya saing ekonomi India. Selain Times of India, media seperti Indian Express dan The Hindu juga mengusung narasi serupa (Aslam et al., 2020).

Berbeda dengan India yang memandang proyek Jalur Sutra Baru atau *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan kecurigaan, Pakistan justru menyajikan sikap yang jauh lebih optimistik. Media-media di Pakistan sejak tahun 2015 hingga 2018 telah membangun narasi yang kuat tentang nilai-nilai ekonomi, semangat kemitraan, dan kerja sama erat dengan Tiongkok. Istilah seperti “persahabatan,” “kemakmuran,” dan “pembangunan” mewarnai hampir seluruh pemberitaan media berbahasa Inggris di sana. Proyek Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) bahkan dianggap sebagai simbol utama solidaritas dua negara dan peluang besar untuk mempercepat modernisasi infrastruktur nasional (Qianqin & Yijun, 2020).

Sementara itu, di benua Afrika, proyek BRI mendapat tanggapan yang tidak kalah hangat. Banyak media mengapresiasi proyek tersebut sebagai bentuk nyata dukungan Tiongkok terhadap pembangunan ekonomi global di kawasan yang selama ini terpinggirkan dalam peta investasi dunia. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan energi mulai terwujud berkat pembiayaan dari proyek ini. Namun demikian, narasi yang dibangun oleh media Afrika tetap memiliki dinamika tersendiri. Tantangan terbesar bukan datang dari proyek itu sendiri,

melainkan dari cara peliputan yang masih sangat dipengaruhi oleh kerangka berpikir media Barat.

Beberapa media di Nigeria, seperti *The Sun*, *Vanguard*, *The Punch*, *The Nation*, dan *New Straits Times*, misalnya, menampilkan laporan yang cukup berimbang. Mereka tidak hanya menyoroti manfaat BRI, tetapi juga menyisipkan catatan kritis tentang potensi ketergantungan ekonomi dan utang. Kritik semacam ini umumnya tidak bersumber dari pengalaman langsung, melainkan dari narasi yang dibangun media Barat dan kemudian diadopsi dalam peliputan lokal (Pan, 2021; Anunne et al., 2019).

Di Afrika Selatan, lanskap media cetak dikuasai oleh lima kelompok besar: *Independent Media*, *Avusa*, *Naspers*, *New African*, dan *Caxton*. Kelima media ini berperan penting dalam membentuk opini publik. Menariknya, sebagian dari mereka menyuarakan sikap skeptis terhadap ambisi besar Tiongkok dalam memperluas hubungan perdagangan internasional, membangun infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan pembangunan secara global (Cao Yuning, Dai Zhongxun, Li Xiang, & Ning Yingnan, 2019).

Namun, nada pemberitaan yang lebih positif juga muncul dari kawasan yang sama. Dalam laporan Liang Bingyu, Lu Xueying, Ma Yingqian, dan Wei Xiaoqing (2019), proyek pembangunan rel kereta api oleh Tiongkok di sejumlah wilayah Afrika dilihat sebagai langkah strategis yang mampu mempercepat pembangunan. Proyek ini dinilai berkontribusi dalam memperlancar arus perdagangan, meningkatkan efisiensi transportasi, mendatangkan investasi, serta mempererat hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi antara negara-negara Afrika dan Tiongkok. Dalam pemberitaan media yang mendukung proyek ini, kata-kata seperti proyek, infrastruktur, kerja sama, keberuntungan, dan utang menjadi istilah yang paling sering muncul (Xin, 2018).

Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, sejumlah media di Singapura menyampaikan pandangan yang berhati-hati terhadap proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dari Tiongkok. Salah satu media terkemuka, *Zaobao*, secara umum menyatakan dukungan terhadap BRI, terutama karena relevansinya dengan pembangunan ekonomi dan kemajuan peradaban manusia. Namun, media ini juga menyoroti pentingnya peran Amerika Serikat sebagai penyeimbang politik di kawasan Asia-Pasifik. Di sisi lain, peran Singapura sendiri digambarkan sebagai aktor dominan yang berkontribusi secara positif dalam mendukung implementasi BRI (X. & Z.W. Li, 2018).

Di Malaysia dan Vietnam, sejumlah media seperti *Malay Mail*, *Business Insider*, *The Star*, *Saigon Times*, dan *Vietnam Bridge* cenderung memberikan penilaian yang positif terhadap proyek BRI. Dalam sejumlah artikel, media menyarankan agar Tiongkok lebih aktif melibatkan media dalam menyosialisasikan dan mempromosikan proyek ini kepada publik (Anunne et al., 2019). Di Malaysia sendiri, persepsi masyarakat terhadap BRI tampak

beragam—ada yang menerima secara positif, ada pula yang bersikap moderat maupun negatif. Menariknya, artikel-artikel surat kabar berbahasa Melayu yang membahas BRI masih terbatas jumlahnya dan umumnya hanya menyoroti aspek ekonomi. Sementara itu, unsur budaya dan pendidikan cenderung dianggap kurang relevan untuk diangkat ke dalam pemberitaan (Mus Chairil et al., 2015, hlm. 49–57).

Sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh *Earth Journalism Network* (EJN), Tiongkok *dialogue*, dan Myanmar *Journalism Institute* mempertemukan para jurnalis dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Indonesia, Kenya, dan Kolombia. Dalam forum ini, terungkap bahwa pemberitaan tentang *Belt and Road Initiative* (BRI) di berbagai media cenderung berfokus pada aspek politik dan ekonomi semata. Laporan-laporan yang menyoroti dampak sosial maupun lingkungan dari proyek tersebut masih sangat terbatas. Para jurnalis peserta lokakarya juga mengakui adanya kekurangan dalam menyajikan sudut pandang Tiongkok dalam pemberitaan BRI yang diproduksi oleh media di luar negeri (Staf EJN, 2019).

Di sisi lain, pemberitaan media arus utama Tiongkok terhadap proyek BRI memperlihatkan nada yang lebih positif dan cenderung objektif. Media seperti Xinhua, CCTV, People's Daily, Guangming Daily, dan The Financial Times versi Tiongkok mengkritisi dominasi ideologis media Barat, yang menurut mereka menjadikan pemberitaan yang bias dan kerap kali memperlihatkan penolakan terhadap kebijakan BRI yang diusung oleh Tiongkok (Fell, 2019; Nie, 2019).

Sementara itu, media Tiongkok Daily menyoroti tiga aspek utama dalam proyek BRI, yakni pembangunan ekonomi, kemajuan budaya, dan keberlanjutan ekologi (Hu, 2019, hlm. 615–623). Pemerintah Tiongkok bahkan disebut telah mengambil langkah konkret untuk membangun tatanan ekonomi global baru yang lebih inklusif. Secara umum, liputan media Tiongkok terhadap BRI bernuansa optimis dan mendukung (Xiao et al., 2019; Zhang & Wu, 2017).

Salah satu media berbahasa Inggris yang berbasis di Tiongkok, Global Times, memandang BRI sebagai bagian dari arus globalisasi. Proyek ini diposisikan dalam kerangka pembangunan ekonomi sekaligus upaya memperkuat nilai-nilai strategis Tiongkok di tingkat internasional. Dalam konteks ini, Tiongkok menaruh harapan besar pada Pakistan untuk menjadi jembatan komunikasi antara Tiongkok dan negara-negara di kawasan Asia Selatan (Aslam et al., 2020; Haiqing, 2018).

Optimisme publik terhadap proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diusung Tiongkok tampak menguat, sebagaimana tercermin dari aktivitas warganet di media sosial. Selama tahun 2017, dalam momentum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRI, tercatat lebih dari 60.000 cuitan di Twitter yang

membicarakan topik terkait. Warganet secara khusus menyoroti isu keamanan selama berlangsungnya forum, dampak ekonomi dari pertemuan tersebut, serta strategi diplomatik yang melekat dalam proyek BRI (Zhao Changyu & Wu Yaping, 2019).

Selain Twitter, media sosial lain seperti Facebook juga memperlihatkan keterlibatan publik yang cukup signifikan. Analisis terhadap 43.239 unggahan yang berkaitan dengan proyek Jalur Sutra mengungkapkan bahwa sentimen warganet cenderung positif. Media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi seputar BRI sekaligus membentuk citra positif Tiongkok di mata global (Liang, 2019).

Studi yang dilakukan oleh Herrero dan Xu (2017) turut memperkuat temuan ini. Dengan menggunakan kumpulan data dari Global Database of Events, Language, and Tone yang mencakup publikasi dalam 100 bahasa di 132 negara selama kurun waktu 2017 hingga 2018, mereka menelusuri bagaimana proyek BRI dipersepsikan secara internasional. Hasilnya mengindikasikan bahwa pemberitaan tentang BRI lebih banyak menitikberatkan pada isu perdagangan dan investasi. Secara umum, proyek ini mendapatkan tanggapan yang bernada optimis dan dianggap memiliki potensi untuk direplikasi di berbagai kawasan dunia.

Dari berbagai representasi media internasional terhadap proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), terdapat sejumlah simpulan, diantaranya.

Pertama, media dari negara-negara Barat seperti Inggris, India, Australia, dan Amerika Serikat cenderung menggunakan metafora yang bernada negatif dalam pemberitaan mereka. Media-media arus utama seperti CNN, New York Times, The Washington Post, dan CNBC di Amerika Serikat, serta Le Monde di Prancis, The Guardian di Inggris, Sueddeutsche Zeitung di Jerman, dan El País di Spanyol, menggambarkan proyek BRI sebagai ekspansi sepihak oleh Tiongkok—ibarat pertunjukan tari tunggal dari satu negara. Di India, media seperti The Times of India, Economic Times, The Indian Express, dan The Hindu bersikap sangat kritis, bahkan menyoroti aliansi strategis antara Tiongkok, Afghanistan, dan Pakistan sebagai hal yang mencurigakan.

Pemberitaan yang sangat skeptis juga muncul dari media-media Australia seperti ABC News, The Australian, The Australian Financial Review, The Sydney Morning Herald, dan The Age. Media-media ini menampilkan narasi yang cenderung memusuhi dan meragukan niat di balik proyek BRI. Secara umum, pemberitaan dari media-media Barat, khususnya dari Amerika Serikat, Inggris, India, dan Australia, memperlihatkan kecenderungan menyebarkan propaganda yang menciptakan citra negatif terhadap pemerintah Tiongkok. Kalimat-kalimat yang sering muncul dalam narasi mereka mencakup peringatan kepada negara-negara penerima proyek agar waspada terhadap “jebakan utang” dari Tiongkok—karena jika tidak mampu membayar, kedaulatan negara

bisa terancam. Frasa “ancaman pengaruh geopolitik” dan “ketidakseimbangan kekuatan dan keamanan” menjadi wacana dominan dalam pemberitaan media-media tersebut.

Kedua, pandangan yang lebih positif terhadap proyek BRI ditemukan pada pemberitaan media dari Tiongkok, negara-negara ASEAN, Asia Tengah, Afrika, Rusia, dan sebagian negara di Eropa Barat. Media-media Tiongkok seperti People’s Daily, Guangming Daily, The Financial Times (Tiongkok), Global Times, dan Xinhua News secara konsisten menyampaikan narasi yang menekankan pada pembangunan ekonomi, peningkatan kerja sama internasional, konektivitas infrastruktur, pertukaran budaya, serta kemajuan di bidang pendidikan. Selain menyambut inisiatif ini dengan optimisme, media-media tersebut juga secara aktif menanggapi—bahkan membantah—narasi negatif yang dilontarkan oleh media-media Barat dan India.

Meskipun umumnya mendukung, sebagian media juga menyampaikan kritik dan saran yang konstruktif. Beberapa isu yang kerap muncul dalam kritik tersebut antara lain menyangkut persoalan ketenagakerjaan, dampak lingkungan, distribusi infrastruktur digital, serta pentingnya komunikasi lintas budaya. Masukan-masukan ini menjadi refleksi penting bagi negara-negara yang terlibat dalam jalur BRI.

Media-media dari Afrika—seperti Independent Media, Avusa, Naspers, New African, Caxton, The Sun, Vanguard, The Punch, The Nation, dan New Straits Times—menampilkan pemberitaan yang relatif mendukung. Di Turki, media seperti Sabah, Bintang, Modern Pek Yolu, CRITürk, Takvim, Birgün, Günlük Evrensel, Yeniçağ, dan Eurasianis Aydınlik pun menyampaikan pandangan yang serupa. Sementara di kawasan ASEAN, media seperti Surat Melayu, Business Insider, The Star, Saigon Times, Vietnam Bridge, dan Zaobao secara luas meliput dampak BRI dengan optimisme, terutama dalam hal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran kawasan.

Ketiga, negara-negara yang paling gencar menyuarakan pemberitaan negatif tentang Tiongkok dan membentuk citra buruk terhadap proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) berasal dari kawasan Barat, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Jika ditelusuri secara historis, ketiganya memiliki latar belakang ideologis dan sejarah yang serupa. Ketiga negara tersebut merupakan keturunan dari peradaban yang sama—yakni bekas jajahan atau bagian dari Kerajaan Inggris—dan memiliki kesamaan sistem politik serta orientasi global.

Lebih dari itu, ketiganya juga tergabung sebagai sekutu utama dalam aliansi pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang menjadikan mereka memiliki posisi strategis dalam menyebarkan narasi global, termasuk dalam membentuk opini publik terkait BRI.

Sementara itu, pemberitaan negatif dari media India terhadap proyek BRI tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik dan konflik bilateral

yang telah berlangsung lama. Ketegangan ekonomi dan sengketa perbatasan antara India dan Tiongkok turut memperkuat sentimen nasionalisme di India. Akibatnya, muncul semacam solidaritas internal yang menjadikan Tiongkok diposisikan sebagai lawan atau ancaman, baik dalam narasi politik maupun dalam wacana media.

Propaganda Negara Barat terhadap Proyek BRI

Indonesia telah lama menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat dan Jepang. Hubungan tersebut terjalin tidak hanya secara diplomatik, tetapi juga melalui kepentingan ekonomi yang mendalam. Amerika Serikat, misalnya, memiliki sejumlah perusahaan pertambangan besar yang beroperasi di Indonesia. Salah satu yang paling menonjol adalah PT Freeport Indonesia, pengelola tambang emas raksasa di Papua. Sementara itu, Jepang telah lama menjadi salah satu pemberi pinjaman utama bagi Indonesia, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pasar penting bagi industri otomotif Jepang, termasuk merek-merek seperti Honda, Yamaha, dan Toyota.

Saat ini, Amerika Serikat tercatat sebagai mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia. Negara tersebut terus mendorong penguatan kerja sama dalam bidang perdagangan dan ekonomi melalui berbagai inisiatif, termasuk gagasan “poros maritim global.” Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat secara terbuka mendorong Indonesia agar turut serta membendung ekspansi Tiongkok, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, elit Indonesia - termasuk kalangan akademisi, politisi, dan peneliti - diindikasikan turut terpengaruh oleh perspektif Barat, Jepang, dan Eropa. Hal ini tidak lepas dari latar belakang pendidikan banyak sarjana Indonesia yang menempuh studi di luar negeri melalui skema beasiswa ke negara-negara tersebut.

Akibatnya, persepsi terhadap Tiongkok, termasuk terhadap sistem sosialisme yang dianutnya, sering kali dibentuk oleh kerangka nilai yang berakar pada pemikiran Barat. Ketegangan geopolitik di Laut Tiongkok Selatan pun kerap dimunculkan kembali dalam pemberitaan maupun diskursus publik, yang pada akhirnya mengaburkan upaya penguatan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok (宋瑞琛, 2017).

Di sisi lain, Amerika Serikat tetap berupaya mempertahankan dominasi global dan berusaha mencegah kemunculan kekuatan baru yang dapat menjadi pesaing. Kekhawatiran utama AS adalah bahwa Tiongkok, dengan kekuatan ekonomi dan maritimnya yang kian besar, akan turut memengaruhi penyusunan aturan internasional dan mendominasi wacana global (宋瑞琛, 2017). Dalam pandangan geopolitik Barat, proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dianggap sebagai bagian dari strategi besar Tiongkok untuk menegaskan

perannya sebagai pemimpin global baru (Zhang Xiaotong, 2016). Oleh karena itu, memperkuat diplomasi dan membangun narasi tandingan menjadi penting dalam menghadapi dominasi naratif dari negara-negara Barat.

Di Indonesia, proyek BRI menjadi salah satu isu yang cukup banyak diberitakan, baik melalui media cetak maupun daring. Pada 26 Mei 2019, pencarian daring dengan kata kunci “belt and road” menghasilkan ratusan artikel dari sejumlah media nasional: Tempo.co edisi bahasa Inggris mencatat 700 hasil pencarian; Kompas.com 582 hasil; MediaIndonesia.com 414; Detik.com 87; dan Republika.co.id sebanyak delapan artikel (Widyanto, 2019). Mayoritas pemberitaan tersebut berfokus pada dimensi ekonomi dan politik proyek BRI. Beberapa topik yang banyak diangkat mencakup kehadiran Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam forum BRI di Tiongkok, prospek investasi, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, hingga pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang didanai oleh pemerintah Tiongkok.

Meskipun secara umum pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memperlihatkan sikap yang positif terhadap proyek BRI, dinamika penerimaan di tingkat masyarakat masih memperlihatkan spektrum yang beragam. Beberapa kelompok oposisi maupun kalangan kritis menyuarakan kekhawatiran dan kehati-hatian terhadap proyek ini, khususnya terkait transparansi, dampak lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Setelah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat dan sekutunya dari negara-negara Barat berhasil memantapkan diri sebagai kekuatan global utama. Dalam konstelasi geopolitik dunia pasca-1990-an, Amerika Serikat memainkan peran dominan, seakan menjadi “polisi dunia” yang mengatur tatanan internasional melalui pengaruh ekonomi dan kekuatan militernya.

Dengan posisinya yang strategis ini, Amerika Serikat cenderung mengarahkan negara-negara lain agar mengikuti jalur kebijakan politik dan ekonominya. Demi mempertahankan dominasi tersebut, berbagai bentuk propaganda dijalankan untuk menjaga agar hegemoninya tidak tergoyahkan. Hal ini telah menjadi pengetahuan umum dalam kajian hubungan internasional dan geopolitik kontemporer.

Strategi propaganda yang dilakukan Barat tidak terbatas pada media massa saja. Pembentukan opini publik melalui pemberitaan menjadi salah satu instrumen utama. Selain itu, program-program beasiswa pendidikan juga diberikan kepada para aktivis, akademisi, dan tokoh masyarakat dari negara-negara berkembang. Bantuan dana untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun kerap disalurkan atas nama penguatan demokrasi versi Barat, pemajuan

hak asasi manusia, isu perubahan iklim, pelestarian lingkungan hidup, serta pemberdayaan perempuan dan kesehatan masyarakat.

Berbagai pendekatan tersebut, meskipun secara formal bertujuan mulia, juga dipahami sebagai bagian dari strategi pengaruh dan penyebaran nilai-nilai Barat. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut menjadi sasaran dari berbagai inisiatif tersebut. Gambar berikut memberikan ilustrasi visual atas praktik-praktik tersebut dalam konteks hubungan global dan penyebaran pengaruh Barat.



Gambar 25. Screenshot Twitter yang mengkritik kebijakan proyek BRI dengan melampirkan pemberitaan media online sebagai dasar argumennya

Dalam salah satu tangkapan layar yang beredar di Twitter, akun @freedomuntung menuliskan, “TKA asal Tiongkok membahayakan kedaulatan Indonesia,” sembari menyertakan potongan berita dari media yang mengutip data Dana Moneter Internasional (IMF). Data tersebut mengindikasikan bahwa prospek ekonomi global pada tahun 2023 diprediksi akan mengalami perlambatan. Dengan menggabungkan isu tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok dan prediksi ekonomi IMF, cuitan tersebut ingin menegaskan bahwa kerja sama ekonomi dengan Tiongkok dianggap berisiko memperparah kemerosotan ekonomi nasional.

Sementara itu, akun @alumnusgorong mencuit, “Waspada jebakan utang Tiongkok, Wapres AS peringatan bahaya utang ke Tiongkok,” sembari melampirkan tautan berita dari media daring detik.com dengan judul “Dubes AS peringatan bahaya utang Tiongkok.”

Dari kedua unggahan tersebut, ada dua hal utama yang dapat dicermati. Pertama, terlihat bahwa media arus utama di Indonesia sering kali mengandalkan narasi dan sudut pandang dari negara-negara Barat dalam

menyampaikan informasi, khususnya terkait Tiongkok. Hal ini tercermin dari penggunaan data IMF dan pernyataan pejabat tinggi Amerika Serikat sebagai rujukan utama. Fenomena ini menimbulkan dua kemungkinan: pertama, adanya keterbatasan atau minimnya inisiatif jurnalis lokal dalam menggali informasi secara independen; atau kedua, adanya kecenderungan untuk mereproduksi narasi global yang sejalan dengan kepentingan politik negara-negara Barat, sehingga media secara tidak langsung menjadi corong propaganda yang menyudutkan Tiongkok.

Kedua, masyarakat Indonesia kini turut aktif membentuk opini publik melalui media sosial. Dalam contoh di atas, cuitan-cuitan yang tersebar menyematkan sumber dari media daring nasional, yang pada dasarnya merujuk pada narasi dan data dari institusi atau tokoh Barat. Hal ini menggambarkan bahwa validasi atas opini publik sering kali diperoleh bukan dari data lokal atau riset kritis, tetapi dari kutipan berita yang dianggap memiliki otoritas karena berasal dari “sumber internasional.”



Gambar 26. Tangkapan layar liputan media daring di Indonesia yang meluncurkan media Barat sebagai bahan informasi.

Dua tangkapan layar dari situs Kabarwonosobo.com dan CNBC Indonesia menjadi contoh bagaimana pemberitaan di media lokal banyak mengacu pada narasi media asing, khususnya Barat. Judul seperti “Viral: Media Asing Sebut Utang Indonesia ke Tiongkok Jebakan Utang Tersembunyi” dan “Banyak Media Asing Soroti Pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping” mengilustrasikan bahwa media Indonesia cenderung menggunakan sumber dari luar negeri untuk membentuk bingkai (framing) pemberitaan mereka.

Fenomena ini kemudian dimanfaatkan oleh pengguna media sosial atau warganet untuk menguatkan opini pribadi mereka. Cuitan-cuitan di Twitter

dan media sosial lainnya sering kali menyertakan tautan atau tangkapan layar dari berita-berita tersebut sebagai bentuk legitimasi terhadap argumen yang mereka bangun. Dengan kata lain, opini publik yang berkembang di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kuat narasi media Barat. Sayangnya, banyak warganet mungkin tidak menyadari bahwa setiap pemberitaan membawa serta bingkai ideologis, politik, dan kepentingan tertentu. Maka tidak heran bila mereka, secara tidak sadar, turut mereproduksi wacana dominan dalam bentuk cuitan dan unggahan media sosial lainnya.

Sebuah riset yang dilakukan oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) yang berbasis di Jakarta memperkuat fenomena ini. Penelitian tersebut mengungkap bagaimana pengaruh hegemoni lunak (*soft power*) Amerika Serikat menjangkau lembaga-lembaga nonpemerintah di Indonesia, khususnya dalam menanggapi proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang digagas Tiongkok.

Dalam survei CSIS yang dilakukan pada Agustus 2017 terhadap generasi milenial Indonesia (usia 17–29 tahun), ditemukan bahwa sebanyak 32,8% responden menganggap bahwa kerja sama dengan Tiongkok merugikan Indonesia, sementara hanya 11,7% yang menilainya menguntungkan. Di sisi lain, kerja sama dengan Amerika Serikat juga dinilai merugikan oleh 29,9% responden, dan hanya 14,3% yang melihat potensi keuntungan.

Hasil ini diperkuat oleh temuan survei dari Media Survei Nasional (Median) pada September 2017. Dengan mengajukan pertanyaan, “Menurut Anda, negara mana yang menjadi ancaman terbesar bagi Indonesia?”, sebanyak 22,7% responden menjawab Tiongkok, sementara 14% memilih Amerika Serikat. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kekhawatiran terhadap potensi hegemoni Tiongkok di Indonesia (Adriansyah & Wu, 2020).

Perlu dicatat bahwa persepsi negatif terhadap Tiongkok ini bisa jadi dipengaruhi oleh arah kebijakan lembaga-lembaga seperti CSIS yang memiliki relasi erat dengan pemerintah Amerika Serikat dan cenderung mengadopsi sudut pandang kebijakan luar negeri AS (Damuri et al., 2019). Dengan demikian, opini publik bukan hanya terbentuk oleh pengalaman nyata masyarakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan wacana dan relasi kuasa dalam distribusi informasi.

Sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga pemikir German Duisburg School mengungkap bahwa persepsi global terhadap proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok cenderung kompleks dan tidak sepenuhnya positif. Salah satu isu utama yang mencuat adalah kekhawatiran terhadap dampak globalisasi ekonomi. Selain itu, Tiongkok dipersepsikan sebagai aktor geopolitik yang aktif dan strategis, yang memainkan peran signifikan dalam percaturan politik internasional (Xia, 2018).

Sejalan dengan temuan tersebut, Brookings Institution dan Komite Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat yang diwakili oleh Song Ruichen juga menggambarkan ambivalensi serupa. Meskipun Amerika Serikat mulai membuka ruang untuk kemungkinan kerja sama dalam kerangka proyek BRI, sikap waspada masih kuat. Tiongkok tetap dipandang sebagai pesaing strategis di berbagai sektor (Song Ruichen, 2017).

Di Indonesia sendiri, reaksi terhadap tawaran kerja sama BRI dari Tiongkok juga cenderung hati-hati. Sikap ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor historis, sosial, dan kultural. Pertama, pada tahap awal peluncuran BRI, pemerintah Tiongkok dinilai lambat memberikan penjelasan yang menyeluruh dan transparan. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa proyek ini merupakan bentuk imperialisme baru dalam kemasakan kerja sama pembangunan. Namun, seiring waktu dan adanya klarifikasi lebih lanjut, beberapa negara, termasuk Indonesia, mulai mempertimbangkan untuk bergabung (Fitriani, 2018).

Kedua, Indonesia memiliki sejarah penjajahan selama lebih dari tiga abad, yang menyisakan trauma kolektif tentang eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Hal ini membuat Indonesia sensitif terhadap kerja sama ekonomi yang dianggap bisa membuka celah ketergantungan baru. Kekhawatiran ini diperkuat oleh realitas geopolitik kawasan, di mana Indonesia dikelilingi negara-negara dengan mayoritas etnis Tionghoa, serta kenyataan bahwa sebagian besar elite ekonomi di Indonesia berasal dari kalangan keturunan Tionghoa.

Ketiga, perbedaan budaya, nilai, dan sistem sosial antara Indonesia dan Tiongkok juga menjadi sumber keraguan. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut latar belakang etnis, tetapi juga menyentuh aspek agama, adat istiadat, dan sistem hukum. Oleh karena itu, keberhasilan kerja sama dalam kerangka BRI sangat ditentukan oleh kemampuan kedua belah pihak untuk membangun komunikasi lintas budaya yang saling menghargai. Pemerintah Tiongkok perlu membangun pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada masyarakat lokal. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga diharapkan bersikap terbuka dan menghargai kemitraan yang dibangun. Dalam konteks ini, literasi budaya menjadi tugas penting yang harus diemban oleh pemerintah Indonesia agar kerja sama yang terjalin tidak sekadar bersifat formal, tetapi juga berakar pada pemahaman sosial yang memadai (Lovina dkk., 2017: 161–177).

Keempat, pemberitaan negatif tentang proyek BRI memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan televisi sebagai sumber utama informasi. Sementara itu, media arus utama nasional sering kali mengutip narasi dan informasi dari media Barat, yang cenderung kritis terhadap proyek BRI. Hal ini turut membentuk opini publik yang skeptis, bahkan sinis, terhadap kerja sama Indonesia–Tiongkok dalam kerangka BRI (Yuniarto, 2019).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang terpilih dalam pemilu tahun 2014 dan kembali memenangi mandat pada tahun 2019, menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Berbeda dari sebagian besar pemimpin Indonesia sebelumnya, Presiden Jokowi tidak berasal dari kalangan militer maupun pimpinan partai politik. Kariernya berangkat dari dunia usaha dan kepemimpinan daerah, yang menjadikannya sosok sipil dengan pendekatan teknokratis (Ge Hongliang, 2017).

Namun, sejak masa kampanye hingga menjelang akhir masa jabatannya, dinamika politik dalam negeri memperlihatkan polarisasi yang kuat. Masyarakat Indonesia tampak terbelah dalam dua kutub besar: mereka yang mendukung Presiden Jokowi, dan mereka yang secara konsisten menjadi oposisi. Polarisasi ini berdampak pada meningkatnya kritik terhadap pemerintahan, meskipun data dan indikator pembangunan mengindikasikan capaian-capaian yang cukup signifikan dalam infrastruktur, konektivitas, dan layanan publik.

Di tengah dinamika tersebut, hubungan Indonesia-Tiongkok juga terus berkembang, tidak hanya dalam kerja sama ekonomi dan investasi, tetapi juga melalui pertukaran pelajar dan program beasiswa. Jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Tiongkok terus meningkat, begitu pula sebaliknya. Pertukaran ini membuka peluang untuk memperkuat pemahaman antarbudaya, membangun dialog publik yang sehat, serta meningkatkan diplomasi masyarakat (*people-to-people diplomacy*).

Dalam konteks proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), diplomasi publik menjadi aspek yang krusial. Upaya membentuk citra positif BRI di tingkat global memerlukan komunikasi yang inklusif, berbasis pemahaman lintas budaya yang lebih mendalam. Hal ini penting, terutama karena kritik terhadap proyek BRI tidak hanya datang dari negara-negara Barat, tetapi juga dari negara mitra tradisional Asia, seperti Jepang (Yue, 2017).

Untuk itu, dibutuhkan kesiapan material dan psikologis, baik dari pemerintah Tiongkok maupun negara-negara mitra BRI seperti Indonesia. Persiapan ini meliputi strategi komunikasi publik yang transparan, pembangunan narasi yang menjembatani perbedaan persepsi, serta pemberdayaan masyarakat sipil agar dapat memahami proyek BRI secara lebih menyeluruh. Mengelola opini publik yang kritis bukan hanya soal membantah atau membela, melainkan soal membangun kepercayaan melalui keterbukaan dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal.

Reaksi Politisi, Intelektual, dan Tokoh Berpengaruh

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) di Indonesia adalah lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidaksinkronan ini terlihat dalam

beberapa kebijakan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yang dalam praktiknya di lapangan tidak selalu diterjemahkan secara konsisten oleh aparat di bawahnya.

Kebingungan ini tercermin dalam isu keberadaan tenaga kerja asing asal Tiongkok dalam proyek BRI. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berulang kali menekankan bahwa keberadaan tenaga kerja Tiongkok bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya, tenaga kerja tersebut adalah tenaga ahli yang berperan penting dalam proses alih teknologi, dan merupakan bagian dari kesepakatan dalam kerja sama bilateral (Adriansyah & Wu, 2020). Sebagai wakil resmi pemerintah dalam proyek-proyek investasi strategis, pandangan Luhut semestinya menjadi acuan dalam komunikasi publik.

Namun, realitas di lapangan tidak selalu sejalan. Beberapa pejabat daerah, seperti Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, justru menyuarakan kekhawatiran tentang potensi tergesernya tenaga kerja lokal oleh pekerja asing. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memahami dan mengkomunikasikan kerja sama BRI (Damuri dkk., 2019). Tidak hanya itu, pandangan Luhut juga terkadang berbeda dengan pernyataan dari menteri lain di kabinet yang menggarap isu serupa, memperlihatkan tidak solidnya komunikasi di tingkat elite.

Kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk dari apa yang disebut sebagai elit case dalam komunikasi publik. Ketidakterpaduan informasi di tingkat elite pemerintahan dapat berdampak langsung terhadap cara publik memandang proyek BRI. Masyarakat yang tidak mendapatkan penjelasan memadai dari pemerintah, akhirnya membentuk opini berdasarkan pemberitaan media yang mereka akses.

Salah satu contoh kasus yang cukup menonjol adalah proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Proyek ini sempat menjadi sorotan karena adanya persaingan antara Tiongkok dan Jepang untuk menjadi pelaksana utama. Dalam prosesnya, Tiongkok akhirnya terpilih untuk menggarap proyek ini. Namun, ketidakterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada publik, serta minimnya ruang dialog yang terbuka, menjadikan masyarakat kerap bersikap skeptis terhadap proyek tersebut (Hong, 2018).

Situasi ini semakin ruwet ketika pandangan dari kalangan tokoh masyarakat, intelektual, dan jurnalis pun turut membentuk opini publik. Misalnya, Muhammad Azis. Dosen teknologi informasi sekaligus Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di Tiongkok, menyampaikan pandangannya mengenai proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Menurutnya, inisiatif ini memiliki tujuan besar untuk memperkuat kerja sama regional dan membangun konektivitas lintas kawasan, baik di negara maju maupun berkembang. Jika pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, proyek BRI

berpotensi memberikan manfaat nyata bagi kelompok masyarakat miskin, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi global.

Dampak positif yang dimungkinkan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan. Azis menilai bahwa keterbukaan terhadap persaingan global akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, sebagai bagian dari efek domino dari keterhubungan ekonomi antarnegara. Namun demikian, ia juga menyoroti bahwa dalam hal pertukaran budaya, terdapat potensi dampak yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, nilai-nilai positif seperti kedisiplinan, ketepatan waktu, dan etos kerja tinggi dari negara lain dapat menjadi inspirasi. Namun di sisi lain, ada risiko jika budaya luar diterapkan secara mentah tanpa menyesuaikan dengan konteks budaya lokal Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan benturan nilai yang merugikan.

Azis juga mengingatkan bahwa proyek infrastruktur berskala besar, seperti yang digagas dalam BRI, tentu memiliki berbagai risiko. Beberapa di antaranya adalah risiko lingkungan, sosial, dan potensi terjadinya korupsi. Dalam konteks negara-negara yang masih menghadapi tantangan dalam tata kelola pemerintahan—termasuk sejumlah negara mitra BRI—risiko ini bisa menjadi signifikan. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi yang cermat serta perlindungan yang efektif untuk meminimalkan potensi dampak negatif tersebut. Ia menegaskan pentingnya pelibatan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Multilateral lainnya. Lembaga-lembaga ini diharapkan mampu mendorong penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang tinggi dalam setiap investasi proyek BRI (Azis, 2021).

Budy Asyhari Afwan, peneliti senior di *Center for Religious and Cross-Culture Studies* (CRCS), Universitas Gadjah Mada, menyampaikan pandangannya tentang proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) serta dinamika pembentukan opini publik di Indonesia. Menurutnya, ada tiga hal penting yang perlu dicermati.

Pertama, kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dalam banyak kasus, dirancang secara spesifik untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Dalam perspektif sosiologi politik, tidak ada tindakan yang benar-benar netral atau bebas dari nilai. Oleh karena itu, setiap kali kepentingan AS dinilai terganggu oleh pihak lain—seperti dalam konteks proyek BRI yang digagas oleh Tiongkok—maka akan muncul upaya sistematis untuk membendung pengaruh tersebut.

Kedua, Budy mengamati bagaimana AS dan pemerintahannya menggunakan strategi hegemoni lunak (*soft power*) untuk membentuk opini publik di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Strategi ini tidak dilakukan secara agresif, melainkan lewat pendekatan lembut, seperti dukungan terhadap organisasi masyarakat sipil (OMS) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM)

yang fokus pada isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kesetaraan gender. Semua itu dikemas dalam kerangka demokrasi ala Barat, namun pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan opini publik yang selaras dengan kepentingan politik luar negeri AS—termasuk dalam hal membendung perluasan pengaruh Tiongkok melalui proyek BRI.

Ketiga, banyak LSM di Indonesia yang memperoleh pendanaan dari lembaga donor internasional asal Barat. Beberapa di antaranya yang disebut Budy antara lain CSIS (*Centre for Strategic and International Studies*), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Transparency International Indonesia*, *Greenpeace Indonesia*, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Selain itu, terdapat pula sejumlah organisasi lain yang bergerak di isu perempuan dan anak, yang secara tidak langsung terhubung dengan jaringan pendanaan dari Barat.

Di sisi lain, Nouval Widi Asmoro, wartawan harian Jawa Pos, menawarkan sudut pandang yang lebih hati-hati dan seimbang dalam menyikapi proyek BRI. Menurutnya, kunci dari kerja sama antarnegara terletak pada bagaimana perjanjian tersebut dirancang dan dilaksanakan. Apakah posisi kedua negara dalam kesepakatan tersebut setara, atau justru ada kecenderungan salah satu pihak menjadi dominan?

Nouval menekankan bahwa konektivitas lintas negara memang penting, terutama untuk membuka peluang ekonomi dan pertukaran pengetahuan. Namun demikian, kerja sama semacam itu juga berisiko menimbulkan ketergantungan baru yang justru memperkuat hegemoni. Karena itu, ia berpendapat bahwa negara-negara yang terlibat dalam proyek BRI mesti menjaga identitas nasionalnya sebagai negara yang mandiri. Dalam hubungan luar negeri, setiap negara semestinya bebas menjalin kemitraan dengan siapa pun tanpa merasa ditekan atau dikendalikan oleh kekuatan tertentu.

Terkait isu pengaruh media dan LSM dalam membentuk opini negatif terhadap BRI, Nouval menegaskan pentingnya prinsip verifikasi dalam praktik jurnalistik. Tidak semestinya sebuah pemberitaan didasarkan pada dugaan atau asumsi semata, apalagi jika menyangkut tuduhan bahwa media atau LSM dipengaruhi oleh kepentingan Barat. Semua tuduhan seperti itu mesti dibuktikan terlebih dahulu.

Nouval juga mengingatkan bahwa keberadaan LSM semestinya berperan sebagai penjaga kepentingan publik, terutama dalam memantau pelaksanaan proyek pembangunan berskala besar seperti BRI. Fungsi pengawasan terhadap jaminan hak-hak masyarakat harus menjadi prioritas, bukan hanya menanggapi atau sekadar mengikuti pengaruh dari luar. (Asmoro, 2021).

Sementara itu, Tsalis Rifa'i, seorang intelektual Islam yang berafiliasi dengan Persyarikatan Muhammadiyah, mengajak publik untuk melihat realitas dengan lebih jernih dan kontekstual. Menurutnya, setiap negara memiliki

situasi dan kepentingan yang berbeda-beda. Termasuk Indonesia, yang dalam posisinya sebagai negara demokrasi tentu memiliki ruang untuk menyuarakan dukungan maupun kritik terhadap proyek BRI.

Namun, jika mencermati pemberitaan media yang mengutip berbagai narasumber, baik dari pejabat pemerintah Indonesia, perwakilan Tiongkok, hingga akademisi, kita akan menemukan satu kesimpulan penting: Indonesia, seperti banyak negara lainnya, tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari dinamika kerja sama dengan Tiongkok. Fakta bahwa lebih dari 70 negara telah menandatangani perjanjian kerja sama dalam kerangka BRI menjadi bukti bahwa proyek ini telah menjadi bagian dari arsitektur ekonomi global yang tidak gampang diabaikan. (Rifa'i, 2021).

Dampak dari beberapa proyek infrastruktur yang termasuk dalam skema *Belt and Road Initiative* (BRI) sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya yang paling nyata adalah keberadaan jalan tol yang membentang di Pulau Jawa. Jalan bebas hambatan ini telah memangkas waktu tempuh secara signifikan, baik untuk mobilitas orang maupun distribusi barang dan jasa. Dengan efisiensi waktu tersebut, biaya transportasi pun turut berkurang. (Sartianawati, 2021). Jika konektivitas serupa juga terealisasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, tentu manfaatnya akan semakin meluas. Padahal, itu baru satu aspek dari infrastruktur—masih ada pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, hingga bendungan yang juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan. Proyek-proyek ini diyakini akan memberi kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan laju pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan manfaat tersebut, media daring di Indonesia juga tampak aktif mengabarkan perkembangan proyek-proyek ini. Dalam beberapa kasus, berita-berita tersebut hadir bukan hanya untuk memberi informasi, tapi juga sebagai upaya menyeimbangkan narasi yang beredar di tengah masyarakat—khususnya narasi yang mencurigai atau bahkan menolak kerja sama Indonesia-Tiongkok di bawah payung BRI. (Wardhan, 2021).

Iswahyuni, seorang aktivis perempuan yang juga praktisi media, mengingatkan bahwa dalam era digital, opini publik sangat mudah dibentuk melalui narasi yang diputar secara berulang, terutama di media sosial. Di ruang digital, informasi menyebar begitu cepat dan nyaris tanpa filter. Di sinilah kebingungan muncul—hal yang keliru bisa tampak benar jika terus disuarakan, sementara hal yang benar bisa tampak meragukan karena tidak cukup mendapat ruang. Maka dari itu, Iswahyuni menekankan pentingnya keberadaan media arus utama sebagai penyaring dan penyeimbang informasi, agar publik tetap mendapat perspektif yang terverifikasi dan utuh. (Iswahyuni, 2021).

Khusus dalam konteks BRI, arus opini di media sosial sering kali condong pada kekhawatiran bahwa proyek-proyek kerja sama tersebut akan menyeret Indonesia dalam ketergantungan utang. Kecemasan ini makin diperkuat

oleh beberapa contoh proyek yang berjalan tidak sesuai rencana—seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sempat mengalami penundaan dan membengkaknya biaya.

Selain pandangan dari hasil wawancara langsung, sejumlah tokoh masyarakat dan cendekiawan juga turut menyumbangkan pemikiran mereka lewat tulisan. Salah satunya adalah Ignatius Adhi Baskoro yang menulis artikel bertajuk “Ekspansi Proyek OBOR Tiongkok, Indonesia Diminta Waspada Jebakan Utang” di Tirto.id. Dalam artikelnya, Baskoro menyoroti proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan nada kritis, sering kali mengutip sumber-sumber dari media Barat dan lembaga riset internasional yang cenderung sinis terhadap ambisi global Tiongkok.

Salah satu sumber yang dikutip adalah Financial Times, yang menyebut bahwa dari sekitar 70 negara yang telah bergabung dalam proyek BRI, sebagian besar tergolong sebagai negara berisiko tinggi mengalami gagal bayar. Data tersebut merujuk pada laporan dari *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), yang menyoroti potensi krisis utang tersembunyi di balik proyek infrastruktur ambisius ini.

Tidak hanya itu, artikel tersebut juga menyebut laporan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) yang dirilis pada Agustus 2018. Dalam laporan itu, proyek BRI dinilai sebagai strategi halus Tiongkok untuk meredam konfrontasi sekaligus membungkam kritik terhadap berbagai isu sensitif di dalam negerinya.

Baskoro juga mengutip survei dari Pusat Studi ASEAN ISEAS-Yusof Ishak Institute bertajuk “*The State of Southeast Asia: 2019*.” Survei itu mengungkapkan bahwa 73 persen responden—yang terdiri dari akademisi, pejabat pemerintah, pelaku bisnis, tokoh masyarakat sipil, dan media di kawasan ASEAN—mengakui bahwa pengaruh ekonomi Tiongkok di Asia Tenggara sangat kuat dan nyata. (Bhaskara, 2019b).

Nada sinis terhadap kehadiran Tiongkok di Asia Tenggara juga tercermin dalam tulisan Pascas Bin Saju yang dimuat di Kompas.com, berjudul “Kehadiran Tiongkok di ASEAN, Berkah atau Masalah?” Dalam artikel itu, Saju mengutip William A. Callahan dari London School of Economics, yang menyebut bahwa ambisi geopolitik Tiongkok lebih luas dari sekadar diplomasi ekonomi. Callahan menilai bahwa slogan “Asia untuk Orang Asia” yang digaungkan oleh Presiden Xi Jinping adalah bagian dari retorika yang ingin menegaskan dominasi nilai-nilai peradaban Tiongkok atas kawasan regional. Dengan kata lain, proyek-proyek Tiongkok seperti BRI dianggap bukan sekadar infrastruktur, tetapi juga alat untuk membangun pengaruh dan tatanan dunia baru versi Beijing. (Saju, 2017).

Sikap serupa juga datang dari Jeffrey D. Sachs dalam tulisannya di The Jakarta Post, berjudul “*Insight: America’s Unholy Crusade Against Tiongkok*.”

Dalam artikel tersebut, Sachs mengkritik retorika agresif Amerika Serikat, khususnya Menteri Luar Negeri saat itu, Mike Pompeo. Ia menggambarkan serangan verbal Pompeo terhadap Tiongkok sebagai bentuk “perang salib evangelis” gaya baru—membuka babak baru dalam ketegangan ideologis global, di mana Tiongkok dianggap sebagai ancaman utama bagi dominasi Amerika. (Sachs, 2020)

Namun, narasi-narasi penuh kecurigaan itu tidak dibiarkan mengambang tanpa tanggapan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, membalasnya secara tegas melalui esainya yang juga dimuat di Kompas, berjudul “Menelaah Kerja Sama Investasi Tiongkok di Indonesia.” Dalam tulisan tersebut, Bahlil menepis tiga isu utama yang kerap dilemparkan ke proyek BRI: pertama, bahwa proyek-proyek investasi dari Tiongkok bukan jebakan utang, melainkan kerja sama strategis yang saling menguntungkan; kedua, bahwa mayoritas pekerja proyek tetaplah warga Indonesia, dan tenaga kerja asal Tiongkok hanya segelintir tenaga ahli; dan ketiga, bahwa kekhawatiran soal hegemoni geopolitik seharusnya tidak hanya diarahkan ke Tiongkok, sebab, selama puluhan tahun justru Amerika Serikat yang dominan mempengaruhi arah kebijakan negara-negara berkembang. (Lahadalia, 2021).

Dalam lanskap politik global, sudah menjadi rahasia umum jika Amerika Serikat “bermain” tidak hanya di wilayah-wilayah strategis seperti Timur Tengah atau Eropa Timur, tapi juga di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Senator asal Yogyakarta, Afnan Hadikusumo, dalam pernyataannya tahun 2023 menyebut bahwa hampir setiap tahun, pemerintah Amerika aktif melobi dan mempengaruhi dinamika politik nasional. Menurutnya, intervensi ini bahkan menyentuh proses penentuan calon presiden. Fenomena serupa, menurut Afnan, juga terjadi di negara-negara lain yang secara geopolitik, ekonomi, dan geografis dipandang penting oleh Washington. Tujuannya jelas: memastikan calon pemimpin yang terpilih selaras dengan agenda Barat dan bersedia menjadi sekutu dalam mempertahankan hegemoni global.

Pernyataan Afnan bukanlah suara tunggal. Politikus senior seperti Fadli Zon dan Setya Novanto juga mengakui pernah dilibatkan dalam jejaring lobi politik yang berpusat di Amerika. Keduanya mengungkapkan bahwa mereka pernah diundang untuk bertemu dengan pihak-pihak yang dekat dengan lingkaran Donald Trump saat masih menjabat sebagai presiden. Pertemuan tersebut, menurut mereka, bagian dari strategi politik global AS yang ingin memengaruhi arah kepemimpinan Indonesia—tentu saja dengan syarat calon yang didukung bersedia tunduk pada agenda strategis Barat.

Lebih jauh lagi, Budiman Sudjatmiko—politikus yang pernah aktif di berbagai pergerakan sosial—menyebut bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam urusan politik Indonesia bukanlah hal baru. Ia merujuk pada peristiwa sejarah paling getir: kudeta militer 1965. Menurut Budiman, dukungan AS

terhadap penggulingan Presiden Soekarno bukan sekadar karena alasan ideologis, tapi juga kepentingan ekonomi yang besar. Soekarno kala itu dianggap tidak cukup ramah terhadap kepentingan Amerika. Ketika Soekarno jatuh dan Soeharto naik menggantikan, salah satu konsekuensi langsungnya adalah masuknya perusahaan tambang raksasa AS, PT Freeport, ke Papua—sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika Soekarno tetap berkuasa.

Respon Jurnalis dalam Pelaporan

Jika kita berbicara tentang realitas media, maka kita tidak bisa lepas dari pendekatan sosiologis yang telah lama digunakan untuk memahami bagaimana media membentuk dan memaknai dunia. Sejak lama, para sosiolog telah menjadikan teks media—seperti berita, puisi, pidato, maupun dokumen resmi—sebagai objek kajian. Media, dalam hal ini, tidak sekadar menyajikan informasi atau mencatat fakta, melainkan juga turut membentuk dan mengonstruksi realitas sosial yang kemudian memengaruhi cara pandang masyarakat.

Di era digital, terutama dalam ruang-ruang media sosial, kosakata bukan lagi sekadar kumpulan kata. Ia menjadi senjata dalam pertarungan wacana—arena tempat berbagai kelompok menyampaikan pesan, narasi, dan ideologi mereka kepada publik. Wacana, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, adalah strategi komunikasi. Ketika sebuah wacana berhasil mendominasi ruang publik, ia bisa membentuk opini, bahkan memengaruhi kebijakan.

Dalam konteks demokrasi modern, pertarungan wacana ini sangat kentara. Siapa yang paling mampu membingkai isu, membangun narasi yang meyakinkan, dan menyebarkannya secara efektif—dialah yang memenangi kontestasi ruang publik. Wacana, secara struktural, merupakan rangkaian proposisi yang saling berkaitan dan membentuk kesatuan makna. Maka, kejelasan dan kekuatan penyampaian menjadi sangat penting.

Wartawan senior Ardhi Wardhan mengingatkan bahwa dalam praktiknya, media tidak berdiri di ruang hampa. Di tengah arus oligarki politik dan ekonomi, media sering dihadapkan pada dua sisi yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, mereka dituntut menjaga independensi, menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan adil. Namun di sisi lain, ada tekanan dari pemilik modal, kepentingan politik, serta pertimbangan bisnis yang kadang memengaruhi isi pemberitaan. Dalam situasi seperti ini, konten media—yang semestinya menjadi ruang edukasi publik—berisiko menjadi korban pertarungan kepentingan.

Untuk menelaah lebih lanjut bagaimana media berkontribusi dalam membentuk opini publik terkait isu-isu global seperti proyek BRI Tiongkok, maka penting mengulas secara kritis beberapa pemberitaan dari media arus utama Indonesia. Dalam hal ini, MediaIndonesia.com, Republika.co.id, Kompas.com, dan JawaPos.com dipilih sebagai sampel. Media-media ini

dikenal luas sebagai media kredibel, populer, dan menjadi rujukan informasi masyarakat. Keempatnya juga berada di bawah pengawasan Dewan Pers Indonesia, yang menjaga standar etika dan akurasi dalam pemberitaan.

Tabel 3 Contoh kasus liputan media online di Indonesia tentang proyek BRI

Daily name	Title	News Informant	Content of News
Kompas.com	According to observers, whoever the President of Indonesia is, it is impossible not to cooperate with China. (Rachman, 2020a)	Dinna Wisnu	"China has an undeniable influence throughout the world. Not only in Asia has reached the whole world. Any ruler, whoever is president of Indonesia, will not escape from working together or not cooperating with China. That cooperation option becomes realistic rather than not, "
	LSI survey: 39 percent of respondents consider China's most influential country in Asia. (Rachman, 2020b)	Executive Director of LSI Djayadi Hanan	"So in 2019, China is considered Asia's most influential country. Followed by the United States by 18 percent, Japan has 14 percent, India by 1 percent, and Russia by 1 percent. So those are the five largest countries considered influential in Asia".
Republika.com	Village Minister: 100 Villages in Indonesia cooperate with China (Nur Aini, 2021)	Minister of Villages, development of disadvantaged regions, and Transmigration (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.	"This cooperation is an implementation of the study results of several village heads in Indonesia to several villages in China that have successfully developed various SMEs products, especially in the agriculture sector that is the mainstay of the Chinese government and Indonesia."

Daily name	Title	News Informant	Content of News
	How far are RI-China relations? Here's the Chinese Ambassador's Speech. (Nashrullah, 2018)	Chinese Ambassador to Indonesia Xiao Qian	He mentioned that President Xi Jinping had visited Indonesia twice, while President Joko Widodo had visited China five times. "Their strong leadership has become the basis for the continuation of bilateral partnerships between the two countries," "The relationships of our two countries have far-being relevance beyond bilateral, East Asian, and even Asian levels. This collaboration is also globally significant".
Media Indonesia. com	Four points strengthen China-Indonesia relations. (Sinaga, 2019)	Chinese Ambassador to Indonesia Xiao Qian	Firstly, in high-level meetings, the presidents of China and Indonesia have met seven times and reached a critical consensus in establishing stronger relationships and promoting synergies between development strategies. Second, grow synergies in the development strategy. Third, in 2018 Chinese-Indonesian bilateral trade reached US \$77,4 billion. This position maintains China's status as Indonesia's largest trading partner for eight consecutive years. Fourth is a new chapter in the exchange of people and cultures. In 2018 the number of Chinese tourists visiting Indonesia was more than 2.1 million people.
	RI-China signs three Mega project cooperations. (RI-Tiongkok Tandatangani Kerja Sama Tiga Mega Proyek, 2017)	Indonesia President Joko Widodo	"On this good opportunity, I would like to take advantage of the high-conference Belt and Road Forum this week to create a fresh momentum, especially for the China-Indonesia cooperation in the framework of One Belt One Road, "

Daily name	Title	News Informant	Content of News
Jawapos.com	DPD RI supports the Silk Road cooperation with China. (Suryowati, 2019)	Deputy chairman of the DPD RI Nono Sampono	"In this context, the combination of world maritime vision and axis can be established. Therefore, many things we can collaborate with both China and internationally, "
	Indonesia-China Trade Relations Increasingly Flutter (Sadri, 2017)	Vice President of DLG Exhibition & Convention Group, Zhou Wei,	"The exhibition aims to strengthen and improve mutually beneficial cooperative relations for both countries, especially in economic and bilateral trade. Indonesia's trading activities with China, especially with Shanghai, have been long-lasting,

Jika kita menelusuri pemberitaan media arus utama seperti Mediaindonesia.com, Republika.co.id, dan Jawapos.com, tampak jelas bagaimana konstruksi narasi dibentuk dari perspektif pelaku kebijakan dan pelaksana kerja sama ekonomi Indonesia–Tiongkok. Judul-judul berita di media tersebut lebih menyoroti aspek implementasi kerja sama, bukan polemik atau kontroversinya. Misalnya, Republika.com mengangkat berita berjudul, “Sejauh mana hubungan Indonesia–Tiongkok? Ini kata Dubes Tiongkok” dan “Mendes PDTT: 100 Desa di Indonesia Kerja Sama dengan Tiongkok”. Fokus pemberitaan diarahkan untuk menjelaskan sejauh mana kerja sama ini telah berjalan di lapangan.

Hal serupa juga terlihat di Mediaindonesia.com, yang memilih judul seperti “Empat Poin Penguatan Hubungan Tiongkok–Indonesia” dan “RI–Tiongkok Teken Kerja Sama Tiga Mega Proyek”. Judul-judul ini secara gamblang mencerminkan bahwa kerja sama antarnegara tidak lagi bersifat wacana, melainkan telah berada di tahap implementasi dan eksekusi proyek strategis. Jawapos.com pun mengikuti arah yang sama, misalnya dengan menurunkan berita bertajuk “Hubungan Dagang Indonesia–Tiongkok Makin Berkibar”—menguatkan narasi optimisme terhadap kerja sama ekonomi bilateral ini.

Meski demikian, Jawapos.com juga menyuguhkan dimensi dukungan politik melalui berita seperti “DPD RI Dukung Kerja Sama Jalur Sutra dengan Tiongkok”. Di sini, narasi bergeser pada aspek dukungan institusional. Wakil Ketua DPD RI menjadi narasumber utama, menggarisbawahi bahwa kerja

sama ekonomi Indonesia–Tiongkok tidak hanya didorong oleh eksekutif, tetapi juga mendapat legitimasi politik dari lembaga legislatif.

Namun, narasi berbeda ditampilkan oleh Kompas.com. Dalam berita “Menurut pengamat, siapa pun presiden Indonesia, mustahil tidak bekerja sama dengan Tiongkok” dan “Survei LSI: 39 Persen Responden Anggap Tiongkok Negara Paling Berpengaruh di Asia”, terlihat bahwa Kompas menyoroti aspek geopolitik dan ketergantungan ekonomi secara lebih analitis. Para pengamat dan akademisi dijadikan sumber utama, dengan penekanan pada bagaimana posisi Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi besar di Asia memengaruhi arah kebijakan luar negeri negara-negara seperti Indonesia.

Melalui pendekatan tersebut, Kompas.com seolah ingin menyampaikan bahwa kerja sama dengan Tiongkok bukan semata pilihan bebas, melainkan bagian dari dinamika realpolitik dan ekonomi global. Pilihan tersebut—apakah disadari atau tidak—dianggap rasional dan nyaris tidak terhindarkan dalam percaturan internasional saat ini. Apalagi proyek-proyek dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) membawa efek domino yang signifikan terhadap rantai perdagangan lintas negara.

Dalam pemberitaannya mengenai kerja sama ekonomi Indonesia–Tiongkok, Kompas.com memilih pendekatan yang cukup berbeda. Media ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan aktivis, yakni Dinna Wisnu dan Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI). Pemilihan narasumber tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com berupaya menyajikan pemberitaan berbasis nilai intelektual dan ketepatan data, bukan semata-mata mengikuti narasi pemerintah atau negara mitra kerja sama. Dalam masyarakat modern yang semakin terdidik, pendekatan berbasis data seperti ini sangat dibutuhkan karena dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap isi berita (Asmoro, 2021).

Sebaliknya, tiga media arus utama lainnya, yaitu Mediaindonesia.com, Jawapos.com, dan Republika.co.id, lebih banyak mengutip pernyataan dari tokoh pemerintahan atau pihak yang secara langsung terlibat dalam kerja sama Indonesia–Tiongkok. Narasumber seperti presiden, anggota DPR, duta besar Tiongkok, serta para pelaku bisnis digunakan untuk menggambarkan proses kerja sama secara faktual dari sudut pandang pelaksana kebijakan. Hal ini mencerminkan bahwa ketiga media tersebut lebih menekankan pada kredibilitas narasumber utama sebagai representasi otoritas negara, alih-alih membangun opini melalui analisis pihak ketiga.

Namun, pola argumentasi yang dikembangkan oleh masing-masing media memperlihatkan perbedaan orientasi. Kompas.com dan Jawapos.com, misalnya, lebih menonjolkan pembahasan mengenai gagasan dan visi jangka panjang dari kerja sama ekonomi Indonesia dan Tiongkok. Dalam pemberitaan Kompas.com, para peneliti dan akademisi menggarisbawahi bahwa kerja sama

kedua negara merupakan keniscayaan, mengingat besarnya peran ekonomi Tiongkok dalam tatanan global serta kebutuhan Indonesia untuk memperkuat konektivitas dan infrastruktur.

Senada dengan hal itu, Jawapos.com juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor, terutama di bidang maritim, mengingat karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Dalam konteks ini, proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dinilai mampu membantu Indonesia membiayai pembangunan infrastruktur strategis yang selama ini membutuhkan anggaran besar.

Meski demikian, media juga mengangkat kekhawatiran yang perlu dicermati, seperti potensi ketergantungan terhadap utang luar negeri dan risiko kehilangan kemandirian jika tidak ada alternatif pembiayaan yang dikembangkan. Oleh karena itu, kerja sama Indonesia–Tiongkok melalui skema BRI harus berlandaskan prinsip saling menguntungkan (mutualisme) dan dijalankan secara transparan. Keterbukaan informasi dan pelibatan publik sangat penting agar tidak menimbulkan asumsi negatif. Melalui komunikasi yang jujur dan keterlibatan masyarakat, kerja sama ini dapat dipahami secara lebih komprehensif dan dimanfaatkan secara optimal (Asmoro, 2021).

Pemberitaan Mediaindonesia.com dan Republika.com cenderung menitikberatkan pada aspek implementatif dari kerja sama Indonesia–Tiongkok dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI). Fokus utama pemberitaan mereka adalah pada pelaksanaan kebijakan di lapangan serta sejauh mana kerja sama ekonomi tersebut telah berjalan. Melalui wawancara dengan narasumber dari kalangan pejabat negara, kedua media ini menggambarkan bahwa salah satu bentuk konkret kerja sama BRI adalah pemberdayaan sektor usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk dalam mendukung pariwisata dan memperluas pasar antarnegara. Selain itu, sejumlah konferensi juga digagas sebagai bagian dari upaya memperkuat dan memperjelas arah kerja sama bilateral.

Dalam liputan Mediaindonesia.com, wartawan menghadirkan narasumber penting seperti Presiden Republik Indonesia dan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia. Kehadiran tokoh-tokoh ini dipandang sebagai penanda strategis untuk memperlihatkan keseriusan kedua negara dalam menjalin hubungan ekonomi. Hal ini juga sekaligus menjadi respons terhadap kelompok masyarakat yang selama ini skeptis terhadap kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama bersama Tiongkok. Kritik yang menyebut bahwa Presiden cenderung “lunak” terhadap Tiongkok coba dijawab melalui pemberitaan yang menggaris bawahi bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar dan tujuan yang jelas.

Sikap serupa juga terlihat dalam pemberitaan Republika.com. Media ini berupaya menjelaskan bahwa kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok bukan hanya gagasan, melainkan telah terimplementasi dalam

berbagai bentuk proyek dan program. Meskipun selama ini Republika.com dikenal memiliki basis pembaca dari kalangan umat Islam—yang sebagian di antaranya kerap dikaitkan sebagai kelompok yang berseberangan secara politik dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo—wartawan Republika.com mengindikasikan kejelian dalam menyajikan laporan yang objektif. Mereka menghadirkan fakta-fakta pelaksanaan kerja sama ekonomi yang bersifat substantif dan konstruktif.

Sikap redaksional seperti ini memperlihatkan bahwa dalam ekosistem pemberitaan yang kompleks, media tetap memiliki peran strategis untuk menjembatani pemahaman publik. Dalam konteks ini, Republika.com turut membuktikan bahwa tidak semua narasi yang berkembang di kalangan masyarakat muslim bersifat tunggal atau monolitik. Justru, di balik anggapan umum tentang sikap kritis terhadap hubungan Indonesia–Tiongkok, terdapat berbagai spektrum pandangan yang layak didengar dan dicermati (Asmoro, 2021).

Pendekatan yang diambil Kompas.com dan Jawapos.com dalam memberitakan kerja sama ekonomi Indonesia–Tiongkok memperlihatkan kecenderungan yang lebih moderat dibandingkan media lainnya. Keduanya mengusung strategi *street framing*, yaitu membingkai isu secara langsung melalui peliputan di lapangan dengan cara yang lebih mendidik dan berbasis data. Alih-alih menunjukkan keberpihakan secara eksplisit, wartawan dan redaksi dari dua media ini lebih memilih menyampaikan fakta dan data dari sumber-sumber kredibel, lalu membiarkan pembaca untuk membentuk opini mereka sendiri berdasarkan informasi yang disajikan.

Strategi ini dianggap efektif untuk menjangkau segmen pembaca yang umumnya berasal dari kalangan terdidik dan kelas menengah ke atas, yang memiliki kecenderungan untuk menganalisis informasi secara kritis. Dalam konteks media digital dan media sosial yang sarat dengan disinformasi, pendekatan semacam ini berperan penting dalam membangun wacana publik yang sehat dan berbasis bukti. Ideologi media dan hubungan interaktif antara media dengan audiens turut memengaruhi bagaimana realitas sosial dikonstruksi dan diterima oleh publik.

Berdasarkan analisis terhadap pemberitaan empat media daring utama, yakni Kompas.com, Mediaindonesia.com, Jawapos.com, dan Republika.com, terlihat adanya perbedaan yang mencolok dalam cara mereka menyajikan kerja sama ekonomi Indonesia–Tiongkok dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI). Kompas.com dan Jawapos.com cenderung melihat proyek BRI sebagai suatu keniscayaan geopolitik dan ekonomi yang tidak bisa dihindari, dengan menekankan pentingnya data dan transparansi. Sementara itu, Mediaindonesia.com dan Republika.com lebih berfokus pada aspek implementasi di tingkat masyarakat, dan berupaya menegaskan manfaat konkret dari kerja sama ini.

Perbedaan perspektif ini menegaskan adanya kontestasi wacana di dalam ruang media. Sebagaimana diungkapkan oleh Simon Saragih, wartawan senior Kompas, fenomena resistensi terhadap investor asing bukan hal baru di Indonesia. Ketika Amerika Serikat datang sebagai investor pada era Orde Lama, muncul tuduhan sebagai “antek kapitalis”. Saat Jepang masuk pada dekade 1970-an, meletus demonstrasi mahasiswa yang dikenal sebagai Peristiwa Malari, yang menimbulkan korban jiwa. Kini, kedatangan Tiongkok pun memicu perdebatan terkait isu-isu seperti tenaga kerja asing, visa, hingga alih teknologi.

Saragih menegaskan bahwa setiap era dan investor memiliki tantangan tersendiri, namun bukan berarti menutup pintu investasi. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mengelola berbagai isu tersebut secara bijak dan transparan. Ia juga mencatat bahwa produk-produk Tiongkok kini semakin berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kehadiran investasi Tiongkok telah berkontribusi pada pertumbuhan berbagai sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan kelapa sawit, dan ekspor tambang (Saragih, 2021).

Pemberitaan media massa hakikatnya merefleksikan cara pandang wartawan terhadap suatu peristiwa yang mereka liput. Dalam hal ini, kondisi psikologis dan latar belakang pengetahuan wartawan turut berpengaruh terhadap narasi yang dibangun. Bahasa dan struktur informasi yang digunakan media daring seperti Kompas.com, Mediaindonesia.com, Jawapos.com, dan Republika.com mengamini adanya perbedaan gaya komunikasi yang berkaitan erat dengan segmentasi pembacanya.

Misalnya, Kompas.com dan Jawapos.com cenderung menggunakan bahasa yang lebih ilmiah dan analitis. Hal ini sejalan dengan karakteristik pembacanya yang umumnya berasal dari kalangan berpendidikan dan ekonomi menengah ke atas. Sebaliknya, Republika.com dan Mediaindonesia.com lebih memilih bahasa yang lugas dan mudah dicerna oleh publik luas, sebagai upaya untuk menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang sosial.

Dalam konteks sumber pemberitaan, Mediaindonesia.com, Republika.com, dan sebagian laporan Jawapos.com lebih banyak mengutip narasumber dari kalangan pembuat kebijakan, seperti presiden, pejabat kementerian, anggota parlemen, hingga duta besar. Mereka mengedepankan pelaporan dari narasumber first party yang terlibat langsung dalam kerja sama ekonomi Indonesia–Tiongkok. Misalnya, Jawapos.com pernah memuat laporan berjudul “DPD RI Dukung Kerja Sama Jalur Sutra dengan Tiongkok” yang menyoroti dukungan institusional terhadap proyek BRI demi meningkatkan kesejahteraan nasional.

Sementara itu, Kompas.com menonjolkan pendekatan berbeda. Media ini mengedepankan narasumber dari kalangan peneliti dan akademisi independen, seperti Dinna Wisnu dan Djayadi Hanan, sebagai bentuk upaya untuk menjaga

netralitas pemberitaan. Fokusnya adalah membangun kredibilitas intelektual melalui data dan analisis yang berimbang. Sikap ini mencerminkan pemahaman Kompas.com bahwa di era masyarakat terdidik dan berbasis informasi, akurasi data menjadi landasan utama pembentukan opini publik.

Perbedaan cara pandang juga terlihat dalam pembentukan argumentasi. Kompas.com dan Jawapos.com lebih menitikberatkan pada visi jangka panjang dari kerja sama Indonesia–Tiongkok, termasuk urgensi membangun konektivitas dan alih teknologi. Pandangan Kompas.com, misalnya, menilai bahwa kerja sama ini tidak terhindarkan karena Tiongkok merupakan kekuatan ekonomi global yang sedang berkembang pesat. Oleh karena itu, Indonesia perlu memosisikan diri sebagai mitra strategis dalam konteks yang saling menguntungkan.

Sejalan dengan itu, Jawapos.com menggarisbawahi pentingnya kolaborasi di sektor maritim. Hal ini beralasan mengingat Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Penguatan kerja sama dengan Tiongkok di bidang maritim dan infrastruktur dinilai akan membawa dampak positif terhadap pembangunan nasional, terutama dalam mendukung konektivitas antarpulau.

Dengan demikian, keempat media tersebut merepresentasikan beragam pendekatan dalam menyampaikan isu kerja sama ekonomi Indonesia–Tiongkok. Kompas.com dan Jawapos.com menonjolkan rasionalitas berbasis data dan visi strategis, sedangkan Mediaindonesia.com dan Republika.com lebih fokus pada implementasi nyata dan keterlibatan langsung para pelaku kebijakan. Perbedaan ini mencerminkan dinamika wacana media yang tidak hanya membentuk persepsi publik, tetapi juga mencerminkan posisi ideologis dan segmentasi sosial dari masing-masing media (Asmoro, 2021).

Sementara Mediaindonesia.com dan Republika.com cenderung menyajikan pemberitaan yang bersifat implementatif, fokus utamanya adalah pada bagaimana kerja sama ekonomi Indonesia–Tiongkok, khususnya dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI), diterapkan di lapangan. Salah satu perhatian mereka adalah sejauh mana pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia memetik manfaat dari skema kerja sama tersebut, misalnya dengan memanfaatkan peluang peningkatan kunjungan wisatawan antarnegara sebagai sumber pendapatan tambahan. Selain itu, sejumlah konferensi juga diselenggarakan sebagai upaya merumuskan konsep kerja sama kedua negara secara lebih matang dan strategis.

Pemberitaan di Mediaindonesia.com menempatkan presiden Indonesia dan duta besar Tiongkok sebagai narasumber utama, yang menjadi simbol pentingnya kerja sama ekonomi lintas negara. Sikap serupa ditunjukkan oleh Republika.com, yang dalam laporannya memaparkan realisasi dan capaian konkret dari kerja sama ekonomi bilateral yang telah berlangsung.

Sebaliknya, Kompas.com dan Jawapos.com mengusung pendekatan berbeda melalui pola pemberitaan yang lebih moderat, dikenal sebagai street framing. Alih-alih menyampaikan opini secara eksplisit, kedua media ini memilih menyuguhkan data dan fakta secara utuh, memungkinkan pembaca menyusun kesimpulan secara mandiri. Pendekatan ini bertujuan mengedukasi publik dengan informasi yang terverifikasi, sehingga mendorong terbentuknya wacana publik berbasis data yang kredibel.

Dalam konteks ini, Ardhi Wardhan—wartawan Kedaulatan Rakyat—mengungkapkan pentingnya sikap independen media dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Ia menilai bahwa negara-negara Barat mungkin merasa terganggu oleh ekspansi kebijakan jalur sabuk dan jalur sutra (BRI) yang diinisiasi Tiongkok, mengingat adanya kompetisi kepentingan antarnegara. Namun demikian, menurut Wardhan, media di Indonesia seyogianya mampu bersikap holistik dan mengambil jalan tengah. Pandangan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menimbang peluang maupun tantangan yang ditawarkan oleh kebijakan ekonomi makro dari Tiongkok. Mengingat posisi Indonesia sebagai negara berkembang, setiap peluang kerja sama harus dilihat dari sudut pandang peningkatan daya saing nasional (Wardhan, 2021).

Senada dengan itu, jurnalis Jawa Pos Nouval Widi Asmoro menekankan bahwa di era globalisasi dan modernisasi, kerja sama antarnegara merupakan keniscayaan. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Tiongkok, ia mengakui adanya urgensi untuk melakukan percepatan pembangunan demi mengejar ketertinggalan. Dari sisi manfaat, kerja sama ini memang menjanjikan dampak positif. Namun demikian, Asmoro juga menekankan pentingnya sikap kritis dan pengawasan terhadap implementasi kerja sama tersebut. Ia menyarankan agar seluruh bentuk kolaborasi harus diletakkan dalam kerangka saling menguntungkan (*mutualisme*), menghormati hak serta kewajiban kedua pihak, dan menjamin tidak terjadinya pelanggaran yang merugikan rakyat. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kerja sama tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas (Asmoro, 2021).

Ringkasan

Kebijakan pemerintah Indonesia yang cenderung mengadopsi demokrasi Barat secara tekstual memberikan dampak yang signifikan terhadap pembentukan struktur sistem media nasional. Ditambah dengan pengalaman panjang selama sekitar 50 tahun hidup di bawah rezim otoriter, transisi menuju Era Reformasi telah mendorong masyarakat untuk mencari bentuk kebebasannya sendiri, termasuk dalam ranah informasi dan kebijakan media.

Ide-ide demokrasi yang berkembang di negara-negara Barat secara kuat memengaruhi para intelektual Indonesia, khususnya mereka yang mengenyam pendidikan tinggi di institusi akademik Barat. Kelompok ini kemudian memegang peranan penting dalam memproduksi dan menyebarkan wacana media. Bersamaan dengan itu, sistem media di Indonesia yang cenderung liberal memberikan ruang luas bagi media nasional untuk mengutip dan mengadopsi informasi dari media Barat tanpa proses verifikasi yang ketat. Kurangnya proses pengecekan silang terhadap sumber informasi atau fakta di lapangan menjadikan banyak pemberitaan bersifat bias, terutama yang berkaitan dengan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang digagas Tiongkok.

Media Barat seringkali memberitakan proyek BRI dengan narasi yang mendiskreditkan, seperti tuduhan terkait jebakan utang, dominasi hegemoni Tiongkok, dan penggunaan data dari lembaga internasional seperti IMF tanpa analisis kontekstual. Salah satu contoh yang kerap diangkat sebagai bukti adalah kasus Sri Lanka, yang diklaim gagal mengelola utang proyek infrastruktur dengan Tiongkok. Narasi semacam ini, ketika diadopsi begitu saja oleh media Indonesia, dapat membentuk opini publik yang negatif terhadap proyek BRI di Indonesia.

Akibatnya, persepsi masyarakat menjadi terpengaruh oleh informasi yang belum tentu objektif dan seimbang. Hal ini tidak hanya menciptakan sentimen negatif terhadap kerja sama Indonesia–Tiongkok, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran hubungan bilateral dalam implementasi proyek-proyek strategis BRI di tanah air. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isu-isu yang mewarnai hubungan Indonesia dan Tiongkok, khususnya terkait proyek BRI, sangat kompleks dan memerlukan pendekatan pemberitaan yang lebih kritis, independen, dan berbasis pada verifikasi data.

Pertama, proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dan investasi Tiongkok di Indonesia menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Diskursus ini banyak didorong oleh pemberitaan media daring, yang dijadikan rujukan oleh masyarakat untuk memperkuat argumen masing-masing. Sayangnya, tidak sedikit media di Indonesia yang merujuk pada sumber informasi dari media Barat tanpa telaah kritis. Akibatnya, narasi negatif terhadap Tiongkok yang dibentuk oleh propaganda media Barat dengan mudah mengalir ke dalam opini publik Indonesia. Kondisi ini tentu berisiko jika persepsi masyarakat terbentuk oleh pemberitaan yang tidak independen dan bias terhadap kepentingan geopolitik tertentu.

Kedua, Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adikuasa pasca-runtuhnya Uni Soviet, secara strategis berupaya menjaga dominasinya di kancah global. Tiongkok, yang kian berkembang menuju status negara adikuasa, dipandang sebagai ancaman potensial terhadap hegemoni tersebut.

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh Amerika Serikat untuk membentuk citra negatif Tiongkok, termasuk melalui pemberitaan media, pendanaan terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta program beasiswa yang mendorong generasi muda dari negara-negara berkembang untuk mengenyam pendidikan di Barat. Ketika mereka kembali ke tanah air, secara sadar atau tidak, mereka kerap menjadi corong penyebaran ideologi Barat—atás nama demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pluralisme.

Ketiga, dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, peran lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting dalam membentuk opini publik. Karena itu, Pemerintah Tiongkok idealnya menjalin komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan organisasi keagamaan tersebut. Kolaborasi yang baik akan menjadi sarana untuk menjelaskan manfaat kerja sama Indonesia–Tiongkok secara objektif. Jika muncul isu negatif, maka lembaga keagamaan yang disegani publik ini dapat berperan sebagai penengah dengan menyampaikan klarifikasi dan narasi yang seimbang.

Selain itu, pemerintah Tiongkok perlu memastikan bahwa setiap proyek yang berjalan di Indonesia telah mematuhi ketentuan hukum dan regulasi nasional, termasuk urusan visa kerja, standar kesehatan (seperti sertifikat bebas Covid-19), ketentuan karantina, dan dokumen administratif lainnya.

Sebagai saran konstruktif, pemerintah kedua negara sebaiknya memperhatikan beberapa hal penting. Pertama, isu mengenai keberadaan tenaga kerja asing asal Tiongkok telah menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Hukum dan HAM perlu menjalin koordinasi yang kuat dalam menangani persoalan ini. Kedua, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek BRI perlu memastikan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan nasional, seperti pemberian upah layak, fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, penyediaan makanan yang sesuai standar, serta jaminan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Ketiga, seluruh proyek BRI harus menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan. Artinya, pelaksanaan proyek tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan ekologi, keramahan lingkungan, dan komitmen terhadap isu perubahan iklim, demi menjaga kelestarian bumi.

BAGIAN VIII

Arah dan Pengembangan Wacana

Bagian ini akan menjadi ruang refleksi sekaligus penutup dari pembahasan yang cukup panjang tentang proyek BRI di Indonesia. Bagi saya, inilah saat yang tepat untuk mengambil jeda, menengok kembali temuan-temua, dan mencoba memahami makna di baliknya secara jernih. Bukan semata tentang statistik dan informasi teknis, melainkan tentang pesan-pesan yang muncul darinya. Misalnya tentang dinamika masyarakat, peran media, arah politik, dan bagaimana semuanya saling terkoneksi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam elemen-elemen ini, kita diajak untuk tidak berhenti pada apa yang terlihat. Pertanyaan-pertanyaan relevan tetap perlu diajukan: Apa yang sebenarnya dipikirkan publik tentang BRI? Bagaimana peran media dalam membentuk pandangan itu? Apakah pemerintah cukup hadir dalam ruang digital untuk menjelaskan proyek ini? Dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa memilah informasi yang datang dari berbagai arah?

Pada pembahasan ini terdiri atas empat bagian. Bagian pertama berisi ringkasan hasil yang menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sejak awal. Bagian kedua mengulas kembali proses yang telah dilalui, termasuk pelajaran yang dapat diambil serta maknanya dalam konteks yang lebih luas. Bagian ketiga menjelaskan berbagai keterbatasan yang muncul selama proses berlangsung. Bagian keempat menyampaikan sejumlah gagasan yang dapat menjadi pijakan awal untuk memahami persoalan ini secara utuh dan terbuka.

Bagian yang tidak kalah penting adalah bahwa bagian ini tidak hadir untuk memberi jawaban final. Justru sebaliknya, ia membuka ruang tanya baru. Karena dalam dunia yang terus berubah cepat, memahami proyek seperti BRI tidak cukup hanya sekali baca atau sekali telaah. Perlu diskusi yang berkelanjutan, pembacaan ulang, dan keberanian untuk melihat dari sisi yang berbeda. Di sinilah penutup ini menjadi awal dari pemikiran baru.

Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Pertanyaan yang diajukan sebenarnya biasa saja, bagaimana media membentuk cara pandang publik terhadap proyek BRI di Indonesia? Namun saat ditelusuri lebih jauh, jawabannya jauh dari kata sederhana. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa isu ini menyentuh banyak sisi. Mulai dari bagaimana masyarakat mengekspresikan pendapatnya, pengaruh dinamika politik dalam negeri, hingga peran kepentingan luar negeri yang ikut membentuk arah pemberitaan.

Dari data yang dikumpulkan melalui media sosial, khususnya Twitter, terlihat bahwa mayoritas tanggapan masyarakat terhadap proyek BRI bernada negatif. Dari puluhan ribu cuitan yang dianalisis, lebih dari separuh menunjukkan kekhawatiran. Masyarakat tidak hanya bicara soal investasi, tetapi juga tentang utang, masuknya tenaga kerja asing, dan dominasi perusahaan luar dalam proyek-proyek penting.

Tanggapan negatif ini tidak muncul begitu saja. Ada latar sosial dan politik yang memengaruhinya. Pemilu 2014 dan 2019, misalnya, melahirkan polarisasi tajam antara kelompok pendukung dan penentang pemerintah. Dalam situasi seperti ini, media sosial menjadi ruang yang paling aktif untuk menyuarakan kritik. Kelompok yang berada di luar lingkaran kekuasaan lebih bebas bergerak dan mengisi ruang digital dengan berbagai opini. Mereka lebih terorganisir dan rajin membangun narasi yang memperkuat posisi mereka.

Selain itu, dari hasil wawancara dan telaah terhadap berbagai dokumen, tampak bahwa persepsi publik di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh kampanye dari luar negeri. Beberapa negara yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan Tiongkok ikut menyebarkan narasi tandingan melalui media, organisasi, dan jejaring yang tersebar di berbagai sektor. Mereka memperkenalkan wacana tentang jebakan utang, dominasi ekonomi asing, serta ancaman terhadap kedaulatan nasional.

Pada akhirnya, proyek BRI menjadi isu yang tidak hanya soal ekonomi, melainkan juga soal ideologi dan persepsi kekuasaan. Semua orang merasa punya hak bicara, tetapi tidak semua pendapat mendapat ruang yang setara. Kelompok yang lebih nyaring dan terorganisir lebih mudah membentuk arus besar. Inilah yang membuat pembicaraan tentang BRI sering kali hanya berputar pada ketakutan, kecurigaan, dan asumsi.

Media sosial bukan saja menjadi tempat yang sepenuhnya netral. Juga digerakkan oleh algoritma, dibanjiri oleh berbagai kepentingan, dan sering kali lebih mengutamakan kecepatan penyebaran informasi daripada keakuratan substansi. Dalam suasana seperti ini, pandangan publik cenderung mudah dibentuk, diarahkan, bukan oleh data, melainkan siapa yang paling sering “tampil” di muka publik.

Dari seluruh proses yang telah ditelusuri, satu hal menjadi jelas adalah bahwa proyek sebesar BRI tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pembangunan semata. Diperlukan juga komunikasi yang terbuka dan dapat dipercaya. Disinilah peran penting pemerintah untuk membangun pemahaman, alih-alih kesadaran publik secara jernih dan menyeluruh. Sebab, apabila ruang digital dibiarkan dan dipenuhi oleh suara-suara yang dipenuhi prasangka, proyek sebesar apa pun akan rentan disalahartikan.

Di sinilah pentingnya peran media yang jernih, masyarakat sipil yang aktif, dan lembaga-lembaga yang bersedia menjembatani pengetahuan kepada publik. Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh seberapa besar warga merasa dilibatkan dan memahami arah kebijakan yang sedang berjalan.

Menyusun ulang temuan

Bagian ini bukan sekadar ajakan untuk menyusun ulang temuan yang sudah ada, melainkan ajakan untuk berpikir lebih dalam. Bukan hanya tentang mengulang data atau kutipan, tetapi tentang mencoba menangkap pesan yang mungkin luput terbaca. Baik yang tersembunyi dalam pola, nada, dan kecenderungan wacana. Dari situ, kita mulai melihat bahwa proyek BRI tidak bisa dipahami hanya sebagai agenda pembangunan infrastruktur. Namun, tumbuh menjadi ruang tarik-menarik antara informasi, kekuasaan, dan persepsi publik. dan di sanalah sesungguhnya letak persoalan yang perlu dicermati bersama

Kita bisa belajar bahwa suara publik yang muncul di media sosial merupakan hasil dari banyak faktor. Peran media tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membentuk cara berpikir, mengarahkan perhatian, dan bahkan membentuk emosi kolektif. Maka ketika media arus utama tidak lagi dipercaya, ruang seperti Twitter tentu saja akan menjadi panggung baru yang relatif agak gaduh, syarat emosi, dan logika yang campur aduk. Di sisi sinilah letak pentingnya menjaga keberimbangan informasi.

Penggunaan media sosial sebagai sumber informasi mengindikasikan bahwa ruang digital telah menjadi medan perebutan narasi. Hal-hal semacam ini tengah mengingatkan kita akan pentingnya literasi digital. Masyarakat perlu dibekali kemampuan membaca informasi secara kritis, agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus unggahan dan tren sesaat. Ketika opini publik dibentuk bukan oleh data, melainkan oleh kecenderungan yang sedang “viral,” maka kebenaran bisa dengan mudah tersingkir.

Pada bagian ini juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya pendekatan yang lebih terbuka dalam memahami dinamika sosial. Tidak semua kebenaran dapat dijelaskan dengan angka. Kadang, suara lirih dari masyarakat

yang resah justru membawa pemahaman yang lebih dalam. Maka mendengar, mencatat, dan memberi tempat bagi suara-suara yang sering terpinggirkan adalah langkah penting agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kebutuhan warga.

Terakhir, kita bisa melihat bahwa proyek-proyek besar seperti BRI tidak bisa dilepaskan dari konteks global yang lebih luas. Ketika kekuatan besar seperti Tiongkok dan negara-negara Barat saling memengaruhi persepsi publik, maka negara seperti Indonesia perlu cermat menjaga keseimbangan. Menyerap manfaat dari kerja sama global tanpa kehilangan arah dan kedaulatan menjadi tantangan yang nyata. Maka dari itu, pemahaman yang utuh tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.

Menemukan ruang bermakna

Saya menyadari bahwa tidak ada upaya pengumpulan informasi yang benar-benar sempurna. Selalu ada ruang yang belum terjamah, sudut pandang yang belum tergali, dan tantangan yang tidak terhindarkan dalam proses pencarian makna. Dalam konteks ini, saya perlu menyampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan selama proses menemukan yang bermakna tadi.

Pertama, pada saat situasi pandemi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membatasi banyak hal. Mobilitas menjadi terbatas, interaksi langsung menjadi sulit, dan akses ke lapangan mengalami hambatan. Tentu saja hal ini berdampak pada kelengkapan informasi dan keterhubungan dengan narasumber, terutama mereka yang berada di lokasi proyek atau di luar wilayah Jawa.

Kedua, meskipun teknologi memberi banyak kemudahan, penggunaannya tetap memiliki keterbatasan. Pengumpulan data dari media sosial, khususnya Twitter, memerlukan pemahaman teknis dan ketelitian dalam memilah informasi yang dipandang relevan. Selain itu, Twitter sendiri bukan satu-satunya wadah percakapan publik. Banyak masyarakat Indonesia lebih aktif di platform lain seperti Facebook, YouTube, atau bahkan TikTok. Artinya, apa yang tergambar di Twitter belum tentu mencerminkan seluruh isi suara masyarakat.

Ketiga, pendekatan yang digunakan dalam membaca data cenderung mengikuti sudut pandang tertentu. Meski berusaha untuk terbuka, tetap saja pemilihan cara analisis, pemilahan kata kunci, dan penafsiran narasi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh latar belakang pembaca dan perancangannya. Maka dari itu, penting untuk tidak menganggap hasil ini sebagai gambaran mutlak. Sebaliknya, ini adalah satu potongan dari mozaik besar yang masih terus disusun.

Keempat, ada persoalan lain yang cukup mendasar, yaitu keterbatasan untuk menggambarkan keragaman sudut pandang masyarakat Indonesia. Untuk diketahui, bahwa negara ini sangat luas dan majemuk. Suara dari satu wilayah atau kelompok belum tentu mewakili seluruh pengalaman. Bahkan antara kota dan desa, atau antara generasi muda dan dewasa, bisa memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang mega proyek BRI.

Akhirnya, dengan menyadari hal-hal tersebut, kita dapat membaca hasil dengan lebih bijaksana. Memang, hal ini bukan akhir dari proses memahami, melainkan bagian dari perjalanan yang terus bergerak. Setiap batas yang ditemui justru memberi petunjuk ke arah mana pemahaman kita bisa dikembangkan lebih lanjut. Maka, alih-alih menjadi penghalang, keterbatasan ini sebaiknya dipandang sebagai peluang untuk memperluas pandangan dan memperdalam penelusuran di masa mendatang.

Peluang di masa depan

Bahasa yang berkembang di ruang digital tidak muncul secara tiba-tiba. Penggunaannya dipengaruhi oleh kebiasaan, latar pendidikan, pengalaman hidup, dan dinamika sosial yang terjadi setiap hari. Dalam konteks Indonesia, munculnya sikap negatif terhadap proyek BRI tidak bisa dilepaskan dari iklim demokrasi yang terbuka dan terus bergerak. Sayangnya, ruang terbuka ini sering kali dipenuhi oleh polarisasi, terutama saat memasuki masa-masa politik seperti pemilihan umum.

Kelompok-kelompok yang tidak berada dalam lingkaran pemerintahan cenderung lebih aktif di ruang maya. Mereka memiliki waktu, sumber daya, dan strategi untuk menyuarakan opini secara luas. Sementara itu, pihak yang menjalankan pemerintahan biasanya lebih fokus pada pengelolaan birokrasi dan operasional harian, sehingga peran mereka dalam membangun narasi sering tertinggal. Ketimpangan ini menciptakan ruang kosong yang mudah diisi oleh opini-opini miring yang belum tentu berbasis fakta.

Ke depan, kajian tentang proyek BRI yang berkait kelindan dengan komunikasi publik, masih cukup relevan untuk dikaji ulang. Ada banyak hal yang belum tergali. Pertama, perluasan cakupan media sosial menjadi hal penting. Twitter memang memberikan banyak data, tetapi platform lain seperti TikTok, Instagram, dan YouTube punya karakter audiens dan budaya percakapan yang berbeda. Memahami bagaimana opini terbentuk di tiap platform bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.

Kedua, perlu adanya pendekatan langsung ke masyarakat. Tidak semua warga aktif di media sosial. Survei lapangan, wawancara tatap muka, atau diskusi kelompok dapat melengkapi gambaran yang sudah dikumpulkan dari

ruang digital. Dengan begitu, suara-suara yang tidak terekam secara daring tetap bisa terdengar.

Ketiga, dunia digital terus berubah. Algoritma platform, tren komunikasi, dan pola interaksi masyarakat ikut bergeser dari waktu ke waktu. Maka, pemantauan yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah sentimen publik juga ikut berubah seiring perubahan kondisi sosial-politik dan teknologi.

Selain itu, penguatan kapasitas literasi digital masyarakat perlu terus digalakkan. Informasi di ruang digital semakin padat dan cepat. Tanpa kemampuan menyaring, memilah, dan memahami informasi secara kritis, masyarakat mudah terjebak dalam kesimpulan yang menyesatkan. Literasi digital bukan hanya soal mengenali hoaks, tetapi juga memahami konteks, mengenali sumber terpercaya, dan menghargai perbedaan pendapat.

Yang tidak kalah genting adalah tentang perlindungan terhadap ruang digital itu sendiri. Keamanan data, etika penggunaan media sosial, dan perlindungan terhadap privasi perlu menjadi bagian dari kajian yang diseriusi. Tentu saja, bahwa dunia digital akan membawa manfaat, tapi juga rentan di selewengkan. Maka pengembangan kebijakan publik yang adaptif-alih-alih reaktif, dan berperspektif pada kepentingan bersama menjadi tanggung jawab negara.

Melalui proses refleksi dan penyusunan visi yang lebih jelas tentang arah masa depan, kita diajak untuk memahami bahwa proyek sebesar BRI bukan semata-mata soal pembangunan infrastruktur fisik. Akan tetapi, proyek ini sudah semestinya membuka peluang dan perbaikan cara kita membangun komunikasi sebagai bangsa. Hal ini mencakup bagaimana aspirasi masyarakat dapat dihargai, direspon, dan dilindungi seadil-adilnya, serta memperkuat peran media sebagai penghubung yang membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara, bukan sebaliknya penghalang yang memperlebar jarak informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- 2019 Ad Spend Closes With Positive Trend. (2020). Nielsen.Com. <https://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2020/2019-ad-spend-closes-with-positive-trends/>
- Abbasi, N. A., Hunag, D., & Rao, F. (2021). The Belt and Road Initiative: Analysis of Twitter Communication During Second Belt and Road Forum for International Cooperation. *Journal of Research in Social Sciences*, 9(2), 1–20. <https://doi.org/10.52015/jrss.9i2.113>
- Abdi, A. P. (2021). *Survei SMRC: 84 Persen Warga Tak Percaya Isu Kebangkitan PKI*. Tirto.Id. <https://tirto.id/survei-smrc-84-persen-warga-tak-percaya-isu-kebangkitan-pki-gj3t>
- Adriansyah, Y., & Wu, Y. S. (2020). Comparing the Perceptions of Indonesians and Malaysians Toward the China's Belt and Road Initiative: Facts and Trends. *Revista UNISCI*, 2020(53), 59–76. <https://doi.org/10.31439/UNISCI-83>
- Agustina, W. (2021). *Terungkap, Indonesia Punya Media Massa Terbanyak di Dunia*. Nasional.Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1059285/terungkap-indonesia-punya-media-massa-terbanyak-di-dunia>
- Ahmed, Z. S., Rojratanakiat, S., & Taekasem, S. (2019). The China-Pakistan Economic Corridor in Social Media: A Critical Discourse Analysis. In *CPD Perspectives*. Figueroa Press. https://www.uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/CPEC_Twitter_Discourse_Analysis_China_Pakistan_Ahmed_Rojratanakiat_Taekasem.pdf
- Akçay, N., & Qingye, T. (2020). Turkey's Perceptions of China's Belt and Road Initiative (2013–2017): Media and Think-Tanks Discourse Analysis. *China Report*, 56(2), 1–12. <https://doi.org/10.1177/0009445520916877>
- Akhtar, N., Pratt, C. B., & Hu, Y. (2019). Sustainability of the Belt and Road Initiative: An Integrated, Conceptual Framework for Instructional

- Communication in China's Universities. *Sustainability*, 11(6789), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su11236789>
- Amali, Z. (2020). *Gairah Pembangunan Infrastruktur Jokowi yang Tak Pedulikan Pandemi*. Tirtto.Id. <https://tirtto.id/gairah-pembangunan-infrastruktur-jokowi-yang-tak-pedulikan-pandemi-fDFd>
- Anunne, U. K., Phuong Thuy, P. N., Yin Yan, J. T., & Lifeng, Y. (2019). Framing Analysis of Belt and Road Initiative Coverage in Major Nigerian, Malaysian, and Vietnamese Newspapers. *European Scientific Journal ESJ*, 15(29), 1–20. <https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n29p1>
- Arifon, O., Huang, Z. A., Zheng, Y., & Zyw Melo, A. (2019). Comparing Chinese and European Discourses regarding the “Belt and Road Initiative.” *Revue Française Des Sciences de l’information et de La Communication*, 17. <https://doi.org/10.4000/rfsic.6212>
- Aris, S. (2016). One Belt, One Road: China's Vision of “Connectivity.” In *CSS Analysen zur Sicherheitspolitik* (Vol. 195, Issue September). <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-a-010717707%0A>
- Aslam, S., Ali, A., & Farooq, M. (2020). Framing of China Pakistan Economic Corridor (CPEC) in Elite Press of India and Afghanistan (2015-2017). *Asian Social Science*, 16(7), 57. <https://doi.org/10.5539/ass.v16n7p57>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Persentase Penduduk Miskin Lampung September 2020 Naik Menjadi 12,76 persen*. Bps.Co.Id. <https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/944/persentase-penduduk-miskin-lampung-september-2020-naik-menjadi-12-76-persen.html>
- Bagus, R. (2020). *Data Internet di Indonesia dan Perilakunya Tahun 2020*. Teknoia. Com. <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19>
- Banker, S. (2016). A Brief Review of Sentiment Analysis Methods. *International Journal of Information Sciences and Techniques*, 6(1/2), 89–95. <https://doi.org/10.5121/ijist.2016.6210>
- Baxter, T. (2020). *How Western Media Sees the Belt and Road*. Chinachannel. Org. <https://chinachannel.org/2020/02/17/bri-media/>
- Benny G. Setiono. (2008). *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Transmediapustaka.
- Berger, P. and L. (1991). The social construction of “religion” and its limits: A critical reading of Timothy Fitzgerald. In *Penguin Book* (Vol. 24, Issue 2). Penguin Press. <https://doi.org/10.1163/157006812X634872>
- Bergman, T., & Schufle, J. A. (2017). The Belt Road Initiative: Impact and Implication. In T. K. G. L. T. O. T. C. J. Y. X. Yi (Ed.), *Chemical Lectures of H.T. Scheffer* (pp. 9–45). https://doi.org/10.1007/978-94-011-2494-2_2

- Bhaskara, I. L. A. (2019a). *Ekspansi Proyek OBOR Cina, Indonesia Diminta Waspada Jebakan Utang*. Tirto.Id. <https://tirto.id/ekspansi-proyek-obor-cina-indonesia-diminta-waspada-jebakan-utang-dnpo>
- Bhaskara, I. L. A. (2019b). *Ekspansi Proyek OBOR Cina, Indonesia Diminta Waspada Jebakan Utang*. Tirto.Id. <https://tirto.id/ekspansi-proyek-obor-cina-indonesia-diminta-waspada-jebakan-utang-dnpo>
- Bhatia, S., Sharma, M., & Bhatia, K. K. (2018). Sentiment Analysis and Mining of Opinions. *Studies in Big Data*, 30(May), 503–523. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60435-0_20
- BPS. (2021). *Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt)*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html>
- Brown, R. A. (2005). China and globalization. In *The Chinese and Indian Corporate Economies*. <https://doi.org/10.4324/9781315680828-9>
- Brugier, C. (2014). China's Way: The New Silk Road. *European Union Institute for Security Studies*, May, 1–4. www.silkroadproject.org
- Buckley, P. J. (2020). China's Belt and Road Initiative and the COVID-19 crisis. *Journal of International Business Policy*, 3(3), 311–314. <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00063-9>
- Bugin, B. (2001). *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Farian Kontemporer*. Raja Grafindo Persada.
- Burke, J. (1995). The Silk Road. *Scientific American*, 273(5), 109–110. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican1195-109>
- Butts, C. T. (2008). Social network analysis: A methodological introduction. *Asian Journal of Social Psychology*, 11(1), 13–41. <https://doi.org/10.1111/j.1467-839X.2007.00241.x>
- Cahyani, D. R. (2021). *5 Negara Pemberi Utang Terbanyak ke Amerika Serikat, Siapa Saja?* Tempo.Com. <https://dunia.tempo.co/read/1512149/5-negara-pemberi-utang-terbanyak-ke-amerika-serikat-siapa-saja>
- Cai, P. (2017). Understanding China's Belt and Road Initiative. *Lowy Institute*, March, 1–26. [https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding China's Belt and Road Initiative_WEB_1.pdf](https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding%20China's%20Belt%20and%20Road%20Initiative_WEB_1.pdf)
- Cakti, A. (2019). *Capaian Periode Pertama Jokowi Membangun Infrastruktur Tani dan Air*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/1121158/capaian-periode-pertama-jokowi-membangun-infrastruktur-tani-dan-air>
- Cao, M., & Alon, I. (2020). Intellectual structure of the belt and road initiative research: A scientometric analysis and suggestions for a future research

- agenda. *Sustainability (Switzerland)*, 12(17), 1–41. <https://doi.org/10.3390/SU12176901>
- Cao Yuning 曹雨凝, Dai Zhongxun 戴中珣, Li Xiang 李响, Ning Yingnan 宁英男, and S. Y. 舒钰嫣. (2019). *How Do South African Media Report the Belt and Road Initiative?* Chinaafricaproject.Com. <https://chinaafricaproject.com/student-xchange/how-do-south-african-media-report-the-belt-and-road-initiative/>
- Castells, M. (2011). *The Rise of The Network Society*. Blackwell Publishers.
- Chaffee, C. R. B. S. H. (1987). *Handbook of Communication Science*. Sage Publication.
- Chance, Alek & Mafinezam, A. (2016). American Perspectives on the Belt and Road Initiative Sources of Concern and Possibilities for Cooperation. In *Institute for China- America Studies*. <https://chinaus-icas.org/wp-content/uploads/2017/02/American-Perspectives-on-the-Belt-and-Road-Initiative.pdf>
- Chandra, J. K., Cambria, E., & Nanetti, A. (2020). One Belt, One Road, One Sentiment? A Hybrid Approach to Gauging Public Opinions on the New Silk Road Initiative. *IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDMW, 2020-Novem*, 7–14. <https://doi.org/10.1109/ICDMW51313.2020.00011>
- Chen, S. (2018). *The Chinese Belt And Road Initiative: A Framing Analysis Of BRI Coverage In The People's Daily* (Issue September). Tilburg University.
- Chen Xinyi 陈昕怡, Chi Jiaying (Lucy) 池佳颖, Wu Xunheng 吴训恒, and X. K. (2019). *Why the Kenyan Media Portrays Negative Sentiment About the Mombasa-Nairobi Railway*. Chinaafricaproject.Com. <https://chinaafricaproject.com/student-xchange/why-the-kenyan-media-portrays-negative-sentiment-about-the-mombasa-nairobi-railway/>
- Chernyaev, M. V., Egorycheva, E. A., Korenevskaya, A. V., & Vasil, A. (2020). The Belt and Road Initiative as a New China's Foreign Economic Policy towards the ASEAN Countries. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(3), 374–392.
- CNN Indonesia. (2021). *Survei: 46,6 Persen Warga Percaya PKI Bangkit di RI*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210930120301-20-701458/survei-466-persen-warga-percaya-pki-bangkit-di-ri>
- cnnindonesia.com. (2019a). *Daftar 28 Proyek Rp1.296 T yang Bakal "Dijual" ke China*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190320203641-92-379253/daftar-28-proyek-rp1296-t-yang-bakal-dijual-ke-china>
- cnnindonesia.com. (2019b). *Riset Oxford: Buzzer Indonesia Dibayar Rp1-50 Juta Giring Isu*.

- Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191006170414-12-437255/riset-oxford-buzzer-indonesia-dibayar-rp1-50-juta-giring-isu>
- Cohen, D. (2017). The Impact of Chinese National Identity on Sino-South Korean Relations. *Joint US-Korea Academic Studies*, 114–128. http://keia.org/sites/default/files/publications/jointus-korea_17_digital_p2ch3.pdf
- Comor, E. (2001). Harold Innis and “the Bias of Communication.” *Information Communication and Society*, 4(2), 274–294. <https://doi.org/10.1080/13691180110044533>
- Conboy, M. (2004). *Journalism A Critical History*. Sage Publications,.
- Cox, M., Majid, T. S. M., Jie, Y., Yan, J., Hamzah, H., Jusoh, S., Casarini, N., Loong, P., Tay, K., & Pongsudhirak, T. (2018). China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia. *LSE Ideas; CIMB ASEAN Research Institute, October*, 1–52. <http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-China-SEA-BRI.pdf>
- Crawford, D. (2020). Chinese Southeast glob capitalism : Asian cultures, and region the economic alisation. *Third World Quarterly*, 21(1), 69–86.
- Creemers, R. (2013). Media control with Chinese characteristics. *Routledge Handbook of Media Law, October 2011*, 269–284. <https://doi.org/10.4324/9780203074572.ch15>
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- crf.org. (2019). *China’s Digital Silk Road: Strategic Technological Competition and Exporting Political Illiberalism*. Cfr.Org. <https://www.cfr.org/blog/chinas-digital-silk-road-strategic-technological-competition-and-exporting-political>
- Cui Fanglei. (2018). A Study of ICT Connectivity for the Belt and Road Initiative in China- Central Asia Corridor. In *Quality Education in Western China (Chinese)* (Vol. 2). <http://www.unescap.org/sites/default/files/BRI.pdf>
- Dagtas, B. (2019). At the Crossroads of the New Silk Road : News Discourses in the Turkish Press. *Communication and the Public*, 4(4), 276–290. <https://doi.org/10.1177/2057047319896214>
- Dai, N. (2020). Research on Central Asian Chinese Media Against the Background of the Belt and Road Initiative. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 378 6th International Conference*

- on Education, Language, Art and Inter-Cultural Communication (ICELAIC 2019), 378(Icelaic), 787–790. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.191217.239>
- Damuri, Y. R., Perkasa, V., Atje, R., & Hirawan, F. (2019). Perceptions and Readiness of Indonesia Towards the Belt and Road Initiative: Understanding Local Perspectives, Capacity, and Governance. In *Centre for Strategic International Studies*. https://www.csis.or.id/uploads/attachments/post/2019/05/23/CSIS_BRI_Indonesia_r.pdf
- Darini, R. (2018). Nasionalisme Etnis Tionghoa Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 14(02). <https://doi.org/10.25134/equi.v14i02.1129>
- Das, S. B. (2017). *OBOR's Digital Connectivity Offers Both Benefits and Risks* (Issue 60). Davis, S. J. B. and D. K. (2011). *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future* (Wadsworth Series in Mass Communication and Journalism) (6th ed.). Cengage Learning.
- De Castro, R. C. (2016). The Challenge of Conflict Resolution in the South China Sea Dispute: Examining the prospect of a Stable Peace in East Asia. *International Journal of China Studies*, 7(1), 23–51.
- De Jaegher, H. (2015). How We Affect Each Other. *Journal of Consciousness Studies*, 22(1– 2), 112–132. <https://doi.org/0803973233>
- Deng, F. (2020). Computerized corpus keyword approaches to evaluation: A case study of evaluative attitudes of “the Belt and Road” reports in mainstream media of China and America. *International Journal of Electrical Engineering Education*, 483. <https://doi.org/10.1177/0020720920923303>
- Deng, Y., & Moore, T. G. (2004). China Views Globalization: Toward a New Great-Power Politics? *Washington Quarterly*, 27(3), 117–136. <https://doi.org/10.1162/016366004323090296>
- Deqiang, Ji and Zhengrong, H. (2018). The Belt and Road Initiative : New Media for a Dialogue of Civilizations. In *Dialogue of Civilizations Research Institute* (Issue January).
- Deranty, J.-P. (2009). *Beyond Communication. A Critical Study of Axel Honneth's Social Philosophy*. Koninklijke Brill NV.
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>
- Djankov, Simeone & Miner, S. (2016). *China's Belt and Road Initiative-Motives, Scope, and Challenges*. Peterson Institute for International Economics.
- Dorff, P. L. (n.d.). *Assessing China's Digital Silk Road Initiative A Transformative*

- Approach to Technology Financing or a Danger to Freedoms?* Cfr.Org. Retrieved February 22, 2021, from <https://www.cfr.org/china-digital-silk-road/>
- Duchesne, S. R. (2018). *International Factors and Rising Authoritarianism in Southeast Asia : China's Belt and Road Initiative and the role of elite coherence in Malaysia and Indonesia*.
- EJN Staff. (2019). *Reporting On The Belt and Road: Journalists Seek More Cross-Border Collaboration*. Earthjournalism.Net/. <https://earthjournalism.net/program-updates/reporting-on-the-belt-and-road-journalists-seek-more-cross-border-collaboration>
- Erlansari, A. (2018). Konsep Visualisasi Data menggunakan Social Network Analisis (SNA). *Seminar Nasional Inovasi*, 2018. <http://capdigital.com/strategies/big...>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). *Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling*. 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Evers, H.-D., & Menkhoff, T. (2018). China's Belt and Road Initiative and Aviation. *Southeast Asian Social Science Review*, 3(2), 8–29.
- Fadillah, Dani; Lin, L. Z. and D. H. (2019). Social Media and General Elections in Malaysia 2018 and Indonesia 2019. *Jurnal Komunikasi ISKI*, 04(01), 1–8.
- Fadillah, D. (2016). Komodifikasi Seksual Dalam Kepentingan Ekonomi Portal Berita Online. *Informasi*, 45(2), 155. <https://doi.org/10.21831/informasi.v45i2.7990>
- Fadillah, D. (2020). Belt Road Initiative in the Simulacra Analysis (Indonesia - China Relationship in the Perspective of Indonesian Students in Nanjing City). *Jurnal ASPIKOM*, 5(1), 63–71.
- Fadillah, D., & Jandevi, U. (2020). Media-social behavior of Muhammadiyah members in China in the framework of Alexander Wendt's international communication constructivism. *Journal of Social Studies (JSS)*, 16(1), 51–64. <https://doi.org/10.21831/jss.v16i1.34604>
- Fairclough, N. L. (1985). Critical and descriptive goals in discourse analysis. *Journal of Pragmatics*, 9(6), 739–763. [https://doi.org/10.1016/0378-2166\(85\)90002-5](https://doi.org/10.1016/0378-2166(85)90002-5)
- Fatmاتيwi, L. N. (2017). Community Of Common Destiny Sebagai Platform Kebijakan Luar Negeri China Dalam Merespon Globalisasi Ala Barat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 14–34.
- Fedorenko, V. (2013). *The New Silk Road Initiatives in Central Asia*. Rethink Institute. Fell, L. (2019). *Translation and Exegesis : Chinese State Media for*

- the English Reader : A Case Study of People s Daily Zhong Sheng Editorials on the Belt and Road Initiative. October, 109.*
- Finance, O. B. A. (2018). *The Belt and Road Initiative in the global Trade, Investment and Finance Landscape*. https://doi.org/10.1787/bus_fin_out-2018-6-en
- Fitriani, E. (2018). China's Belt and Road Initiative (BRI): an Indonesian Perspective. In *China: BRI o el nuevo camino de la seda*.
- Flyvbjerg, B. (2009). Survival of the unfittest: Why the worst infrastructure gets built-and what we can do about it. *Oxford Review of Economic Policy*, 25(3), 344–367. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grp024>
- Front, S. S. (2019). 《社会科学战线》网络首发论文. 社会科学战线, 6. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/22.1002.C.20190521.0953.002.html>
- Fuchs, C. (2018). Karl Marx & communication @ 200: Towards a Marxian theory of communication. *TripleC*, 16(2), 518–534. <https://doi.org/10.31269/triplec.v16i2.987>
- Fuchs, C., & Mosco, V. (2015). Marx in the Age of Digital Capitalism. In C. F. and V. Mosco (Ed.), *Marx in the Age of Digital Capitalism* (p. 544). Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004291393>
- Gao;, C.-K. L. ;Hui Z. Y., & Wu, L. (n.d.). ICT in Education and Implications for the Belt and Road Initiative. In C. Looi, H. Zhang, Y. Gao, & L. Wu (Eds.), *Lecture Notes in Educational Technology* (The series, pp. 3–15). Springer. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-6157-3>
- Garcia-Herrero, A., & Xu, J. (2019). Countries' Perceptions of China's Belt and Road Initiative: A Big Data Analysis. *SSRN Electronic Journal*, February, 1–9. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3430318>
- Ge, J., Alonso Vazquez, M. & Gretzel, U. (2018). Sentiment Analysis: a review. In *Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality: New Perspectives, Practice and Cases*,. Routledge.
- Geethanjali, Nataraj and Sekhani, R. (2015). China's One Belt One Road, An Indian Perspective. *Economic & Political Weekly*, 50(49), 67. <https://www.epw.in/journal/2015/49/notes/chinas-one-belt-one-road.html>.
- Gezikol, B., Onur, T., & Tunahan, H. (2020). The Codes of Belt and Road Initiative: a Media Content Analysis. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 19(75), 1507–1516. <https://doi.org/10.17755/esosder.675958>
- Gong, S., & Gu, J. (2019). *The Impact of the Belt and Road Initiative Investment in Digital Connectivity and Information and Communication Technologies on Achieving the SDGs. K4D Emerging Issues Report* (Issue March).

- Gramsci, A. (1971). *From Prison Notebooks*. Lawrence and Wishart. Groendveldt, W. (2009). *Nusantara dalam Catatan Tionghoa*. Komunitas Bambu.
- Group, E. (2020). The Digital Silk Road: Expanding China's Digital Footprint. In *Eurasia Group* (Issue April). <https://www.eurasiagroup.net/files/upload/Digital-Silk-Road-Expanding-China-Digital-Footprint.pdf>
- Gunn, G. C. (2020). China's Globalization and the Belt and Road Initiative. In *Politics and Development of Contemporary China* (pp. 123–138). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-22289-5>
- Guo, M. (2017). Building the People-to-people Bond in the Belt and Road Initiative: A Case Study of Digital Visual Communication. *International Conference on Education Innovation and Social Science (ICEISS 2017)*, 157(Iceiss), 241–244. <https://doi.org/10.2991/iceiss-17.2017.58>
- Guo, S., & Wang, D. (2020). News Production and Construal Level: A Comparative Analysis of the Press Coverage of China's Belt and Road Initiative. *Chinese Journal of Communication*, 0(0), 1–20. <https://doi.org/10.1080/17544750.2020.1816556>
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Haiqing, H. (2018). China's Image in the Belt and Road Initiative: Case Study of Pakistan and India. In *CENTRE FOR EAST AND SOUTH-EAST ASIAN STUDIES*. Lund University.
- Hakim, S. (2018). *Imparsial: Isu komunisme hanya komoditas politik*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/754760/imparsial-isu-komunisme-hanya-komoditas-politik>
- Hamna, D. M. (2018). Konvergensi Media Terhadap Kinerja Jurnalis (Studi Kasus: Fajar Tv Dan Fajar Fm). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 19(1), 58–83. <https://doi.org/10.24252/jdt.v19i1.5911>
- Handinoto. (2008). *Perkembangan Bangunan Etnis Tionghoa di Indonesia (Akhir Abad ke 19 sampai tahun 1960-an)*.
- Hassan, N. A., Tunku, U., Rahman, A., & Ismail, M. M. (2020). Public Perceptions Towards Belt and Road Initiative (BRI) in Malaysia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(8), 9201–9213. <https://doi.org/10.37200/IJPR/2418/PR280910>
- Hatef, A., & Luqiu, L. R. (2018). Where does Afghanistan fit in China's grand project? A content analysis of Afghan and Chinese news coverage of the One Belt, One Road initiative. *International Communication Gazette*, 80(6), 551–569. <https://doi.org/10.1177/1748048517747495>
- He, A. (2020). The Belt and Road Initiative: Motivations, financing, expansion

- and challenges of Xi's ever-expanding strategy. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 4(1), 139–169. <https://doi.org/10.24294/jipd.v4i1.1180>
- Herdiansah, A. G. and, & Sumadinata, W. S. (2019). Indonesia's Political Culture in The New Digital Age: A Preliminary Discussion. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 32(4), 378–389.
- Herrero, A. G., & Xu, J. (2017). China's Belt and Road Initiative: Can Europe Expect Trade Gains? *China and World Economy*, 25(6), 84–99. <https://doi.org/10.1111/cwe.12222>
- Hill, D. T., & Sen, K. (2005). The Internet in Indonesia's New Democracy. In *Routledge*. Routledge.
- Hoay, K. T. (2001). *Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia*. KP.
- Hong, L., & Dalong, J. (2018). *The Belt and Road Initiative* (Issue November 2017). <https://doi.org/10.2991/icpm-18.2018.6>
- Hong, Y. (2020). Socialist political economy with Chinese characteristics in a new era. *Socialist Political Economy*, 3(2), 259–277. <https://doi.org/10.1108/cpe-10-2020-0017>
- Hong, Z. (2018). China's One Belt One Road: An Overview of the Debate. In T. C. Tjong (Ed.), *The ISEAS – Yusof Ishak Institute* (Issue 6). <https://doi.org/10.1355/9789814376440-014>
- Hongxiu, L. (2018). Public Diplomacy in the Belt and Road Initiative within the New Media : Theories and Practices. *Athens Journal of Mass Media and Communication*, 4(3), 219– 236.
- Hu, L. (2019). External Communication Research of the Belt and Road Initiative - Comparative Analysis of The Relevant Reports on The Belt and Road Initiative in China Daily, CNN and CNBC. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 351(Mmetss), 615–623.
- Huadong, Guo.; Zeeshan Shirazi.; Liang Dong, Li. J. (2018). DBAR – An International Science Program for the Digital Belt and Road. *Perspectives*, 32(3), 173–182.
- Hudayah, Nur and Winarni, R. (2014). Indonesian Government Policy Influence on the Lives of Ethnic Chinese in the Political, Social Cultural, and Economic in the Jember district the Old Order up to the Reform period 1998-2012. *Publika Budaya*, 2(2), 19–31. <https://media.neliti.com/media/publications/190967-ID-pengaruh-kebijakan-pemerintah-indonesia.pdf>
- Idris, A. (1997). *Biografi Populer Mochammad Yusuf: Pengobatan Kanker Pendekatan Tradisional Cina dan Modern*. Yayasan Bina Bangsa.
- Idris, M. (2016). *2 Tahun Jokowi-JK, Realisasi Investasi China Naik Tajam*.

- Finance.Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3329683/2-tahun-jokowi-jk-realisisi-investasi-china-naik-tajam>
- Inglehart, R., & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have- Nots and Cultural Backlash. In *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2818659>
- Jacob, A. G. (2010). Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State. Cambridge, UK, Cambridge University Press, (2008), ISBN: 978-0521898102. *Journal of Asian Economics*, 21(2), 233–234. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2009.12.009>
- Jacobs, S. K. (2015). Aproaching Communication With Marx: On The Symbolic Reproduction of Social relations [Boise State University]. In *Metrologia: Vol. mey* (Issue 5). http://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=en&SID=5BQIj3a2MLaWUV4OizE%0Ahttp://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_
- Jan, I., Mehmood, T., & Hussain, S. (2018). American, Indian and Chinese Media on “Belt and Road Initiative.” *Global Social Sciences Review*, III(IV), 31–48. [https://doi.org/10.31703/gssr.2018\(iii-iv\).03](https://doi.org/10.31703/gssr.2018(iii-iv).03)
- Jandevi, U. (2019). New Media for Increasing Political Participation in Indonesia. *International Journal of Communication and Society*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v1i1.19>
- Jetin, B. (2018). “One Belt-One Road Initiative” and ASEAN Connectivity: Synergy Issues and Potentialities. In *China’s Global Rebalancing and the New Silk Road* (Issue 30). https://doi.org/10.1007/978-981-10-5972-8_12
- Jia, W. (2009). “Chiglobalization? A Cultural Argument” in *Greater China in an Era of Globalization* (S. G. and B. Guo (Ed.)). Lexington Books.
- Jia, W. (2017). *Now, Globalization With Chinese Characteristics*. Yaleglobal. Yale.Edu. <https://yaleglobal.yale.edu/content/now-globalization-chinese-characteristics>
- Johnson, C. K. (2016). President Xi Jinping’s “Belt and Road” Initiative A Practical Assessment of the Chinese Communist Party’s Roadmap for China’s Global Resurgence. In *Center for Strategic & International Studies* (Issue March).
- Jomo, K. S., & Folk, B. C. (2013). Ethnic business: Chinese capitalism in Southeast Asia. In *Ethnic Business: Chinese Capitalism in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.4324/9780203412312>

- Junxian, G., & Yan, M. (2016). China's New Silk Road: Where Does It Lead? *Asian Perspective*, 40(1), 105–130. <https://doi.org/10.1353/apr.2016.0004>
- Kadi, T. H. El. (2019). *The Promise and Peril of the Digital Silk Road*. Chathamhouse. Org. <https://www.chathamhouse.org/2019/06/promise-and-peril-digital-silk-road>
- Kaiqiang, X., & Chen, L. (2013). A Brief Analysis of New Media Pushing “The Belt and Road” Initiative. *Journal of Contemporary Educational Research Review Article*, 3(4), 47–50.
- Kamrany, N. (2015). *China's Rise to Global Economic Superpower*. Huffington Post. http://www.huffingtonpost.com/nake-m-kamrany/chinas-rise-to-global-eco_b_6544924.html
- Kang, L., Peng, F., Zhu, Y., & Pan, A. (2018). Harmony in Diversity: Can the One Belt One Road Initiative Promote China's Outward Foreign Direct Investment? *Sustainability (Switzerland)*, 10(9), 1–28. <https://doi.org/10.3390/su10093264>
- Karman. (2014). Monopoli Kepemilikan Media & Lenyapnya Hak Publik. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 5(1), 69–84. <https://media.neliti.com/media/publications/233799-monopoli-kepemilikan-media-lenyapnya-hak-950f992e.pdf>
- Karnia, K. (2012). China's Capitalism. *Warsaw Forum of Economic Sociology*, 3(5), 84–111.
- Kencana, M. R. B. (2018). 4 Tahun Memimpin, Jokowi-JK Bangun Lebih dari 1 Juta Rumah.
- Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3673023/4-tahun-memimpin-jokowi-jk-bangun-lebih-dari-1-juta-rumah>
- Khairani, Bannati. Khafivah, Diah Nur and Susanti, R. W. (2019). Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Belt And Road Initiative (BRI) Republik Rakyat Tiongkok. *Prosiding Senas POLHI Ke-2 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 53(9), 295–310.
- Khan, M. K., Sandano, I. A., Pratt, C. B., & Farid, T. (2018). China's Belt and Road Initiative: A global model for an evolving approach to sustainable regional development. *Sustainability (Switzerland)*, 10(11), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su10114234>
- King, K. (2020). China–Africa Education Cooperation: From FOCAC to Belt and Road. *ECNU Review of Education*, 3(2), 221–234. <https://doi.org/10.1177/2096531119889874>
- Klinger, J. M. (2017). The Uneasy Relationship between “China” and “Globalization” in Post-Cold War Scholarship. In *Beyond Neoliberalism* (pp. 215–233). https://doi.org/10.1007/978-3-319-45590-7_13

- Kobayashi, T., Jung, S., Linton, N. M., Kinoshita, R., Hayashi, K., Miyama, T., ... Nishiura, H. (2020). Communicating the Risk of Death from Novel Coronavirus Disease (COVID-19). *Journal of Clinical Medicine*, 9(2), 580. *Journal of Clinical Medicine*, 9(2), 580.
- Kopper, Ákos and Peragovics, T. (2019). Overcoming the Poverty of Western Historical Imagination: Alternative Analogies for Making Sense of the South China Sea Conflict. *European Journal of International Relations*, 25(2), 360–382. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1354066118780996>
- Kosandi, M. (2014). China's Maritime Silk Road and Indonesia's Maritime Nexus Policies: Towards Policy Convergence? *International Conference on Social Politics, August*, 875–883.
- Koto, F., & Rahmaningtyas, G. Y. (2018). Inset lexicon: Evaluation of a word list for Indonesian sentiment analysis in microblogs. *Proceedings of the 2017 International Conference on Asian Language Processing, IALP 2017, 2018-Janua*, 391–394. <https://doi.org/10.1109/IALP.2017.8300625>
- Kunavut, K. A. O. and D. L. (2018). Belt and Road Initiative (BRI): Enhancing ICT Connectivity in China-Central Asia Corridor †. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 2(1), 1–26. <https://doi.org/10.24294/jipd.v2i1.164>
- Kurniawan, D., Iriani, A., & Manongga, D. (2020). Pemanfaatan Social Network Analysis (Sna) Untuk Menganalisis Kolaborasi Karyawan Pada Pt. Arum Mandiri Group. *Jurnal Transformatika*, 17(2), 149. <https://doi.org/10.26623/transformatika.v17i2.1646>
- Kusdarjito, C. (2019). China's Belt and Road Initiatives and Indonesia's Maritime Fulcrum: Building Scenarios for Economic Multipolarity in South East Asia. *2nd International Conference on Banking, Accounting, Management and Economics (ICOBAME 2018)*, 86(Icobame 2018), 42–47.
- Kuteleva, A., & Vasiliev, D. (2020). China's Belt and Road Initiative in Russian Media: Politics of Narratives, Images, and Metaphors. *Eurasian Geography and Economics*, 1–25. <https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1833228>
- Kuwado, F. J. (2018). 4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/14144381/4-tahun-jokowi-jk-dan-catatan-pembangunan-infrastruktur?page=all>
- Lahadalia, B. (2021). Mengupas Kerja Sama Investasi China di Indonesia. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investasi-china-di-indonesia>
- Laruelle, M. (2018). China's Belt and Road Initiative and Its Impact in Central Asia. In *The George Washington University Central Asia Program*. Central Asia Program.

- Leckey, A. (2017). *Western Media Coverage About Belt and Road Gains Momentum*. Shanghaidaily.Com. <https://archive.shine.cn/opinion/Western-media-coverage-about-Belt-and-Road-gains-momentum/shdaily.shtml>
- Lehman Brown. (2017). The Belt and Road Initiative: Country Profiles. In *Lehman Brown International Accountants* (Vol. 6, Issue 2). <http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/One-Belt-One-Road/The-Belt-and-Road-Initiative-Country-Profiles/obor/en/1/1X000000/1X0A36I0.htm>
- Lele, A., & Roy, K. (2019). *Analysing China's Digital And Space Belt And Road Initiative* (No. 54). Institute for Defence Studies and Analyses.
- Leonardo, O. (2020). Aalisis Framing Media Tiongkok Dan India Terhadap Kerjasama China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) Tahun 2015-2019. In *Universitas Pertamina*. Universitas Pertamina.
- Li, W. (2021). Research Proposal of a Corpus-Based Discourse Analysis of British and American Mainstream Media on “The Belt and Road Initiative.” *Open Journal of Social Sciences*, 09(02), 509–516. <https://doi.org/10.4236/jss.2021.92033>
- Li, X. and Z. W. (2018). The Construction of Singapore's Mainstream Chinese Media on OBOR: Based on a Discourse Analysis of Zaobao. *Asian Education and Developmen Studies*. <https://doi.org/10.1108/AEDS-10-2018-0162>
- Liang Bingyu 梁冰玉, Lu Xueying 鹿学颖, M. Y. 马樱倩 and W. X. (2019). *How the U.S. Media Perceives and Communicates Chinese Railway Projects in the Belt and Road Initiative*. China Africa Project. <https://chinaafricaproject.com/student-xchange/how-the-u-s-media-perceives-and-communicates-chinese-railway-projects-in-the-belt-and-road-initiative/>
- Liang, F. (2019). The New Silk Road on Facebook: How China's Official Media Cover and Frame a National Initiative for Global Audiences. *Communication and the Public*, 4(4), 261–275. <https://doi.org/10.1177/2057047319894654>
- Lim, M. (2005). Archipelago online: The Internet and political activism in Indonesia [University of Twente, Enschede, the Netherlands]. In *Twente University*. <http://search.proquest.com/docview/305392998?accountid=13771>
- Lim, M. (2011). *@ Crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia*. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:@Crossroads:+Demo+cratization+&+Corporatization+of+Media+in+Indonesia#0>
- Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636–657. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386>

- Lin, C. (2019). China's New Globalism. In *Socialist Register* (Vol. 55, pp. 1–24). Merlin Press. <https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/30939>
- Lincoln, N. K. D. & Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Lombard, D. (2005). *Nusa Bangsa: Silang Budaya*. Gramedia.
- Lovina, H. R., Jiajia, G., & Chen, H. (2017). Review of “the Chinese Belt and Road Initiative”: Indonesia-China Cooperation and Future Opportunities for Indonesia's Port Cities Development. *Journal of Regional and City Planning*, 28(3), 161–177. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.1>
- Luo, A. J. (2015). Media system in China: a Chinese perspective. *International Communication of Chinese Culture*, 2(1), 49–67. <https://doi.org/10.1007/s40636-015-0012-3>
- Luthfi, A. (2019). *Intip Perkembangan Media dan Tren Baru Masyarakat Digital*. Techno.Okezone.Com. <https://techno.okezone.com/read/2019/04/15/207/2043698/intip-perkembangan-media-dan-tren-baru-masyarakat-digital>
- Mahbubani, K. (2021). *The Genius of Jokowi*. Project Syndicate. <https://www.project-syndicate.org/commentary/indonesia-president-jokowi-effective-democratic-governance-model-by-kishore-mahbubani-2021-10?barrier=accesspaylog>
- Mahfud, C. (2014). The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-China Relations in Islamic Cultural Identity. *Journal of Indonesian Islam*, 8(1), 23–38. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2014.8.1.23-38>
- Malik, T. H. (2020). The Belt and Road Initiative (BRI) Project Legitimation: The Rhetor's Innovation and the US Response. *Asian Journal of Comparative Politics*, September. <https://doi.org/10.1177/2057891120959476>
- Man, C. Y., Palmer, D. A., & Qian, J. (2022). The Belt and Road Initiative on Twitter: An annotated dataset. *Data in Brief*, 45, 108711. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2022.108711>
- Manca, L. D. M. A. M., & Karl. (2015). *Karl Marx And Communication*.
- Marnani, Sri. Rumambi, C., Johanes, Simatupang, F., & Haposan. (2016). Connectivity Indonesia's Maritime Global Axis Policy. *Jurnal Pertahanan*, 2(1), 53–70.
- Mathias, D. S. (2019). *The Belt and Road Initiative The People's Republic of China's New Assertive Foreign Policy* (Issue October). ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.
- Matura, T. (2018). The Belt and Road Initiative depicted in Hungary and Slovakia. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 7(2), 174–189. <https://doi.org/10.1080/24761028.2018.1537091>

- McCoy, M. E. (2019). *Scandal and Democracy Media Politics in Indonesia*. Cornell University Press Printed.
- Mensah, I. K., & Jianing, M. (2016). E-Government, China Internet Plus, and the One Belt One Road Initiative : The Africa Connection. *International Scholarly and Scientific Research & Innovation*, 10(8), 2634–2638.
- Miao, J. T. (2021). Understanding the soft power of China's Belt and Road Initiative through a discourse analysis in Europe. *Regional Studies, Regional Science*, 8(1), 162–177. <https://doi.org/10.1080/21681376.2021.1921612>
- Minghao, Z. (2015). China's New Silk Road Initiative. In *Instituto Affari Internazionali* (No. 37).
- Mironov, L. (2020). *Ideologically Biased Western Media Distort Belt and Road Coverage*. Chinadaily.Com.Cn. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202008/25/WS5f4462e8a310736c2dea4af5.html>
- Mokashi, A., Jayaraman, J. D., Mahakul, P., Patel, R., & Picciano, A. (2022). Global Perception of the Belt and Road Initiative: A Natural Language Processing Approach. *Journal of Big Data: Theory and Practice*, 1(1). <https://doi.org/10.54116/jbdt.v1i1.18>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Remaja Rosda Karya.
- Moscato, D. (2018). The Polar Silk Road in the Popular Press: Global Media Framing of China's 2018 Arctic Policy White Paper. *Arctic Yearbook*, February, 1–12. www.arcticyearbook.com
- Mosco, V. (2008). Current Trends in the Political Economy of Communication. *Global Media Journal -- Canadian Edition*, 1(1), 45–63.
- Muqstith, M. A., Muzykant, V. L., & Kuzmenkova, K. E. (2019). Cyberprotest: new media and the new social movement in Indonesia. *RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism*, 24(4), 765–775. <https://doi.org/10.22363/2312-9220-2019-24-4-765-775>
- Nashrullah, N. (2018). *Sejauh Mana Hubungan RI-Cina? Begini Penuturan Dubes Cina*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/11/28/piv4yv320-sejauh-mana-hubungan-ricina-begini-penuturan-dubes-cina>.
- Nation, P. M. O. T. C. T. T. U. (2020). *The Belt and Road Initiative: Progress, Contributions and Prospects*. China-Un.Ch. <http://www.china-un.ch/eng/zywjyjh/t1675564.htm>
- Negara, S. D. A. L. S. (2020). *Indonesia and China's Belt and Road Initiatives: Perspective, Issues and Prospect* (Issue 11).
- Nie, Y. (2019). *Microblogging and Media Policy in China: Xinhua's Strategic Communication on the Belt and Road Initiative*. Leiden University.

- Nip, J. Y. M., & Sun, C. (2018). China's news media tweeting, competing with US sources. *Westminster Papers in Communication and Culture*, 13(1), 98. <https://doi.org/10.16997/wpcc.292>
- Niu, S. (2019). *Framing of China's Belt and Road Initiative by the U . S . and Indian News Media (2013-2018)*. The University of Arizona.
- Nobis, A. (2016). *Routes, Orders, Globalizations — New And Old Globalizations?* 189–200. Nomleni, P., Hariadi, M., & Purnama, I. K. E. (2014). Sentiment Analysis Berbasis Big Data. *Seminar Nasional Rekayasa Teknologi Industri Dan Informasi*, 9, 142–149.
- Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia. In *Report series: Engaging Media, Empowering Society: Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens' rights* (Issue March). <https://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-2-Media-Industry-2012.pdf>
- Nur Aini. (2021). *Mendes: 100 Desa di Indonesia Kerja Sama dengan China*. Republika.Co.Id. <https://nasional.republika.co.id/berita/q4goay382/mendes-100-desa-di-indonesia-kerja-sama-dengan-china>.
- Nurita, D. (2020). *Jokowi Lantik Mantan Timses dan Eks Dirut Metro TV Jadi Dubes*. Tempo.Com. <https://nasional.tempo.co/read/1385997/jokowi-lantik-mantan-timses-dan-eks-dirut-metro-tv-jadi-dubes>
- Nurrokhman, N., Dwi Purnomo, H., & Dwi Hartomo, K. (2020). Utilization of Social Network Analysis (SNA) in Knowledge Sharing in College. *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, 4(2), 259–271. <https://doi.org/10.29407/intensif.v4i2.14460>
- Onitsuka, K., Hidayat, A. R. R. T., & Huang, W. (2018). Challenges for the next level of digital divide in rural Indonesian communities. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 84(2), 1–25. <https://doi.org/10.1002/isd2.12021>
- Otte, E., & Rousseau, R. (2002). Social network analysis: A powerful strategy, also for the information sciences. *Journal of Information Science*, 28(6), 441–453. <https://doi.org/10.1177/016555150202800601>
- Özsu, G. and F. M. B. (2019). Representation of the “Belt and Road Initiative” in Turkish mainstream Newspapers. *Communication and the Public*, 4(4), 291–304. <https://doi.org/10.1177/2057047319895448>
- Paggi, G. (2017). *Globalization with Chinese characteristics : the implications of the Belt and Road Initiative for the globalization process*. Ca' Foscari University of Venice.

- Pamungkas, C. (2017). Global Village dan Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan. *Jurnal Global & Strategis*, 9(2), 245. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.245-261>
- Pan, Y. (2021). An Investigation into Changes in African Mainstream Media's Perception of China's "Belt and Road" Initiative: A Corpus-Based Critical Discourse Analysis. *Open Journal of Modern Linguistics*, 11(02), 262–276. <https://doi.org/10.4236/ojml.2021.112021>
- Petras, J. F. (1999). Globalisation: A Socialist Perspective. *Economic and Political Weekly*, 34(8), 459–463. <http://www.jstor.org/stable/4407674>
- Pitlo, L. B. (2019). Philippine Media Portrayal of China's Belt and Road Initiative. *Asian Politics and Policy*, 11(1), 172–177. <https://doi.org/10.1111/aspp.12443>
- Pradana, Y. S. (2020). Menelisik Tren Peningkatan Pengguna Internet di Indonesia. www.Goodnewsfromindonesia.Id. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/08/26/menelisik-tren-peningkatan-pengguna-internet-di-indonesia>
- Pramesti, I. A. (2019). *Sederet Bukti Konkret Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi!* Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190214123837-4-55506/sederet-bukti-konkret-pembangunan-infrastruktur-era-jokowi>
- Prastya, N. M. (2011). Komunikasi Krisis Di Era New Media Dan Social Media. *Jurnal Komunikasi*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol6.iss1.art1>
- Pratama, A. M. (2020). *Pengguna Internet Indonesia hingga Kuartal II 2020 Capai 196,7 Juta Orang*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/11/09/213534626/pengguna-internet-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020-capai-1967-juta-orang>
- Pratama, I. B., & Ulfa, A. A. I. (2017). Discourse Networking Analysis Sebagai Metode Penelitian Alternatif Dalam Kajian Ilmu Komunikasi. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(2), 126–136. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/1129/718>
- Putra Dwivianto, B. (2006). Pengaruh Kebijakan Mengenai Etnis Tionghoa di Indonesia era Pemerintahan Abdurrahman Wahid terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan Tiongkok. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(2), 476–485. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahib7670796b4full.pdf>
- Qianqian, L., & Yijun, L. (2020). The China-Pakistan Economic Corridor: The Pakistani Media Attitudes Perspective. *Technology in Society*, 1–23. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101303>
- Rachman, D. A. (2020a). *Menurut Pengamat, Siapa Pun Presiden Indonesia, Tak*

- Mungkin Tak Kerja Sama dengan China*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/12/22153131/menurut-pengamat-siapa-pun-presiden-indonesia-tak-mungkin-tak-kerja-sama?page=all>.
- Rachman, D. A. (2020b). *Survei LSI: 39 Persen Responden Anggap China Negara Paling Berpengaruh di Asia*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/12/17524661/survei-lsi-39-persen-responden-anggap-china-negara-paling-berpengaruh-di>
- Rahman, R. (2019). *Billions on offer for Belt and Road*. Thejakartapost.Com. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/20/billions-offer-belt-and-road.html>
- Ramadhan, H. A., & Putri, D. A. (2018). Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia. In *Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika*. <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Kajian-Kominfo-CIPG-compressed.pdf>
- Ravitsky, M. (2018). Jumping onto the Train? How Russian Media Cover China's Belt and Road Initiative. *Asian Politics & Policy*, 10(3), 564–570. <https://doi.org/10.1111/aspp.12403>
- Reksanegara, A., & Budi Setiawan, E. (2019). Analisis Sentimen Politik Pada Twitter dan Facebook Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier. *E-Proceeding of Engineering*, 6(1), 2390–2402.
- RI-Tionggok Tandatangani Kerja Sama Tiga Mega Proyek. (2017). MediaIndonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/read/detail/104698-ri-tionggok-tandatangani-kerja-sama-tiga-mega-proyek>
- Ritonga, R., & Syahputra, I. (2019). Citizen journalism and public participation in the Era of New Media in Indonesia: From street to tweet. *Media and Communication*, 7(3 Civic Organizations in an Age of Distrust), 79–90. <https://doi.org/10.17645/mac.v7i3.2094>
- Ritzer, G. (2016). *Pengantar Sosiologi*. Pustaka Pelajar.
- Rizki Akbar Putra. (2021). *Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 04.02.2021*. Deutsche Welle Indonesia. <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>
- Roosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal*. Hasta Mitra.
- Rosana, F. C. (2019). *Indonesia Ikut One Belt One Road Cina, Untung atau Rugi? Fokus*. Tempo.Co. <https://fokus.tempo.co/read/1189679/indonesia-ikut-one-belt-one-road-cina-untung-atau-rugi>

- Rudolph F. Verderber, K. S. V. (2007). *Communicate*. (Twelfth Ed). Wadsworth Publishing.
- Sadri, M. (2017). *Hubungan Dagang Indonesia-Tiongkok Makin Berkibar*. Jawapos.Com. <https://www.jawapos.com/ekonomi/11/05/2017/hubungan-dagang-indonesia-tiongkok-makin-berkibar>
- Said, I. (2019). Hubungan Etnis Cina dengan Pribumi: (Sebuah Tinjauan Sosiologis). *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 2, 1–10. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/view/8004>
- Saju, P. Bin. (2017). *Kehadiran China di ASEAN, Berkah atau Masalah?* Kompas.Com.
- Salam, A., Zeniarja, J., & Khasanah, R. S. U. (2018). Analisis Sentimen Data Komentar Sosial Media Facebook Dengan K-Nearest Neighbor (Studi Kasus Pada Akun Jasa Ekspedisi Barang J&T Ekpress Indonesia). *Prosiding SINTAK*, 480–486.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana.
- Samani, Mus Chairil. Maliki, Jamilah. Rahim, Mohd Helmi Abd. Rahman, Mat Pauzi Abd. and Mustaffa, N. (2015). The Media Agenda of the New and Traditional Media in Malaysia: Constructing Realities. *E-BANGI: Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan, Specia*(1), 48–57.
- Santoso, E. B., & Nugroho, A. (2019). Analisis Sentimen Calon Presiden Indonesia 2019 Berdasarkan Komentar Publik Di Facebook. *Eksplorasi Informatika*, 9(1), 60–69. <https://doi.org/10.30864/eksplorasi.v9i1.254>
- Schnell, J. A., & Schnell, B. L. (2017). A Mass Mediated Interpretation of the Chinese “Belt & Road Initiative” as Strategic Intelligence Perspective. *Advances in Image and Video Processing*, 5(6), 10–18. <https://doi.org/10.14738/aivp.56.4107>
- Seele, P., Jia, C. D., & Helbing, D. (2019). The New Silk Road and Its Potential for Sustainable Development: How Open Digital Participation Could Make BRI a Role Model for Sustainable Businesses and Markets. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s41180-018-0021-3>
- Sen, G., & Bingqin, L. (2019). The digital silk road and the sustainable development goals. *IDS Bulletin*, 50(4), 23–46. <https://doi.org/10.19088/1968-2019.137>
- Shahriar, S. (2020). *Foreign Business in China and Opportunities for Technological Innovation and Sustainable Economics* (Issue January). <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8980-8.ch005>

- Shan Bo and Feng Ji-hai. (2019). How do Western Communication Theories Connect with Marxism? *Angewandte Chemie International Edition*, 03, 1–12.
- Shen, H. (2018). Building a Digital Silk Road? Situating the Internet in China's Belt and Road Initiative. *International Journal of Communication*, 12, 2683–2701.
- Shen, X. (2017). *Chinese ICT on the Digital Silk Road: A Case Study of Infrastructure Building in Pakistan*. Communication University of China.
- Silaban, C. A. dan M. W. (2021). *Riset AidData: Indonesia Punya Utang Tersembunyi kepada Cina Rp 247 T - Bisnis Tempo.co*. Wwww.Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1514246/riset-aiddata-indonesia-punya-utang-tersembunyi-kepada-cina-rp-247-t>
- Sinaga, D. P. (2019). *Empat Poin Mantapkan Hubungan Tiongkok-Indonesia*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/read/detail/237721-empat-poin-mantapkan-hubungan-tiongkok-indonesia>
- Solmecke, U. (2016). Multinational Enterprises and the “One Belt, One Road” Initiative: Sustainable Development and Innovation in a Post-Crisis Global Environment. *Copenhagen Journal of Asian Studies*, 34(2), 9–27. <https://doi.org/10.22439/cjas.v34i2.5304>
- Sparks, C. (2010). China's Media in Comparative Perspective. *Journal of Communication*, 4, 552–566. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=51893355&site=ehost-live>
- Su, C., & Flew, T. (2020). The rise of Baidu, Alibaba and Tencent (BAT) and their role in China's Belt and Road Initiative (BRI). *Global Media and Communication*, 1–20. <https://doi.org/10.1177/1742766520982324>
- Suchs, J. D. (2020). *Insight: America's unholy crusade against China*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/08/07/insight-americas-unholy-crusade-against-china.html>
- Sulistiyo, H. (2003). *Palu Arit Di Ladang Tebu*. Gramedia.
- Suryadinata, L. (ed.). (2002). *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia, 1900-1945*. INTI dan LP3ES.
- Suryowati, E. (2019). *DPD RI Dukung Kerja Sama Jalur Sutra dengan Tiongkok*. Jawapos.Com. <https://www.jawapos.com/ekonomi/21/06/2019/dpd-ri-dukung-kerja-sama-jalur-sutra-dengan-tiongkok/>
- Susanti, E. (2015). Critical Discourse Analysis: Hegemony of the Social Media Twitter About National Issues in Indonesia and its Implications to the Discourse Analysis Subject in Colleges. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 2(2), 153–166. <https://doi.org/10.15408/tjems.v2i2.3180>
- Swaine, M. D. (2015). Chinese Views and Commentary on the One Belt, One

- Road Initiative. *China Leadership Monitor*, 47(2), 1–24. <https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm47ms.pdf>
- Sylaj, V. (2020). *Mapping China's Belt and Road Initiative in the Albanian Media: A Corpus Content Analysis Study* (Issue August).
- Talbot, M. (2007). *Media discourse; Representation and Interaction* (Issue 1). Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.20916/1812-3228-2018-1-12-16>
- Tan, H. (2016). *Berapa Jumlah populasi Etnis Tionghoa di Indonesia?* Tionghoa. Info. <https://www.tionghoa.info/berapa-jumlah-populasi-etnis-tionghoa-di-indonesia>
- Tapsell, R. (2015). Indonesia's Media Oligarchy and the "Jokowi Phenomenon." *Indonesia*, 99(1), 29–50. <https://doi.org/10.1353/ind.2015.0004>
- Ten Brink, T. (2013). Paradoxes of Prosperity in China's New Capitalism. *Journal of Current Chinese Affairs*, 42(4), 17–44. <https://doi.org/10.1177/186810261304200402>
- Thiombiano, D., & TULGA, A. Y. (2021). A Sentiment Based Text Analysis of the Perception of Chinese Infrastructure Development in Africa: Cases from Nigeria and Ethiopia. *International Journal of Social Science Studies*, 10(1), 11. <https://doi.org/10.11114/ijsss.v10i1.5359>
- Thomas, V. F. (2019). *Daya Saing Indonesia: Terbata-bata & Kian Ditinggal Negara Tetangga*. Tirto.Id. <https://tirto.id/daya-saing-indonesia-terbata-bata-kian-ditinggal-negara-tetangga-ejEX>
- Tongco, M. D. C. (2007). Purposive Sampling as a Tool for Informant Selection. *Ethnobotany Research & Applications*, 5, 147–158.
- Tri Andika, M., & Nur Aisyah, A. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? *Indonesian Perspective*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.14710/ip.v2i2.18477>
- Triolo, R. G. and P. (2020). *Will China Control the Global Internet Via its Digital Silk Road?* Carnegieendowment.Org. <https://carnegieendowment.org/2020/05/08/will-china-control-global-internet-via-its-digital-silk-road-pub-81857>
- Tritto, A. (2021). China's Belt and Road Initiative: from perceptions to realities in Indonesia's coal power sector. *Energy Strategy Reviews*, 34(March), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2021.100624>
- Utomo, W. P. (2017). *Oligarki Media dan Bagaimana dia Menentukan Arah Pemberitaan*. The Conversation. <https://theconversation.com/oligarki-media-dan-bagaimana-dia-menentukan-arrah-pemberitaan-86639>

- Van Alphen, H. F. (2015). *Indian Perceptions of the 21st Century Maritime Silk Road*. Leiden University.
- Van der Leer, Y., & Yau, J. (2008). China's New Silk Route: The Long and Winding Road. *OCCLC Systems & Services: International Digital Library Perspectives*, 24(1), 22–29. <http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/10650750810847215>
- Van Dijk, T. A. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. *Discourse & Society*, 4(2), 249–283. <https://doi.org/10.1177/0957926593004002006>
- Van Dijk, T. A. (1994). *Discourse and Cognition Society*. (& D. C. & D. M. (Polity (Eds.)). Polity Press.
- Van Dijk, T. A. (1995). Aims of critical discourse. *Japanese Discourse*, 1(1), 18–26. <https://doi.org/10.1007/BF02092754>
- Van Dijk, T. A. (2001). *Critical discourse analysis. Handbook of discourse analysis*. Blackwell.
- van Noort, C. (2020). Strategic Narratives, Visuality and Infrastructure in The Digital Age: The Case of China's Maritime Silk Road Initiative. *Cambridge Review of International Affairs*, 33(5), 1–18. <https://doi.org/10.1080/09557571.2020.1741513>
- Vila Seoane, M. F. (2020). Alibaba's discourse for the digital Silk Road: the electronic World Trade Platform and 'inclusive globalization.' *Chinese Journal of Communication*, 13(1), 68–83. <https://doi.org/10.1080/17544750.2019.1606838>
- Villafuerte, J., Corong, E., & Zhuang, J. (2016). The One Belt, One Road Initiative - Impact on Trade and Growth. *19th Annual Conference on Global Economic Analysis*, May, 1– 30.
- Vineles, P. (2019). *Proyek Sabuk dan Jalan China Bisa Berhasil di Asia Tenggara, Ini Caranya*. Matamatapolitik.Com. <https://www.matamatapolitik.com/analisis-menjadikan-proyek-sabuk-dan-jalan-china-berfungsi-di-asia-tenggara/>
- Wang, Y., & Reagan, J. (2020). Media sentiment towards Chinese investments in Malaysia: An examination of the forest city project. *Asian Journal for Public Opinion Research*, 8(3), 197–221. <https://doi.org/10.15206/ajpor.2020.8.3.197>
- Wartakota.tribunnews.com. (2017). *Nawacita Jokowi, Ribuan Desa Kini Miliki Akses Air Bersih dan Sanitasi Sehat*. Wartakota.Tribunnews.Com. <https://wartakota.tribunnews.com/2017/12/19/nawacita-jokowi-ribuan-desa-kini-miliki-akses-air-bersih-dan-sanitasi-sehat>
- We Are Social & Hootsuite. (2020). Indonesia Digital report 2020. In *Global*

- Digital Insights*. <https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview>
- Wheeler, A. (2020). *China's Digital Silk Road (DSR): The New Frontier in the Digital Arms Race?* Silkroadbriefing.Com. <https://www.silkroadbriefing.com/news/2020/02/19/chinas-digital-silk-road-dsr-new-frontier-digital-arms-race/>
- Wibowo, P. (2012). Tionghoa Dalam Keberagaman Indonesia : Sebuah Perspektif Historis Tentang Posisi dan Identitas. *Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: "Unity, Diversity and Future,"* 640–657. <https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/09102012-52.pdf>
- Widhana, D. H. (2020). *Tim Pemenangan hingga Buzzer Jokowi yang Menjabat Komisaris BUMN*. Tirto.Id. <https://tirto.id/tim-pemenangan-hingga-buzzer-jokowi-yang-menjabat-komisaris-bumn-f67z>
- Widowati, H. (2019). *Proyek OBOR Tiongkok: Kontroversial di Asia, Didukung Arab dan Rusia*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a50d92f3aa/proyek-obor-tiongkok-kontroversial-di-asia-didukung-arab-dan-rusia>
- Widyanto, U. (2019). *Covering China's Belt and Road Initiative Isn't Easy. Here's Why*. Earthjournalism.Net/. <https://earthjournalism.net/program-updates/covering-chinas-belt-and-road-initiative-isnt-easy-heres-why>
- Wijayakusuma, H. M. H. (2000). *Cheng Ho Muslim Tionghoa: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*. Yayasan BRI Indonesia.
- WNI keturunan Cina bisa "lebih Indonesia dibanding suku bangsa lain." (2017). Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41736620>
- Wulandari, D. A. P., Sudarma, M., & Paramaita, N. (2019). Pemanfaatan Big Data Media Sosial Dalam Menganalisa Kemenangan Pilkada. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, 18(1), 101. <https://doi.org/10.24843/mite.2019.v18i01.p15>
- Wuthnow, J. (2017). Chinese Perspectives on the Belt and Road Initiative: Strategic Rationales, Risks, and Implications. In *China Strategic Perspectives: Vol. No. 12*.
- Wyman, O. (2017). *Navigating the New Silk Road: Expert Perspectives on China's Belt and Road Initiative*. http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliverwyman/v2/publications/2017/aug/Navigating_The_New_Silk_Road.pdf
- Xiao, Y., Li, Y., & Hu, J. (2019). Construction of the Belt and Road Initiative in Chinese and American Media : A Critical Discourse Analysis Based on Self-Built Corpora. *International Journal of English Linguistics*, 9(3), 68–77. <https://doi.org/10.5539/ijel.v9n3p68>
- Xin, J. and D. M. (2018). One Belt, Competing Metaphors: The Struggle Over

- Strategic Narrative in English-Language News Media. *International Journal of Communication*, 12(0), 4248–4267.
- Xu, B. (2021). Understanding Education on China's Belt and Road Initiative: A Cultural Political Economy Approach. *Beijing International Review of Education*, 3(1), 56–71. <https://doi.org/10.1163/25902539-03010005>
- Xuming, Q. (2018). "One Belt One Road" Initiative and China and the Middle East Media Exchanges. *Journalism and Mass Communication*, 8(5), 239–245. <https://doi.org/10.17265/2160-6579/2018.05.002>
- Yang, A. (2012). Understanding the Changing Chinese Media: Through the Lens of Crises. *China Media Research*, 8(2), 63–76. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authryp e=crawler&jrnl=1556889X&AN=74746131&h=5oprWq0aBxglIyHCb6FY1xZdwQwGR1aH4Xr7brtIA2p8D3QLQoMIwwKY9My8hERRjHpNwsY93nYzopEXQBiqnA==&crl=c>
- Yu, C., & Yan, J. (2020). Research on the Coverage of the Belt and Road Initiative and a Community with Shared Future for Mankind by Mainstream Media in the United States——Taking the three major mainstream media in the United States as an example. *Journal of Contemporary Educational Research*, 4(8), 72–78. <https://doi.org/10.26689/jcer.v4i8.1452>
- Yu, S. Z. (2018). *Belt and Road Initiative: Defining China's Grand Strategy and the Future World Order* [Harvard University]. <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:37799759>
- Yulistyo Pratomo, S. R. (2014). *Di balik debat Pemred RCTI dengan aktivis pers*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/di-balik-debat-pemred-rcti-dengan-aktivis-pers.html>
- Yuni, Q., & Gita, F. (2021). Transformation of Print Media in the Digital Era : Media Convergence of Kedaulatan Rakyat. *International Journal of Communication and Society*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v3i1.165>
- Yuniarto, P. R. (2019). Intercultural Gaps between Indonesia and China on the Belt and Road Initiative: Causes and Remedies. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 5(3), 395–416. <https://doi.org/10.1142/S2377740019500234>
- Yurkov, S. (2018). How Uzbek Media Presents the "One Belt, One Road" Initiative—A Case Study on Uzbekistan Today. *Communication and Public Diplomacy*, 1(1), 118–133. <https://doi.org/10.17265/2160-6579/2018.01.011>
- ZAİN, A., ÖZSU, G., BİNARK, M., & GIDRETA, A. D. (2020). ÇİNPakistanEkonomiKoridoru VePakistan Twitter Uzaminda

- KanaaTeknisyenleri: Bir Temati İçeri Analizi. *Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(1), 9–28. <https://doi.org/10.34189/asyam.4.1.002>
- Zhang, L., Li, H., & Chen, K. (2020). Effective Risk Communication for Public Health Emergency: Reflection on the COVID-19 (2019-nCoV) Outbreak in Wuhan, China. *Healthcare*, 8(1), 64. <https://doi.org/10.3390/healthcare8010064>
- Zhang, L., & Wu, D. (2017). Media Representations of China: A Comparison of China Daily and Financial Times in Reporting on the Belt and Road Initiative. *Critical Arts*, 31(6), 29–43. <https://doi.org/10.1080/02560046.2017.1408132>
- Zhao, W. (2015). What is capitalism with Chinese characteristics? Perspective on State, market, and society. *Colloque International, Recherche & Régulation (R&R)*, 1–15.
- Zhao, Y. (2011). Understanding China's media system in a world historical context. In *Comparing Media Systems beyond the Western World* (pp. 143–174). <https://doi.org/10.1017/CBO9781139005098.009>
- Zhixin, C. (2018). Australia's Fear and Greed Over China's Rise: A Discourse Analysis of Mainstream News Coverage of the Belt and Road Initiative. *International Relations and Diplomacy*, 6(8), 436–449. <https://doi.org/doi:10.17265/2328-2134/2018.08.001>
- Ziblatt, S. L. and D. (2018). *How Democracies Die*. Crown Publishing Group.
- Ziromwatela, R., & Changfeng, Z. (2016). Africa in China's 'One Belt, One Road' Initiative: A Critical Analysis. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 21(1), 10. <https://doi.org/10.9790/0837-2112011021>
- Zou, W., Lan, Y., Xia, Y., Liu, M., & Zhang, P. (2020). Research on public opinion risk control of "one belt and one road." *Advances in Intelligent Systems Research, Volume 171 Fourth Symposium on Disaster Risk Analysis and Management in Chinese Littoral Regions (DRAMCLR 2019)*, 171(Dramclr), 164–169. <https://doi.org/10.2991/dramclr-19.2019.33>
- Zulaika, H. (2020). *Pemerintah Habiskan Rp90,45 Miliar untuk Bayar Buzzer*. MediaIndonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/338091/pemerintah-habiskan-rp9045-miliar-untuk-bayar-buzzer>
- 伟胡 政 , 郑. (2021). 中国对东盟直接投资的效率研究 -基于DEA模型. *山西大学学报 (哲学社会科学版)*, 44(3). [https://doi.org/10.13451/j.cnki.shanxi.univ\(phi.soc\).2021.03.018](https://doi.org/10.13451/j.cnki.shanxi.univ(phi.soc).2021.03.018)
- 兴闫. (2019). 人类命运共同体视阈下闽籍华人华侨 参与海丝核心区建设研究. *中共福建省委党校学报*, 4, 163–168. <https://doi.org/10.15993/j.cnki.cn35-1198/c.2019.04.020>

- 刘伟王 文. (2019). 新时代中国特色社会主义政治经济学视阈下的“人类命运共同体.”管理世界, 3, 1-16. <https://doi.org/10.19744/j.cnki.11-1235/f.2019.0031>
- 刘佳欢何 伟. (2019). 新加坡华文主流媒体对中国“一带一路”倡议的表征研究. 北京第二外国语学院学报, 2(4), 67-80. <https://doi.org/10.12002/j.bisu.213>
- 勤王. (2019). 论中国—东盟经济关系发展的新格局. 太平洋学报, 27(1). <https://doi.org/10.14015/j.cnki.1004-8049.2019.01.008>
- 博马. (n.d.). “一带一路”与印尼“全球海上支点”的战略对接研究 *. 2015, 33-50. <https://doi.org/10.13851/j.cnki.gjzw.201506003>
- 周玉渊. (2016). 佐科时期“一带一路”在印尼推进面临的挑战与对策分析. 太平洋学报, 24(10), 19-29. <https://doi.org/10.14015/j.cnki.1004-8049.2016.10.003>
- 唐小松景丽娜. (2017). “一带一路”背景下公共外交与中国国家形象构建. 公共外交季刊, 2, 22-28. <https://doi.org/10.16869/j.cnki.pdq.2017.02.005>
- 安亚伦, 段世飞. (2018). “一带一路”倡议下的汉语国际教育: 现状、问题及对策. 湖南师范大学教育科学学报, 17(6), 45-52. <https://doi.org/10.19503/j.cnki.1671-6124.2018.06.007>
- 宋瑞琛. (2017). 美国对“一带一路”倡议的认知及中国的策略选择. 6. <https://doi.org/10.13851/j.cnki.gjzw.201706004>
- 尚永辉, & 魏君英. (2017). “一带一路”下中国与东盟农业合作研究. 合作经济与科技, 9, 9-11. <https://doi.org/10.13665/j.cnki.hzjyjk.2017.18.002>
- 张帆, 余淼杰俞建拖. (2017). “一带一路”与人民币国际化的未来. 二十四个重大问题研究 *IMPORTANT ISSUES*, 5, 28-45. <https://doi.org/10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2017.09.003>
- 张亚蓉. (2018). “一带一路”新形势下汉语国际教育专业 改革与发展模式构想. 西北大学学报(哲学社会科学版), 48(6), 142-150. <https://doi.org/10.16152/j.cnki.xdxbsk.2018-06-016>
- 张建成. (2016). 云南少数民族基督教文化涵化的中国化 理解研究. 贵州民族研究, 37(185), 188-191. <https://doi.org/10.13965/j.cnki.gzmzyj10026959.2016.07.044>
- 张晓通弗林特. (2016). “一带一路”与地缘政治理论创新. 外交评论, 3. <https://doi.org/10.13569/j.cnki.far.2016.03.001>
- 征, 杨红娟曾. (2017). 基于文献计量学的孔子学院发展现状分析. 昆明理工大学学报(社会科学版), 17(2). <https://doi.org/10.16112/j.cnki.53-116-/c.2017.02.015>

- 敏汤 轩, 莫. (2018). “一带一路”背景下英语教学中的中外文化教育 —— 基于跨文化教育交流的思考. 湖南工业职业技术学院学报, 18(3), 93-96. <https://doi.org/10.13787/j.cnki.43-1374/z.2018.03.024>
- 景丽娜唐小松. (2017). 中国对东盟的公共外交: 现状、动因与方向. 东南亚研究, 4, 38-51. <https://doi.org/10.19561/j.cnki.sas.2017.04.038>
- 景嘉伊胡 钰. (2019). “一带一路”倡议在伊斯兰世界的传播: 战略能力与文明对话. *Journalism & Communication Review*, 72(2), 118-128. <https://doi.org/10.14086/j.cnki.xwycbpl.2019.02.011>
- 李丹. (2019). “一带一路”: 负责任大国的话语与作为. 江苏大学学报 (社会科学版), 21(3), 7-14. <https://doi.org/10.13317/j.cnki.jdsxb.2019.027>
- 洪赵. (2018). 中日对东南亚基础设施投资竞争及其影响. 国际论坛, 20(2), 39-45. <https://doi.org/10.13549/j.cnki.cn11-3959/d.2018.02.006>
- 王少楠林乐芬. (2016). “一带一路”进程中人民币国际化 影响因素的实证分析. 金融市场, 2, 75-83. <https://doi.org/10.16475/j.cnki.1006-1029.2016.02.007>
- 王继民, & 玥, 吴亚平, 王一博秦. (2019). 2014 ~ 2018 年中英文期刊论文 “一带一路”研究对比分析. 文献与数据, 3, 83. <https://doi.org/10.33985/0531-025-003-004>
- 玥潘. (2017). “一带一路”背景下印尼的中国劳工问题. 东南亚研究, 3(March), 123-137. <https://doi.org/10.19561/j.cnki.sas.2017.03.123>
- 程晓勇. (2018). “一带一路”背景下中国与东南亚国家海洋非传统安全合作. 东南亚研究 2, 1, 99-114. <https://doi.org/10.19561/j.cnki.sas.2018.01.099>
- 立张, & 李 坪. (2016). 印度对_一带一路_的认知与中国的应对. 南亚研究季刊, 164(1). <https://doi.org/10.13252/j.cnki.sasq.2016.01.003>
- 翔张二震 李远本 戴. (2018). 从融入到推动: 中国应对全球化的战略转变 —— 纪念改革开放40周年. 国际贸易问题, 4, 1-10. <https://doi.org/10.13510/j.cnki.jit.2018.04.001>
- 肖, 珺胡文韬. (2021). 新媒体跨文化传播的难点及其理论回应. *Journalism & Communication Review*, 74(1). <https://doi.org/10.14086/j.cnki.xwycbpl.2021.01.010>
- 艳曲 甜 王. (2019). “一带一路”倡议官方话语解析 与国际反响述评. 当代世界与社会主义, 6, 3-10. <https://doi.org/10.16502/j.cnki.11-3404/d.2019.06.025>
- 菊邢 丽. (2018). 习近平外交思想的 中华优秀传统文化内涵. 东北亚论坛, 6(140). <https://doi.org/10.13654/j.cnki.naf.2018.06.001>
- 葛红亮彭燕婷. (2017). 海洋外交视野下的中印尼海上伙伴关系. 东南亚南亚研究, 3, 40-42. <https://doi.org/10.13848/j.cnki.dnynybjb.2017.03.001>
- 董丹. (2018). 语篇—历史视角下意大利主流媒体 “一带一路”倡议报道的

- 文本分析. 外语学刊, 6(205), 13–16. <https://doi.org/10.16263/j.cnki.23-1071/h.2018.06.003>
- 谷合强. (2018). “一带一路”与中国—东盟经贸关系的发展. 东南亚研究, 1, 115–133. <https://doi.org/10.19561/j.cnki.sas.2018.01.115>
- 赵常煜, & 吴亚平王继民. (2019). “一带一路”倡议下的 Twitter 文本主题挖掘和情感分析. 图书情报工作, 63(19). <https://doi.org/10.13266/j.issn.0252-3116.2019.19.012>
- 邹红霞, 宋净飞. (2019). 印尼工程承包的风险分析. *Port Engineering Technology*, 56(5), 88–91. <https://doi.org/10.16403/j.cnki.ggjs20190521>
- 郝瑜, & 朱江华. (2020). “一带一路”沿线地方高校国际文化交流路向探析. 江苏高教, 9, 32–37. <https://doi.org/10.13236/j.cnki.jshe.2020.09.005>
- 霞詹. (2018). 德国智库对“一带一路”倡议的认知. 外语学刊, 6. <https://doi.org/10.16263/j.cnki.23-1071/h.2018.06.002>
- 静, 王竹青, 许陈生唐. (2021). 双边教育协定对来华留学服务 贸易规模的影响. 《国际商务——对外经济贸易大学学报》, 1, 32–47. <https://doi.org/10.13509/j.cnki.ib.2021.01.003>
- 韩永辉, 韦东明黄亮雄. (2021). 中国与“一带一路”沿线国家 产能合作的耦合效应研究. 国际贸易问题, 4, 143–158. <https://doi.org/10.13510/j.cnki.jit.2021.04.010>
- 齐俊妍, 任奕达. (2020). 东道国数字经济发展水平与中国对外直接投资——基于“一带一路”沿线43 国的考察. *International Economic and Trade Reaserch*, 36(9). <https://doi.org/10.13687/j.cnki.gjjmts.2020.09.004>

Interview

- Afwan, B. A. (2021, September 16). Intellectual Perception about BRI Project in Indonesia. (A. Masduki, interviewer)
- Asmoro, N. W. (2021, 10 2). What do journalists think about China's BRI project? (A. Masduki, interviewer)
- Azis, M. (2021, September 25). Intellectual Perception of The BRI Project. (A. Masduki, interviewer)
- Fanani, Y. (2021, 11 3). How does the BRI China project affect the world of education? (A. Masduki, interviewer)
- Iswahyuni. (2021, 10 8). How Indonesia's social media responds to China's BRI Project. (A. Masduki, interviewer)
- Munajat. (2021, 11 5). How opinion to the BRI Project in Indonesia. (A. Masduki, interviewer)

- Rifa'i, T. (2021, 10 24). How does China's BRI project influence politics? (A. Masduki, interviewer)
- Saragih, S. (2021, September 21). Journalist Opinion about BRI China Project in Indonesia. (A. Masduki, interviewer)
- Sartianawati. (2021, 11 6). How the BRI project affects of education. (A. Masduki, interviewer)
- Wardhan, A. (2021, September 18). How Jurnalist Opinion about BRI Project in Indonesia. (A. Masduki, interviewer)
- Hadikusumo, A. (2023, Juny 23). Why does America intervention in other countries' politics?. (A. Masduki, interviewer)
- Zon, F. (2023, Juny 23). Why does America intervention in other countries' politics?. (A. Masduki, interviewer)
- Novanato, S. (2023, Juny 23). Why does America intervention in other countries' politics?. (A. Masduki, interviewer)
- Soejatmiko, B. (2023, Juny 23). Why does America intervention in other countries' politics?. (A. Masduki, interviewer)

INDEKS

A

Amerika, 18, 24, 40, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 72, 74, 81, 87, 89, 98, 101, 102, 103, 126, 139, 140, 142, 144, 148, 149, 151, 152, 153, 160, 161, 165, 166, 170, 171, 172, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 198, 201, 202, 203, 210, 213, 214

ASEAN, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 41, 45, 46, 61, 81, 157, 166, 189, 201

B

Barat, 4, 16, 17, 18, 1, 17, 19, 21, 22, 26, 50, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 125, 126, 127, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 153, 162, 169, 170, 171, 172, 173, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 212, 213, 214, 218

Belt and Road Initiative (BRI), 3, 8, 15, 16, 2, 19, 20, 21, 23, 24, 40, 41, 47, 50, 53, 58, 59, 61, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 81, 82, 86, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 101, 102, 105, 107, 111, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 125,

126, 130, 131, 135, 136, 141, 153, 154, 155, 157, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 196, 197, 198, 200, 201, 207, 208, 209, 211, 213

Budaya, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 32, 36, 39, 47, 50, 52, 53, 57, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 84, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 104, 105, 119, 133, 137, 139, 141, 142, 160, 161, 162, 163, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 187, 189, 195, 196, 198, 219

C

Chiglobalization, 51

D

Digitalisasi, 50, 72, 80

Diplomasi, 25, 27, 47, 51, 57, 58, 59, 69, 71, 72, 79, 93, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 143, 149, 157, 161, 167, 168, 174, 177, 182, 183, 184, 191, 196, 201

E

Ekonomi, 16, 17, 21, 22, 32, 36, 61, 69, 80, 156, 165, 170, 185

Ekspansi, 201

F

Framing, 222

G

Geopolitik, 223

Globalisasi, 16, 49, 60, 65, 66, 67, 71, 72, 91

H

Habermas, 8, 5, 102

I

Identitas, 15, 14, 15, 120

Indonesia, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 60, 63, 74, 80, 87, 88, 90, 98, 107, 109, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219

Infrastruktur, 15, 3, 21, 109, 136, 185

Investasi, 21, 22, 24, 44, 110, 127, 128, 153, 156, 171, 197, 202

J

Jalur Sutra Digital, 16, 18, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 62, 64, 71, 74, 75, 79, 81, 97, 105, 185

Jalur Sutra Maritim, 18, 19, 43, 45, 152

K

Kapitalisme, 38

Komunikasi, 16, 17, 64, 74, 84, 95, 103, 112, 158, 173, 174

L

Luar Negeri, 132, 150, 153, 195, 202, 214

M

Media sosial, 4, 6, 27, 30, 39, 48, 63, 88, 92, 96, 103, 119, 123, 173, 179, 188, 216

Minoritas, 141, 142

N

Narasi, 2, 15, 16, 17, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 41, 56, 82, 83, 95, 113, 117, 118, 122, 125, 140, 141, 148, 152, 153, 179, 181, 182, 183, 213

Nasionalisme, 16, 90

O

Opini publik, 112, 123, 134, 177

P

Pembangunan, 21, 22, 25, 41, 129, 178, 198

Pemerintah Indonesia, 17, 3, 43, 46, 136, 142, 152, 167, 170, 171, 177, 178

Politik, 16, 17, 32, 36, 69, 115, 152, 158, 163

Propaganda, 18, 190

Publik, 1, 2, 15, 16, 17, 1, 3, 87, 102, 123, 169, 177

S

Sejarah, 15, 89, 184

T

Tionghoa Indonesia, 11, 17

Tiongkok, 4, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 9, 10, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,
103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112,

113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 216, 218

U

Utang, 17, 23, 112, 115, 144, 193, 201

BIODATA



Anang Masduki adalah Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Sebelumnya pernah bekerja di Lembaga Study Pengembangan Perempuan dan Anak, juga pernah bekerja sebagai surveiyor di LSI. Lahir dan besar di Ponorogo. Mengenyam pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya. Kemudian melanjutkan kuliah S1 di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, menempuh S2 Ilmu Komunikasi di FISIPOL UGM dan pendidikan Doktoral di School of Journalism and Communication Shanghai University, China. Mengajar mata kuliah Sosiologi Komunikasi, Komunikasi Politik, Komunikasi Massa. Mendalami kajian hubungan agama dan media, media dan politik serta komunikasi antar budaya.

Selain aktif mengajar juga meneliti terkait dengan kelompok elit politik, komunikasi antar budaya, media baru yang telah terbit di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Diantaranya : *identitas dalam Iklan Pemilu SBY dan Megawati, Efektifitas Strategi Komunikasi Politik Elit Muhammadiyah DIY dalam Pemenangan Pemilu DPD-RI Tahun 2014, A Study Of Major Problem In Indonesian Animation Vocational High School, Audience and Social Criticism in Sisir Tanah Songs, Ahmadiyah polemic in media discourse: Study of news in kompas and republika daily in Indonesia, Ngenger tradition and ideology transformation in inter-cultural communication, Belt Road Initiative and Chiglobalization, Komunikasi Organisasi : Telaah Konsep Budaya Musyawarah dalam Al Qur'an, The Role of Media in Political Communications :The Imaging Analysis Of Political In The Reform Period. The effect of network convergence on digital culture industry: Model construction of network industrial economics and empirical study on China. Political Imaging in Philosophical Communication Review, Indonesian government communication crisis facing the coronavirus*

pandemic, Influencing Factors of Audience's Willingness to Consume of Outdoor Music Festival Based on Grounded Theory. Sedangkan buku yang pernah ditulisnya adalah Ngenger; dari komunikasi antar budaya menuju transformasi ideologi (2022), Dialektika Komunikasi dan Politik (2024) dan kontributor buku Krisis komunikasi dalam pandemic covid-19 tahun 2020.

Pernah menjadi mahasiswa internasional teladan di Universitas Shanghai tahun 2020 saat mengambil program doctoral. Kemudian menjadi juara satu penulisan buku menyambut muktamar Muhammadiyah pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh UAD-Press. Aktif menjadi narasumber program literasi digital dari Kemenkominfo. Beberapa artikelnya di muat pada media massa dan media online. Diantaranya di harian Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Majalah Suara Muhammadiyah, mediamu.com, ibtimes. Beberapa organisasi yang diikuti antara lain anggota Perhumas (Persatuan Humas) Indonesia. Anggota KNPI DIY 2010-2014. Anggota ASPIKOM (Asosiasi Prodi Ilmu Komunikasi Indonesia). Wakil Sekertaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY 2015-2022. Dan sekarang menjadi ketua pusat study mitigasi kebencanaan di UAD dan wakil ketua MDMC DIY. Komunikasi bisa dilakukan dengan menghubungi. Email : anang.masduki@comm.uad.ac.id dan anang_masduki@yahoo.com. Twitter : @AnangMasduki